



PROFIL GENDER PROVINSI LAMPUNG 2019



Kerjasama

Nomor 020/PL-867/SPK/V.08/2019

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
dan**

**Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lampung**

2019

PROFIL GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

Tim Penyusun:

**PUSLITBANG WANITA, ANAK, DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Dr. Novita Tresiana, M.Si
Dr. Noverman Duadji, M.Si
Berta Putri, M.Si
Rahmah Dianti Putri, M.Pd
Rialdi Azhar, SE., M.SA., AK.,CA
Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A., Ph.D
Devi Yulianti, S.A.N., M.A**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kelancaran serta rahmatnya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan profil gender dengan baik dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung, juga sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Penyelenggaraan program pengarusutamaan gender, program pemberdayaan perempuan, dan program perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Penggunaan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Tersusunnya profil gender ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerjasamanya serta kepada semua pihak yang turut serta membantu baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam penyusunan profil ini ini.

Akhirnya tim penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku ini dan semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Provinsi Lampung.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Theresia Sormin, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 196008311981032004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam praktiknya, tujuan kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat di segala bidang. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Informasi data gender merupakan dasar dalam melihat kesetaraan gender di suatu daerah. Isu gender yang membutuhkan perhatian penting di Provinsi Lampung terletak pada bidang kesehatan, partisipasi dan kependidikan, politik, perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang berjenis kelamin perempuan masih lebih sedikit dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rasio jenis kelamin Provinsi Lampung pada tahun 2018 adalah 105, yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berkaitan dengan isu gender kesehatan, utamanya pada jumlah angka kematian ibu dan bayi. Di Provinsi Lampung angka kematian ibu bersalin tertinggi berada pada usia 20-34 tahun, yang merupakan usia produktif untuk hamil dan melahirkan. Kematian lain pada ibu selanjutnya adalah pada periode nifas. Jumlah kematian ibu di provinsi Lampung pada periode nifas lebih tinggi dari jumlah kematian ibu saat melahirkan. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas harus menjadi perhatian bersama dan diharapkan dapat menekan angka kematian ibu. Tingginya kematian ibu harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh ibu selama masa mengandung, melahirkan dan nifas juga menjadi perhatian semua pihak yang sadar akan pentingnya menekan angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan pada kelompok ibu tersebut dapat menentukan tingkat kematian ibu dan anak. Disadari tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu pada kondisi tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat hal tersebut, penurunan angka putus sekolah menjadi indikator utama dalam upaya pengembangan SDM unggul. Adanya program Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun dari pemerintah juga ternyata belum dapat menuntaskan permasalahan tingginya angka putus sekolah. Sebagian besar anak usia 5-17 tahun berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 88,56%. Secara umum, gambaran seluruh kabupaten di Provinsi Lampung menunjukkan semakin tinggi kelompok usia maka semakin rendah persentase anak yang

bersekolah di kabupaten tersebut sebagaimana terdeskripsi pada gambaran data pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 80,68%, SMP sebesar 54,74%, dan SMA/SMK sebesar 55,24%. Dan gambaran data pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD sebesar 90,78%, SMP 74,56%, dan SMA/SMK sebesar 74%.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik berkontribusi bagi pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung. Tingginya partisipasi perempuan akan berkontribusi pada kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik tergambar dari masih sedikitnya keterwakilan perempuan di yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan tingkat perbedaan yang cukup tinggi, yaitu hanya sejumlah 12 orang dari total seluruh anggota yang berjumlah 85 orang anggota. Demikian juga dengan partisipasi dalam kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung (legislatif), yang didapati tidak ada satupun keterwakilan perempuan. Hal lain yang nampak dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural yang masih rendah.

Isu selanjutnya yang memerlukan perhatian bersama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah, rendahnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pelaksanaan Musrenbang sebagai bahan RKPD Provinsi menjadi starting point bagi terumusnya rancangan RKPD Provinsi Lampung yang responsif gender. Dibutuhkan perhatian pemerintah daerah mulai dari regulasi keikutsertaan minimal 30% di pelaksanaan musrenbang Provinsi Lampung, juga pengaturan teknis dan kuota peserta, dan penguatan materi tematik gender.

Isu minimnya OPD yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender juga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian. Perlu dilakukan bukan saja penguatan kompetensi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender, pendampingan namun juga peran pengawasan dan ketersediaan tool pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender, menjadi hal yang juga penting untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sumber Data.....	5
1.4 Kerangka Analisis.....	5
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
2. STRUKTUR PENDUDUK	
2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung.....	9
2.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	10
2.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status pernikahannya.....	12
2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran	13
2.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	15
3. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	
3.1 Angka Kematian Ibu (AKI).....	17
3.2 Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas.....	22
3.3 Angka Perkawinan (Usia Perkawinan).....	30
3.4 Angka Kesakitan (Morbiditas).....	40
3.5 Penyakit Menular.....	50
3.6 Partisipasi KB	60
4. PARTISIPASI SEKOLAH DAN PENDIDIKAN	
4.1 Angka Partisipasi Sekolah.....	67
4.2 Jumlah Siswa.....	73
4.3 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan.....	95
5. EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	122
5.2. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (EPR).....	124
5.3. Tenaga Kerja Indonesia Sektor Formal dan Informal	128
5.4. Pengangguran Terbuka	132
5.5. Pekerja Profesional dan Managerial	134
5.6. Jumlah Pelamar dan Lowongan Terdaftar, dan Penempatan Kerja..	135
5.7. Jumlah Pekerja Tidak di Bayar	136

6. POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
6.1 Anggota Legeslatif.....	137
6.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	139
7. KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN.....	145
8. GENDER ANALYSIS PATHWAY.....	161
9. REKOMENDASI.....	180

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Persebarannya.....	9
Tabel 8.1. <i>Gender Analysis Pathway (GAP) 1</i>	161
Tabel 8.2. <i>Gender Analysis Pathway (GAP) 2</i>	164
Tabel 8.3. <i>Gender Analysis Pathway (GAP) 3</i>	168
Tabel 8.4. <i>Gender Analysis Pathway (GAP) 4</i>	173
Tabel 8.5. <i>Gender Analysis Pathway (GAP) 5</i>	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Indeks Disparitas Gender Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	10
Gambar 2.2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	10
Gambar 2.2.2	Indeks Disparitas Gender Berdasarkan Jenjang Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	11
Gambar 2.3.1	Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status pernikahannya.....	12
Gambar 2.4.1	Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Provinsi Lampung.....	13
Gambar 2.4.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki NIK.....	14
Gambar 2.4.5	Indeks Disparitas Kepemilikan NIK Usia 5 Tahun Keatas.....	14
Gambar 2.5.1	Grafik Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	15
Gambar 3.1.1	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten /Kota.....	19
Gambar 3.1.2	Jumlah Kematian Ibu Bersalin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung.....	20
Gambar 3.1.3	Jumlah Kematian Ibu Nifas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung.....	21
Gambar 3.2.1	Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Provinsi Lampung.....	24
Gambar 3.2.2	Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	25
Gambar 3.2.3	Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Nifas yang Mendapatkan Vitamin A di Provinsi Lampung.....	26
Gambar 3.2.4	Cakupan Ibu Hamil Konsumsi 90 Tablet Tambah Darah Fe ³ Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	27
Gambar 3.2.5	Jumlah Ibu Hamil Anemia.....	28
Gambar 3.2.6	Jumlah Ibu Hamil yang Dilakukan Pemeriksaan HIV di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	29
Gambar 3.3.1	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	31
Gambar 3.3.2	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	33
Gambar 3.3.3	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	35

Gambar 3.3.4	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Berat Bayi Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	37
Gambar 3.3.5	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	38
Gambar 3.3.6	Persentase Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	39
Gambar 3.4.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	41
Gambar 3.4.2	Indeks disparitas Gender Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	42
Gambar 3.4.3	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	43
Gambar 3.4.4	Indeks Disparitas Gender Penduduk Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	44
Gambar 3.4.5	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	45
Gambar 3.4.6	Disparasi Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	45
Gambar 3.4.7	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	46
Gambar 3.4.8	Disparitas Gender Penduduk yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	47
Gambar 3.4.9	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	48
Gambar 3.4.10	Indeks Disparitas Gender Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	49
Gambar 3.4.11	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	49

Gambar 3.4.12	Disparitas Gender Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	50
Gambar 3.5.1	Kasus Baru TB BTA+ Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	51
Gambar 3.5.2	Seluruh kasus TB Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	52
Gambar 3.5.3	Perkiraan Kasus Diare Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	53
Gambar 3.5.4	Kasus Diare yang Ditangani Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	53
Gambar 3.5.5	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	55
Gambar 3.5.6	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) Meninggal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun	55
Gambar 3.5.7	Penderita Filariasis yang Baru Ditemukan Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	57
Gambar 3.5.8	Penderita Jumlah Seluruh Kasus Filariasis Ditemukan Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung..	57
Gambar 3.5.9	Jumlah Kasus HIV Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	60
Gambar 3.5.10	Jumlah Kasus AIDS Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	60
Gambar 3.6.1	Persentase Anggota BKB, BKR, BKI, dan UPPKS-KB di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	61
Gambar 3.6.2	Peserta KB Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	62
Gambar 3.6.3	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung	63
Gambar 3.6.4	Peserta KB Aktif di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018	64
Gambar 4.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017,2018.....	68
Gambar 4.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan pada tahun 2015- 2018.....	69
Gambar 4.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2015-2018....	70
Gambar 4.2.1	Jumlah siswa Tahun 2018-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
Gambar 4.2.2	Jumlah Siswa SD Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	76
Gambar 4.2.3	Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	78
Gambar 4.2.4	Jumlah Siswa SMP Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	80
Gambar 4.2.5	Jumlah Siswa SMP Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.....	82

Gambar 4.2.6	Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	84
Gambar 4.2.7	Jumlah Siswa SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	86
Gambar 4.2.8	Jumlah Siswa SMA Mengulang Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	88
Gambar 4.2.9	Jumlah Siswa SMA Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelas X, XI, XII di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.....	90
Gambar 4.2.10	Jumlah Siswa SMA dan SMK Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019....	92
Gambar 4.2.11	Jumlah Siswa SMK Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	93
Gambar 4.2.12	Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2018 dan 2019.....	94
Gambar 4.3.1	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019.....	96
Gambar 4.3.2	Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	98
Gambar 4.3.3	Jumlah Tenaga Kependidikan SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	100
Gambar 4.3.4	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.....	101
Gambar 4.3.5	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tahun 2018 dan 2019.....	103
Gambar 4.3.6	Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	105
Gambar 4.3.7	Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi Tahun 2018 dan 2019	107
Gambar 4.3.8	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung.....	108
Gambar 4.3.9	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	110
Gambar 4.3.10	Jumlah tenaga kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	112
Gambar 4.3.11	Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	113
Gambar 4.3.12	Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.....	115
Gambar 4.3.13	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMK Menurut Jenis kelamin dan Status Sekolah.....	116
Gambar 4.3.14	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	117
Gambar 4.3.15	Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Provinsi Lampung.....	118

Gambar 4.3.16	Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung.....	120
Gambar 5.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	123
Gambar 5.1.2	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (ribu) Tahun 2018.....	123
Gambar 5.2	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.....	125
Gambar 5.3	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor Tahun 2018	131
Gambar 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	133
Gambar 5.5	Jumlah Pekerja Profesional dan Managerial Provinsi Lampung Tahun 2018.....	134
Gambar 5.6	Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	135
Gambar 5.7	Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018	136
Gambar 6.1.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	138
Gambar 6.1.2	Indeks Disparitas Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2018.....	139
Gambar 6.2.1	Jumlah Anggota Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018.....	140
Gambar 6.2.2	Indeks Disparitas Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	141
Gambar 6.2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	142
Gambar 6.2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	143
Gambar 6.2.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	144
Gambar 7.1.1	Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018.....	148
Gambar 7.1.2	Indeks Disparitas Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018.....	149
Gambar 7.1.3	Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung 2018.....	150
Gambar 7.1.4	Jenis Kekerasan yang Dialami Korban 2018.....	150
Gambar 7.1.5	Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Lampung 2018.....	151

Gambar 7.1.6	Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	152
Gambar 7.1.7	Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2019.....	153
Gambar 7.1.8	Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Tempat Kejadian Tahun 2018.....	154
Gambar 7.1.9	Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2018.....	156
Gambar 7.1.10	Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	157
Gambar 7.1.11	Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan di Provpinsi Lampung Tahun 2018.....	159
Gambar 7.1.12	Jenis Layanan Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	160

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 2.1.1** Indeks Disparitas Gender Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 2.2.1** Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018
- Lampiran 2.2.2** Indeks Disparitas Gender Berdasarkan Jenjang Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 2.3.1** Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status pernikahannya.
- Lampiran 2.4.1** Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Provinsi Lampung.
- Lampiran 2.4.2** Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki NIK.
- Lampiran 2.4.5** Indeks Disparitas Kepemilikan NIK Usia 5 Tahun Keatas
- Lampiran 2.5.1** Data Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.
- Lampiran 3.1.1** Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota.
- Lampiran 3.1.2** Jumlah Kematian Ibu Bersalin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.1.3** Jumlah Kematian Ibu Nifas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung
- Lampiran 3.2.1** Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.2.2** Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota.
- Lampiran 3.2.3** Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Nifas yang Mendapatkan Vitamin A di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.2.4** Cakupan Ibu Hamil Konsumsi 90 Tablet Tambah Darah Fe³ Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.2.5** Jumlah Ibu Hamil Anemia.
- Lampiran 3.2.6** Jumlah Ibu Hamil yang Dilakukan Pemeriksaan HIV di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 3.3.1** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.3.2** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.3.3** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.

- Lampiran 3.3.4** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Berat Bayi Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.3.5** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.3.6** Persentase Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.1** Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.2** Indeks disparitas Gender Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.3** Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.4** Indeks Disparitas Gender Penduduk Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.5** Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.6** Disparitas Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.7** Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.8** Disparitas Gender Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.9** Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.10** Indeks Disparitas Gender Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.11** Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.12** Disparitas Gender Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.

- Lampiran 3.5.1** Kasus Baru TB BTA+ Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.2** Seluruh kasus TB Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.3** Perkiraan Kasus Diare Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.4** Kasus Diare yang Ditangani Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.5** Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.6** Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) Meninggal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun.
- Lampiran 3.5.7** Penderita Filariasis yang Baru Ditemukan Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.8** Penderita Jumlah Seluruh Kasus Filariasis Ditemukan Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.9** Jumlah Kasus HIV Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.5.10** Jumlah Kasus AIDS Menurut Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 3.6.1** Persentase Anggota BKB, BKR, BKI, dan UPPKS-KB di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 3.6.2** Peserta KB Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 3.6.3** Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.6.4** Peserta KB Aktif di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 4.1.1** Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 4.1.2** Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan pada tahun 2018.
- Lampiran 4.1.3** Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2018.
- Lampiran 4.2.1** Data Jumlah siswa Tahun 2018-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin.
- Lampiran 4.2.2** Data Jumlah Siswa SD Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.3** Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.4** Jumlah Siswa SMP Putus Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.5** Data Siswa SMP Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.6** Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.7** Jumlah Siswa SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.

- Lampiran 4.2.8** Jumlah Siswa SMA Mengulang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.2.9** Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat SMA Kelas X, XI, XII di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.
- Lampiran 4.2.10** Siswa SMA dan SMK berdasarkan Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.
- Lampiran 4.2.11** Jumlah Siswa Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- Lampiran 4.2.12** Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.1** Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.2** Data Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.3** Data Jumlah Tenaga Kependidikan SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.4** Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.5** Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.6** Data Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.7** Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.8** Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah SMA Tiap Provinsi.
- Lampiran 4.3.9** Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.10** Jumlah tenaga kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 4.3.11** Jumlah Tenaga Kependidikan di SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.12** Jumlah Tenaga Kependidikan di SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019.
- Lampiran 4.3.13** Data SMK Kepala Sekolah dan Guru di SMK Menurut jenis kelamin dan Status Sekolah.
- Lampiran 4.3.14** Jumlah Kepala Sekolah dan Guru di SMK Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- Lampiran 4.3.15** Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi.
- Lampiran 4.3.16** Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi.

Lampiran 5.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018.
Lampiran 5.1.2	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (ribu) Tahun 2018.
Lampiran 5.2	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.
Lampiran 5.3	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor Tahun 2018.
Lampiran 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018.
Lampiran 5.5	Jumlah Pekerja Profesional dan Managerial Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 5.6	Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 5.7	Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 6.1.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 6.1.2	Indeks Disparitas Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2018
Lampiran 6.2.1	Jumlah Anggota Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018.
Lampiran 6.2.2	Indeks Disparitas Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 6.2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 6.2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 6.2.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
Lampiran 7.1.1	Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018.
Lampiran 7.1.2	Indeks Disparitas Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018.
Lampiran 7.1.3	Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung 2018
Lampiran 7.1.4	Jenis Kekerasan yang Dialami korban 2018.
Lampiran 7.1.5	Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Lampung 2018.
Lampiran 7.1.6	Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018.

- Lampiran 7.1.7** Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2018.
- Lampiran 7.1.8** Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Tempat Kejadian Tahun 2018.
- Lampiran 7.1.9** Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2018.
- Lampiran 7.1.10** Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 7.1.11** Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan di Provinsi Lampung Tahun 2018
- Lampiran 7.1.12** Jenis Layanan Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2018

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan esensi pembangunan. Target pentingnya meliputi aspek kebijakan, kesetaraan dan partisipasi penuh di ruang publik (khususnya politik, ekonomi dan publik), serta akses kesehatan seksual dan reproduksi, mengingat masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan disemua bidang.

Pada tahun 2030, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* atau SDGs, khusus terkait dengan pencapaian tujuan kelima, yakni kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Untuk itu Pemerintah Daerah telah menetapkan 6 target yang terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut, telah dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Karenanya, untuk melihat perubahan kondisi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 11 tahun ke depan, tentunya sangat ditentukan sejauhmana strategi yang disusun oleh pemerintah dapat di implementasikan secara berkesinambungan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. IPG Lampung di tahun 2018 masih berada di angka 90,57% mengalami peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya 90,49%, yang masih mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan untuk perempuan di Provinsi Lampung masih lebih lambat dari laki-laki. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, meskipun tahun 2018 trennya naik sedikit dan indikator kompositnya, yaitu persentase perempuan dalam parlemen, kontribusi upah pekerja perempuan, dan jumlah perempuan sebagai tenaga kerja profesional, namun dirasa hasilnya masih stagnan. IDG Lampung di tahun 2016 sebesar 62,01 dan di tahun 2018 sebesar 63,60.

Dalam hal kebijakan gender, wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengarusutamaan gender di Provinsi Lampung antara lain telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Namun tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana agar upaya peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan. Untuk itu, penguatan-penguatan melalui : 1) peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender, 2) perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender sangat strategis untuk dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan gender yang disusun untuk lebih memperhatikan dengan klarifikasi wilayah-wilayah berdasarkan kondisi IPG dan IDG diperlukan. Harapannya dapat diketahui kebijakan yang berkesesuaian dengan kondisi yang terjadi dimasing-masing kabupaten, dan dapat disusun rencana (dan

penyelesaian permasalahan) berdasarkan skala prioritas dan mobilisasi keterlibatan/dukungan stakeholder yang lebih terarah dan efektif.

Mengingat bahwa isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bersifat lintas sektor atau *crosscutting issue*, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung membutuhkan kompilasi ketersediaan data pilah dan penyajian berbagai informasi dan data terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Daerah menyadari pentingnya ketersediaan data melalui indikator kesetaraan gender. Karenanya pemerintah daerah berupaya berinvestasi secara intensif pada gender bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Investasi secara intensif juga dilakukan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Beberapa investasi di atas merupakan penentu masa depan pemberdayaan perempuan dan ketercapaian kesetaraan gender. Untuk itu menjadi sangat penting mengetahui sejauhmana indikator-indikator itu mencapai kemajuan atau belum. Dari indikator-indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, menyediakan data bagi berbagai pengguna data, baik dilingkungan pemerintah, institusi swasta maupun institusi masyarakat. Publikasi ini akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mengukur sejauhmana pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya atas pemenuhan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat dalam berbagai

dimensi/indikator yang telah ditetapkan melalui kesetaraan gender yang sebagian akan disajikan dalam Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung 2019 ini.

1.2. TUJUAN

Penyusunan Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung bertujuan mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah, baik pemerintah nasional (pusat), pemerintah provinsi dan daerah, institusi masyarakat dan institusi swasta tentang kondisi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang telah dan sedang berlangsung.

Kondisi kesetaraan gender yang disajikan dalam publikasi profil ini meliputi beberapa dimensi yaitu kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi sekolah dan kependidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, kekerasan dan perlindungan.

Metode-metode baru dalam pengumpulan dan penggunaan data akan membantu investasi sekaligus intervensi program pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan lebih tepat sasaran, sehingga berbagai program pembangunan akan lebih tepat menyoar kelompok yang rentan dan sangat memerlukan uluran tangan pemerintah.

1.3. SUMBER DATA

Analisis yang disajikan dalam Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung disupply data oleh kegiatan survei dan sensus yang bersumber dari:

- a. Badan Pusat Statistik
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- f. Bappeda Kabupaten Provinsi Lampung
- g. Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM Provinsi Lampung
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- i. Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD)
- j. Polisi Daerah Provinsi Lampung
- k. Bappeda Provinsi Lampung
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1.4. KERANGKA ANALISIS

Kerangka analisis dalam Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung menggunakan skema kinerja perempuan dan laki-laki (disparitas gender) dan kerangka analisis Gender *Analysis Pathways (GAP)*

Skema analisis Disparitas Gender adalah selisih kinerja yang dilakukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mengukur kinerja secara statistik digunakan IndeksParitas Gender (IP) yang merupakan rasio capaian kinerja perempuan terhadap laki-laki. Rumus penentuan angka disparitas dan indeksparitas secara matematis sebagai berikut :

- a. Analisis Prosentase dengan rumus : $F : N \times 100$
- b. Analisis Disparitas dengan rumus : Kinerja perempuan – Kinerja laki-laki
- c. Analisis Indek paritas dengan rumus: (Kinerja perempuan : Kinerja laki-laki) x 100% .

Kriteria Indeks Paritas dalam mengukur rasio capaian kinerja antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

- a. $IP = 1$: Tidak terdapat perbedaan kinerja/kesenjangan antara perempuan dan laki-laki
- b. $IP < 1$: Terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki
- c. $IP > 1$: Terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Kerangka analisis *Gender Analysis Pathways* (GAP) merupakan skema analisis menyusun perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/ program/ proyek dari kegiatan pembangunan organisasi perangkat daerah yang relevan. Skema analisis ini berisi paparan data statistik yang bersumber dari data riil lapangan dalam berbagai aspek berdasarkan jenis kelamin serta analisa kualitatif yang memunculkan indikator akses, peran, kontrol dan manfaat (kelompok yang menerima manfaat) dalam setiap dimensi/indikator kesetaraan gender. Hasil dari kerangka analisis *Gender Analysis Pathways* (GAP) adalah keluaran berupa rekomendasi program atau kegiatan yang responsif gender berbasis data terpilah gender baik secara kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, dengan penciptaan peluang untuk memonitor dan mengevaluasi setiap langkah dan hasil yang dicapai.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung disajikan dalam 9 bab. Pemilihan bab dalam Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung 2019 ini disesuaikan dengan pengelompokan gender dalam data gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, yaitu kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi sekolah dan kependidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, kekerasan dan perlindungan. Pengelompokan dilakukan untuk mempermudah pemahaman publik/pembaca serta penyusunan laporan implementasinya. Dalam setiap pengelompokan telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data, tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam publikasi ini.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan profil, tujuan, sumberdata, kerangka analisis dan sistematika publikasi. Bab kedua berisi struktur penduduk 0-17 Tahun. Bab ketiga berisi kesehatan dan kesejahteraan. Bab keempat berisi partisipasi sekolah dan pendidikan. Bab kelima berisi ketenagakerjaan dan koperasi. Bab keenam politik dan pengambilan keputusan. Bab ketujuh kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak. Bab kedelapan, analisis GAP dan kesembilan rekomendasi.

2. STRUKTUR PENDUDUK

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan di perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan. Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Lampung mencapai lebih dari 8,2 juta orang atau sekitar 14,62 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Pulau Sumatera. Posisi ini menempatkan Lampung di posisi kedua setelah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbanyak. Meskipun secara luas wilayah Lampung lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti, Provinsi Sumatera Selatan dan Riau dengan luas wilayah hampir 2,5 kali lebih besar dibandingkan Provinsi Lampung.

Gambaran data kependudukan yang meliputi gambaran kelahiran, pernikahan, kematian, kepemilikan kartu tanda kependudukan dan lain-lain. Demografi berkaitan dengan angka dan jumlah. Aspek komponen yang berkaitan dengan demografi umumnya adalah: jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kepemilikan kartu tanda penduduk dan akte kelahiran. Jumlah dan persebaran penduduk di suatu daerah sangat penting karena mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah terkait perencanaan dalam banyak bidang seperti pemerataan pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Berikut akan dibahas dinamika demografi penduduk Lampung beserta indeks disparitas gendernya.

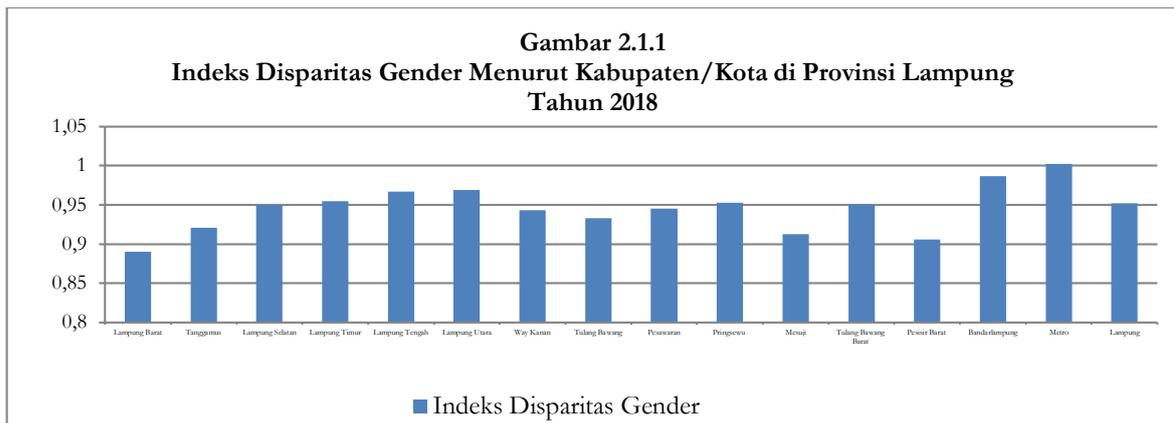
2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung

Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Persebarannya

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2010	2018	2000-2010	2010-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	277.296	278.189	300.703	1,29	0,98
Tanggamus	536.613	538.418	592.603	1,08	1,21
Lampung Selatan	912.490	915.463	1.002.285	1,41	1,14
Lampung Timur	951.639	954.694	1.036.193	0,72	1,03
Lampung Tengah	1.170.717	1.174.534	1.271.566	1,05	1,00
Lampung Utara	584.277	585.973	614.701	0,93	0,60
Way Kanan	406.123	407.525	446.113	1,48	1,14
Tulang Bawang	397.906	399.291	445.797	2,14	1,39
Pesawaran	398.848	400.208	440.192	1,26	1,20
Pringsewu	365.369	366.291	397.219	1,21	1,01
Mesuji	187.407	188.030	199.168	0,86	0,72
Tulang Bawang Barat	250.707	251.489	271.206	1,16	0,95
Pesisir Barat	141.741	142.228	153.743	1,52	0,98
Kota Bandar Lampung	881.801	885.363	1.033.803	1,75	1,96
Kota Metro	145.471	145.985	165.193	2,08	1,56
Provinsi Lampung	7.608.405	7.634.005	8.370.485	1,25	1,16

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, BPS 2018

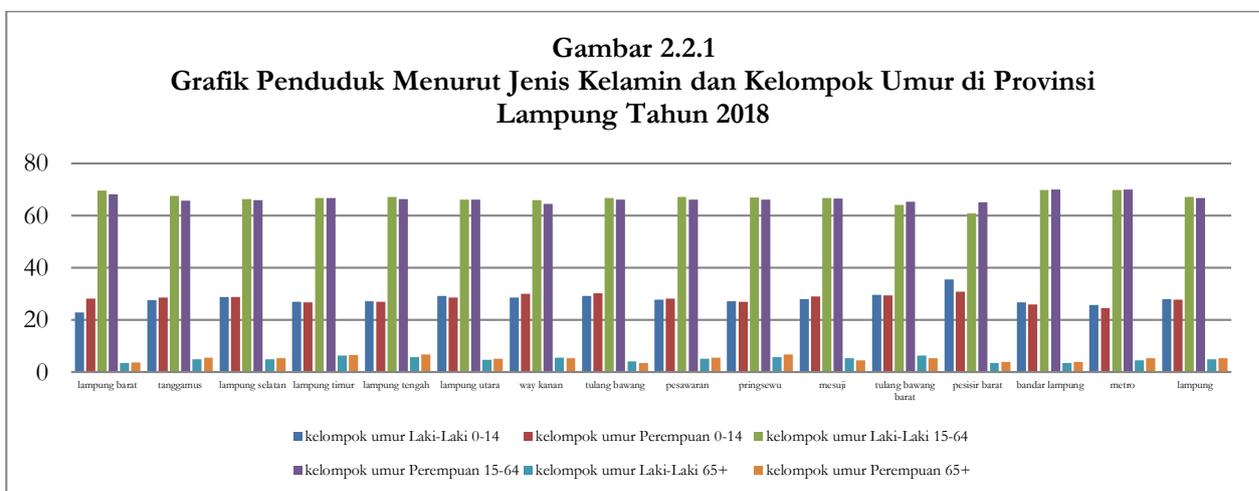
Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2018 adalah sebesar 8.370. 485 jiwa, dengan tingkat persebaran yang berbeda di tiap kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas ini menunjukkan persebaran penduduk paling tinggi berada di Kabupaten Lampung Tengah dengan angka sebesar 1.271.566 jiwa. Selain memberikan informasi tentang jumlah penduduk, tabel di atas juga menampilkan laju pertumbuhan penduduk pada tiap Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari tahun 2010-2018 adalah Kota Bandar Lampung. Peningkatan laju pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut harus segera diantisipasi karena hal tersebut dapat menyebabkan ledakan penduduk yang dapat mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

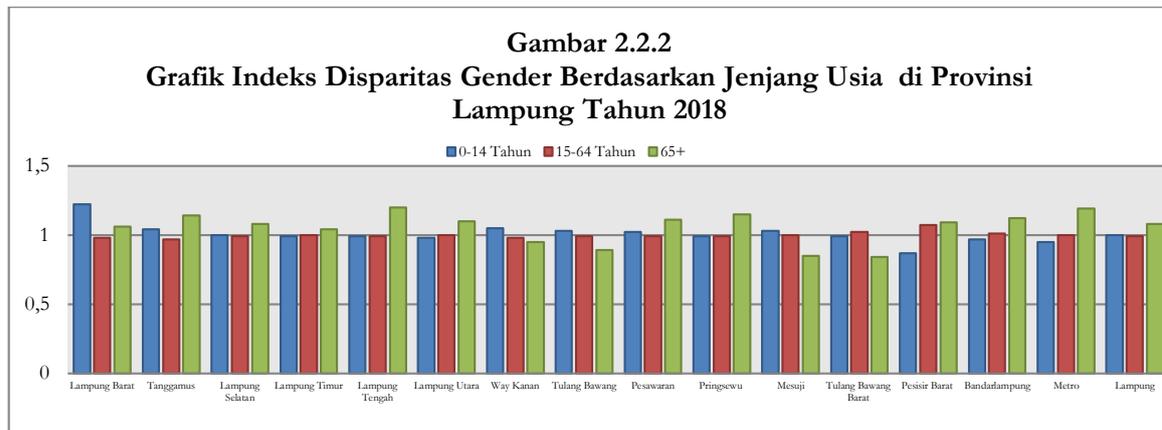
Gambar di atas menunjukkan disparitas gender menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2018. Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua kabupaten/kota memiliki indeks disparitas kurang dari 1, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan, kecuali Kota Metro yang memiliki indeks disparitas sebesar 1,002

2.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

Gambar di atas adalah grafik persebaran penduduk Lampung berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua kabupaten di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya berusia diantara 15-64 tahun, yang artinya dalam usia produktif. Penduduk usia produktif terbanyak adalah di daerah kabupaten Pesisir Barat. Berikut disajikan table indeks disparitas gender Provinsi Lampung berdasarkan jenjang usia.

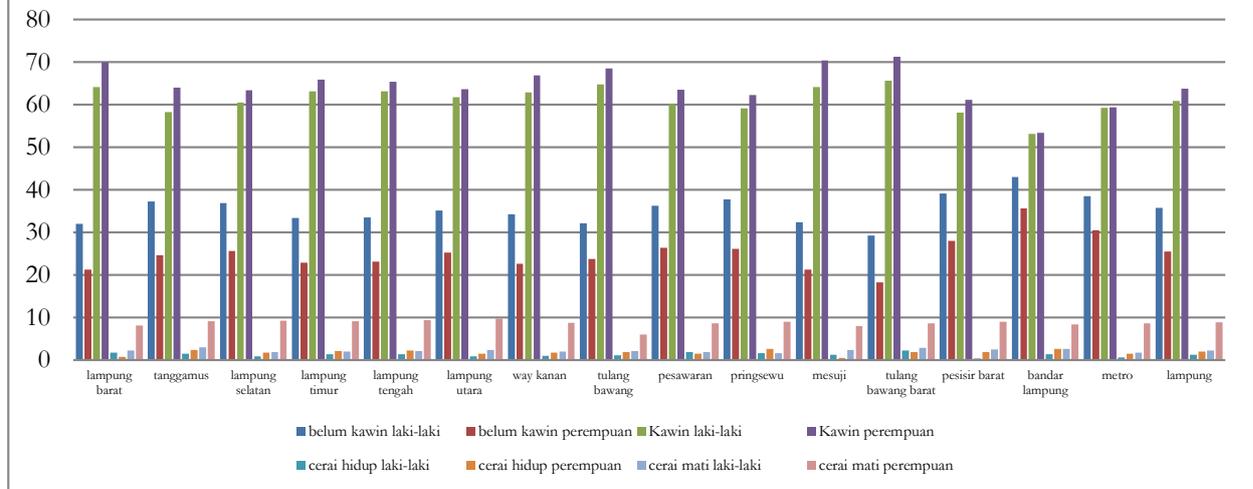


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

Tabel di atas merupakan tabel indeks disparitas gender menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung. Dari tabel di atas terlihat bahwa indeks disparitas di semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung beragam di tiap jenjang usia. Indeks disparitas tertinggi pada jenjang usia 0-14 tahun ada di kabupaten Lampung Barat, artinya jumlah jenis kelamin perempuan di Lampung Barat jauh lebih banyak dari laki-laki. Untuk indeks disparitas terendah ada di kabupaten Pesisir Barat, artinya di daerah tersebut jauh lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dari perempuannya.

2.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status pernikahannya

Gambar 2.3.1
Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status
Pernikahannya

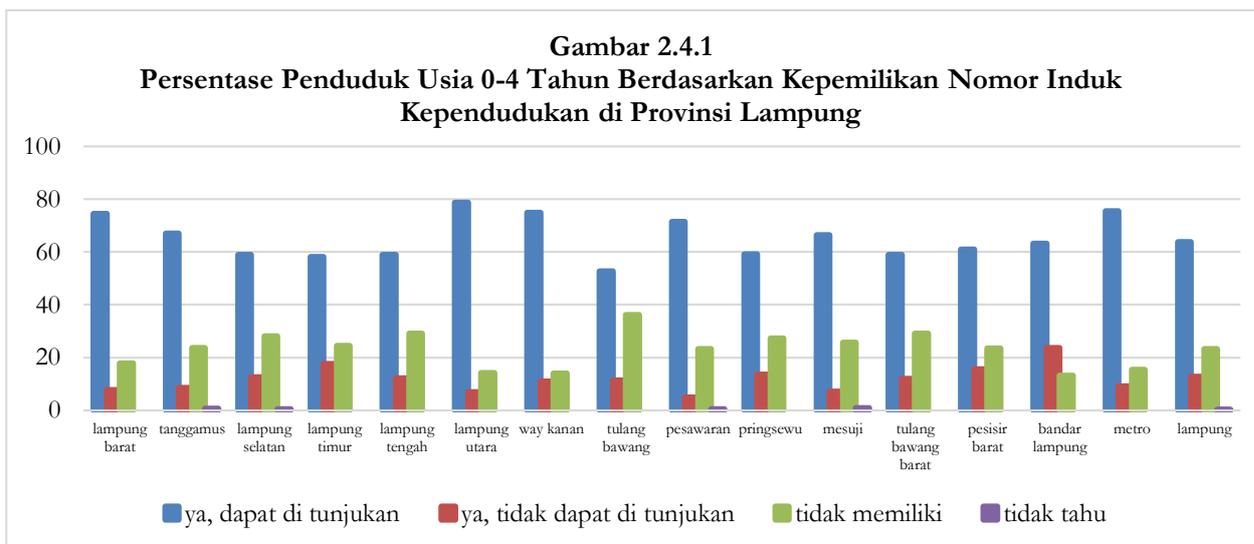


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

Gambar di atas adalah grafik persentase penduduk Provinsi Lampung berdasarkan jenis kelamin dan status pernikahannya pada tahun 2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa perempuan yang berusia di atas 10 tahun berstatus menikah paling banyak ada di Kabupaten Lampung Barat dan yang paling sedikit ada pada kota Bandar Lampung. Hal tersebut diduga karena di kota Bandar Lampung, perempuan banyak yang memiliki pekerjaan, sehingga mereka memiliki pola pikir untuk berkeja dan memiliki penghidupan yang layak dulu baru memutuskan untuk menikah, berkebalikan dengan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran

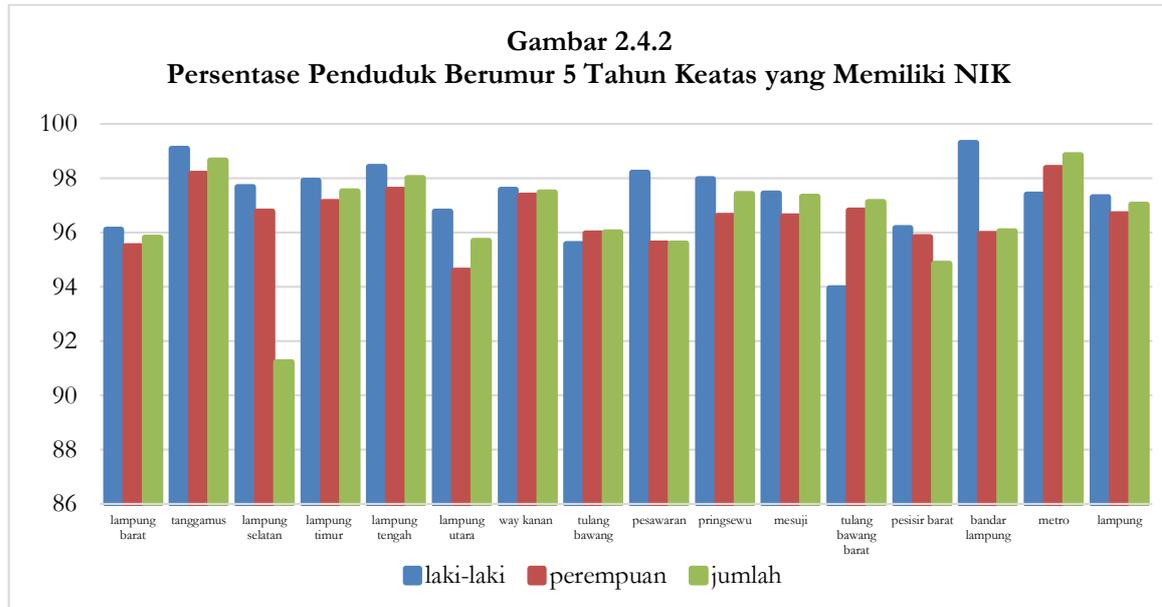
Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, Paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dari pengertian dan kegunaan NIK tersebut dapat dilihat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, masih ada warga negara yang tidak memiliki, untuk lebih detailnya dibahas pada data di bawah ini.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

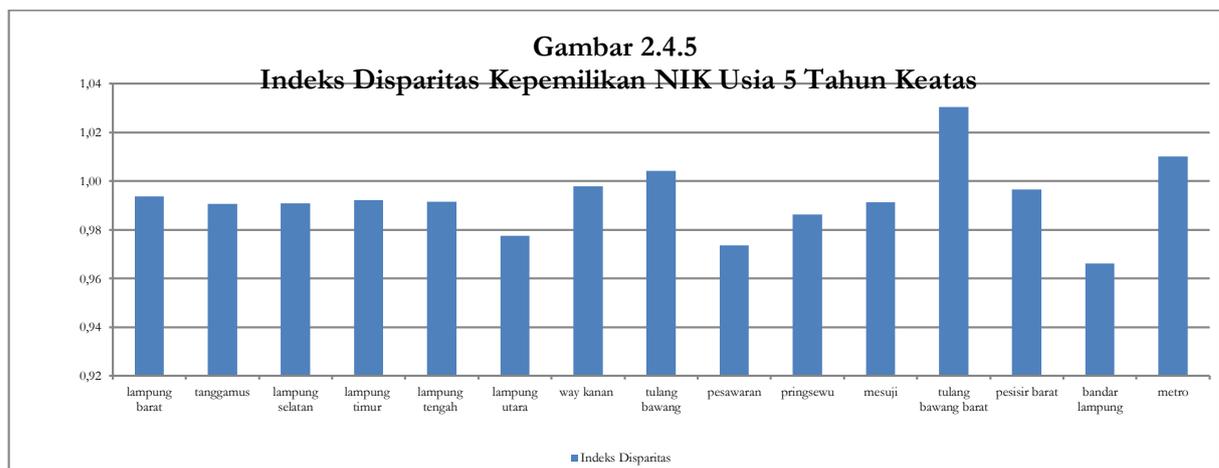
Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa ada di semua kabupaten/kota masih banyak penduduk usia 0-4 tahun yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Hal tersebut diduga karena

orangtua merasa anak-anak belum membutuhkan Nomor Induk Kependudukan, sehingga masih banyak orangtua yang malas untuk mengurus kepemilikan Nomor Induk Kependudukan anak-anak mereka.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Dalam gambar di atas terlihat bahwa pada usia di atas 5 tahun keatas kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di semua Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung belum ada yang 100%. Itu berarti masih ada warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Nomor Induk Kependudukan sangat diperlukan untuk pembuatan dokumen-dokumen penting lainnya.

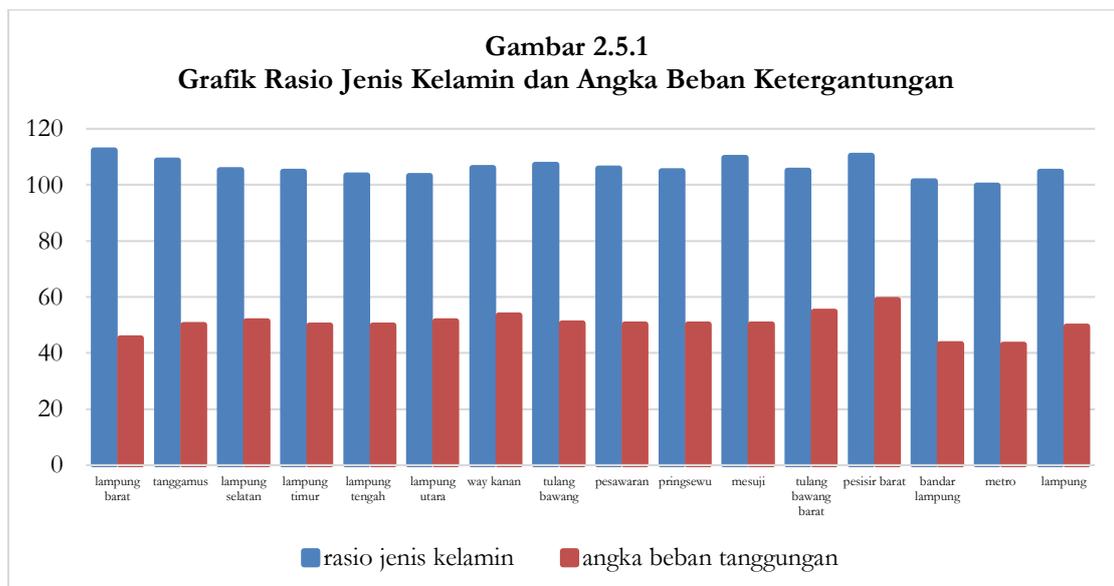


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

Penduduk berusia di atas 5 tahun yang memiliki Nomor Induk Kependudukan banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di atas bahwa kebanyakan kabupaten/kota memiliki indeks disparitas kurang dari 1. Hanya ada empat kabupaten/kota yang memiliki angka indeks disparitas di atas 1, yaitu Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.

2.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Secara lebih sederhana angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka beban ketergantungan di Provinsi Lampung 49,55.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018, 2019 (diolah)

3. KESEHATAN DAN KESEJATERAAN

Isu gender dalam bidang kesehatan selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan yang telah berjalan. Keterabaian dalam bidang kesehatan ini disebabkan adanya keterbatasan data kesehatan terpilah gender yang ada. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan menjadi tidak atau kurang responsif terhadap salah satu kebutuhan dan menjadi timpang terhadap salah satu gender meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memastikan hadirnya kesetaraan gender. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan tindak lanjut lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi *Convention on the Right on the Child (CRC)* yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bidang kesehatan memiliki permasalahan yang sama, terutama keterbatasan mengenai data yang ada. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan adanya data yang terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dalam bidang kesehatan sehingga dapat membuka permasalahan yang selama ini ada. Diharapkan dengan ketersediaan data terpilah gender dalam bidang kesehatan dapat memberikan pelaksanaan pembangunan yang lebih setara gender terutama dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Permen PPPA No 5 Tahun 2014, jenis data gender kesehatan dibedakan menjadi Angka Kematian Ibu (AKI),

penolong persalinan, angka kesakitan, isu gender dan kesehatan dalam era globalisasi.

3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya untuk menekan angka kematian ibu merupakan tujuan jangka panjang peningkatan kesehatan secara nasional yang secara berkelanjutan juga menjadi tujuan Provinsi Lampung dalam bidang kesehatan. Tujuan ini selaras dengan tujuan SDG's dalam 1,5 dekade kedepan yaitu menjadi 70 AKI per 100 ribu kelahiran hidup. Pada tahun 2016, AKI Indonesia sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Tujuan nasional pada akhir tahun 2019 angka kematian ibu diharapkan mengalami penurunan menjadi 149 per 100 ribu kelahiran yang ada. Faktanya, angka kematian ibu pada di Provinsi Lampung yang tertinggi berada pada kelompok umur 20-34 tahun dengan empat kabupaten kota tertinggi berturut-turut adalah Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesisir Barat serta Lampung Barat. Sedangkan untuk, Bandarlampung dan Tulang Bawang Barat merupakan dua kabupaten tertinggi yang memiliki tingkat kematian ibu dibawah usia kurang dari 20 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan (Kota dan Kabupaten) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kematian ibu.

Derajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya, yaitu morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo). Sedangkan untuk mortalitas telah disepakati lima indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Pneumonia Pada Balita per 1000 Balita, Angka Kematian Diare pada Balita per1000 Balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup.

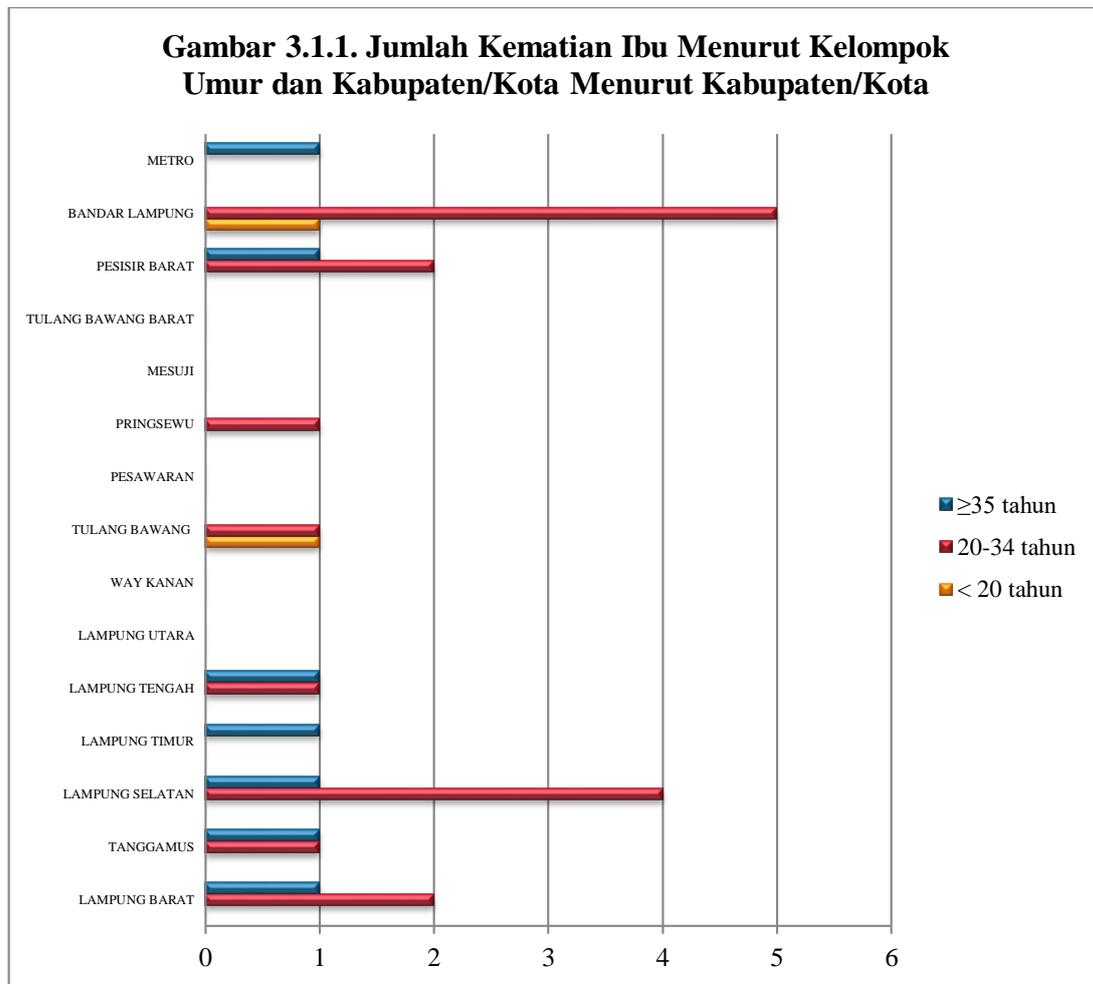
Secara umum kematian ibu bersalin pada kelompok umur kurang dari 20 tahun di Provinsi Lampung dapat dikatakan terendah jika dibandingkan dengan angka kematian ibu bersalin pada kelompok usia lebih dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, kabupaten Mesuji, Lampung Timur dan Lampung Utara merupakan tiga kabupaten dengan kematian ibu bersalin tertinggi di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kabupaten terendah adalah Metro, Bandarlampung, Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat.

Resiko kematian lain pada kelompok ibu adalah pada saat periode nifas, Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Secara umum, kelompok ibu berumur kurang dari 20 tahun merupakan kelompok kematian ibu dengan jumlah yang terendah sedangkan usia ibu yang berada pada rentang lebih dari 20 tahun sampai 35 tahun merupakan kelompok usia tertinggi yang mengalami kematian saat periode nifas.

Secara teoritis kematian ibu bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan faktor kompleks yang dibagi menjadi determinan jauh, antara dan dekat (Kemenkes RI, 2013). Determinan dekat adalah gangguan sepele perdarahan, preeklamsi/eklamsi, dan infeksi atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan seperti jantung, malaria, tuberkulosis, ginjal, dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Determinan dekat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara yang berhubungan dengan faktor kesehatan, seperti status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas kesehatan.

Determinan jauh berhubungan dengan faktor demografi dan sosiokultural. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang kesehatan ibu hamil, pemberdayaan perempuan yang tidak baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan

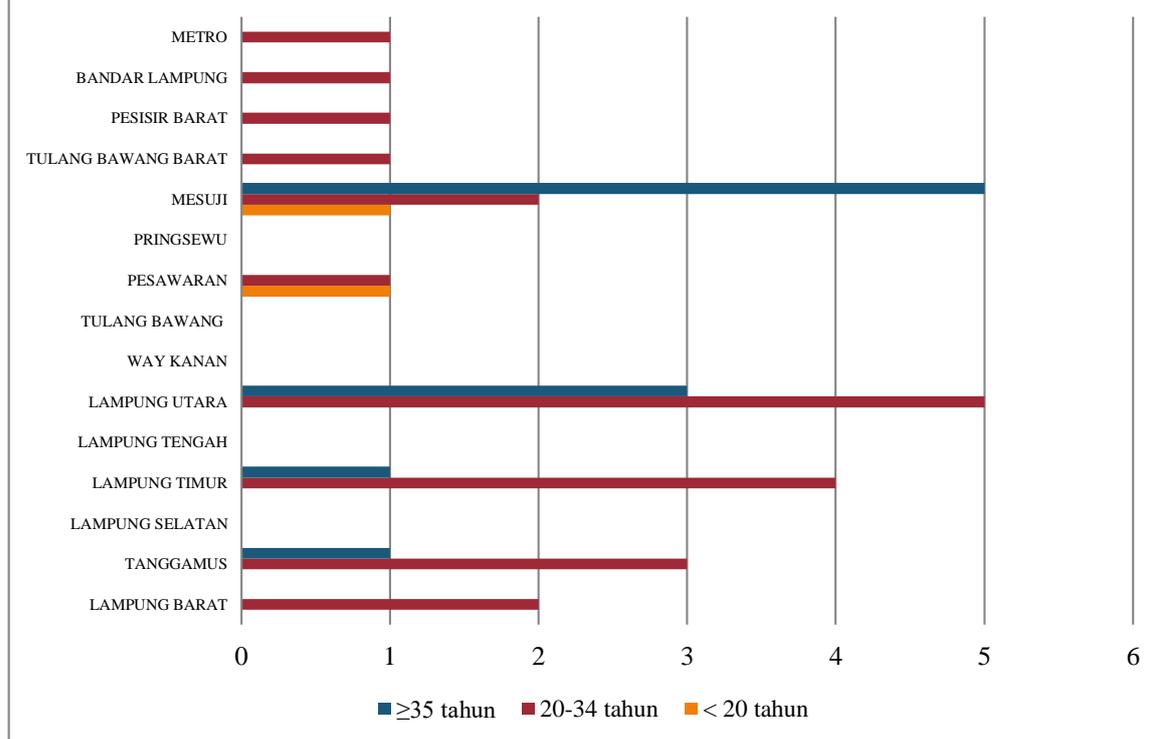
politik, serta kebijakan secara tidak langsung diduga ikut berperan dalam meningkatkan kematian ibu.



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Pada kelompok ibu berumur 20 tahun Bandarlampung dan Kabupaten Tulang Bawang merupakan dua Kabupaten dengan kasus kematian ibu tertinggi. Pada kelompok ibu berumur 20-34 tahun Bandarlampung dan lampung selatan merupakan kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi. Lalu untuk ibu dengan kelompok umur lebih dari 35 tahun tujuh kabupaten memiliki jumlah kematian yang sama.

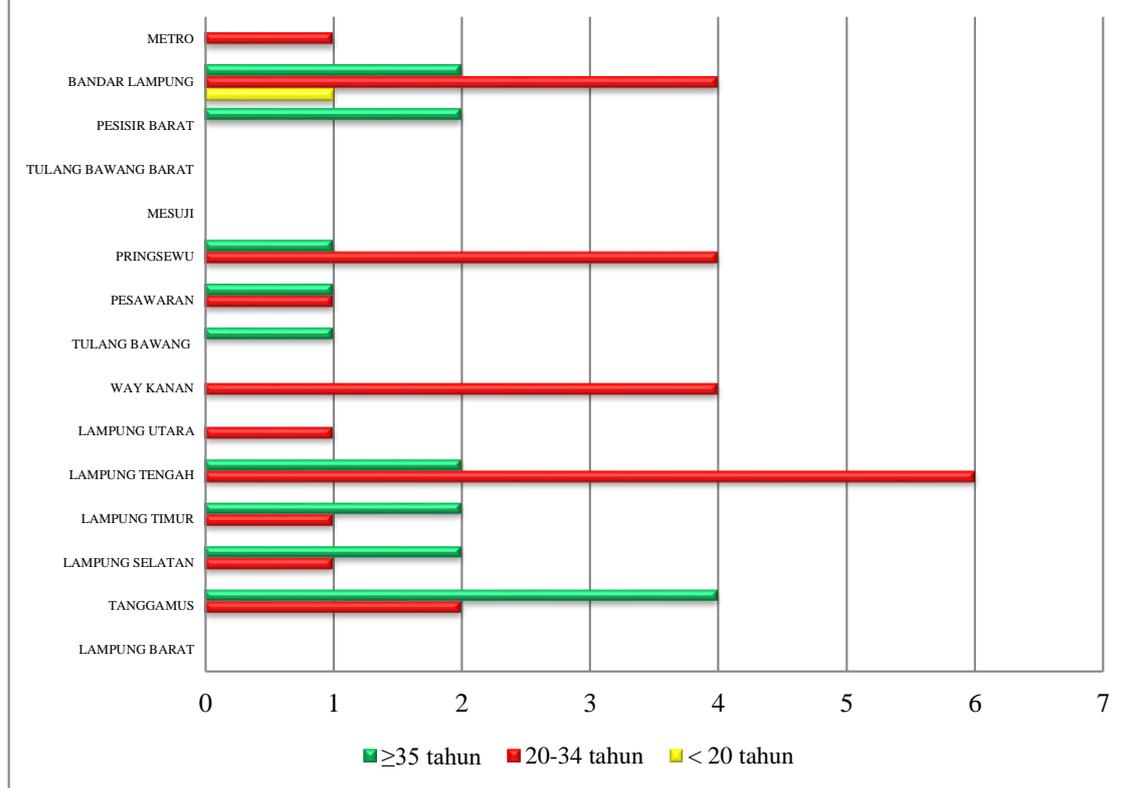
3.1.2. Jumlah Kematian Ibu Bersalin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Jumlah kematian pada ibu selanjutnya ditemukan pada kelompok ibu bersalin di Provinsi Lampung. Pada kelompok ibu bersalin berumur 20 tahun Mesuji dan Pesawaran merupakan dua Kabupaten dengan kasus kematian ibu bersalin tertinggi. Pada kelompok ibu berumur 20-34 tahun Lampung Utara merupakan kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi. Lalu untuk ibu dengan kelompok umur lebih dari 35 tahun Mesuji merupakan kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi. Secara umum, Mesuji memiliki kasus kematian ibu pada semua kelompok umur tertinggi.

3.1.3. Jumlah Kematian Ibu Nifas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Kematian lain pada ibu selanjutnya adalah pada periode nifas, Dalam istilah medis nifas disebut sebagai *puerperium*. Nifas adalah periode waktu atau suatu masa yang terjadi setelah proses persalinan selesai yang diperlukan bagi organ reproduksi untuk kembali seperti pada keadaan sebelum hamil. Pada periode ini terdapat resiko kematian yang terjadi pada ibu. Di Provinsi Lampung, ibu yang berumur kurang dari 20 tahun Bandarlampung memiliki angka kematian ibu nifas tertinggi sedangkan di kabupaten lain dapat dikatakan rendah, pada kelompok ibu berusia 20-34 tahun, Lampung Tengah adalah kabupaten dengan angka kematian tertinggi, lalu pada kelompok ibu berusia 35 tahun Tanggamus merupakan kabupaten dengan angka kematian tertinggi. Namun, secara umum Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan kasus kematian ibu nifas terbanyak.

3.2. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lasmita (2007) mengatakan bahwa kematian yang terjadi pada ibu disebabkan oleh pelayanan kesehatan selama hamil dan akses terhadap pelayanan kegawat daruratan obstetric (Huda *et al*, 2007). Di Provinsi Lampung pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas menjadi perhatian bersama dan diharapkan dapat menekan angka kematian ibu. Selain angka kematian ibu yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh ibu selama masa mengandung, melahirkan dan nifas juga menjadi perhatian semua pihak yang sadar akan pentingnya menekan angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan pada kelompok ibu tersebut dapat menentukan tingkat kematian ibu dan anak. Namun, tidak semua kabupaten di Provinsi Lampung dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh ibu pada kondisi tersebut.

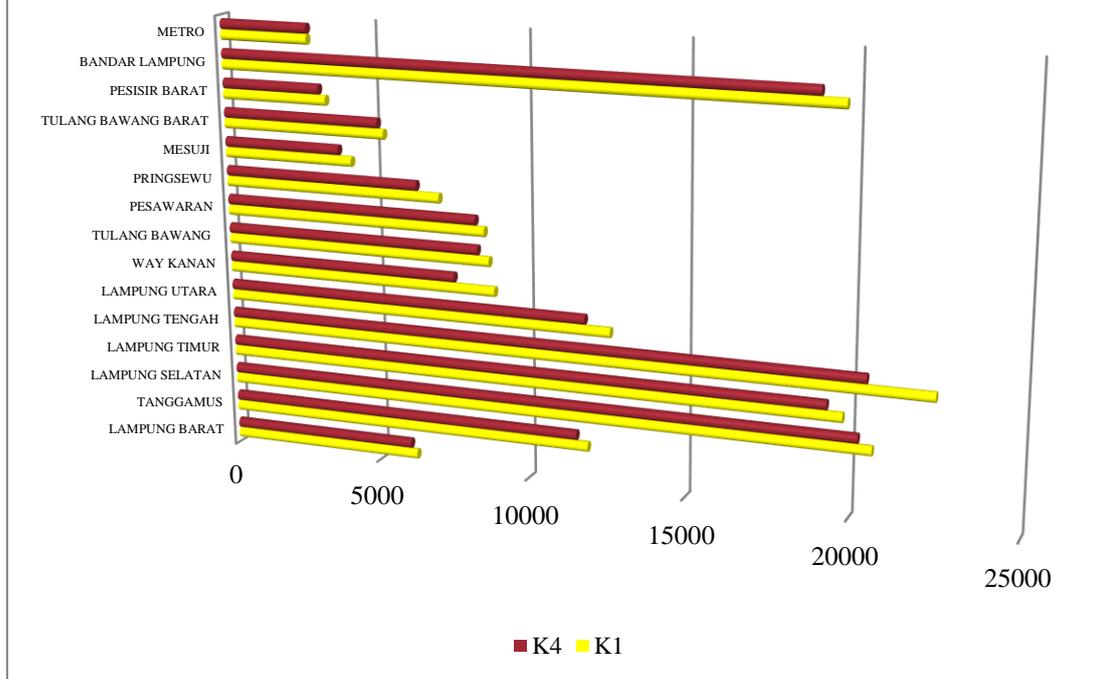
Secara umum, tingkat pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas, mendapatkan vitamin A pada saat nifas telah menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, namun untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Lampung Lampung Tengah, Bandarlampung dan Lampung Selatan merupakan tiga kabupaten dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan jumlah layanan kesehatan tertinggi. Sedangkan Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan tingkat terendah yang mendapatkan layanan kesehatan pada ibu.

Selanjutnya, pada angka ibu nifas yang mendapatkan layanan kesehatan Kabupaten Lampung tengah masih merupakan kabupaten dengan jumlah ibu yang mendapatkan layanan kesehatan bersalin dan nifas tertinggi sedangkan yang terendah adalah Kota Metro dan Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya adalah ibu nifas yang mendapatkan Vitamin A, secara umum, Lampung Selatan dan

Bandarlampung merupakan dua kabupaten yang memberikan layanan kesehatan vitamin A pada ibu nifas dengan angka yang tertinggi. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A dengan jumlah terendah. Secara umum, lebih dari 1000 ibu nifas mendapatkan layanan vitamin A setelah melahirkan di Provinsi Lampung.

Tidak hanya pemeriksaan kesehatan dan layanan Vitamin yang didapatkan ibu bersalin dan nifas di Provinsi Lampung, namun juga penyakit menular HIV yang diderita ibu hamil. Test HIV menjadi penting terhadap ibu hamil dikarenakan HIV yang diderita bukan hanya menjadi ancaman bagi ibu sendiri namun juga menjadi ancaman bagu anak yang dikandung oleh seorang ibu dengan HIV. Lebih dari 90% kasus anak yang menderita HIV terjadi akibat infeksi yang ditularkan dari Ibu ke Janin (*Mother-to-Child Transmission/ MTCT*) (KPPPA, 2013). Oleh karena itu perlu adanya intervensi bagi ibu hamil yang positif HIV dengan layanan kesehatan obat antiretroviral dan persalinan sectio caesaria untuk mengurangi resiko bayi tertular HIV. Di Provinsi Lampung, Mesuji merupakan Kabupaten dengan rasio jumlah ibu hamil yang positif HIV dengan perbandingan 1:18 kasus. Dimana setiap 18 ibu hamil diperiksa satu orang dinyatakan positif mengidap HIV. Sedangkan untuk kabupaten dengan jumlah ibu hamil diperiksa terbanyak adalah Kabupaten Lampung Selatan namun rasio terjangkit HIV ibu hamil rendah.

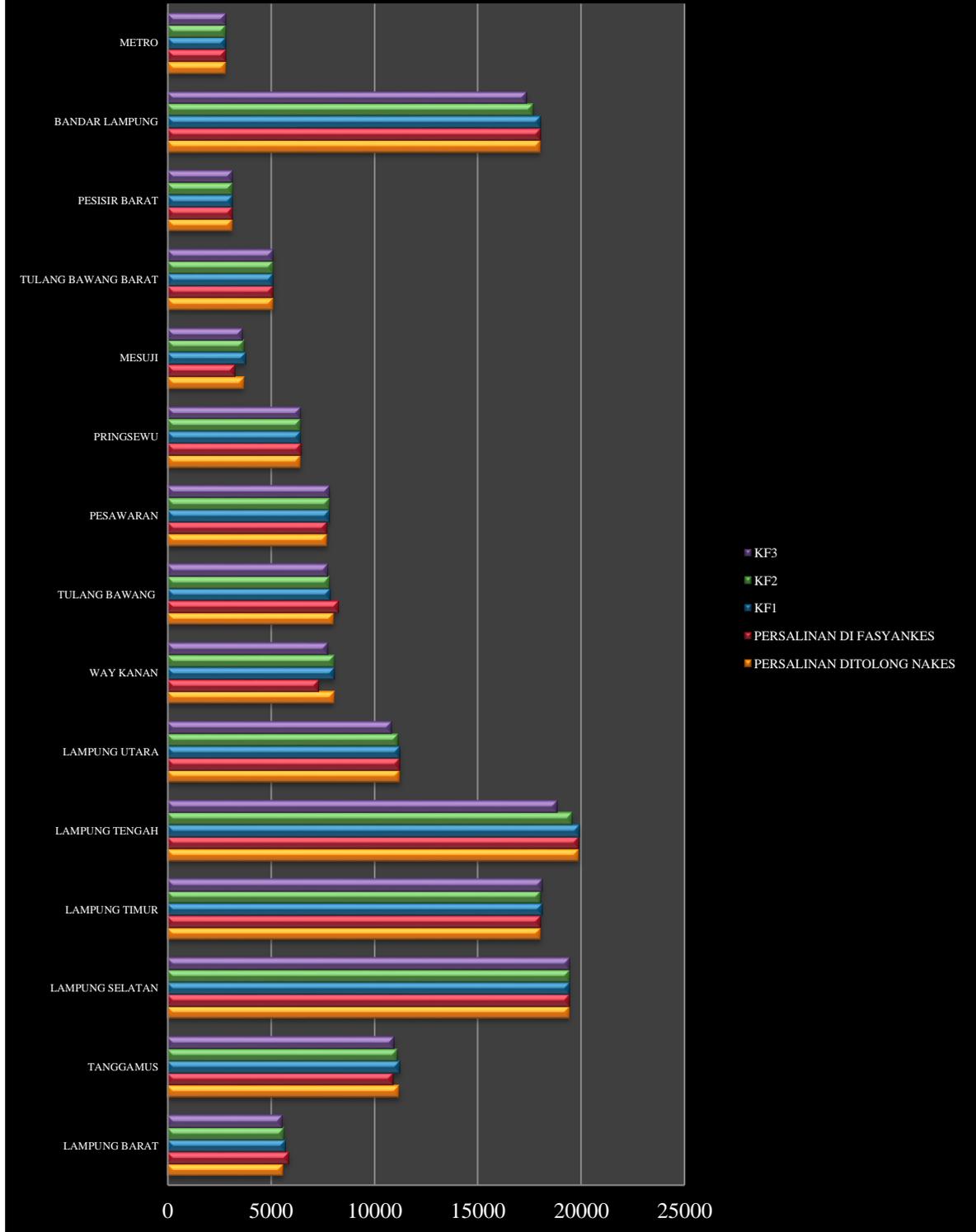
Gambar 3.2.1 Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Provinsi Lampung



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

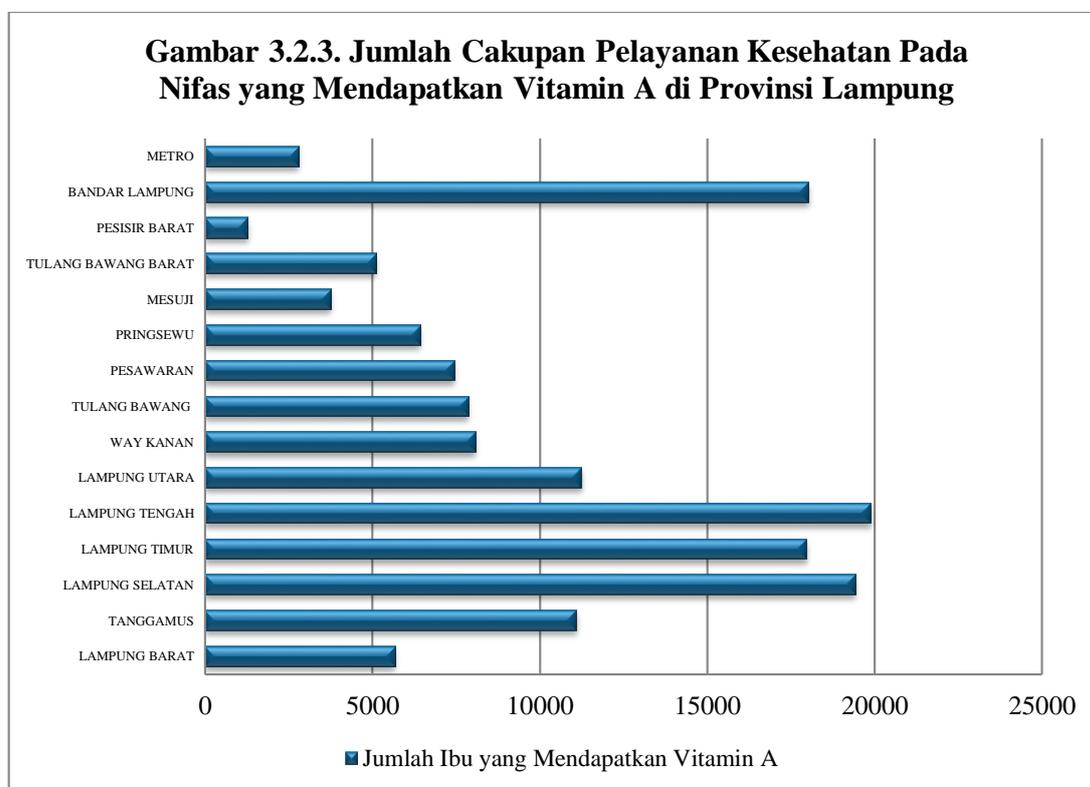
Pelayanan kesehatan K1 dan K4 pada ibu hamil di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik. Jumlah pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh setiap ibu hamil yang ada di Provinsi Lampung tidak dapat diukur dari jumlah ibu yang mendapatkan layanan kesehatan karena setiap kabupaten kota memiliki kepadatan dan jumlah wilayah yang berbeda dan menyebabkan perbedaan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara umum, Lampung Tengah adalah kabupaten dengan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan K1 dan K4 terbanyak, diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sedangkan untuk jumlah yang paling rendah adalah Kota Metro yang dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda dari kabupaten lain.

Gambar 3.2.2. Cakupan Persentase Ibu mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota 2018



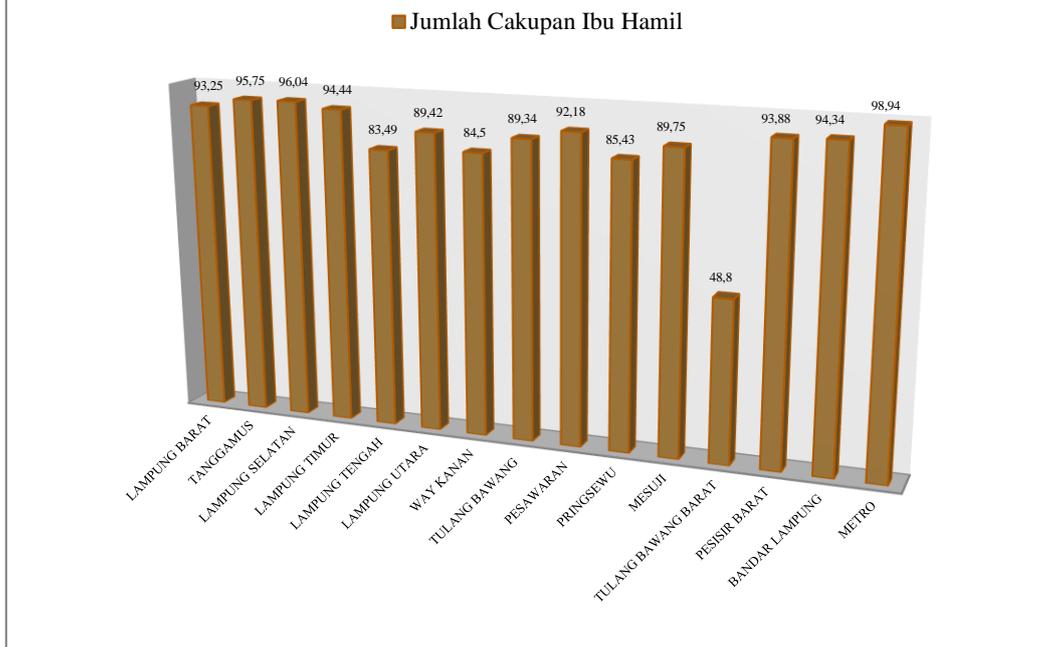
Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Pasca melahirkan, ibu bersalin harus mendapatkan layanan kesehatan berupa pelayanan nifas pertama (KF1) yang berselang antara 40 jam – 3 hari setelah melahirkan. KF1 merupakan masa pantau bagi ibu yang rawan karena dari 18 kematian ibu nifas 8 diantaranya berada pada fase ini (Pamungkas dkk, 2018). Pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Provinsi Lampung dibagi menjadi KF1, KF2, KF3, Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Persalinan ditolong Nakes. Dari kelima pelayanan kesehatan pada ibu nifas, hampir semua mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin yang merata, namun secara angka, Kabupaten Lampung Tengah (98.097) merupakan kabupaten dengan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan nifas yang terbesar dan diikuti Lampung Tengah dan yang terendah adalah Kota Metro (13.935).



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

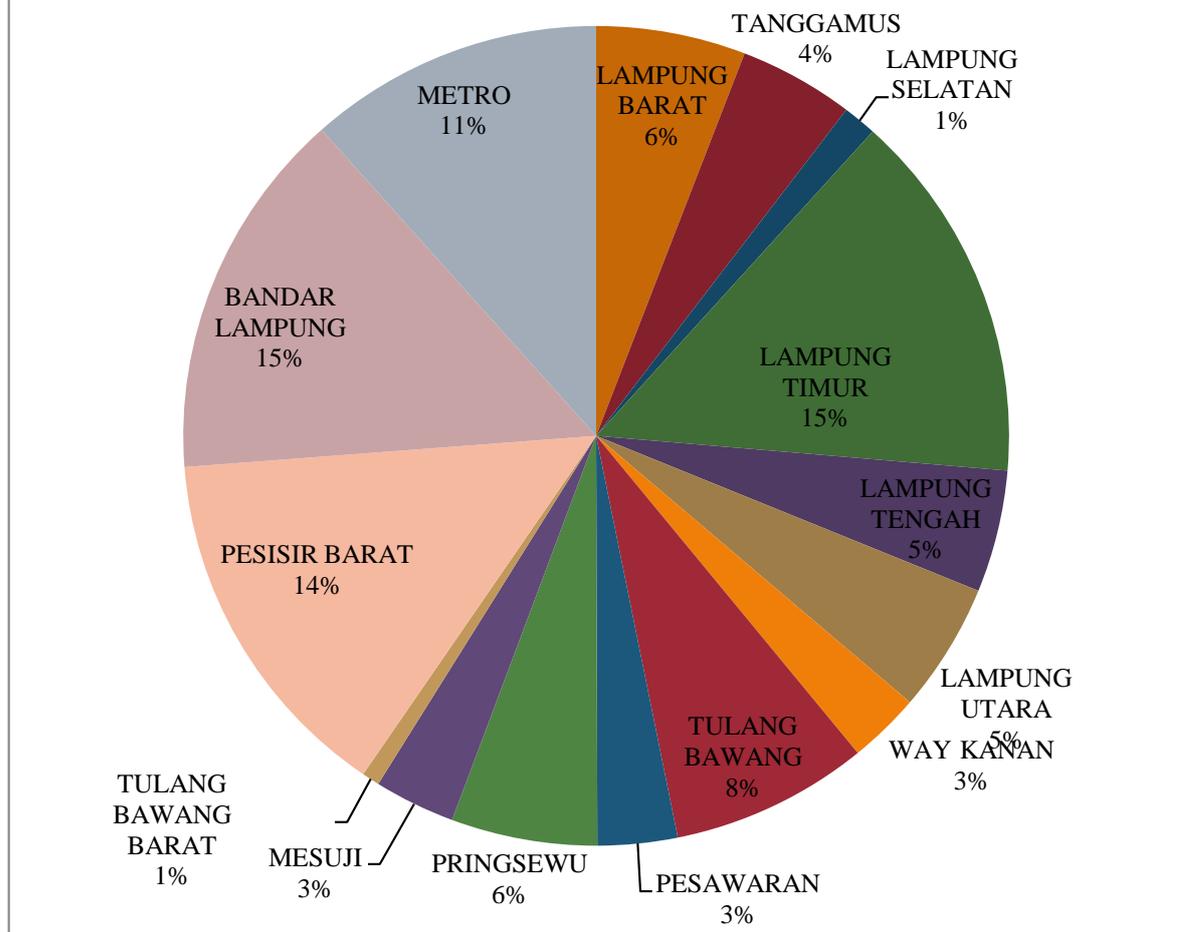
Gambar 3.2.4 Cakupan Ibu Hamil Konsumsi 90 Tablet Tambah Darah Fe³ Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Selain pelayanan kesehatan pasca melahirkan, ibu hamil juga memerlukan pelayanan kesehatan tambahan berupa konsumsi vitamin A dan Fe³ (Zat Besi) guna mengurangi resiko anemia pada ibu hamil dan menyebabkan bayi lahir prematur atau berat bayi lahir rendah (BBLR) yang dapat menyebabkan kematian perinatal dan menyebabkan pendarahan postpartum saat melahirkan. Di Provinsi Lampung, cakupan jumlah ibu hamil yang mendapatkan Vitamin A tertinggi adalah Lampung Tengah (19.889) dan Lampung Selatan (19.426) sedangkan yang terendah adalah Pesisir Barat (1.274). Sedangkan untuk tablet Fe³ jumlah ibu hamil yang mendapatkan konsumsi dengan jumlah terbesar adalah Metro (98,94%) dan yang terendah adalah Tulang Bawang Barat (48,8%)

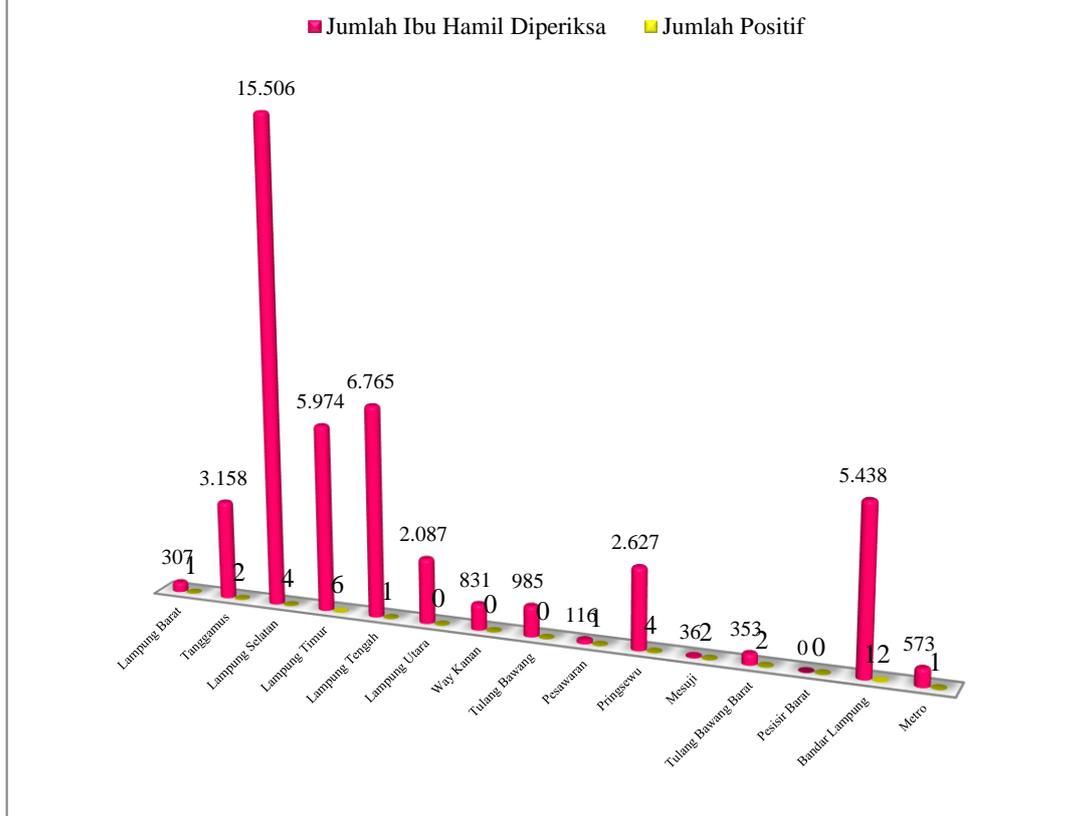
Gambar 3.2.5 Jumlah Ibu Hamil Anemia



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Meskipun Metro merupakan wilayah di Provinsi Lampung yang memberikan tablet Fe₃ tertinggi, namun wilayah ini masih urutan ke-4 di Provinsi Lampung dengan jumlah ibu hamil yang menderita anemia (11%). Sedangkan Tulang Bawang Barat (1%) merupakan kabupaten dengan jumlah ibu hamil yang menderita anemia terendah bersama dengan Kabupaten Lampung Selatan (1%). Sedangkan untuk jumlah tertinggi Kabupaten/Kota dengan jumlah ibu penderita anemia tertinggi adalah Bandarlampung (15%) dan Lampung Timur (15%) penderita anemia.

Gambar 3.2.6. Jumlah Ibu Hamil yang Dilakukan Pemeriksaan HIV di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Ibu penderita HIV memiliki resiko tinggi menularkan virus yang sama kepada anak yang dikandungnya. Di Provinsi Lampung jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan HIV pada tahun 2018 sebanyak 44.756 dengan jumlah penderita positif sebanyak 36 ibu hamil. Kabupaten dengan jumlah penderita HIV tertinggi adalah Bandar Lampung (12 positif HIV dari 5.438 diperiksa) dan yang terendah adalah Lampung Tengah (1 positif HIV dari 6.765 diperiksa). Sedangkan untuk kabupaten dengan jumlah ibu diperiksa tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan (15.506 diperiksa, 4 postif HIV).

3.3. Angka Perkawinan (Usia Perkawinan)

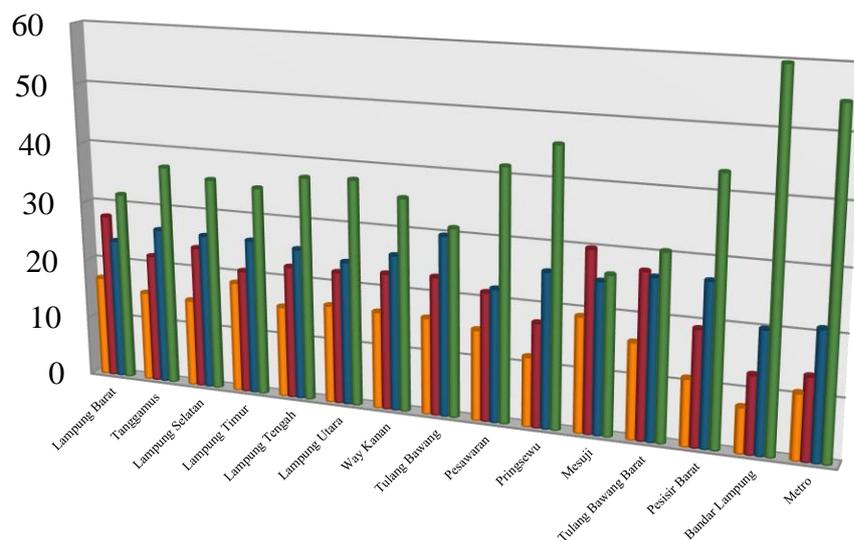
Secara regional Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki tingkat pernikahan anak di ASEAN serelah Kamboja. Dalam tataran domestik isu ini juga menjadi permasalahan di Provinsi Lampung. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan berusia 10-45 tahun, 2,6% pernah menikah pertama kali pada umur 15 -19 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum organ reproduksinya berkembang dengan maksimal (Kartikawati, 2004). Secara hukum, Indonesia telah menaikkan ambang batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan dengan disahkannya Revisi UU Perkawinan No 1/1974 pada 16 September 2019 menjadi 19 tahun. Revisi ini menjadi selaras dengan Undang –undang No.23 tahun 2002 memberikan definisi anak adalah mereka yang berusia kurang dari 19 tahun.

Selain permasalahan hukum, pernikahan yang tidak memperhatikan usia adalah dampak yang dirasakan oleh perempuan. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia kurang dari 19 tahun rentan terhadap kehamilan dengan resiko tinggi karena belum siapnya organ reproduksi secara maksimal. Selain ancaman kesehatan organ reproduksi, ancaman kesehatan mental juga hadir karena secara psikologis usia kurang dari 19 tahun perempuan seringkali mengalami stress karena masa hamil dan menyusui serta penyesuaian dengan kehidupan pernikahan yang berbeda.

Di Provinsi Lampung kelompok perempuan yang pernah kawin dibagi menjadi empat kelompok umur, yaitu wanita dengan usia kurang dari 16 tahun, 17-18 tahun, 19-20 tahun dan wanita dengan usia kawin diatas 21 tahun. Secara umum jumlah perempuan yang kawin tertinggi

adalah kelompok wanita diumur 21 tahun keatas, diikuti oleh kelompok umur 19-20 tahun, lalu 17-18 tahun dan terakhir adalah wanita dengan umur kurang dari 16 tahun.

Gambar 3.3.1 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019



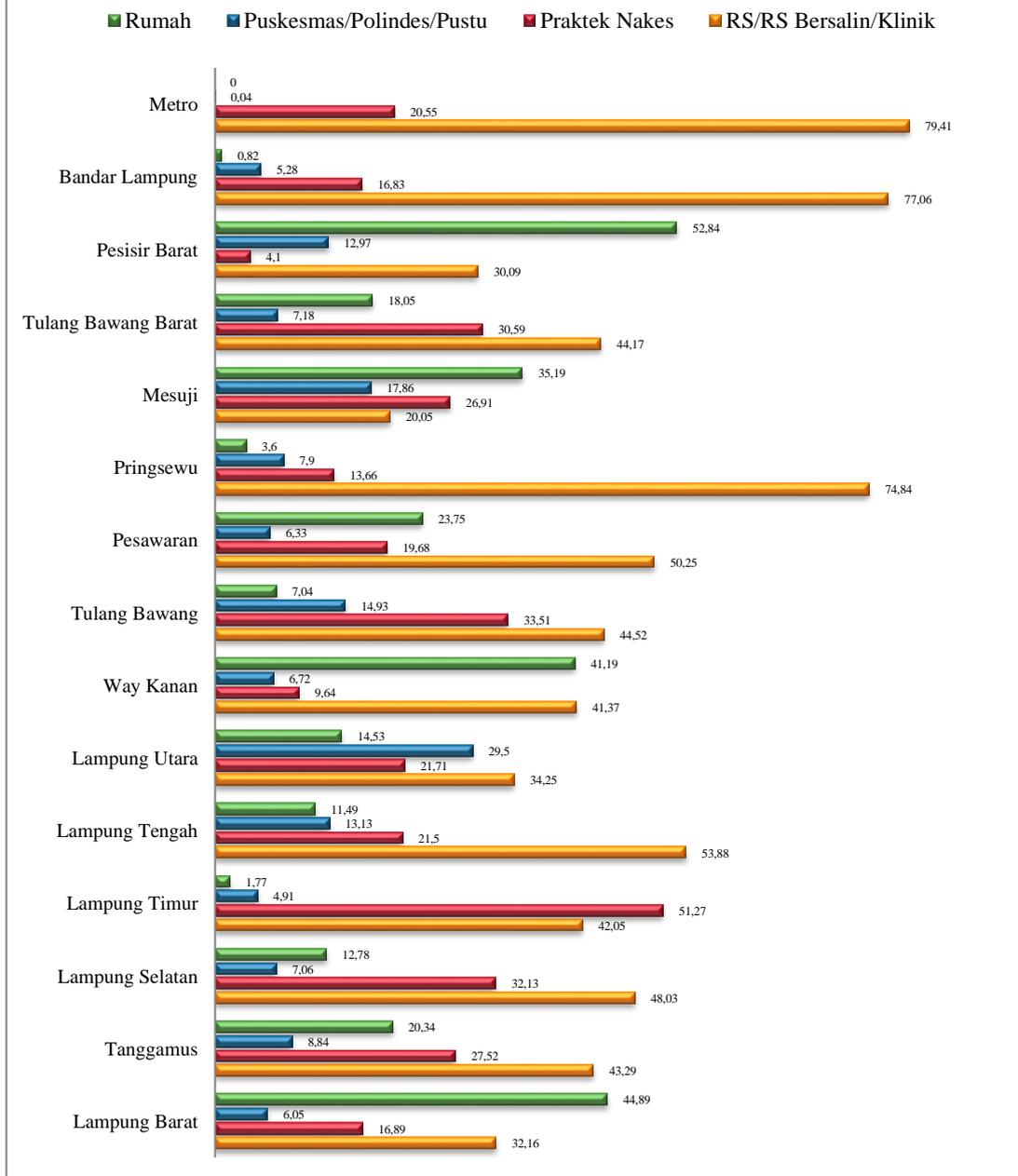
	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Bandar Lampung	Metro
Kurang Dari 16 Tahun	16,91	15,11	14,64	18,53	15,28	16,39	16,19	16,08	15,05	11,53	19,03	15,83	11,02	7,48	10,75
17-18 Tahun	27,75	21,64	23,81	20,69	22,21	22,12	22,7	22,97	21,31	17,26	29,91	27,21	19,06	12,78	13,55
19-20 Tahun	23,63	26,26	26,01	25,96	25,3	23,96	25,85	29,8	22,04	25,62	24,96	26,43	26,67	20,05	21,05
Diatas 21 Tahun	31,71	36,99	35,55	34,82	37,21	37,53	35,25	31,15	41,59	45,59	26,11	30,53	43,26	59,68	54,65

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Pada data perempuan berumur diatas sepuluh tahun keatas yang pernah kawin di lima belas kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang dibagi menjadi empat kelompok umur pada rentang kelompok pertama di usia kurang dari enam belas tahun yang paling tinggi merupakan Lampung Timur dengan presentase 18,53 % dan Bandar Lampung sebagai kota terendah di angka 7,48%. Pada kelompok umur 17-18 tahun Kabupaten Mesuji merupakan daerah tertinggi dengan presentase 29,91% dan Bandar Lampung sebagai Kota Terendah

dengan presentase 12,78%. Pada kelompok ketiga dengan rentang usia 19-20 tahun Pesisir Barat merupakan kabupaten tertinggi dengan presentase 26,67% dan yang terendah merupakan Kota Metro dengan presentase 21,05%. Pada kelompok keempat yang merupakan perkawinan usia dewasa diatas 21 tahun, Bandarlampung menempati urutan teratas pada angka 59,68% dan yang terendah merupakan Kabupaten Mesuji dengan presentase 26,11%. Secara umum, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat merupakan dua Kabupaten yang kelompok usia kawin disemua umur hampir tersebar secara merata.

Gambar 3.3.2 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Lampung Tahun



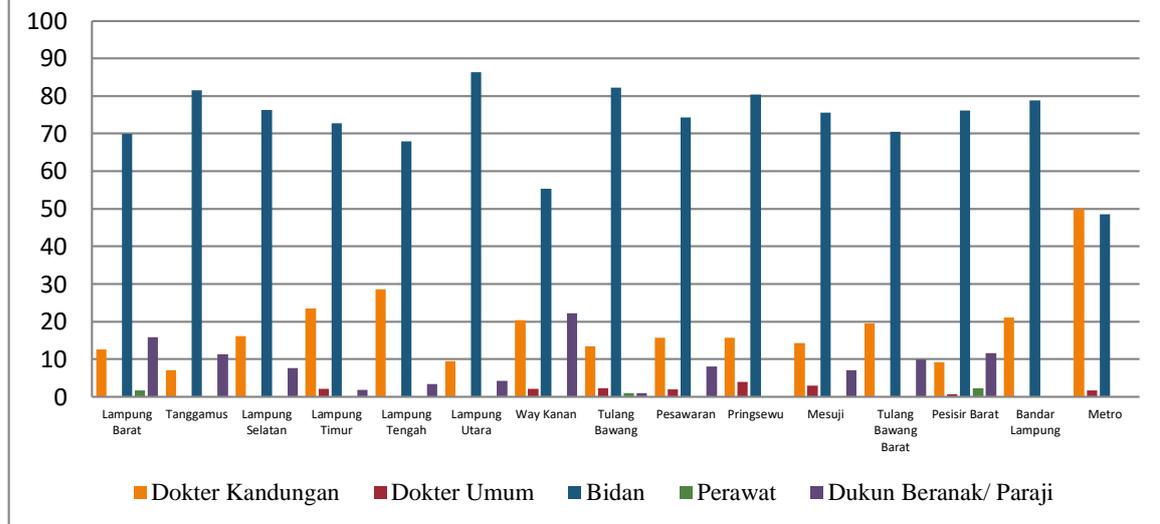
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Pada kelompok data selanjutnya merupakan paparan data mengenai perempuan berusia subur yang berumur 15-49 tahun dan pernah melahirkan anak yang hidup terakhir kali dan dibagi berdasarkan kelompok penolong persalinan di setiap kabupaten/kota di Provinsi

Lampung. Pada kelompok data ini dibagi berdasarkan penolong kelahiran di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Klinik akan ditempatkan pada satu kelompok, Kemudian penolong kelahiran di Praktek Nakes, Puskesmas/Polindes/Puskesmas Pembantu pada satu kelompok dan yang terakhir di Rumah. Secara umum, Kota Metro, Bandar Lampung dan Pringsewu merupakan wilayah dengan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan tertinggi, sedangkan Pesisir Barat, Lampung Barat dan Waykanan merupakan Kabupaten dengan tingkat persalinan dirumah tertinggi.

Menurut data yang didapatkan Kota Metro merupakan kota dengan penolong persalinan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Klinik yang paling tinggi dengan presentasi 79,41% kelahiran di Kota Metro sudah ditangani oleh tenaga kesehatan, sedangkan berbanding terbalik dengan Kota Metro, Mesuji merupakan kabupaten dengan tingkat penolong persalinan medis terendah yaitu sebanyak 20,05% kelahiran. Pada kelompok ibu yang melahirkan di Praktek Nakes, Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang jumlah kelahiran yang dibantu nakes dengan presentase tertinggi sebanyak 51,27% dan Kabupaten Pesisir Barat merupakan yang terendah dengan presentase 4,1%. Kelompok kelahiran yang ditolong oleh tenaga Puskesmas/Polindes/Puskesmas Pembantu Lampung Utara merupakan kabupaten dengan tingkat kelahiran yang tertinggi, mencapai 29,5% kelahiran dilakukan di Puskesmas/Polindes/Puskesmas Pembantu sedangkan di Kota Metro angka tersebut hanya menyentuh 0,04% dari total kelahiran di seluruh Kota Metro. Pada kelompok yang terakhir merupakan ibu yang melahirkan bayinya terakhir dirumah Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten dengan tingkat tertinggi mencapai 52,84% dan Kota Metro merupakan daerah di Provinsi Lampung dengan kelahiran di rumah 0% atau dengan kata lain seluruh persalinan di Kota Metro telah ditangani oleh tenaga medis.

Gambar 3.3.3 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018



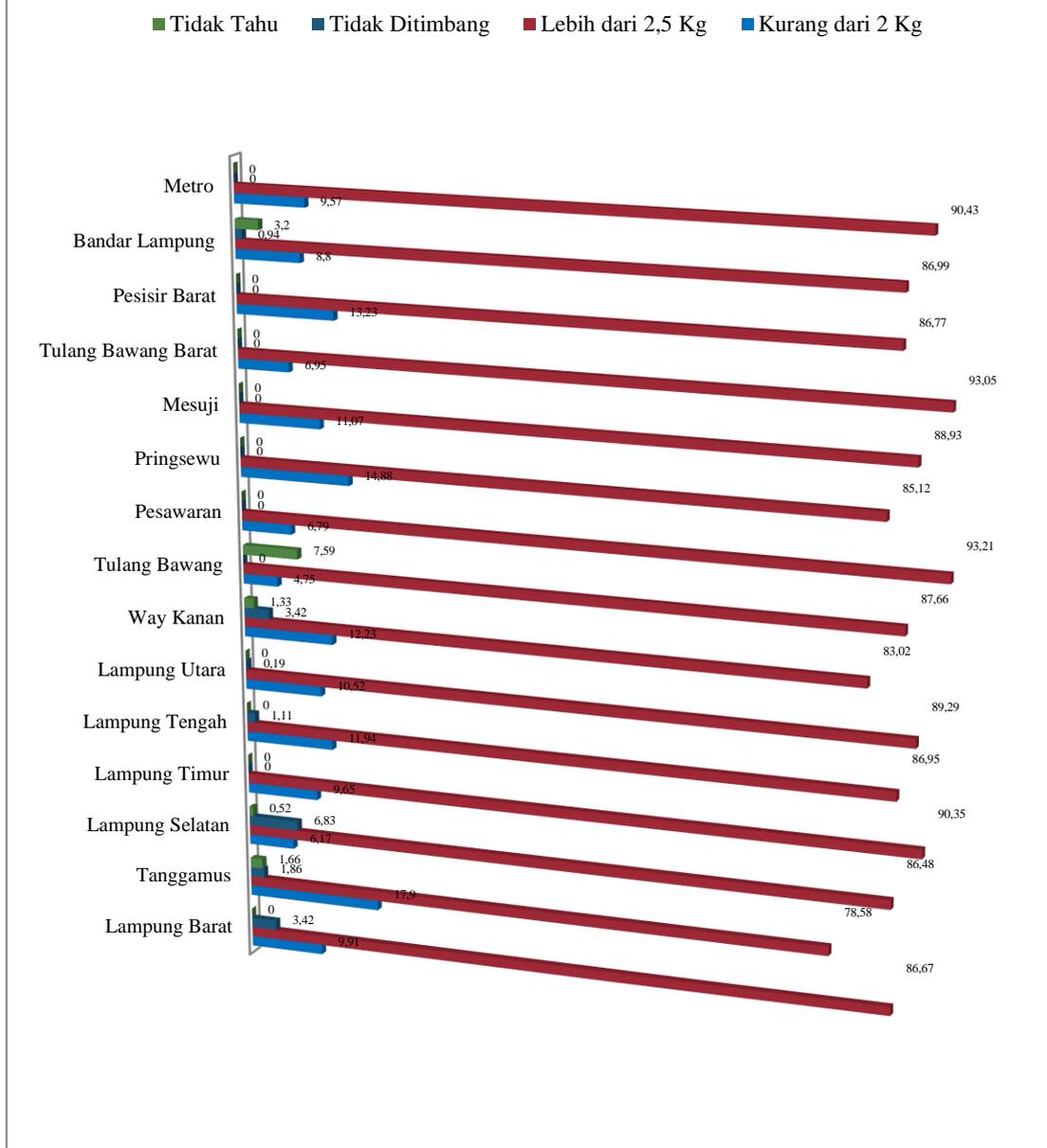
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Pada kelompok data selanjutnya merupakan paparan data mengenai perempuan yang pernah melahirkan di lima belas kabupaten kota di Provinsi Lampung dan penolong pada proses kelahiran terakhir. Pada kelompok data ini dibedakan berdasarkan lima kelompok penolong persalinan yaitu Dokter Kandungan, Dokter Umum, Bidan, Perawat dan Dukun Beranak/Paraji. Secara umum di Provinsi Lampung Bidan merupakan tenaga medis yang paling banyak menolong proses persalinan sedangkan perawat merupakan yang paling rendah.

Pada kelompok Bidan, Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang mendapatkan pertolongan pada persalinan mencapai 86% dari total kelahiran di kabupaten tersebut, sedangkan di Kota Metro Bidan merupakan penolong persalinan yang paling rendah dan hanya membantu 48,48% dari seluruh kelahiran. Kelompok penolong persalinan yang selanjutnya merupakan Dokter Kandungan dimana Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan tingkat penolong persalinan tertinggi yang menggunakan jasa dokter kandungan mencapai 28,61% dan Tanggamus merupakan kabupaten yang paling sedikit menggunakan jasa tersebut. Secara mengejutkan, dukun

beranak/paraji masih menjadi tiga besar penolong persalinan di Provinsi Lampung dengan Kabupaten Waykanan sebagai kabupaten tertinggi dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh paraji sebanyak 22,16% dan Pringsewu dan Kota Metro merupakan daerah yang tidak lagi menggunakan jasa ini. Selanjutnya, pada kelompok Dokter Umum merupakan penolong persalinan yang paling tinggi adalah Kabupaten Pringsewu dengan 3,89%, sedangkan pada kelompok penolong persalinan perawat Kabupaten Pesisir Barat yang tertinggi sebesar 2,32%.

Gambar 3.3.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Berat Bayi Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Provinsi Lampung Tahun



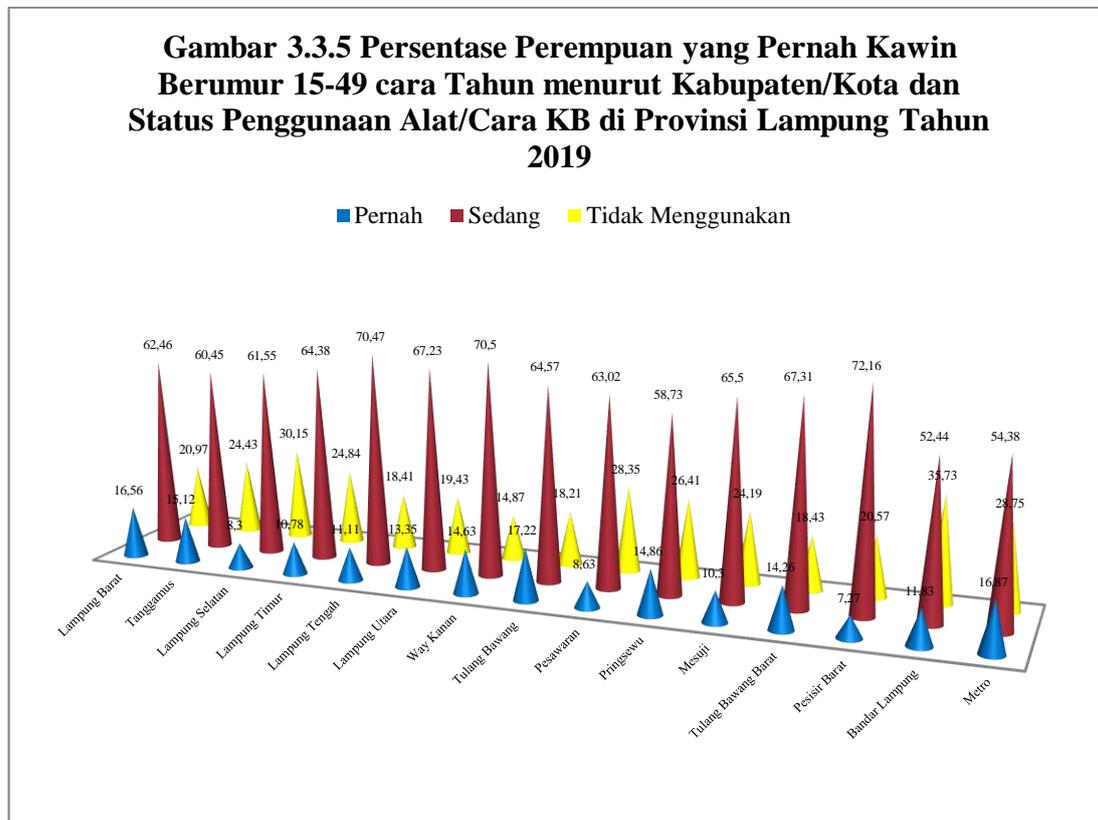
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Pada kelompok data berat bayi yang dilahirkan oleh wanita usia 15-49 tahun di Provinsi Lampung dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2 kg, lebih dari 2,5 kg, tidak ditimbang dan tidak diketahui beratnya. Secara

umum bayi yang lahir di Provinsi Lampung rata-rata memiliki berat badan lebih dari 2,5 kg dalam presentasi yang tinggi dan dalam angka yang kecil tidak diketahui beratnya.

Secara umum bayi yang lahir di Provinsi Lampung di lima belas kabupaten/kota memiliki berat lebih dari 2,5 kg diatas 80% kelahiran yang terjadi, Kabupaten Pesawaran memiliki presentase tertinggi dengan 93,21% kelahiran dan yang terendah adalah Kabupaten Waykanan dengan presntase 83,02%. Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2 kg yang paling tinggi merupakan Kabupaten Tanggamus dengan jumlah kelahiran 17,9% dan yang terendah adalah Kabupaten Pesawaran 4,74%. Sedangkan berat bayi yang lahir dan tidak ditimbang beratnya yang tertinggi ada di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 6,83% dan yang tidak diketahui beratnya tertinggi ada di Kabupaten Tulang Bawang dengan presentase 7,59%.

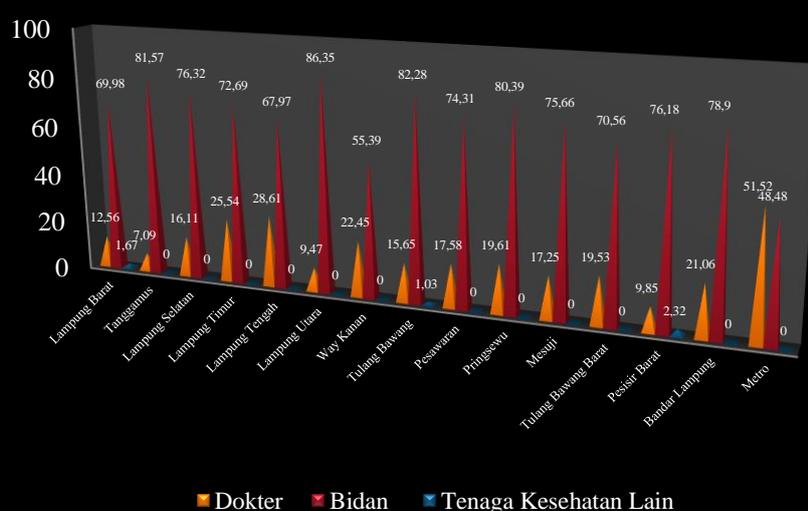
Gambar 3.3.5 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 cara Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung Tahun 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Pada kelompok perempuan yang pernah kawin dan menggunakan kontrasepsi di Provinsi Lampung di lima belas kabupaten/kota di secara umum telah menggunakan di angka lebih dari 50%, hal ini menunjukkan kesadaran di terhadap pentingnya merencanakan kelahiran di Provinsi Lampung dapat dikatakan baik. Dari lima belas kabupaten/kota, Pesisir Barat merupakan jumlah tertinggi perempuan yang sedang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 72,16% perempuan pengguna dan yang terendah adalah Bandar Lampung dengan pengguna 52,44%. Sedangkan kabupaten/kota dengan perempuan yang pernah menggunakan alat kontrasepsi tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan presentase 17,22% dan yang terendah adalah Pesisir Barat. Sedangkan untuk kabupaten dengan jumlah perempuan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi tertinggi adalah Banda Lampung dengan presentase 35,75% dan yang terendah adalah Tulang Bawang dengan presentase 18,21%.

Gambar 3.3.6 Persentase Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung Tahun 2019



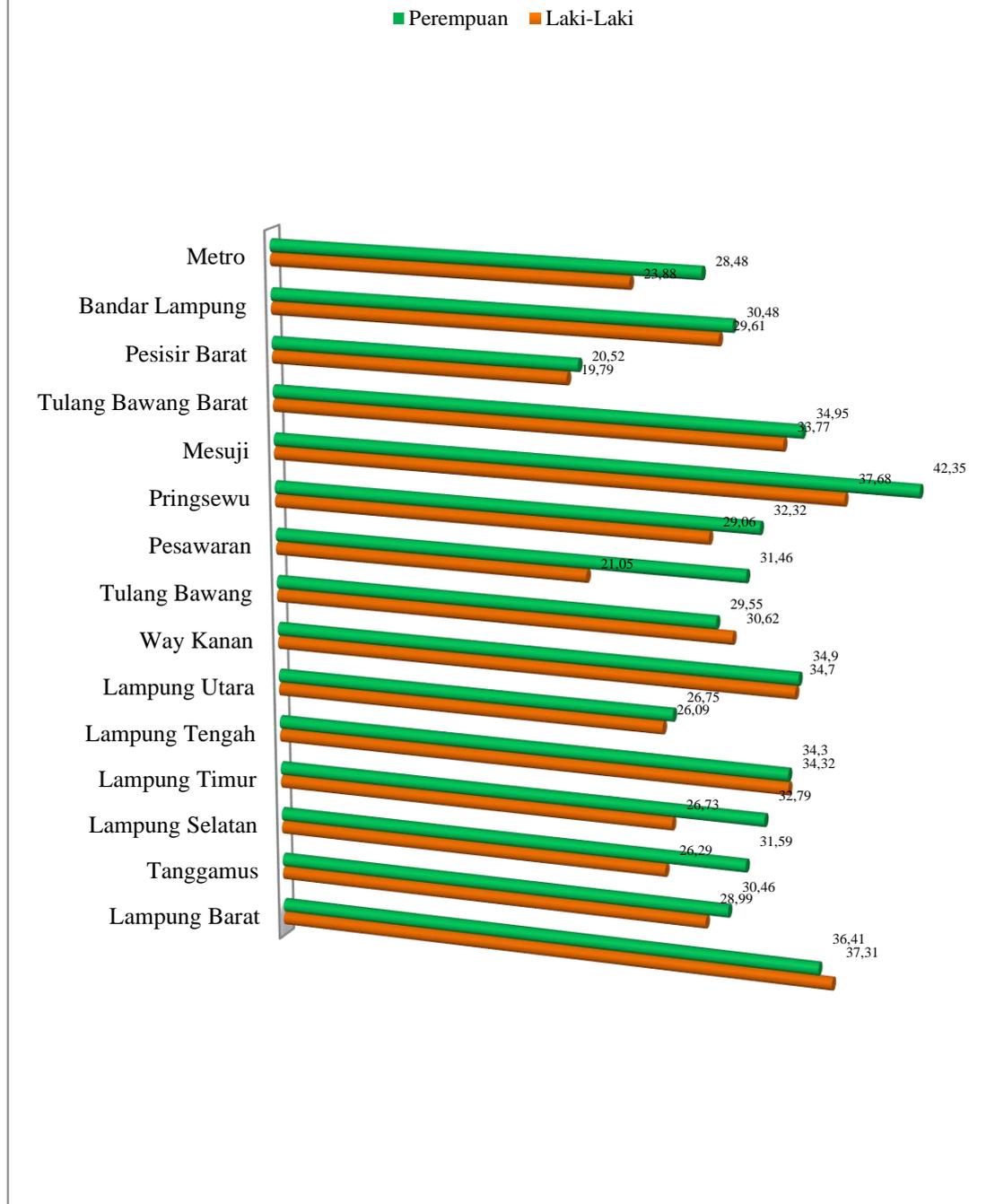
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

3.4 Angka Kesakitan (Morbiditas)

Isu lain yang menjadi perhatian adalah angka kesakitan masyarakat di Provinsi Lampung. Angka kesakitan dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan penduduk di Provinsi Lampung. Secara umum angka kesakitan digambarkan pada angka keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir, presentase penduduk yang dirawat inap selama sebulan terakhir, jumlah penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan selama sebulan terakhir, jumlah penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap sebulan terakhir, penduduk yang berobat jalan selama sebulan terakhir, penduduk rawat inap selama setahun terakhir.

Secara umum, data yang didapatkan di masyarakat Provinsi Lampung memiliki keluhan kesehatan relatif merata. Data kabupaten dengan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir yang paling tinggi adalah Kabupaten Mesuji dan yang terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian untuk angka penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir yang tertinggi adalah Kabupaten Mesuji dan yang terendah adalah Kota Metro. Untuk presentase penduduk yang rawat inap selama setahun terakhir yang tertinggi adalah Kota Metro dan yang terendah adalah Lampung Barat. Sedangkan untuk penduduk sakit yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan selama sebulan terakhir yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat dan yang terendah adalah Pesisir Barat. Sedangkan untuk penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap selama setahun terakhir yang tertinggi adalah Bandarlampung dan yang terendah adalah Pringsewu. Berikut merupakan paparan data mengenai angka kesakitan masyarakat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018



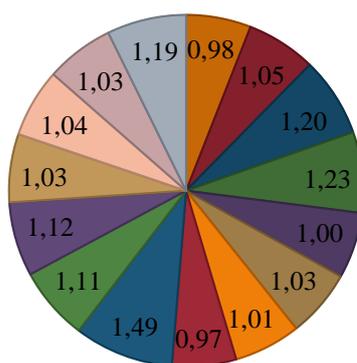
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Sedangkan untuk kabupaten dengan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah Mesuji, Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat. Kabupaten Mesuji menjadi

kabupaten/kota dengan penduduk yang mengeluh kesehatan tertinggi dengan keluhan penduduk perempuan sebanyak 42,35% dan penduduk laki-laki sebanyak 37,68%. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki keluhan kesehatan terendah baik laki-laki maupun perempuan adalah pesisir barat dengan presentase 19,79% dan 20,52%. Sedangkan menurut indeks disparitas gender, hanya Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki kesenjangan gender.

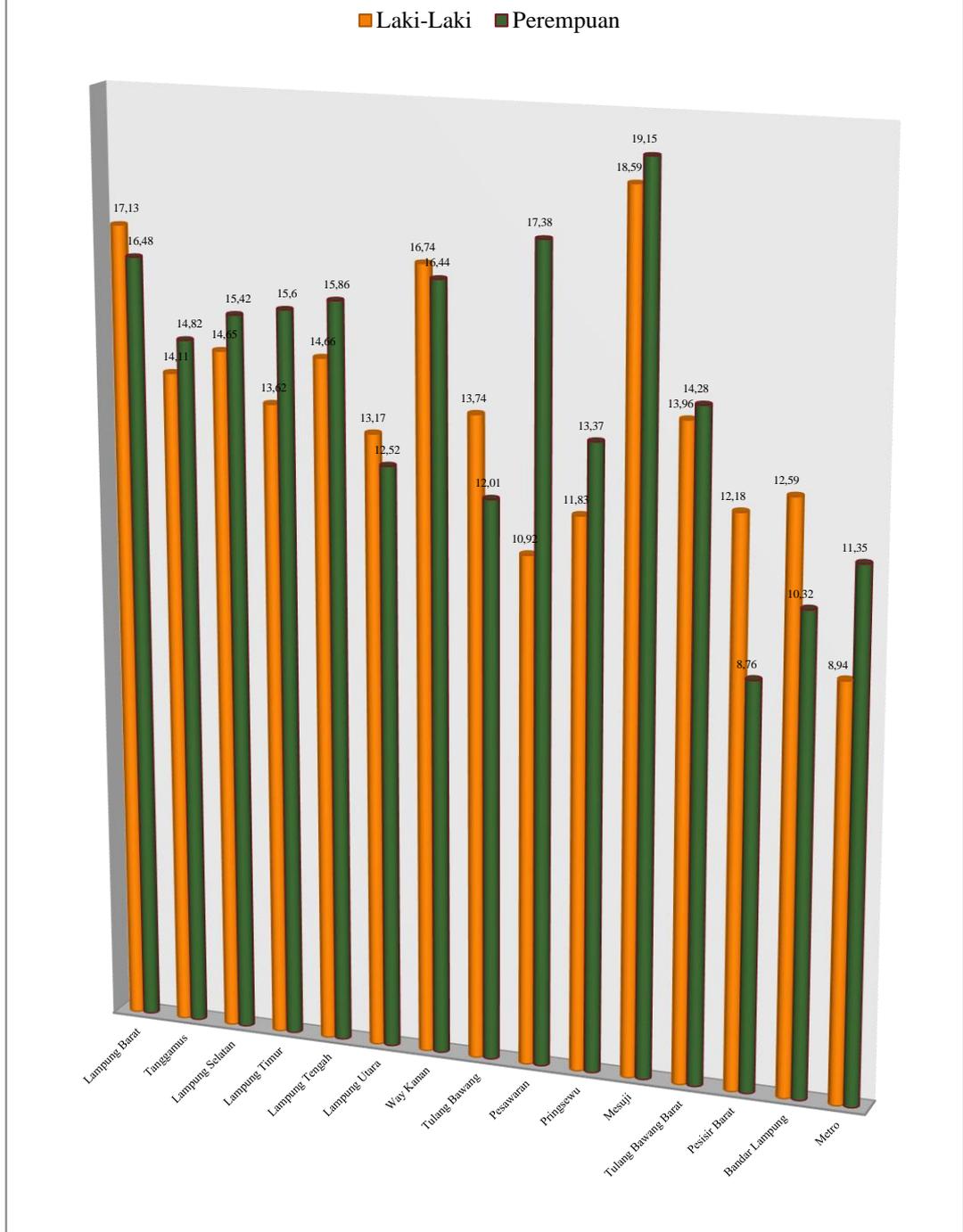
Gambar 3.4.2 Indeks Disparitas Gender Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2019

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| ■ Lampung Barat | ■ Tanggamus | ■ Lampung Selatan |
| ■ Lampung Timur | ■ Lampung Tengah | ■ Lampung Utara |
| ■ Way Kanan | ■ Tulang Bawang | ■ Pesawaran |
| ■ Pringsewu | ■ Mesuji | ■ Tulang Bawang Barat |
| ■ Pesisir Barat | ■ Bandar Lampung | ■ Metro |



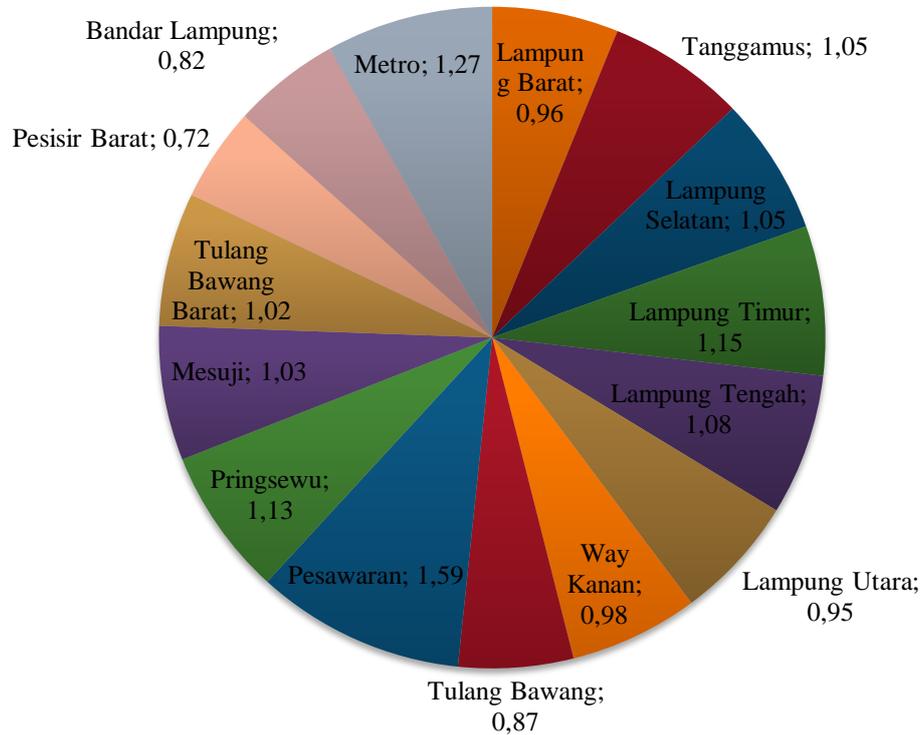
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Gambar 3.4.3 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Gambar 3.4.4 Indeks Disparitas Gender Penduduk Menderita Sakit Selama 6 Bulan terakhir menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

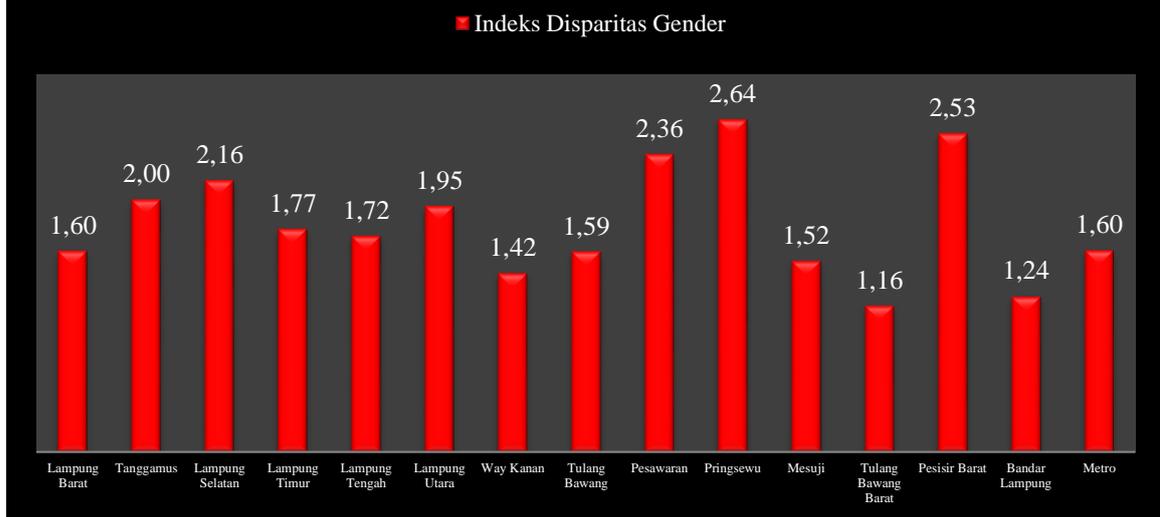
Pada kelompok angka penduduk yang menderita sakit selama 6 bulan terakhir di Provinsi Lampung berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Mesuji merupakan jumlah tertinggi kabupaten dengan penduduk yang menderita sakit selama 6 bulan terakhir laki-laki 18,59% dan perempuan 19,15% dan yang terendah adalah Metro dengan presentase laki-laki 8,94% dan perempuan 11,35%.

Gambar 3.4.5 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi

Gambar 3.4.6 Disparitas Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019

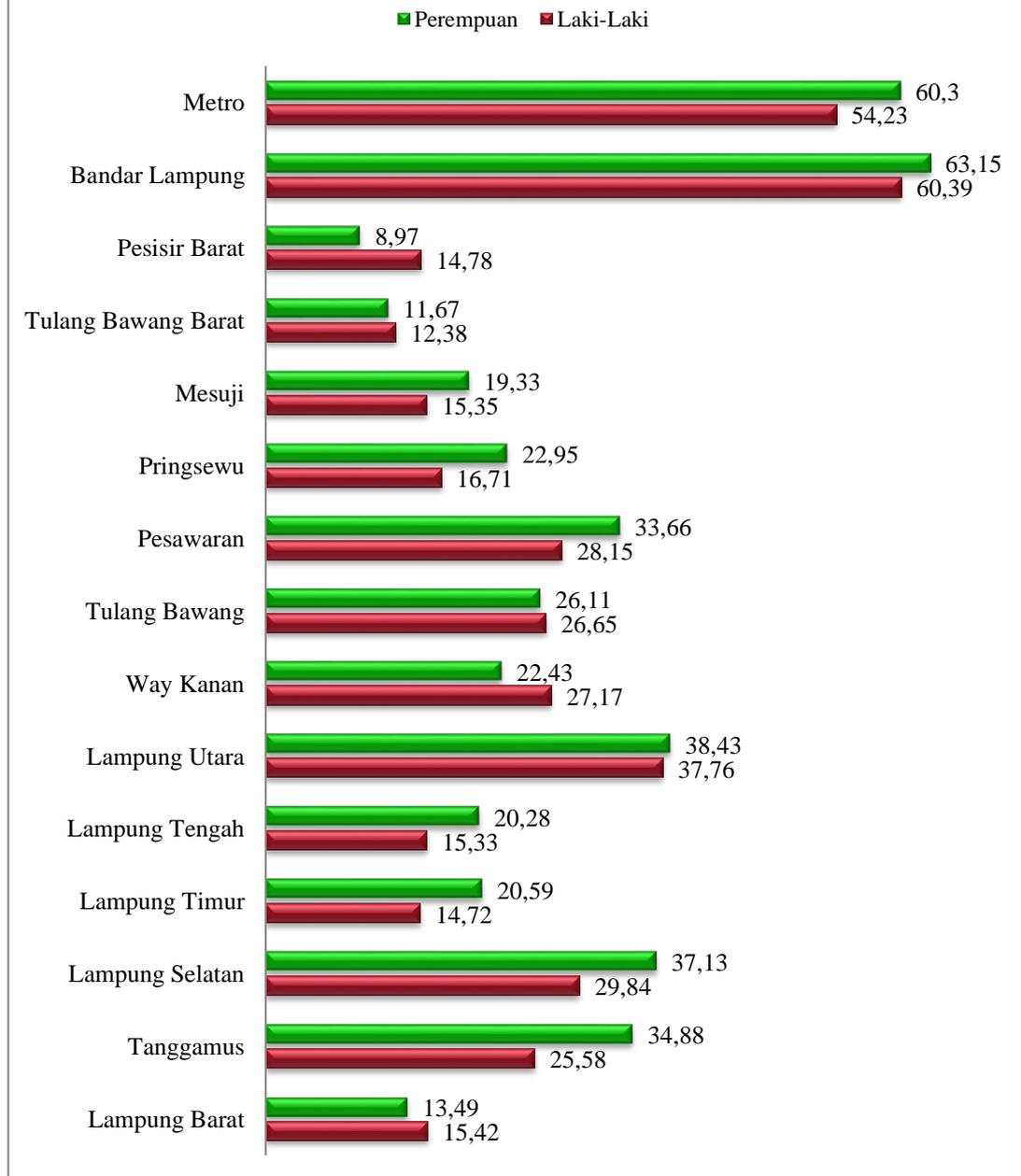


Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi

Pada kelompok angka penduduk yang pernah dirawat inap di Provinsi Lampung secara keseluruhan kurang dari 15% dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Jumlah presentse penduduk yang pernah dirawat ini baik laki-laki maupun perempuan yang tertinggi

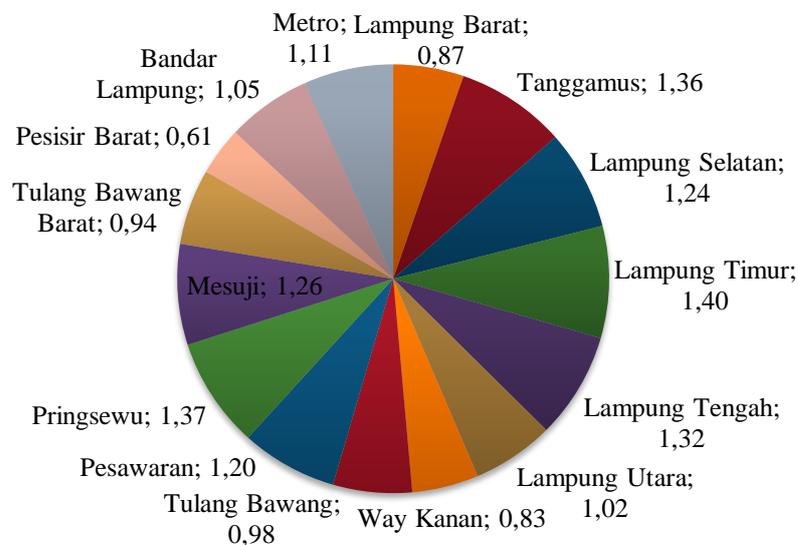
adalah Kota Metro 13,28% (5,1% Laki-laki, 8,18% Perempuan) dan yang terendah adalah Lampung Barat dengan presentase 4,49% (1,9% laki-laki dan 3,04 perempuan).

Gambar 3.4.7 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi

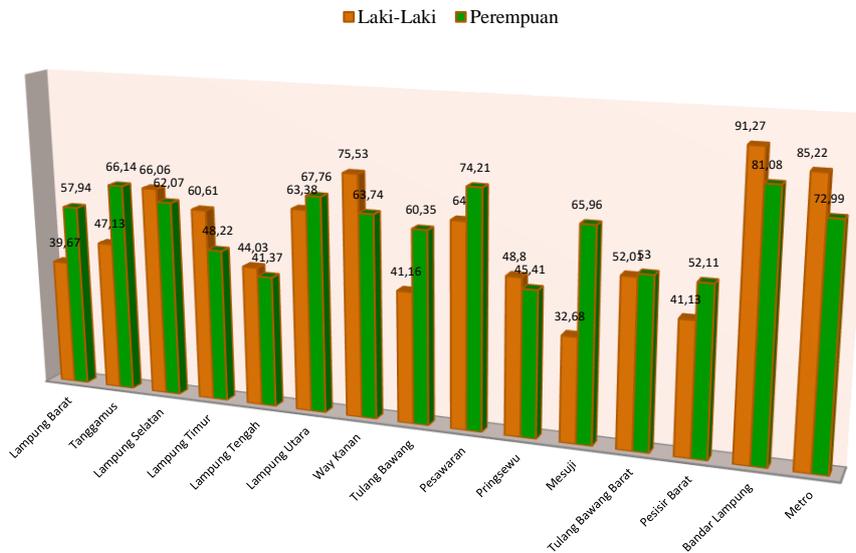
Gambar 3.4.8 Disparitas Gender Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi

Jaminan kesehatan di Indoensia menjadi sangat dibutuhkan bagi masyarakat baik yang memiliki keluhan kesehatan ringan sampai berat. Jaminan kesehatan nasional (BPJS) digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan mulai dari dasar hingga pelayanan kesehatan lanjutan. Penerima manfaat BPJS menggunakan jaminan kesehatan tersebut sebagai dimulai dari faskes terendah hingga tertinggi dengan pelayanan yang sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Di Provinsi Lampung khususnya, Bandarlampung dan Kota Metro merupakan dua wilayah pengguna jaminan kesehatan selama sebulan terakhir yang tertinggi (Masing-masing menyentuh 50% pengguna) dan yang terendah adalah kabupaten Pesisir Barat (8,97%).

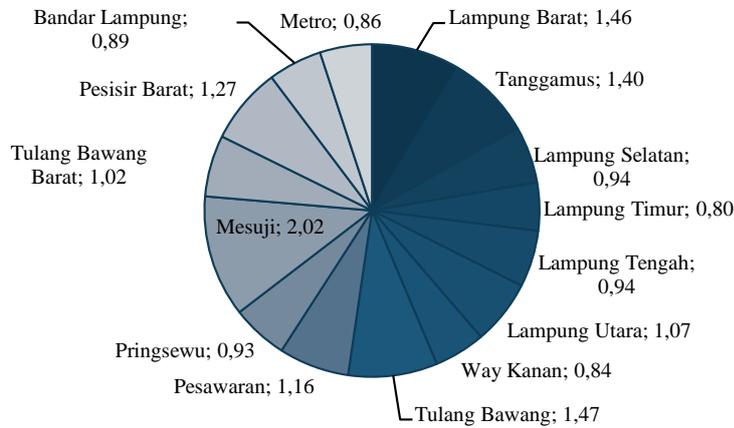
Gambar 3.4.9 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2018

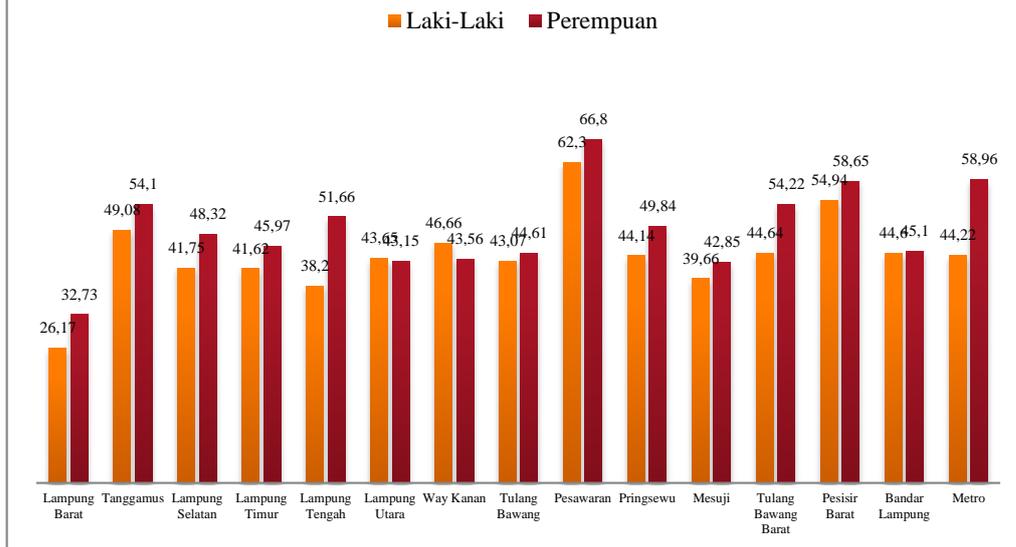
Pada bagan pengguna jaminan kesehatan untuk rawat inap dalam rentang waktu satu tahun terakhir, Bandarlampung dan Kota Metro masih menjadi wilayah dengan presentase pengguna jamina kesehatan tertinggi (91,27% dan 85,22%) dan di angka yang hampir mendekati adalah Kabupaten Way Kanan (75,53%) dan Pesawaran (74,21%). Sedangkan untuk kabupaten dengan presentase pengguna jaminan kesehatan untuk rawat inap terendah adalah Lampung Tengah (44,03%).

Gambar 3.4.10 Indeks Disparitas Gender Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2018

Gambar 3.4.11 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

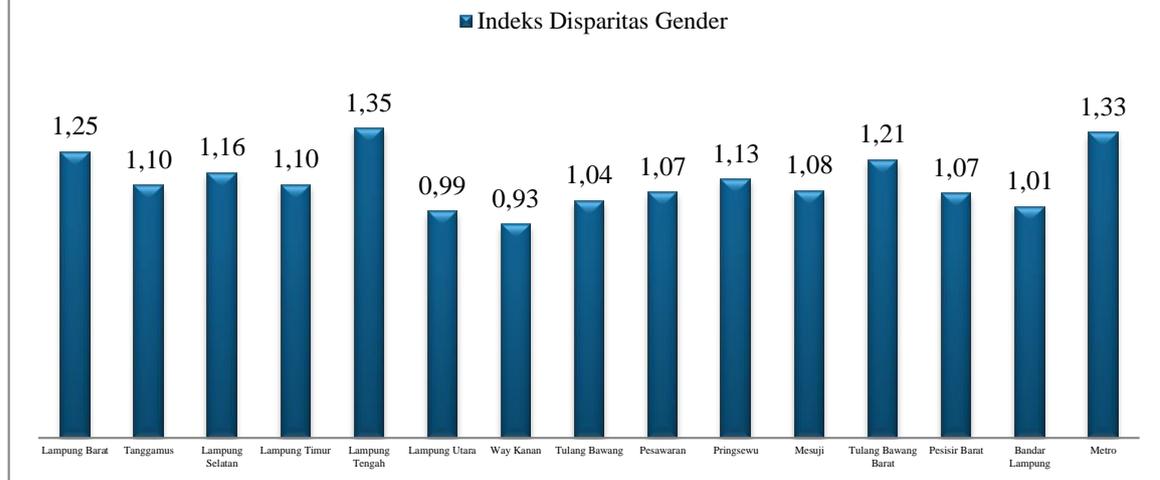


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2018

Penduduk dengan presentase berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Lampung yang tertinggi adalah Kabupaten Pesawaran (66,8%), Pesisir Barat (58,65%) dan Tanggamus (54,1%). Sedangkan

untuk presentase penduduk yang berobat jalan selama sebulan terakhir yang terendah adalah Lampung Barat (26,17%).

Gambar 3.4.12 Disparitas Gender Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2018

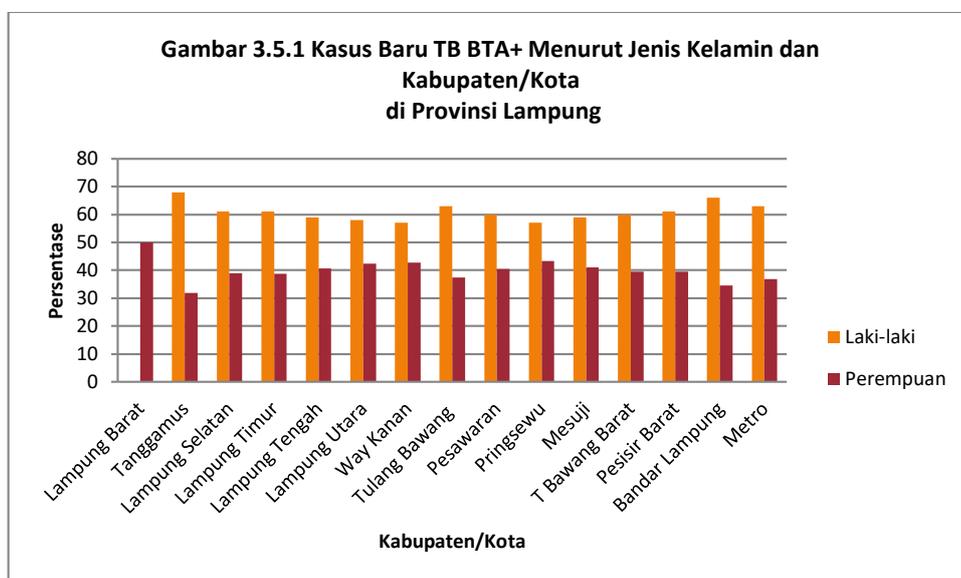
3.5. Penyakit Menular

Pada kelompok penyakit menular data kelompok dibagi menjadi beberapa jenis penyakit besar yang diderita oleh masyarakat Provinsi Lampung antara lain Tuber Culosis (TBC), Diare, DBD, Filariasis, HIV dan AIDS. Penyakit menular tersebut menjadi perhatian pemerintah karena menjadi salah satu indikator kesehatan nasional.

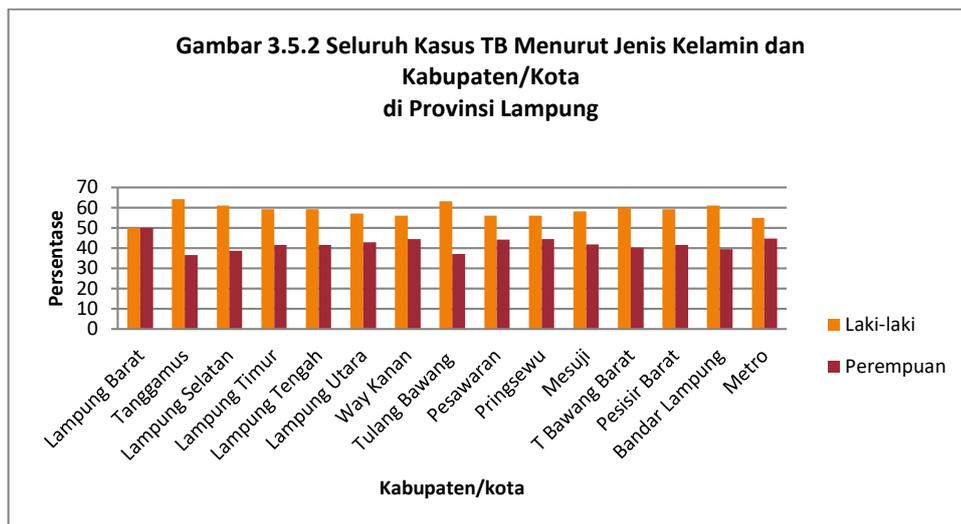
3.5.1 Tuber Culosis (TBC)

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung, penyakit TBC masih merupakan penyakit menular yang merupakan masalah kesehatan serius. Jumlah kasus baru di seluruh provinsi pada tahun 2017 mencapai 5.612. Sementara itu jumlah seluruh kasus TB mencapai 8.808, dimana 629 diantaranya merupakan penderita anak-anak (0-14 tahun). Dari aspek gender, terdapat perbedaan cukup

signifikan antara penderita laki-laki dan perempuan, dimana jumlah penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penderita perempuan. Hal ini kemungkinan disebabkan faktor resiko (perilaku hidup beresiko) yang lebih banyak dilakukan laki-laki dibandingkan perempuan seperti merokok dan begadang serta lingkungan kerja yang kurang sehat. Perbedaan dari aspek gender ini berdampak luas dalam konteks masyarakat dimana pencari nafkah utama keluarga ada pada laki-laki. Penderita TBC pada umumnya kehilangan hari kerja paling tidak 105 hari dalam setiap tahunnya, dan hal ini tentunya merupakan kerugian ekonomis yang tidak sedikit. Anggota keluarga harus menanggung kerugian yang lebih besar ketika penderita TBC adalah tulang punggung ekonomi keluarga.



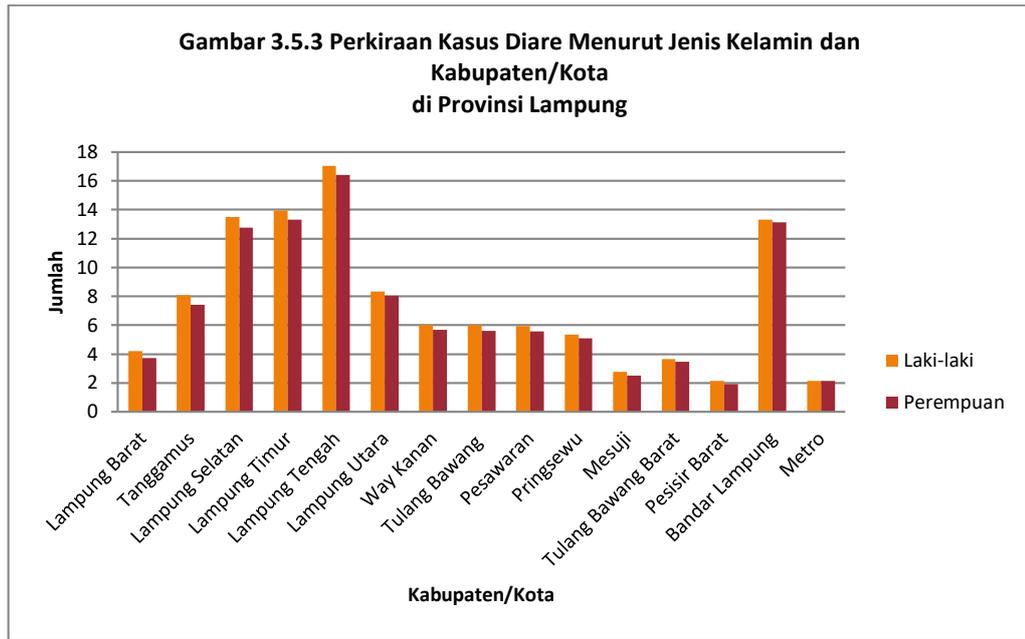
Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016



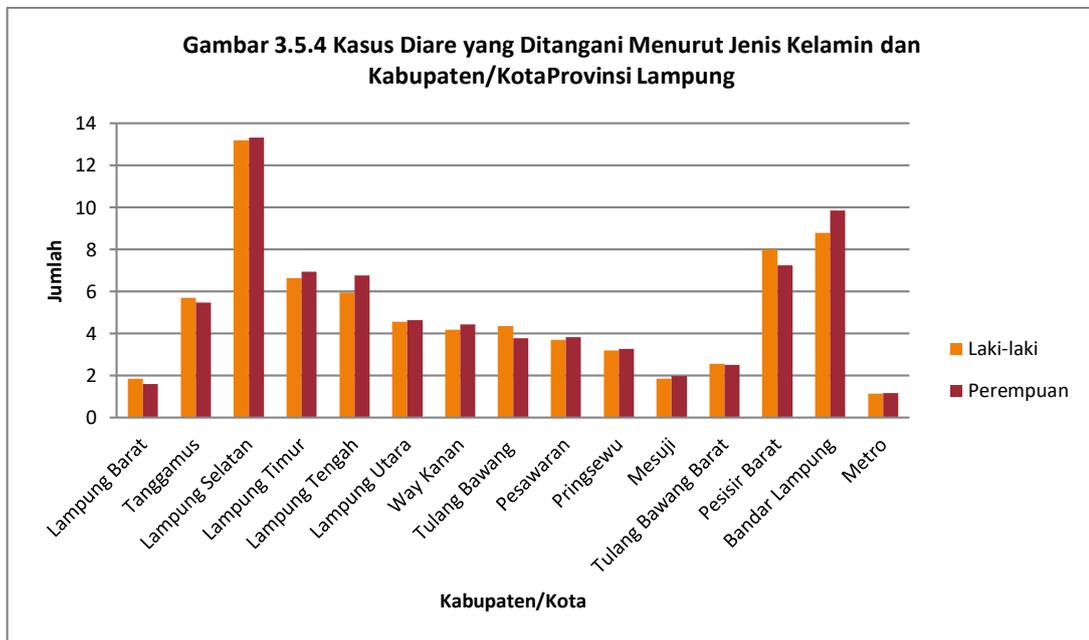
Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2016

3.5.2 Diare

Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan dunia terutama di negara berkembang. Di Indonesia diare merupakan salah satu masalah utama kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan menimbulkan banyak kematian, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare meliputi status gizi dan pemberian ASI eksklusif serta faktor lingkungan berupa sarana air bersih, sarana sanitasi dan risiko pencemaran (Adisasmito, 2007).



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

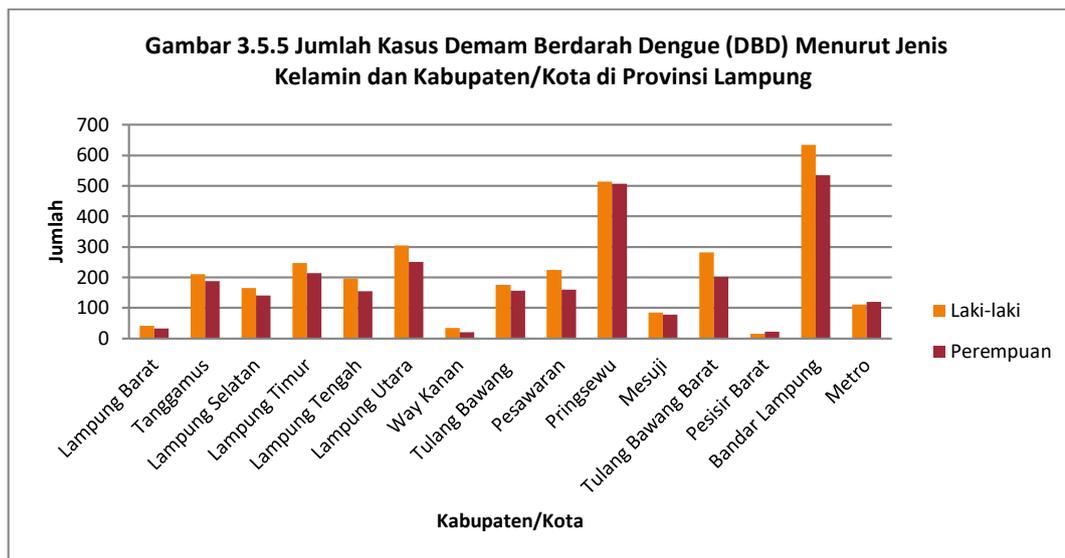


Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

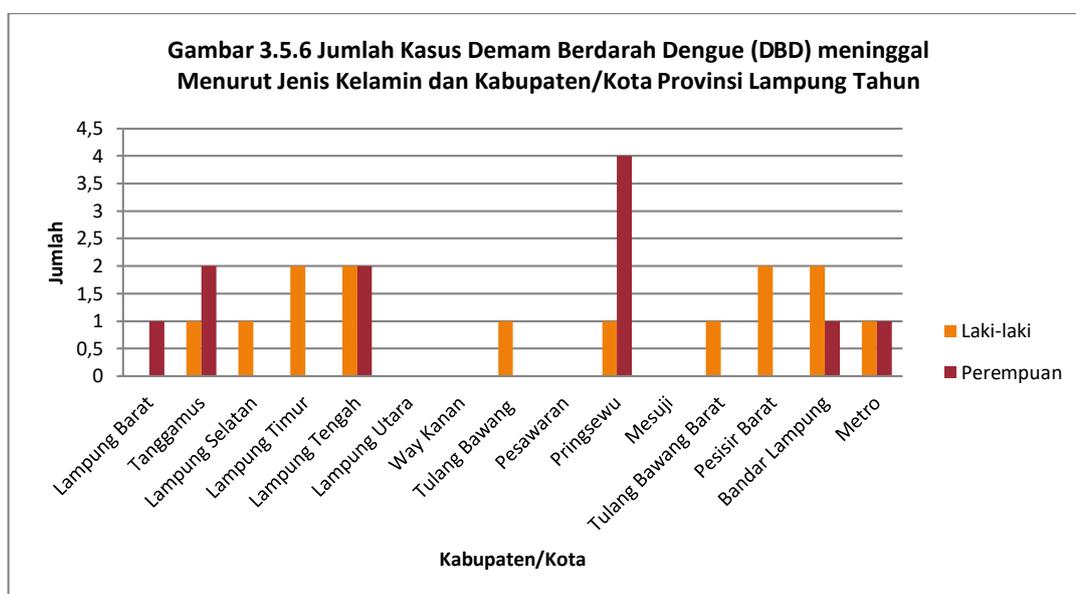
3.5.3 DBD

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus *dengue* dan disebarluaskan oleh nyamuk terutama spesies *Aedes aegypti*. World Health Organization (WHO) menggolongkan penyakit ini ke dalam penyakit infeksi baru yang sedang muncul dan meningkat karena semakin meluasnya sebaran geografis serta semakin meningkatnya jumlah penduduk yang terkena. Berdasarkan kajian dari Kementerian Kesehatan RI (2004) diperoleh kesimpulan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di Indonesia diakibatkan oleh beragam faktor. Pertama, pada dasarnya penyakit menular termasuk DBD masih endemik di beberapa wilayah karena terdapat vektor nyamuk hampir diseluruh pelosok tanah air serta adanya 4 sel tipe virus yang bersirkulasi sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan sewaktu-waktu mungkin dapat terjadi KLB. Faktor kedua adalah lemahnya sistem kewaspadaan dini sehingga penanganan dan pengobatan kasus sebagai intervensi belum dilakukan sebagaimana mestinya.

Ketiga, kemudahan alat transportasi memungkinkan pergerakan/perpindahan alat angkut, penumpang, bahan/barang, dan alat dari satu wilayah ke wilayah lain yang merupakan daerah endemik. Ketiga faktor tersebut didukung dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan paradigma hidup sehat dan kesadaran pada kondisi lingkungan sekitar sebagai faktor risiko penyebaran penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016



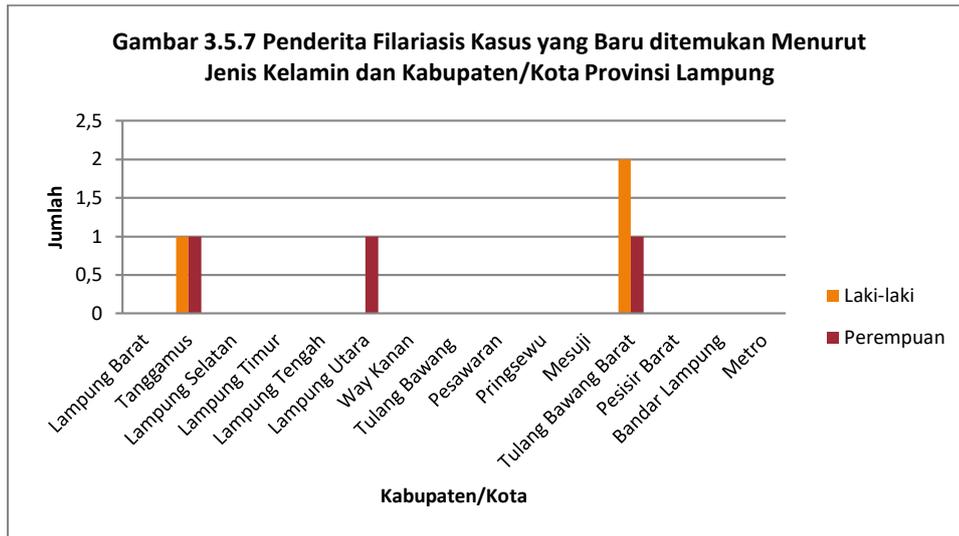
Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

3.5.4 Filariasis

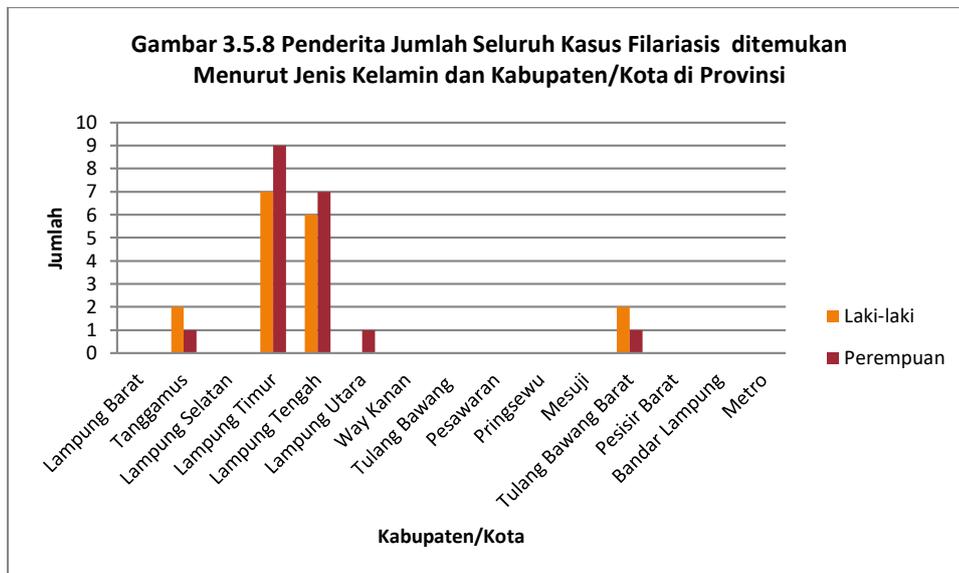
Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filariasis yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, *glandula mammae*, dan *scrotum*, menimbulkan kecacatan seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Penyakit ini ditularkan oleh berbagai

jenisnyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita, beban keluargadan menimbulkan kerugian ekonomi baginegara yang tidak sedikit. Pada tahun 2004, filariasis telah menginfeksi 120 juta penduduk di 83 negara di seluruh dunia, terutama negara-negara di daerah tropis dan beberapa daerah subtropis (Depkes RI, 2009:25). Secara tipikal penyakit ini menyerang segmen masyarakat tertentu. Menurut Santoso (2014), terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara karakteristik responden, jenis dan kondisi penampungan air limbah, kondisi saluran air limbah, keberadaan ternak sedang dan besar, dan klasifikasi daerah dengan kejadian filariasis. Sementara itu studi Nurpila (2016) menunjukkan bahwa infeksi filariasis terjadi pada penderita yang memiliki karakteristik umur >40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai petani, berpendidikan tamat SD, memiliki pengetahuan yang rendah tentang filariasis dan tidak mendapat dukungan dari TPE.

Jumlah provinsi di Indonesia yang melaporkan kasus filariasis terus bertambah setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2000 tercatat 6.233 kasus filariasis dan meningkat hingga tahun 2009 tercatat 11.914 kasus filariasis. Tiga provinsi dengan jumlah kasus terbanyak filariasis adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (2.359 orang), Nusa Tenggara Timur (NTT) (1.730 orang), dan Papua (1.158 orang). Kejadian Filariasis di NAD sangat menonjol (Lusi, Utami, & Nauli, 2015). Secara empirik terdapat banyak faktor yang menyebabkan kejadian filariasis antara lain: konstruksi plafon rumah, barang-barang bergantung, keberadaan kawat kassa, jenis kelamin, dan kebiasaan keluar malam. Keempat faktor risiko tersebut dilengkapi dengan keberadaan kelambu (Juriastuti, 2010). Faktor buruknya lingkungan dan perilaku masyarakat sebagai penyebab filariasis juga ditemukan dalam berbagai studi seperti: Ardias, Setiani, & Hanani (2012), Windiastuti, Suhartono, & Nurjazuli (2013), dan Wulandari & Pawenang (2017).



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

3.5.5 HIV dan AIDS

Penyakit HIV-AIDS merupakan penyakit menular yang keberadaanya semakin meningkat di Provinsi Lampung. Penyakit HIV dan AIDS serta penyakit menular seksual lain seperti syphilis sebagian besar berada di Bandar Lampung (lihat Tabel 9). Dari aspek gender, penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Penyakit ini lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan serta pemakaian jarum suntik secara bergantian. Hal ini

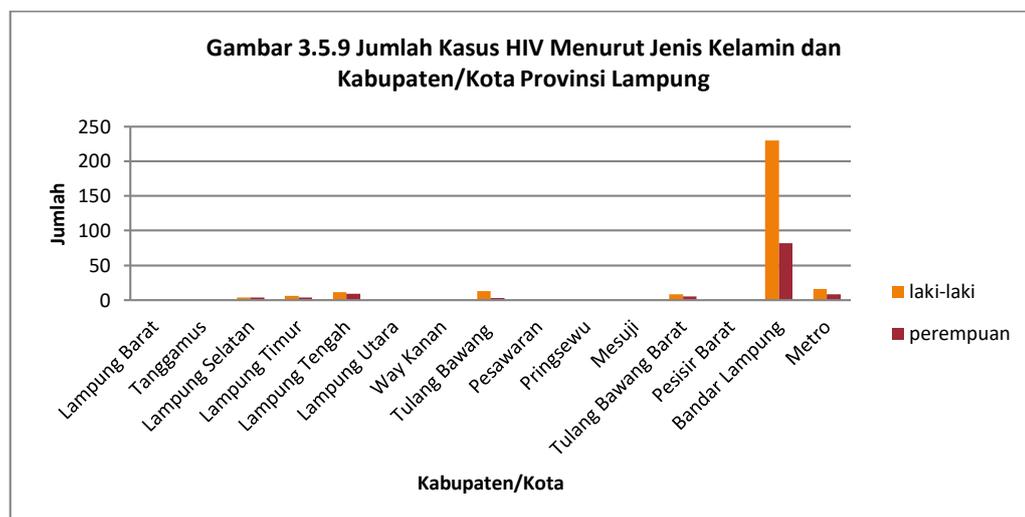
mencerminkan perilaku beresiko terutama dalam hal berhubungan seksual dan penggunaan narkoba lebih banyak dilakukan laki-laki dibandingkan perempuan. Meskipun demikian perempuan lebih rentan tertular penyakit ini meskipun tidak melakukan kebiasaan atau perilaku hidup beresiko.

Secara biologis, perempuan lebih mudah tertular HIV-AIDS dibandingkan laki-laki karena alat kelamin perempuan akan mudah terluka pada waktu melakukan senggama. Kecenderungan laki-laki mempunyai banyak pasangan seks, sementara laki-laki tersebut mengidap HIV-AIDS, menyebabkan makin banyak perempuan yang tertular penyakit tersebut. Secara sosiologis, posisi subordinat perempuan dalam budaya patriarki, menyebabkan ketidakberdayaan perempuan dalam mengontrol perilaku seksual pasangannya yang berisiko tinggi. Kaum perempuan dengan demikian tidak mempunyai daya untuk melindungi diri dari bahaya penularan HIV-AIDS serta Penyakit Menular Seksual (PMS) lain. Meskipun tidak selalu konsisten, ketergantungan ekonomi perempuan sering pula mengakibatkan perempuan tidak mempunyai mekanisme pertahanan diri dari bahaya penyakit tersebut.

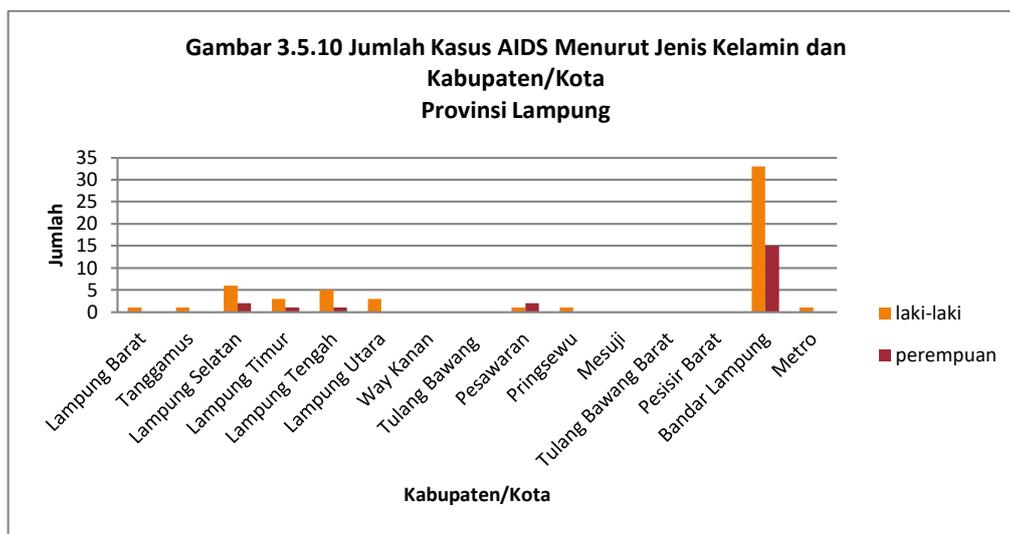
Ketidakberdayaan perempuan adalah sebagai akibat dari konstruksi sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang subordinat, memberi nilai yang kurang berarti bagi apa yang dikerjakannya. Di bidang reproduksi ketidakberdayaan ini terlihat dari hubungan yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hal seksual dan reproduksi, seperti tercermin dalam kasus pemaksaan berhubungan kelamin, pemerkosaan, istri/perempuan yang berisiko tinggi karena HIV-AIDS dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan seksual, sebagai akibat dari perilaku seksual berisiko tinggi dari pasangannya. Kasus-kasus sebagai akibat dari perilaku seksual, hampir sepenuhnya dibebankan pada perempuan/istri (Rahardjo, 1995).

Perubahan sosial yang pesat yang terjadi pada hampir semua masyarakat akhir-akhir ini secara teoritik menimbulkan berbagai akibat di kalangan masyarakat, diantaranya adalah reaksi resistensi terhadap perubahan itu sendiri yang diwujudkan dalam berbagai perilaku destruktif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Menurut Mohammad (1998), sikap penolakan terhadap perubahan tersebut juga dapat melalui ekspresi seksual, walaupun tidak disadari bahwa tindakan tersebut memberikan dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Mereka, misalnya memperkosa perempuan atau melibatkan diri dalam kegiatan seksual yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakatnya. Hal ini akhirnya akan mendekatkan mereka kepada resiko terkena Penyakit Menular Seksual, termasuk HIV-AIDS.

Sikap masyarakat yang cenderung diskriminatif terhadap penderita HIV-AIDS merupakan faktor lain yang memberikan kontribusi bagi peningkatan epidemi penyakit ini. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penderita HIV-AIDS harus dikucilkan karena dianggap akan membawa wabah. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa penderita HIV-AIDS telah melanggar norma-norma sosial yang disepakati bersama. Akibatnya penderita HIV-AIDS semakin menutup diri termasuk untuk memeriksakan kesehatannya. Perawatan dan pengobatan yang semestinya segera didapatkan menjadi sudah sangat terlambat untuk diperoleh.



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016



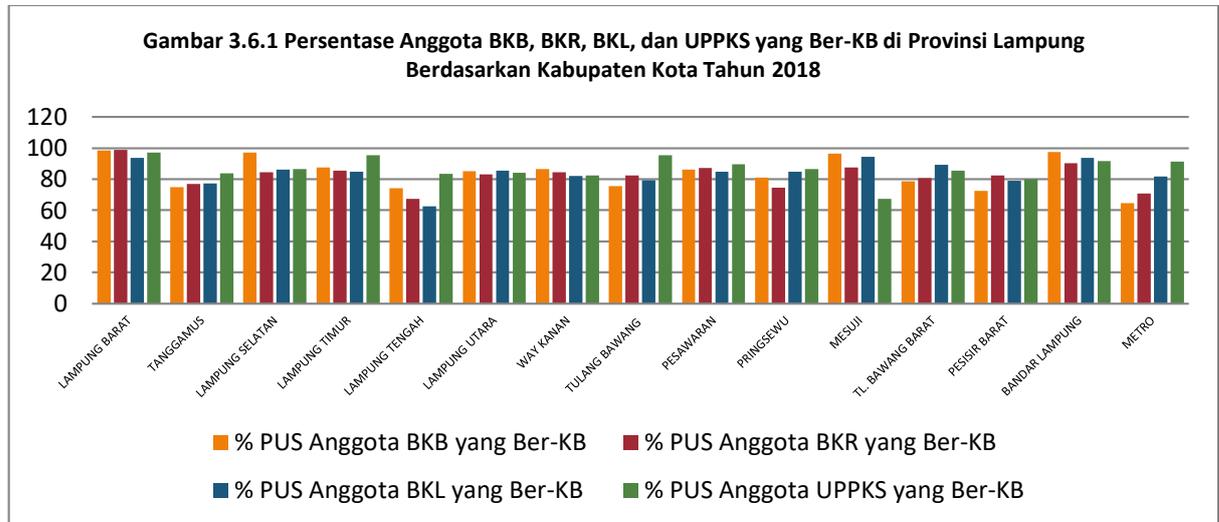
Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

3.5 Partisipasi KB

Partisipasi KB menjadi cerminan dalam pengambilan kebijakan terutama mengenai angka pengendalian penduduk di Provinsi Lampung. Angka partisipasi KB menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengelola jarak kelahiran dan jumlah kelahiran dalam waktu tertentu. Angka partisipasi KB di Provinsi Lampung dibagi menjadi empat jenis yaitu berdasarkan keanggotaan pada BKB dan sejenisnya, kepersertaan berdasarkan jenis kelamin, kepersertaan berdasarkan jenis kontrasepsi, dan yang terakhir adalah jumlah peserta KB aktif di Provinsi Lampung.

Secara umum, 5 jenis kontrasepsi yang paling populer di Provinsi Lampung adalah Implan, MOW, MOP, AKDR, PIL, SUNTIK dan Kondom. Kabupaten Kota yang memiliki kepersertaan aktif terbanyak di Provinsi Lampung adalah Bandarlampung dan yang terendah adalah Pesawaran. Dan jenis kontrasepsi paling populer adalah jenis KB Suntik. Untuk

kepesertaan KB aktif Provinsi Lampung kabupaten yang paling tinggi adalah Metro sedangkan yang terendah adalah Pesawaran.



Sumber: Data BKKBN Prov. Lampung, 2018

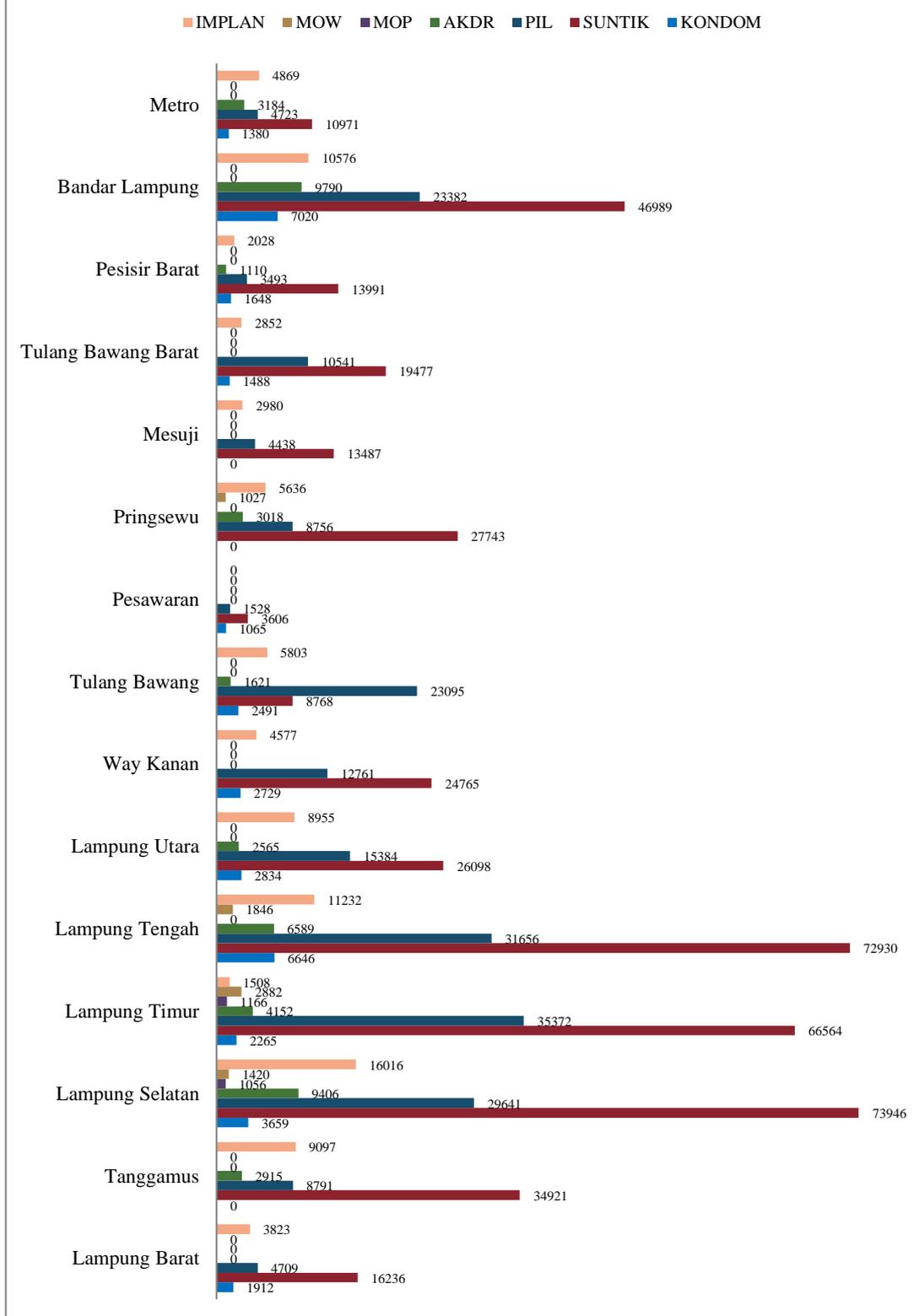


Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Untuk peserta KB di Provinsi Lampung dengan peserta dengan jumlah tiga tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Bandarlampung. Sedangkan jumlah terendah adalah Kota Metro. Presentase tersebut didasarkan pada jumlah

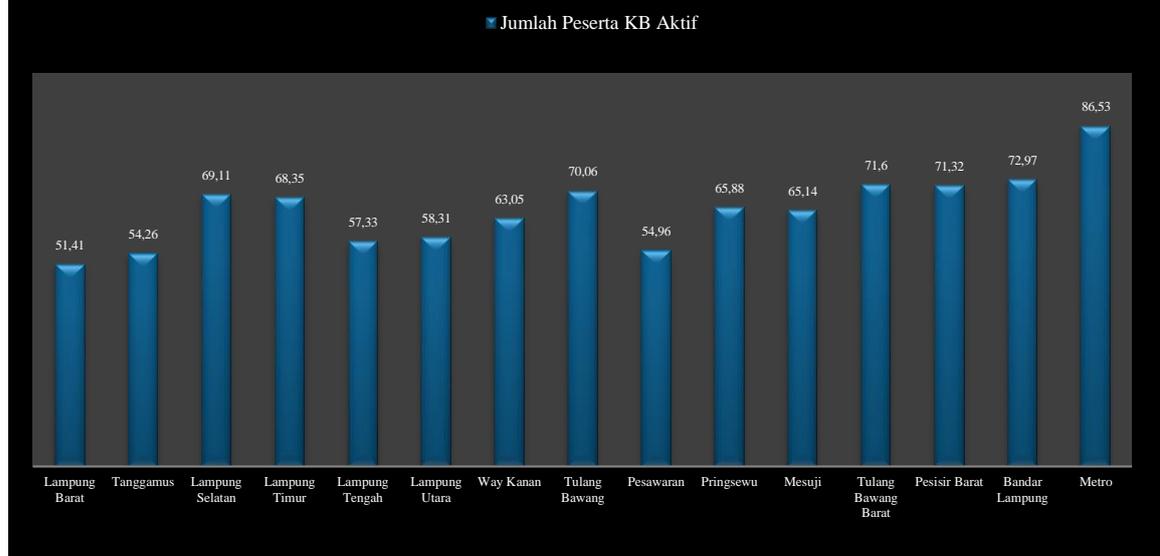
pengguna KB dan angka tertinggi dan terendah yang ada tidak mempengaruhi kualitas pelayanan dan penggunaan. Jumlah ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di lokasi wilayah tersebut.

Gambar 3.6.3 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Gambar 3.6.4 Peserta KB Aktif di i Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2018



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Lampung menunjukkan tujuh alat kontrasepsi paling populer yang digunakan oleh masyarakat. Namun jumlah terbanyak jenis alat kontrasepsi yang digunakan adalah Suntik (460.942), diikuti dengan kontrasepsi pil (218.270). Sedangkan untuk jumlah peserta KB terbanyak adalah Kota Metro (86,53%) dan yang terendah adalah Lampung Barat (51,41%).

4. PARTISIPASI SEKOLAH DAN PENDIDIKAN

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu agenda nasional yang menjadi tujuan utama arah pembangunan secara komprehensif. Hal tersebut menjadikan bidang pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan jangka panjang dan agenda segala aspek kehidupan. Hal ini terimplementasi sebagai undang-undang dasar dan dijabarkan pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Meskipun bidang pendidikan telah menjadi agenda nasional, namun kenyataannya pada bidang pendidikan masih terdapat kesenjangan kesenjangan gender, termasuk di dalamnya yaitu bidang pendidikan. Sehingga diperlukannya banyak pihak untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Upaya dalam mengurangi atau menghapus kesenjangan gender tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membuka atau memperluas kesempatan di bidang pendidikan, melainkan dengan meningkatkan sumber daya manusia baik dari siswa maupun guru dan fasilitas pendidikan perlu dilengkapi agar dapat menjamin ketersediaan kesempatan belajar yang semakin merata dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun kebijakan pemerintah di bidang pendidikan bersifat netral gender, pada kenyataannya perbedaan gender masih menjadi permasalahan di masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Indikator-indikator mengenai arah kecenderungan ini dapat

dilihat dari analisis data kuantitatif (dalam Tabel dan Gambar) yang didukung data kualitatif. Tiga aspek penting yang dianalisis adalah: (a) akses dan partisipasi pendidikan, (b) mutu dan relevansi pendidikan, (c) manajemen pendidikan. Termasuk dalam analisis tersebut juga penting disajikan data dan analisis pengelolaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan.

Sebagaimana yang telah terjadi di berbagai bidang pendidikan di Indonesia kesenjangan gender masih banyak hal ini secara umum disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial kultural. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2006: 127) faktor penghambat kesetaraan gender antara lain berkaitan dengan:

1. Sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga (beban kerja domestik)
2. Pendidikan belum memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua (motivasi rendah)
3. Masih terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan SLTP, SLTA, PT dengan mutu baik dan biaya murah.
4. Proses pembelajaran, bahan ajar, ilustrasi yang masih bias gender.
5. Ekonomi keluarga yang kurang menentukan.

Persoalan ekonomi didukung oleh kondisi sosial budaya dapat menjadi faktor penghambat upaya mengurangi persoalan gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Upaya mengurangi persoalan gender memerlukan waktu, kearifan, kesabaran dan ketekunan dari berbagai pihak dalam mengupayakan perubahan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan diperlukan data profil gender di bidang pendidikan (database) sebagai panduan dalam membuat program dan kegiatan mengurangi atau menghapus kesenjangan gender di bidang pendidikan.

4.1. Angka Partisipasi sekolah

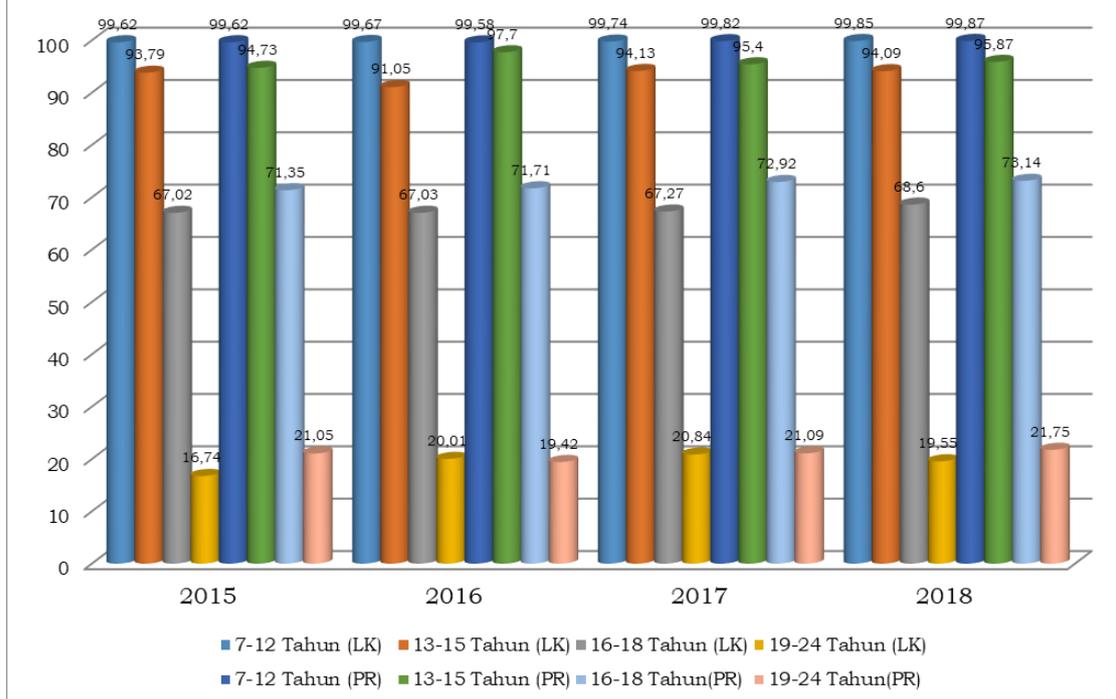
4.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal turut diperhitungkan, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung cenderung meningkat pada semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Bahkan terdapat kecenderungan APS perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki pada kurun waktu tahun 2015-2018.

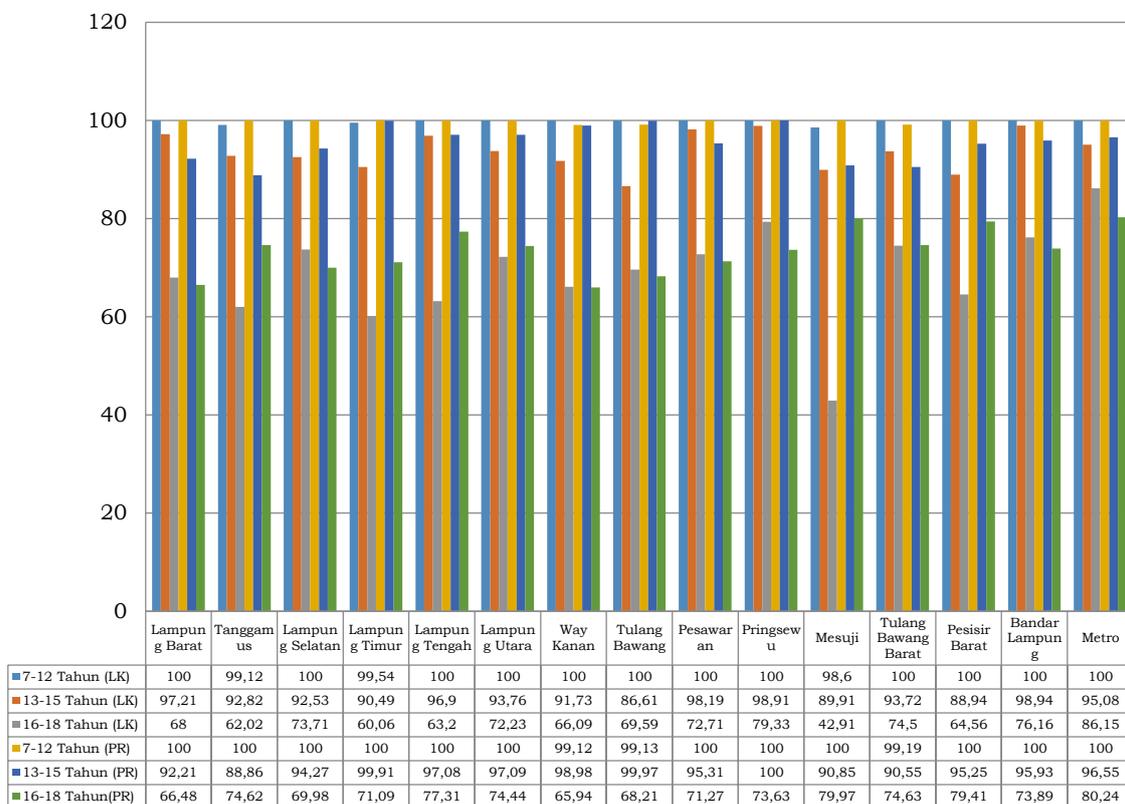
Data pada Gambar 4.1.1.a menyajikan data pendidikan APS di Provinsi Lampung dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018) pada kelompok umur 7-12 Tahun atau setingkat dengan sekolah dasar, 13-15 tahun atau setingkat dengan sekolah menengah pertama, 16-18 tahun atau setingkat dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan dan pada kelompok usia 19-24 tahun atau pendidikan tinggi. Pada gambar yang disajikan trend data menunjukkan bahwa APS di wilayah Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir (2015-2018) cukup stabil.

Gambar 4.1.1.a
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia
Provinsi Lampung Tahun 2015-2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019

Gambar 4.1.1.b
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia
Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan data BPS tahun 2018, dapat dilihat bahwa APS anak 7-12 tahun di Provinsi Lampung tercatat sebesar 99,14 persen (Gambar 4.1.1.b). Artinya, dari 100 anak usia 7-12 tahun, ada sekitar 99 anak yang masih bersekolah. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun tercatat sebesar 95,08 persen dan APS anak usia 16-17 tahun sebesar 80,26 persen. Semakin tinggi kelompok usia, semakin rendah persentase anak yang bersekolah. Kondisi ini terjadi baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Secara umum APS anak perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APS anak laki-laki untuk semua kelompok usia. Fenomenanya sama bahwa penduduk yang melanjutkan keperguruan tinggi masih sedikit dan ada kecenderungan perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan gambar 4.1.1.b terlihat APS untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 terdapat perbedaan antara APS anak yang tinggal di perkotaan dengan perdesaan. APS perkotaan lebih tinggi daripada APS perdesaan. APS anak usia 7-18 tahun di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yaitu sebesar 99,51 persen berbanding 98,76 persen. Hal ini juga terjadi pada setiap kelompok usia. Kondisi ini menggambarkan penduduk di perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dibanding di perdesaan. Hal ini diduga karena lebih banyak jumlah sekolah di daerah perkotaan dan akses transportasi yang lebih mudah. Secara umum, di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, semakin tinggi kelompok usia maka semakin rendah persentase anak yang bersekolah di wilayah tersebut. Menurut jenis kelamin, secara umum APS anak perempuan lebih tinggi dibanding dengan anak laki-laki untuk masing-masing kelompok usia.

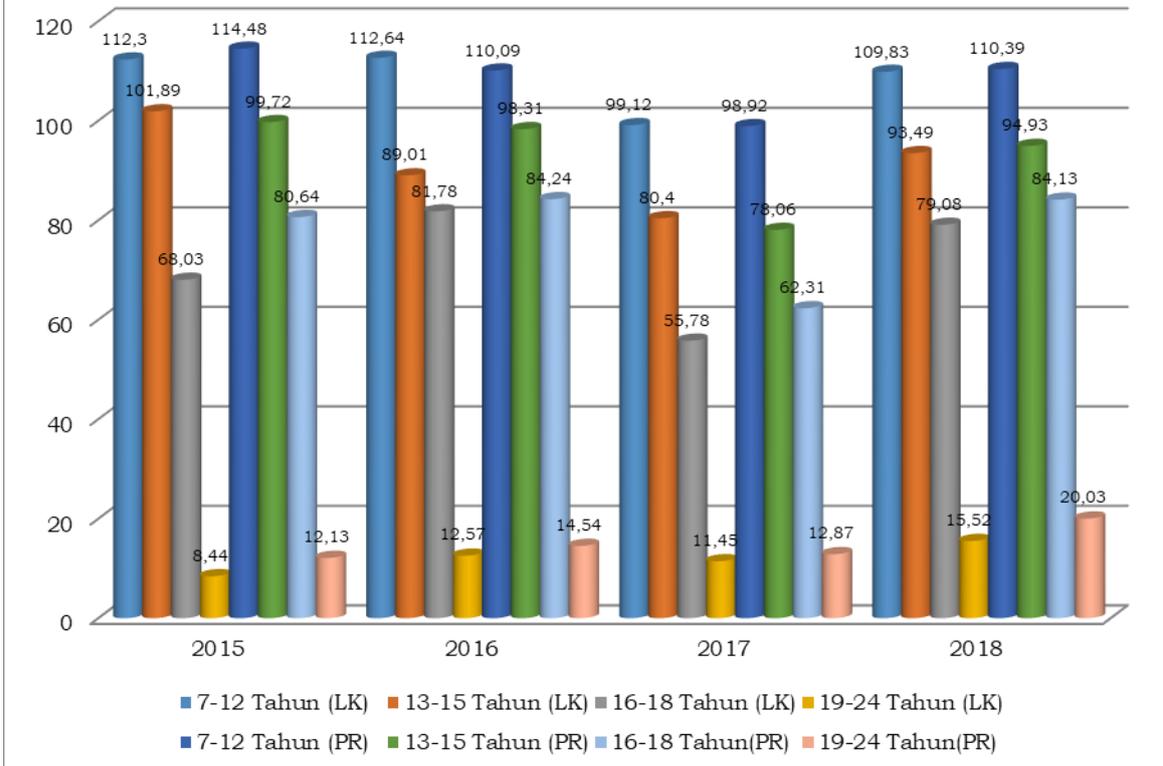
4.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan hasil pembagian angka persen antara jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang sekolah yang sama. Misalnya, APM SMA adalah angka persen yang dihasilkan dari pembagian antara jumlah siswa SMA usia 15-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-18 tahun. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Merupakan gejala umum bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan penduduk maka APM semakin menurun. Akan tetapi, data pada Gambar 16 menunjukkan gejala bahwa APM perempuan sedikit lebih tinggi daripada APM laki-laki, suatu perbedaan yang tidak berarti. Artinya, terdapat kesamaan akses dan pemerataan pendidikan menurut jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan di provinsi Lampung untuk dapat bersekolah pada semua jenjang pendidikan. Bahkan APM perempuan cenderung naik selama empat tahun terakhir (2015-2018).

Gambar 4.1.2. merupakan grafik data APM pendidikan di Provinsi Lampung. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa pada pendidikan tingkat SMA jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 semakin meningkat hingga tahun 2018, APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2018. Pada tingkat SMP jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 sampai 2018 semakin menurun dan APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2015. Pada tingkat SD atau kelompok usia penduduk 7-12 tahun jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 sampai 2018 semakin menurun dan APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2018.

Gambar 4.1.2.
 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia
 Provinsi Lampung
 Tahun 2015- 2018



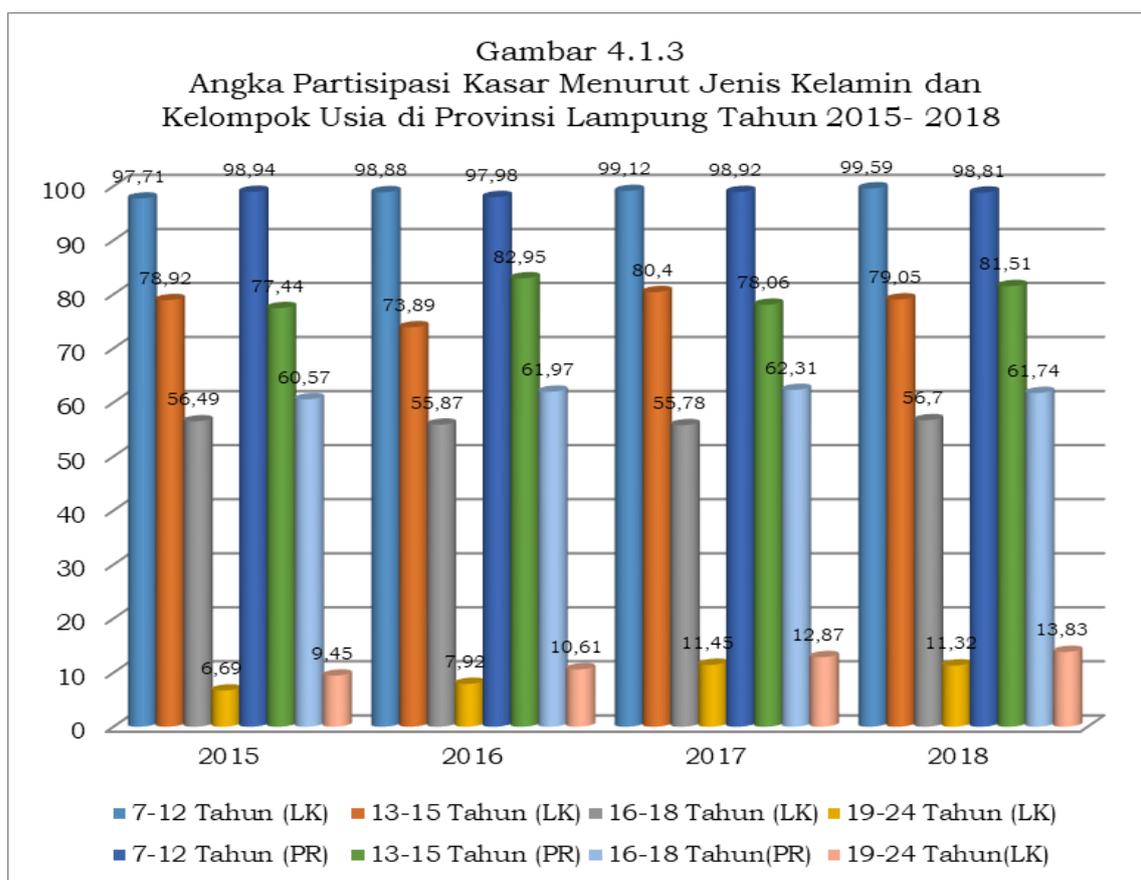
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019

4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data APK pendidikan pada tahun 2015- 2018 pada jenjang Perguruan Tinggi (19-24 Tahun) datanya selalu mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun meskipun secara agregat angkanya merupakan yang paling rendah baik laki-laki maupun perempuan, selanjutnya berdasarkan data APK pendidikan pada kelompok umur 13-15 atau jenjang SMP dari tahun ke tahun nilainya relatif stabil, dan pada kelompok umur 7-12 atau setara jenjang SD pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan. Berdasarkan data APK pada tahun 2018 semua kelompok umur 13-15 (semua jenjang pendidikan) mengalami penurunan yakni pada kelompok umur 16-18 sebesar 59 dari 60, kemudian pada kelompok umur 13-15 juga mengalami penurunan menjadi 60. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, berupa penambahan fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019

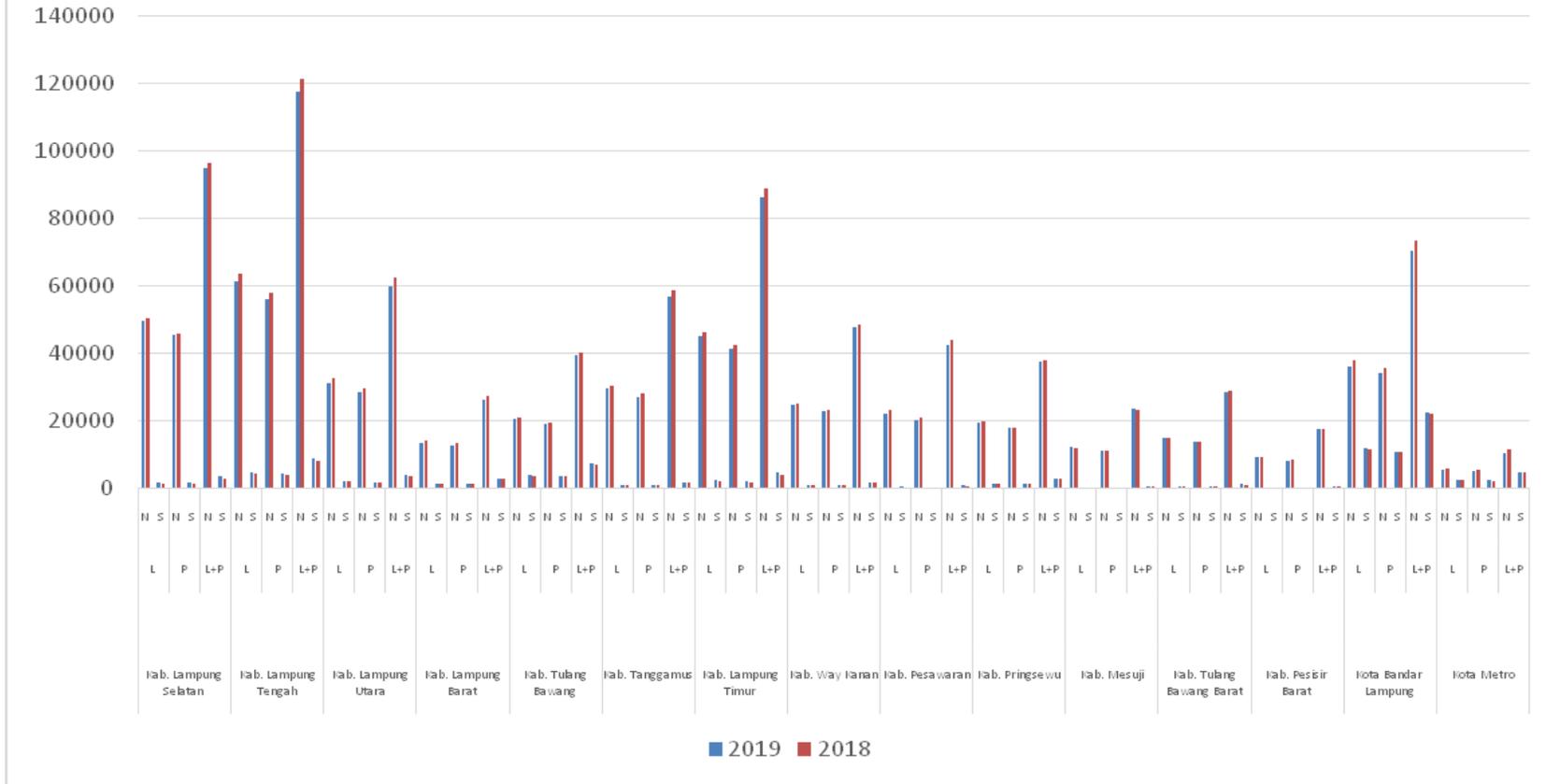
4.2. Jumlah Siswa

Untuk lebih mengenal dunia pendidikan di wilayah Lampung, berikut ini adalah data jumlah siswa di Provinsi Lampung menurut jenjang pendidikan pada Tahun Ajaran (TA) 2018/2019. Jumlah peserta didik secara keseluruhan dari semua jenjang pendidikan adalah 1.440.978 (siswa laki-laki 740.916 dan siswa perempuan 700.062).

4.2.1 Jumlah Siswa SD

Pada Gambar 4.2.1 menunjukkan jumlah siswa menurut jenis kelamin di tiap Kabupaten/Kota di tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah siswa menurut jenis kelamin di tahun 2018 terdapat 168542 siswa. Di tahun 2019 terdapat 165086 jumlah siswa menurut jenis kelamin yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta. Sedangkan jumlah disparitas ditahun 2019 adalah 1,09 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jumlah disparitas di tahun 2018 adalah 0,92 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Gambar 4.2.1 Jumlah Siswa SD Tahun 2018 dan 2019 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

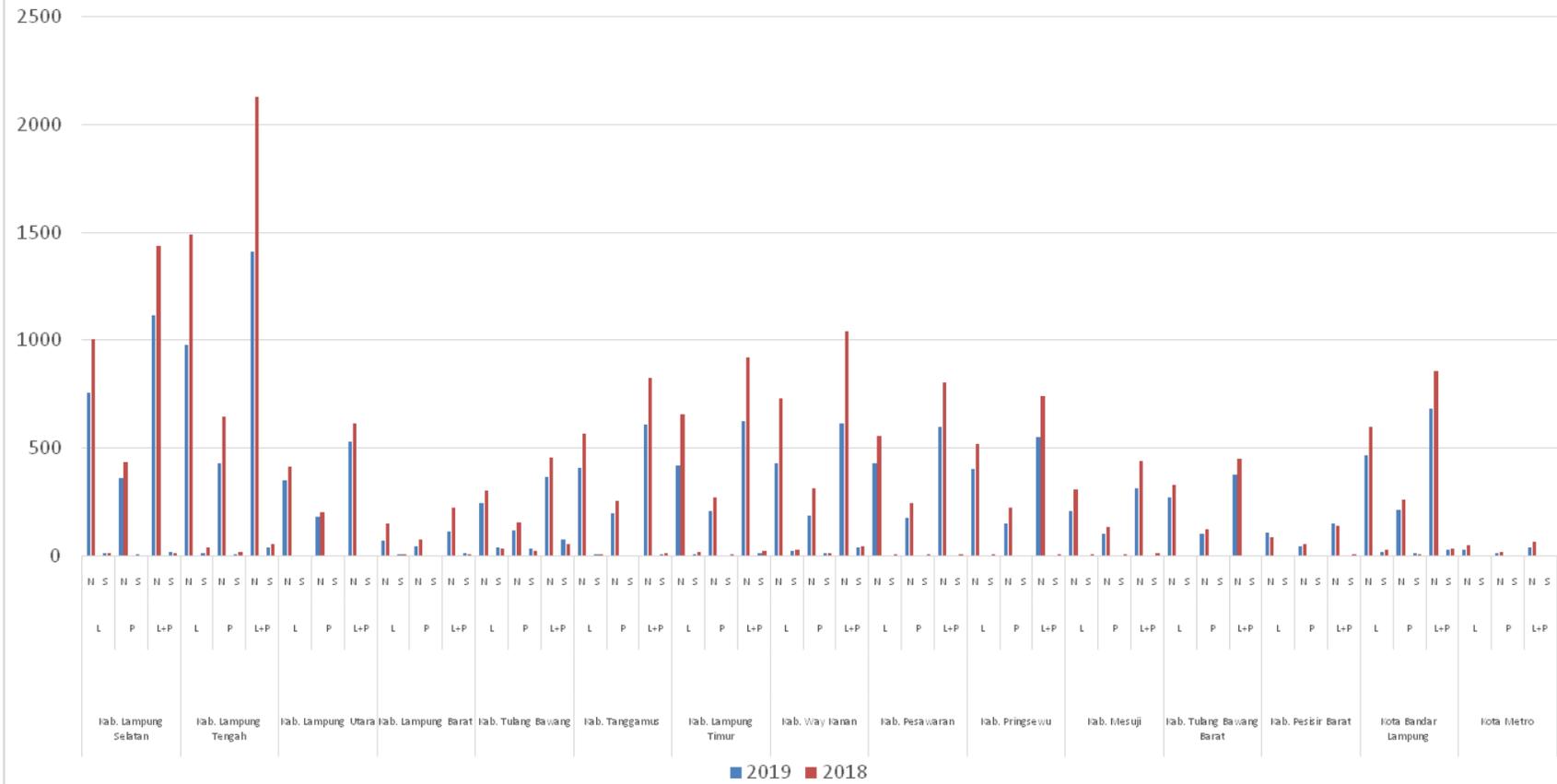


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.2. Jumlah Siswa SD Mengulang

Berdasarkan Gambar 4.2.2. menunjukkan bahwa jumlah siswa SD yang mengulang berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah di tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2019. Jumlah siswa mengulang berdasarkan kelamin di sekolah SD negeri dan swasta di tahun 2018 terdapat 22814. Di tahun 2019 jumlah siswa SD mengulang berdasarkan jenis kelamin terdapat 16576 siswa yang mengulang di sekolah negeri dan swasta. Jumlah disparitasnya ditahun 2019 adalah 0,46 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Jumlah disparitas ditahun 2018 adalah 0,44 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Gambar 4.2.2 Data Jumlah Siswa SD Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

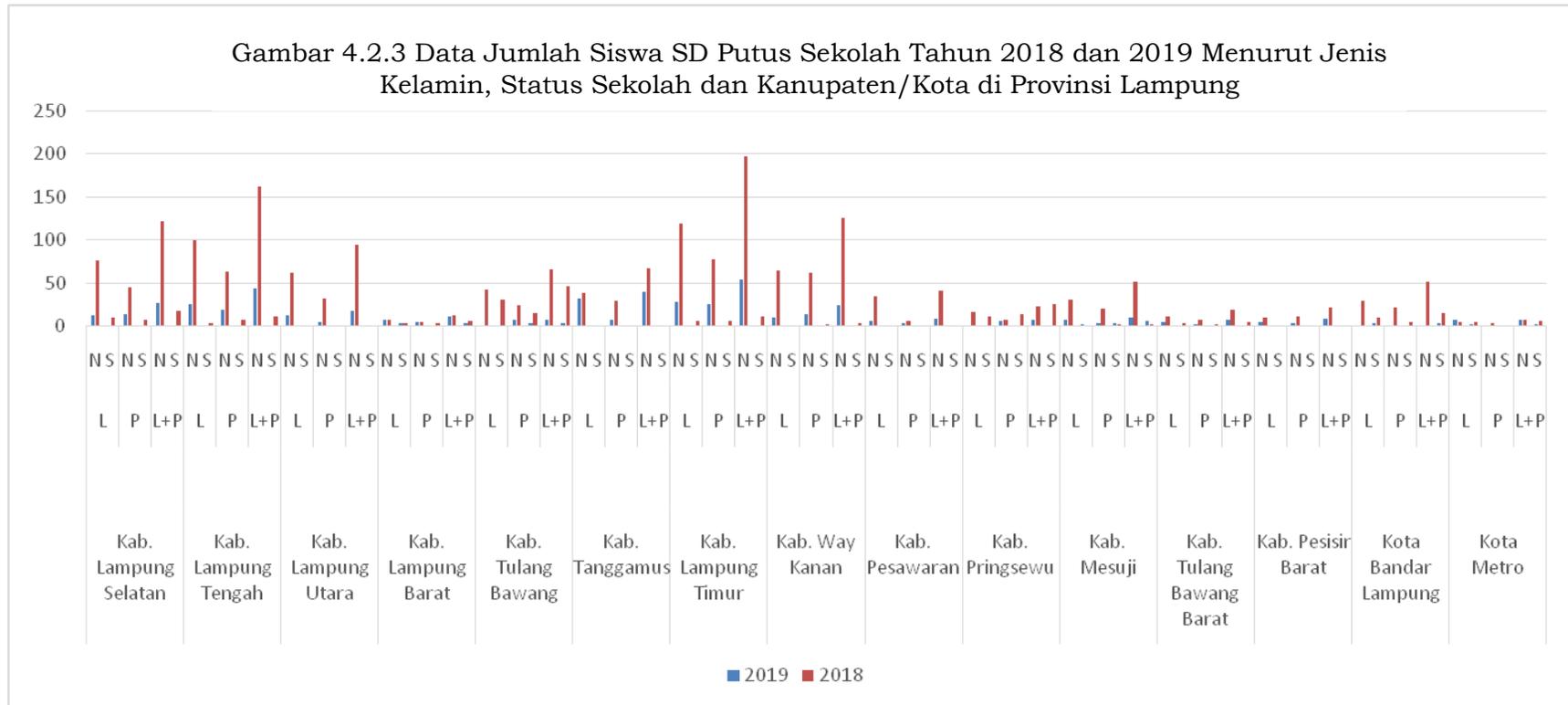


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.3 Jumlah Siswa SD Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 4.2.3 menunjukkan jumlah siswa SD yang putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah di tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat 2424 jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenis kelamin yang bersekolah di SD negeri dan swasta. Di tahun 2019 jumlah siswa SD yang putus sekolah terdapat 600 siswa disekolah negeri dan swasta. Jumlah disparitas tahun 2019 adalah 0,71 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas tahun 2018 adalah 0,44 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki.

Gambar 4.2.3 Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Tahun 2018 dan 2019 Menurut Jenis Kelamin, Status Sekolah dan Kanupaten/Kota di Provinsi Lampung

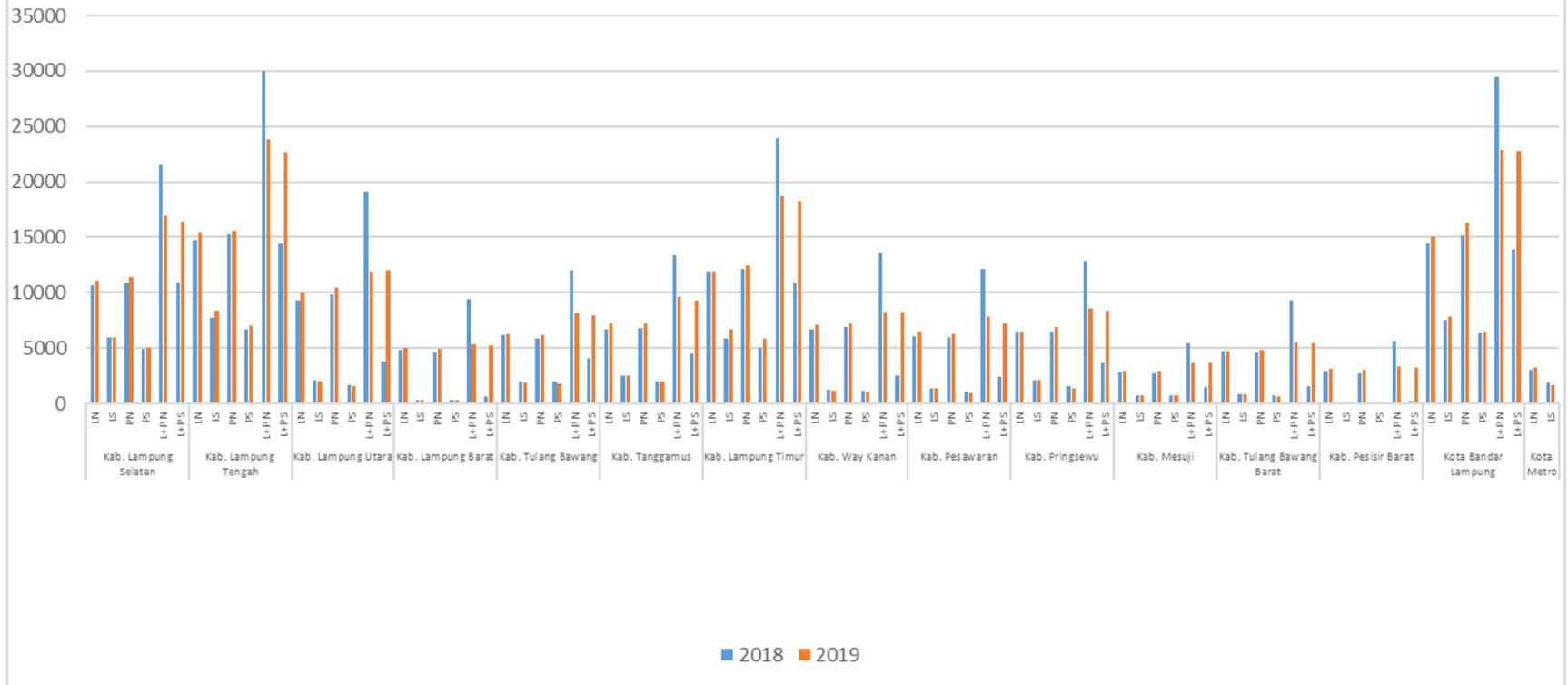


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.4 Jumlah Siswa SMP

Berdasarkan Gambar 4.2.4 menunjukkan Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta Berdasarkan Jenis Kelamin di tiap Kabupaten dan Kota pada tahun 2018 relatif tidak berbeda besar dibandingkan pada tahun 2019 dapat dilihat dari grafik di atas. Pada tahun 2019 jumlah disparitas sebesar 0,97 maka maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan dan laki-laki. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,97 lebih kecil dari 1 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan dan laki-laki.

Gambar 4.2.4 Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta Berdasarkan Jenis Kelamin di tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018

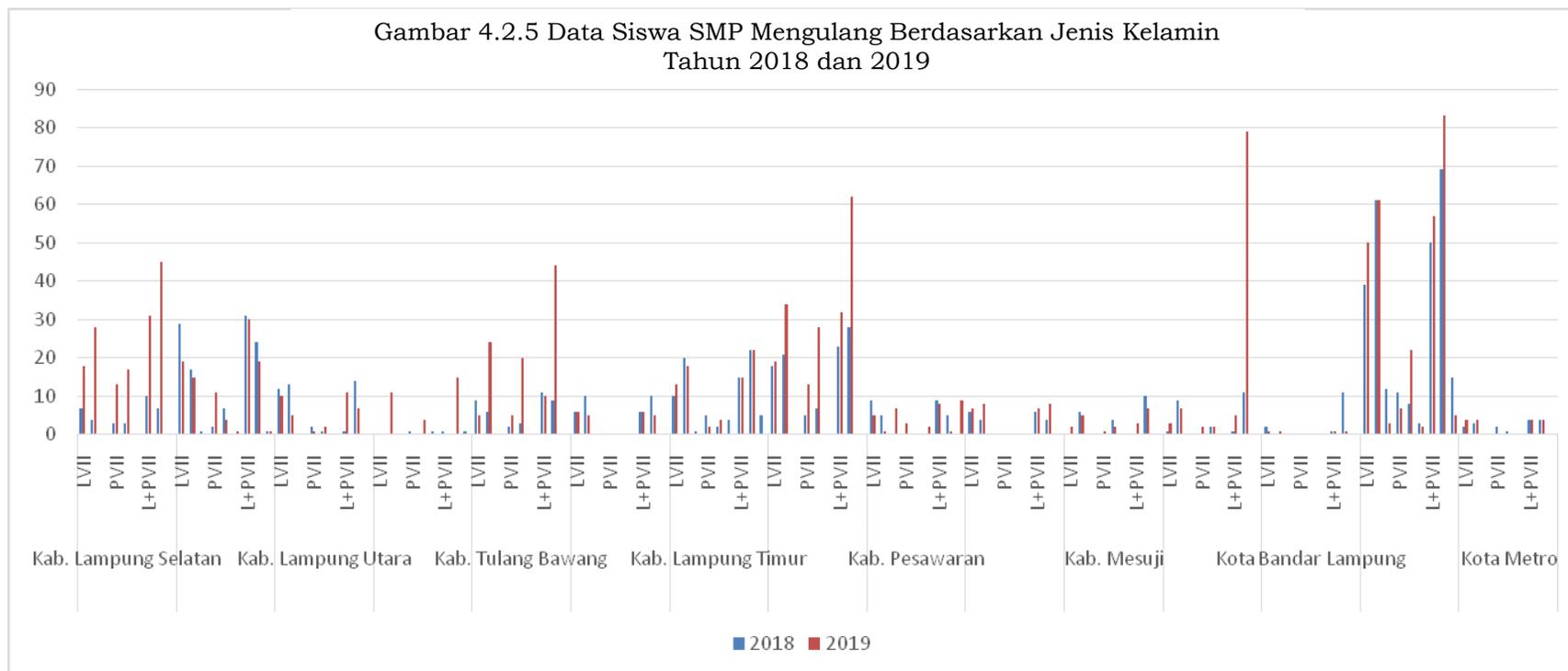


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.5. Jumlah Siswa SMP Mengulang

Berdasarkan Gambar 4.2.5 menunjukkan jumlah siswa yang mengulang menurut jenis kelamin di tiap kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2019 kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten yang siswa SMP mengulang paling banyak dan mengalami peningkatan drastis dari tahun 2018. Jumlah disparitas pada tahun 2019 sebesar 0,42 hal ini maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan dan laki-laki.

Gambar 4.2.5 Data Siswa SMP Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

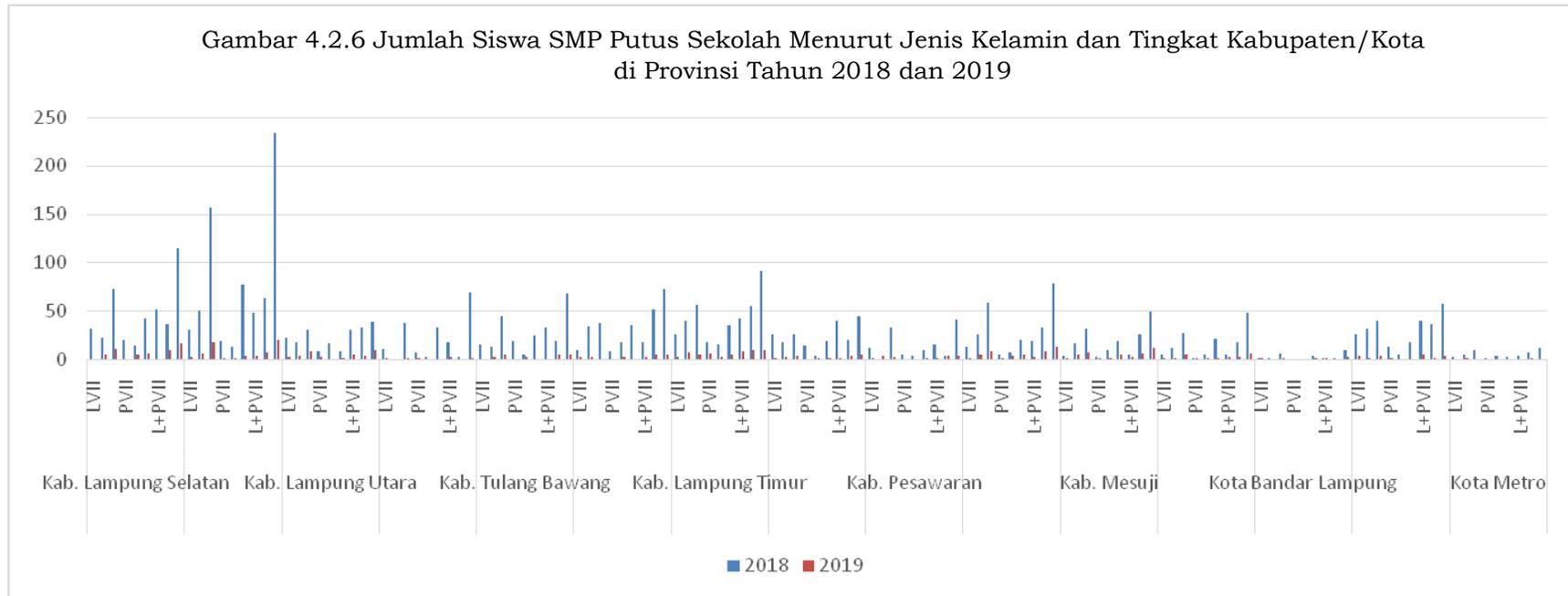


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.6 Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 4.2.6 Jumlah siswa putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di tiap Kabupaten Kota pada tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada sekolah Negeri dan Swasta. Sedangkan untuk jumlah disparitas pada tahun 2019 sebesar 0,44 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jumlah disparitas pada tahun 2018 adalah 0,53 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 4.2.6 Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2018 dan 2019

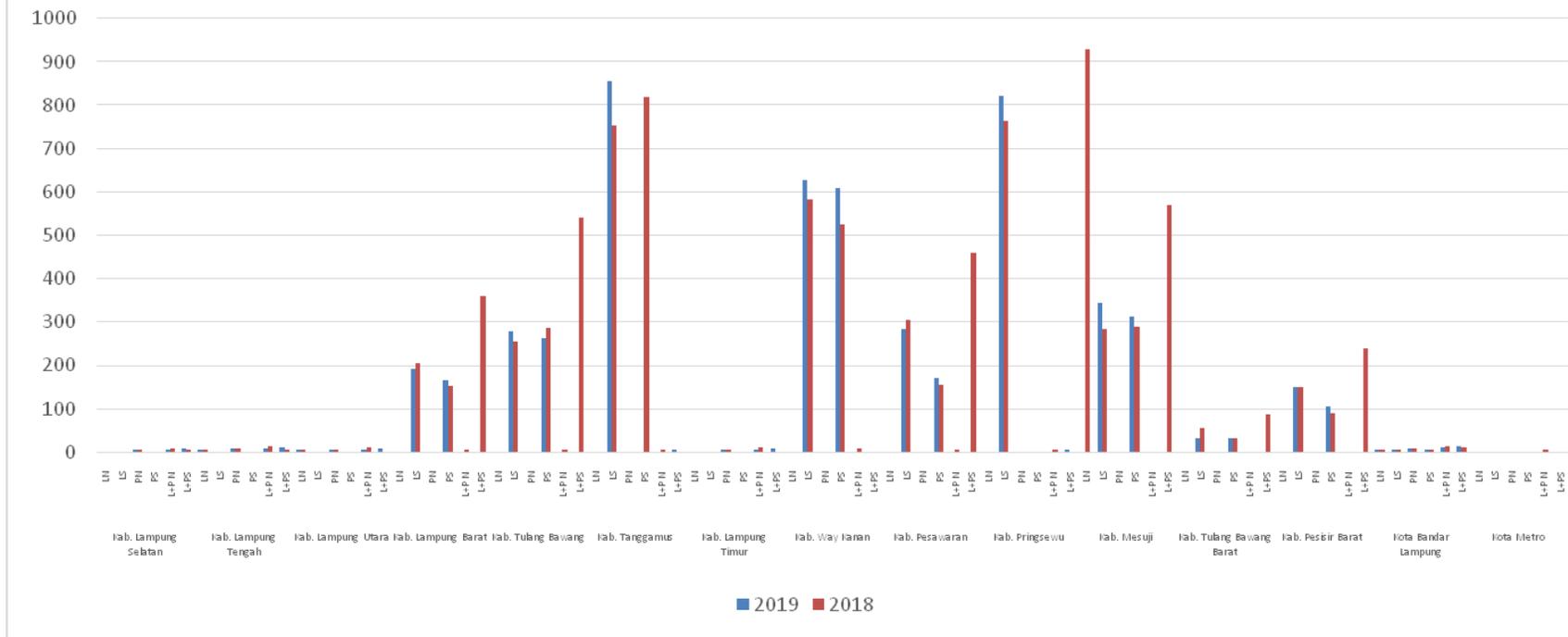


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.7 Jumlah Siswa SMA

Gambar 4.2.7 merupakan grafik jumlah siswa menurut jenis kelamin dan status sekolah SMA tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1.26, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 1.27, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Gambar 4.2.7 Jumlah Siswa SMA Menurut Jenis Kelamin, Status Sekolah, dan Kabupaten/Kota di Provinsi 2018-2019

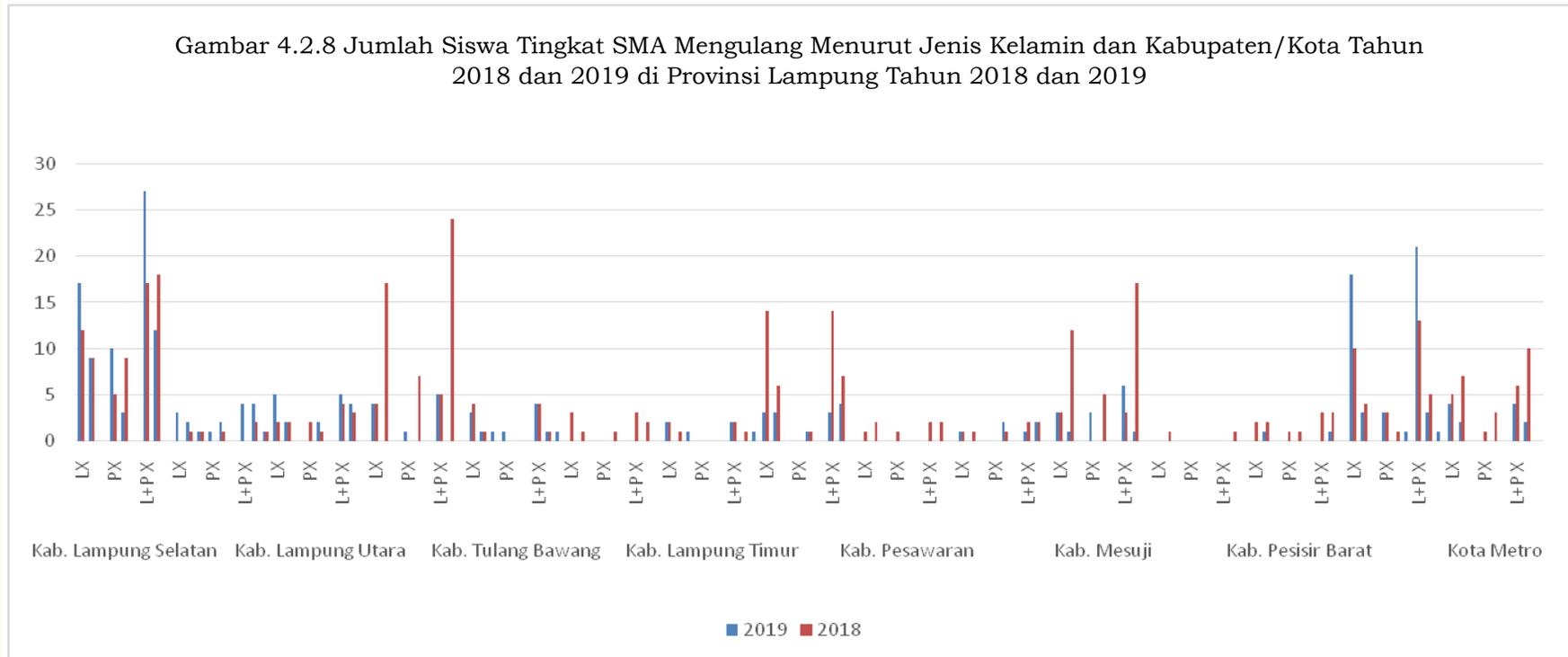


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.8 Jumlah Siswa SMA Mengulang

Gambar 4.2.8 merupakan grafik jumlah siswa mengulang menurut jenis kelamin dan tingkat SMA tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2019 lebih banyak dari pada tahun 2018. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 0.33, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.33, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Gambar 4.2.8 Jumlah Siswa Tingkat SMA Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

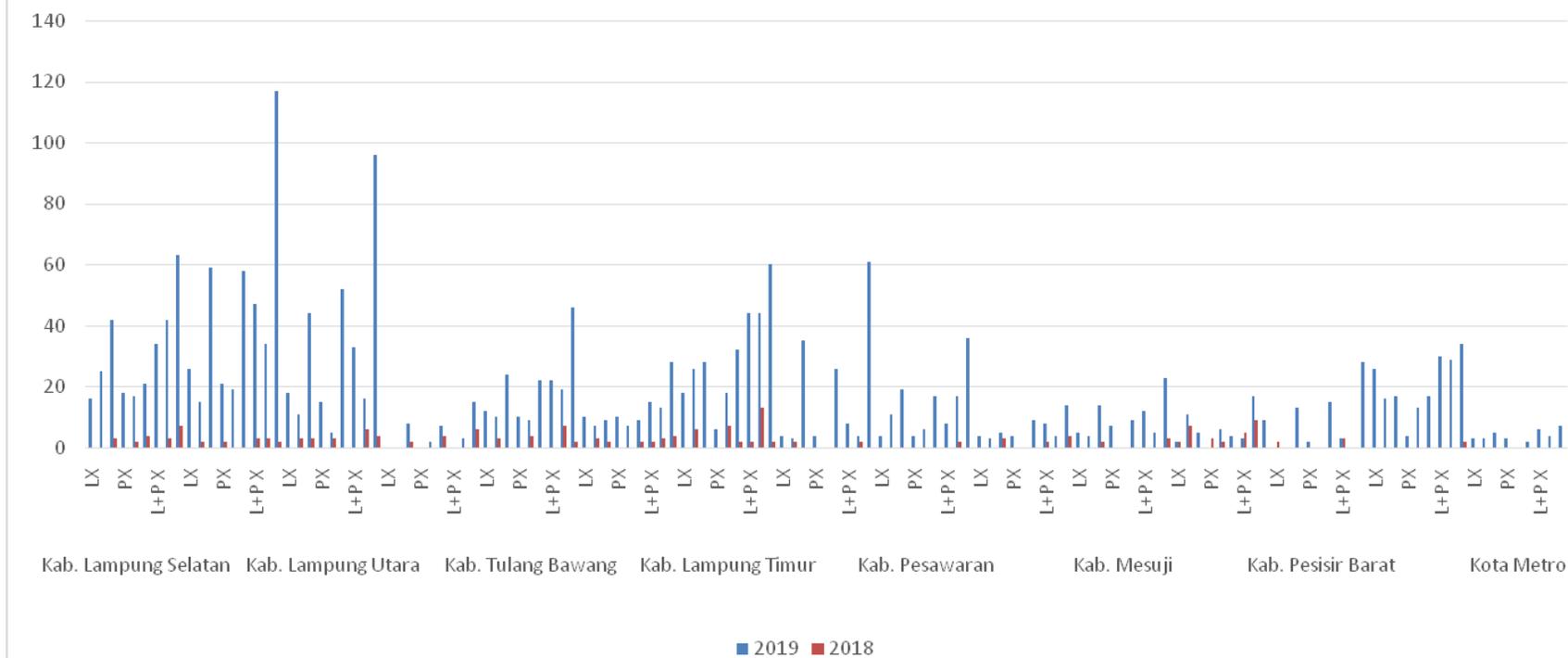


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.9 Jumlah Siswa SMA Putus Sekolah

Gambar 4.2.9 merupakan Grafik jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat SMA tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2019 lebih banyak dari pada tahun 2018. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 0.89, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.86, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Gambar 4.2.9 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat SMA Kelas X, XI, XII Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

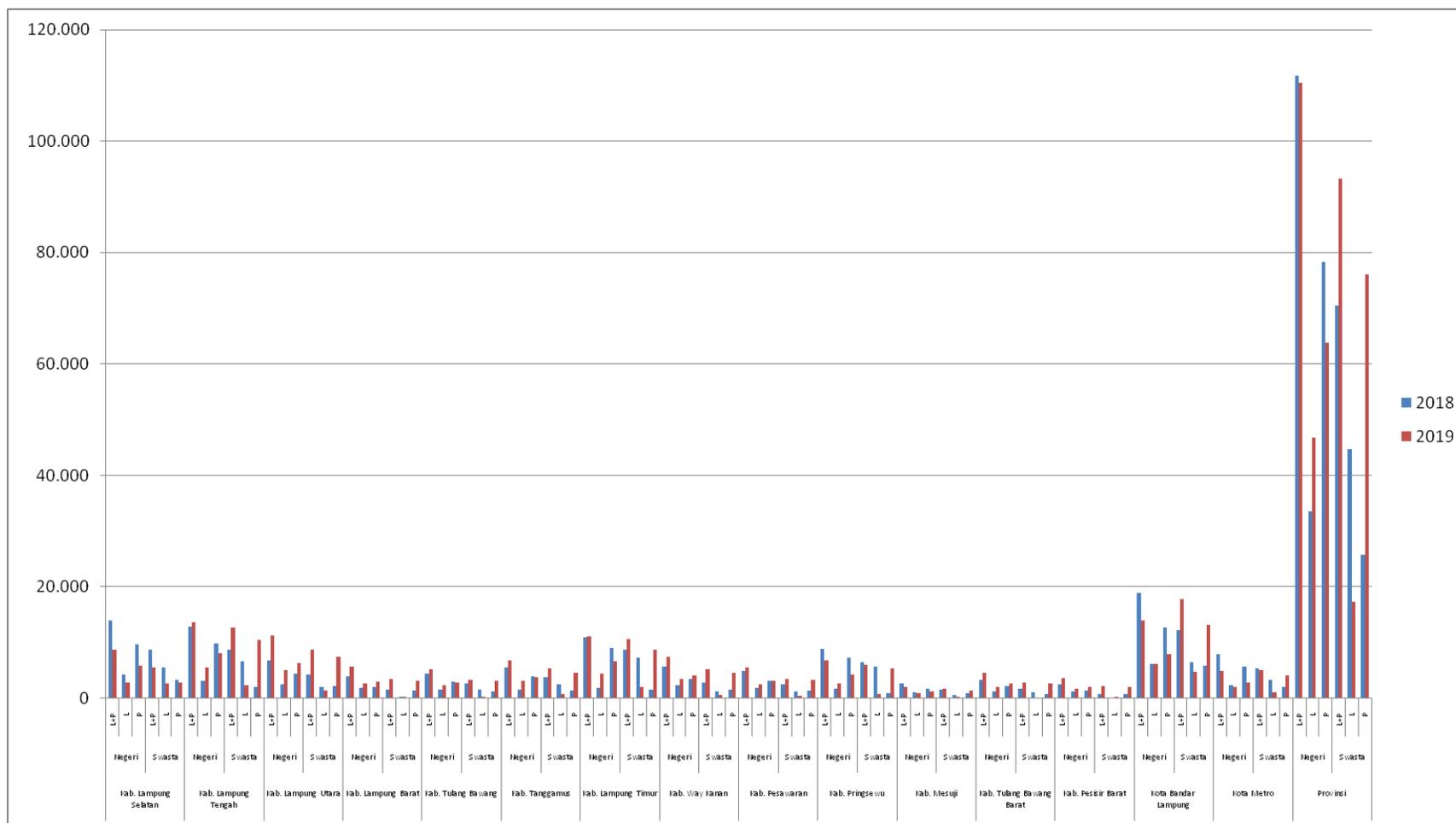


Sumber: Data Dina Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2019

4.2.10 Jumlah Siswa SMK

Jumlah siswa menurut jenis kelamin dan status sekolah berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung yang terlihat pada gambar menunjukkan bahwa jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Sekolah Negeri pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Sekolah Negeri tingkatannya terdapat 111.767 siswa. Sedangkan di tahun 2019 jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Sekolah Negeri tingkatannya terdapat 110.473 siswa.

Gambar 4.2.10 Siswa SMA dan SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

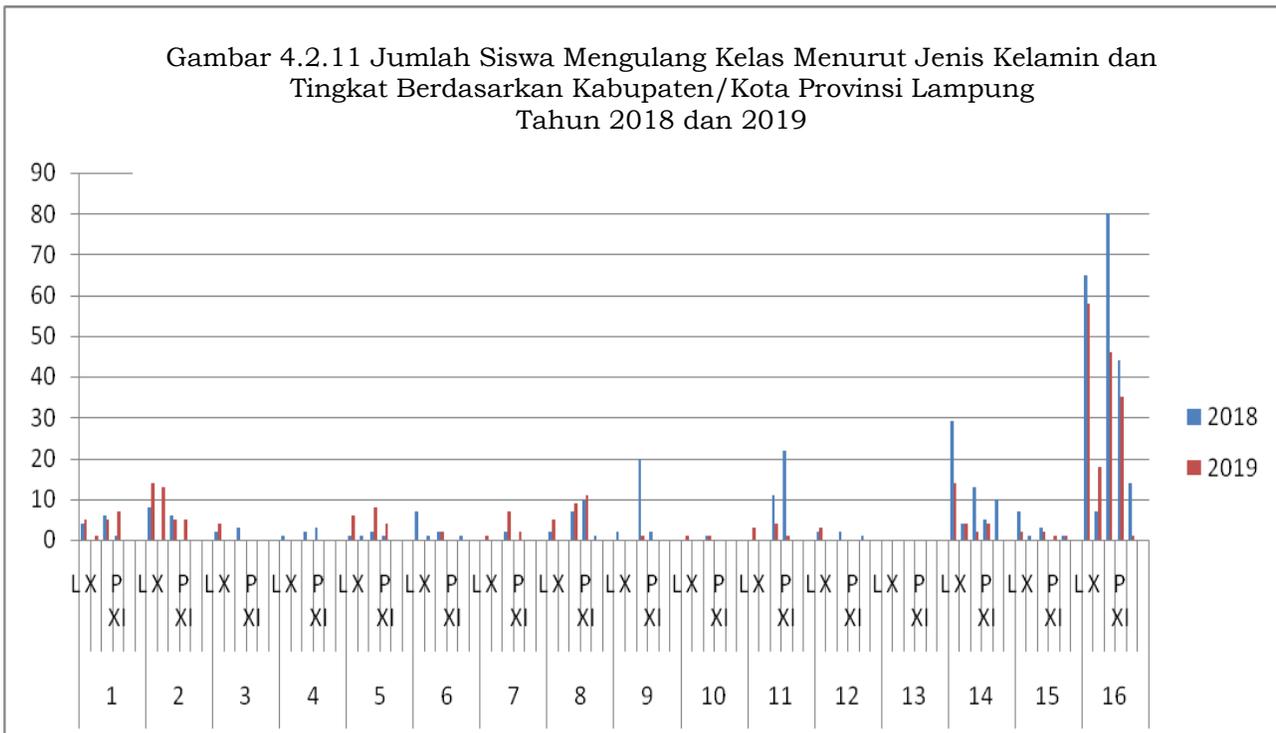


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.11 Jumlah Siswa SMK Mengulang

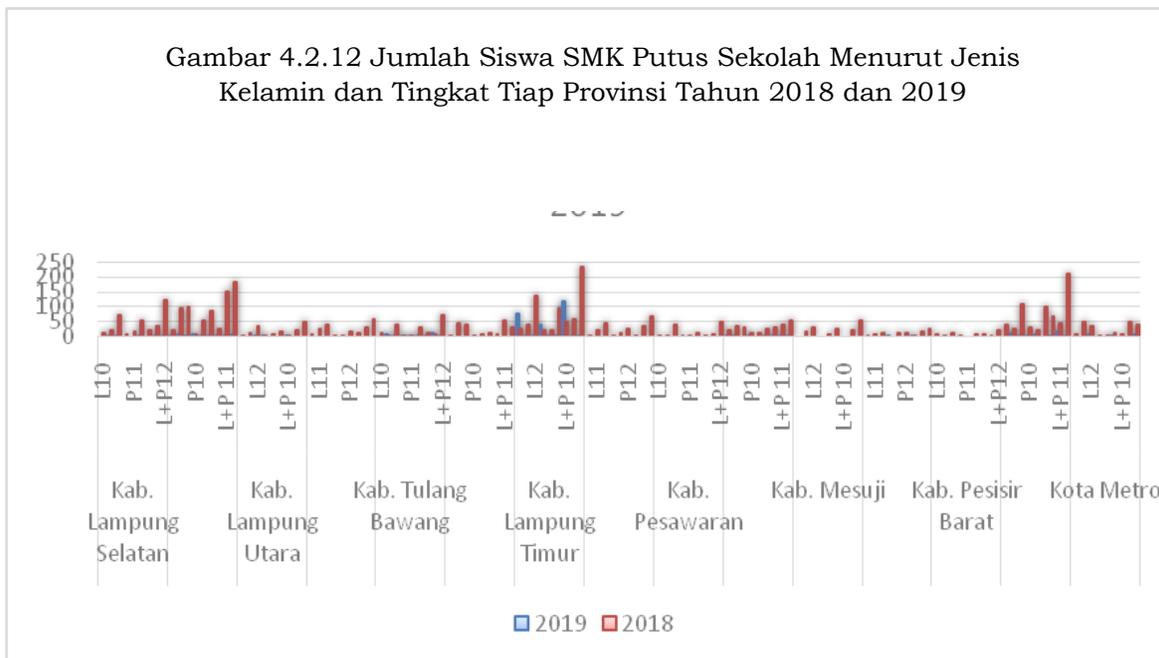
Pada tahun 2019, jumlah siswa SMK di Provinsi Lampung yang mengulang kelas menurut jenis kelamin dan tingkat kelas paling banyak yaitu siswa laki-laki kelas X. Hal ini terlihat dari gambar di atas yang merupakan grafik jumlah siswa SMK mengulang kelas menurut jenis kelamin dan tingkat atau kelas berdasarkan Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2019. Jumlah siswa mengulang kelas menurut jenis kelamin dan tingkat berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung yang terlihat pada gambar menunjukkan bahwa jumlah siswa mengulang di SMK pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah siswa mengulang menurut jenis kelamin dan tingkatannya terdapat 420 siswa. Sedangkan di tahun 2019 jumlah siswa mengulang menurut jenis kelamin dan tingkatannya terdapat 316 siswa.

Gambar 4.2.11 Jumlah Siswa Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Lampung Tahun 2019

4.2.12 Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan jumlah angka Putus Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung, dapat dilihat jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2018 lebih besar dari pada pada tahun 2019. Pada tahun 2019 siswa putus sekolah paling banyak terjadi di Lampung Timur dengan gender laki-laki tepatnya di saat kelas 10 sebanyak 76 siswa dan gender perempuan pada kelas 10 mengalami putus sekolah sebanyak 41 siswi. Sedangkan pada tahun 2018 siswa putus sekolah paling banyak terjadi di Lampung Timur dengan gender laki-laki tepatnya di saat kelas 12 sebanyak 136 siswa dan gender perempuan mengalami putus sekolah paling banyak di Bandarlampung pada kelas 12 mengalami putus sekolah sebanyak 99 siswi. Jumlah disparitas pada tahun 2018 sebesar 0,59 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding

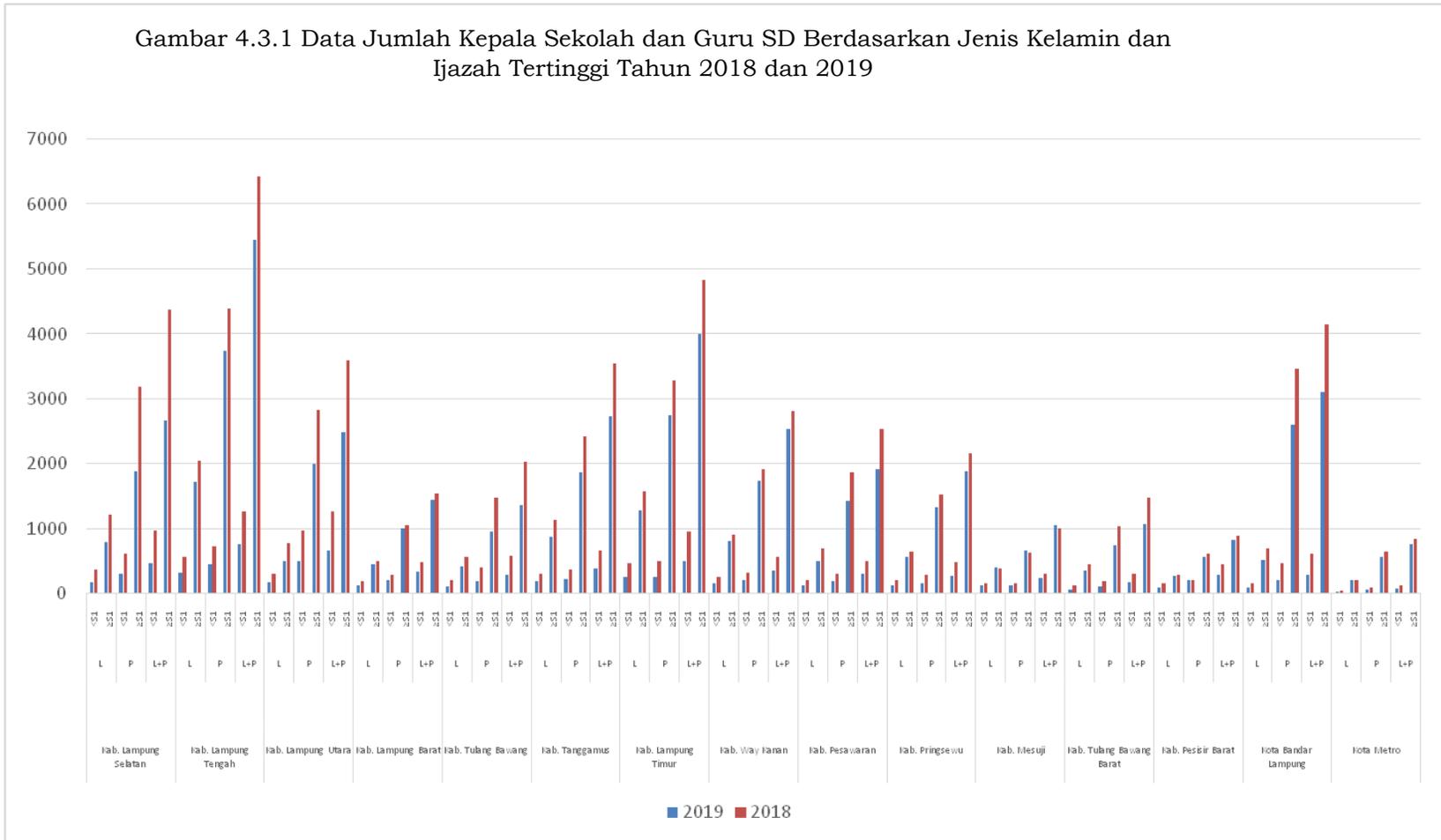
dengan laki-laki. Jumlah disparitas 2019 sebesar 0,53 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

4.3. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan

4.3.1 Jumlah Guru SD

Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019 Berdasarkan Gambar 4.3.1 menunjukkan jumlah kepala sekolah dan guru berdasarkan jenis kelamin dan ijazah di tahun 2018 lebih besar daripada ditahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat jumlah kepala sekolah dan guru berdasarkan jenis kelamin yaitu 102986. Sedangkan di tahun 2019 jumlah kepala sekolah berdasarkan jenis kelamin dan ijazah adalah 76946. Jumlah disparitas ditahun 2019 adalah 2,34 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jumlah disparitas ditahun 2018 adalah 2,32 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Gambar 4.3.1 Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019

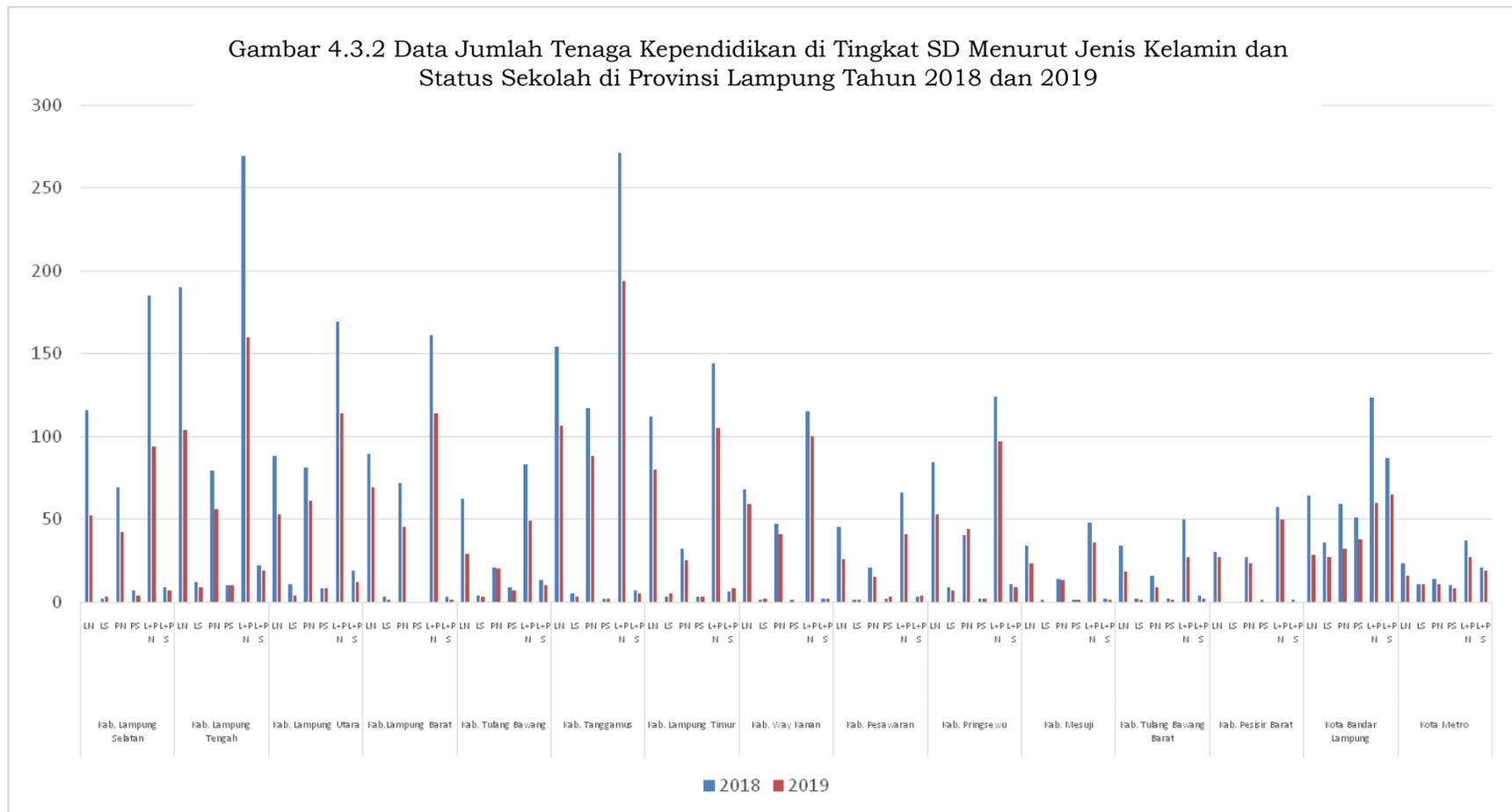


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.2 Jumlah Tenaga Kependidikan SD

Berdasarkan Gambar 4.3.2 menunjukkan data jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah di tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 2864 jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 4224 jumlah tenaga kependidikan. Jumlah disparitas ditahun 2019 adalah 0,75 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas ditahun 2018 adalah 0,63 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki.

Gambar 4.3.2 Data Jumlah Tenaga Kependidikan di Tingkat SD Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

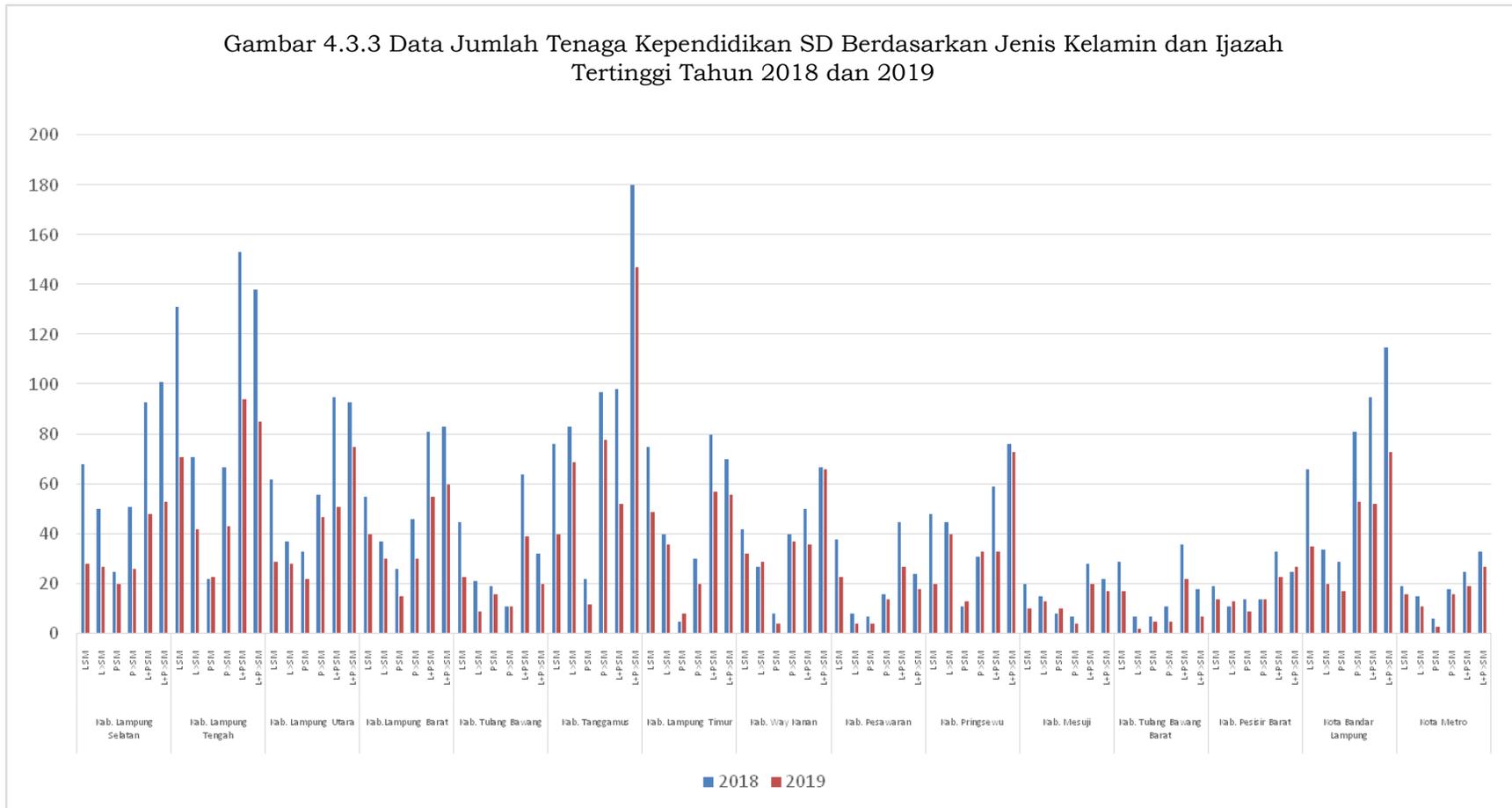


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.3 Jumlah Tenaga Kependidikan SD Berdasarkan Ijazah

Berdasarkan Gambar 4.3.3 menunjukkan data jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin dan ijazah ditahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 2864 jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 4224 jumlah tenaga kependidikan. Jumlah disparitas ditahun 2019 adalah 0,75 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas ditahun 2018 adalah 0,63 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki.

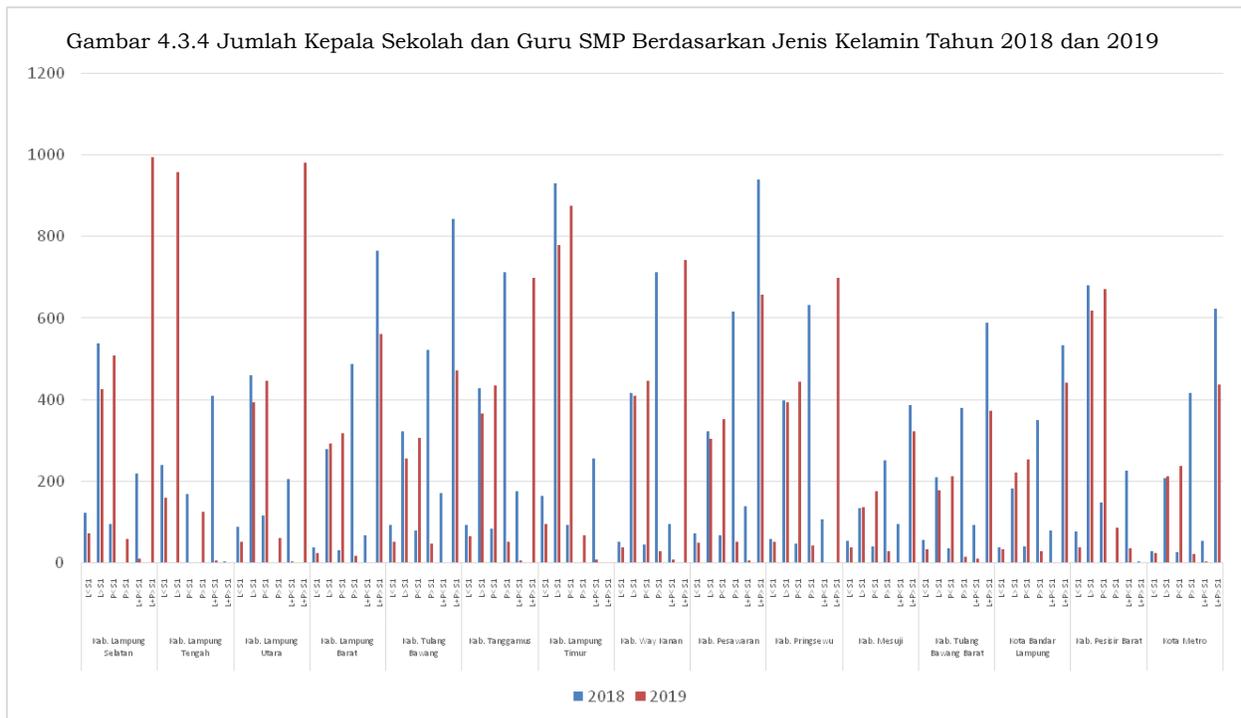
Gambar 4.3.3 Data Jumlah Tenaga Kependidikan SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019

4.3.4 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 4.3.4 di atas menunjukkan bahwa data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 memiliki nilai data yang paling tinggi pada kabupaten pesawaran. Sedangkan pada tahun 2019 tiap kabupaten dan kota memiliki nilai rata-rata yang sama. Selanjutnya untuk nilai disparitas pada tahun 2018 sebesar 1,64 sedangkan maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pada tahun 2019 sebesar 1,76 hal ini sama dengan tahun 2018 bahwa lebih besar dari 1 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

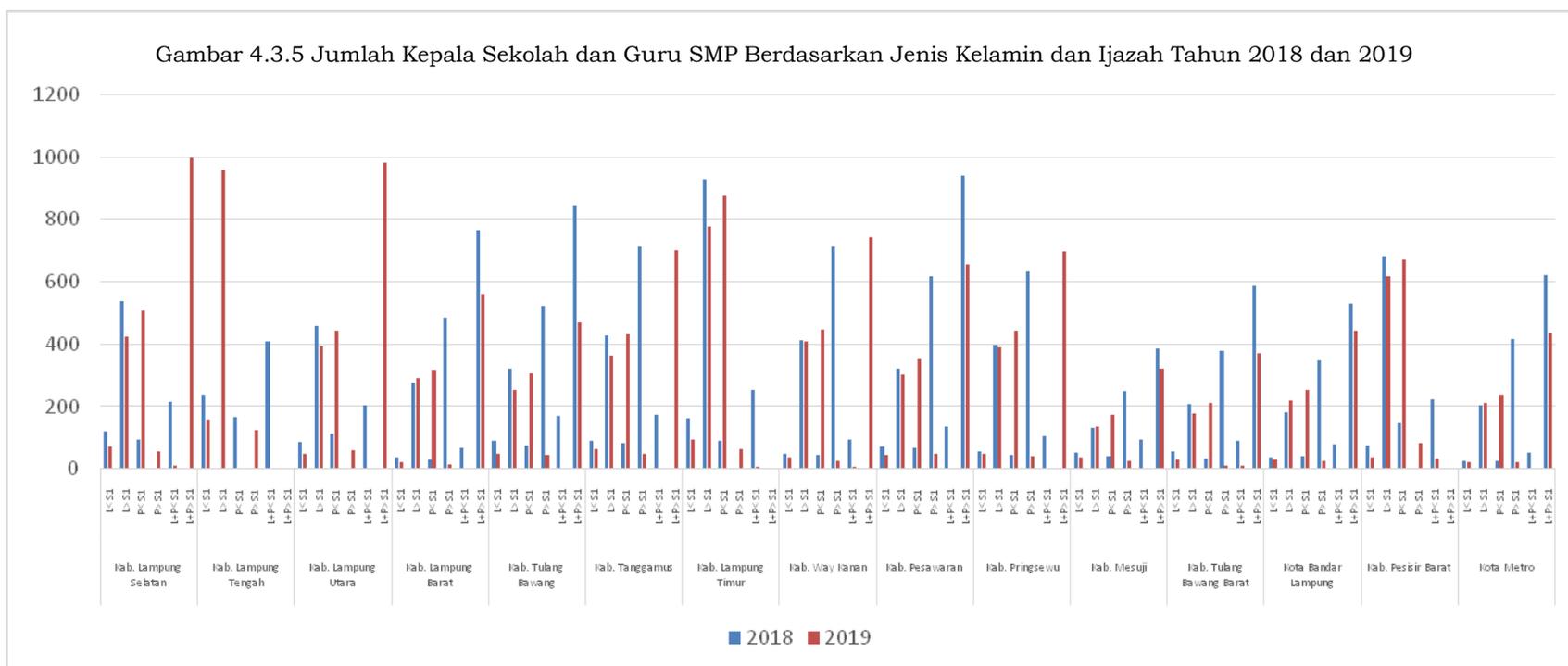


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.5 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Ijazah Tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.3.5 menunjukkan Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tahun 2018 dan 2019 bahwa pada tiap Kabupaten dan Kota pada tahun 2018 pada tiap kabupaten memiliki nilai paling besar dibandingkan pada tahun 2018. Sedangkan untuk nilai disparitas pada tahun 2019 lebih besar dari 1 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dan pada tahun 2018 sebesar 1,64 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki .

Gambar 4.3.5 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tahun 2018 dan 2019

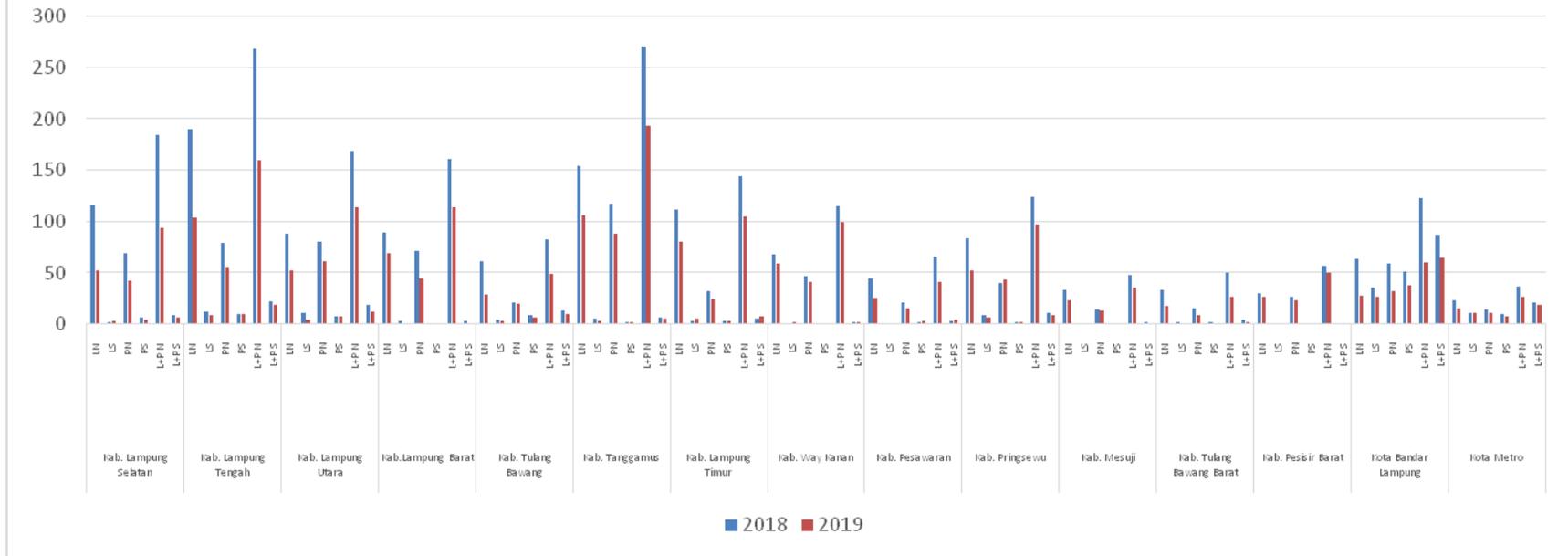


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.6. Jumlah Tenaga Kependidikan SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah

Berdasarkan Gambar 4.3.6. di atas data Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah Tahun 2018 dan 2019 di tiap Kabupaten dan Kota pada tahun 2018 memiliki jumlah tenaga paling banyak dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan disparitas pada tahun 2018 sebesar 1,021 maka hal ini terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 5,72 sama halnya pada tahun 2019 lebih besar dari 1 terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Gambar 4.3.6 Data Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

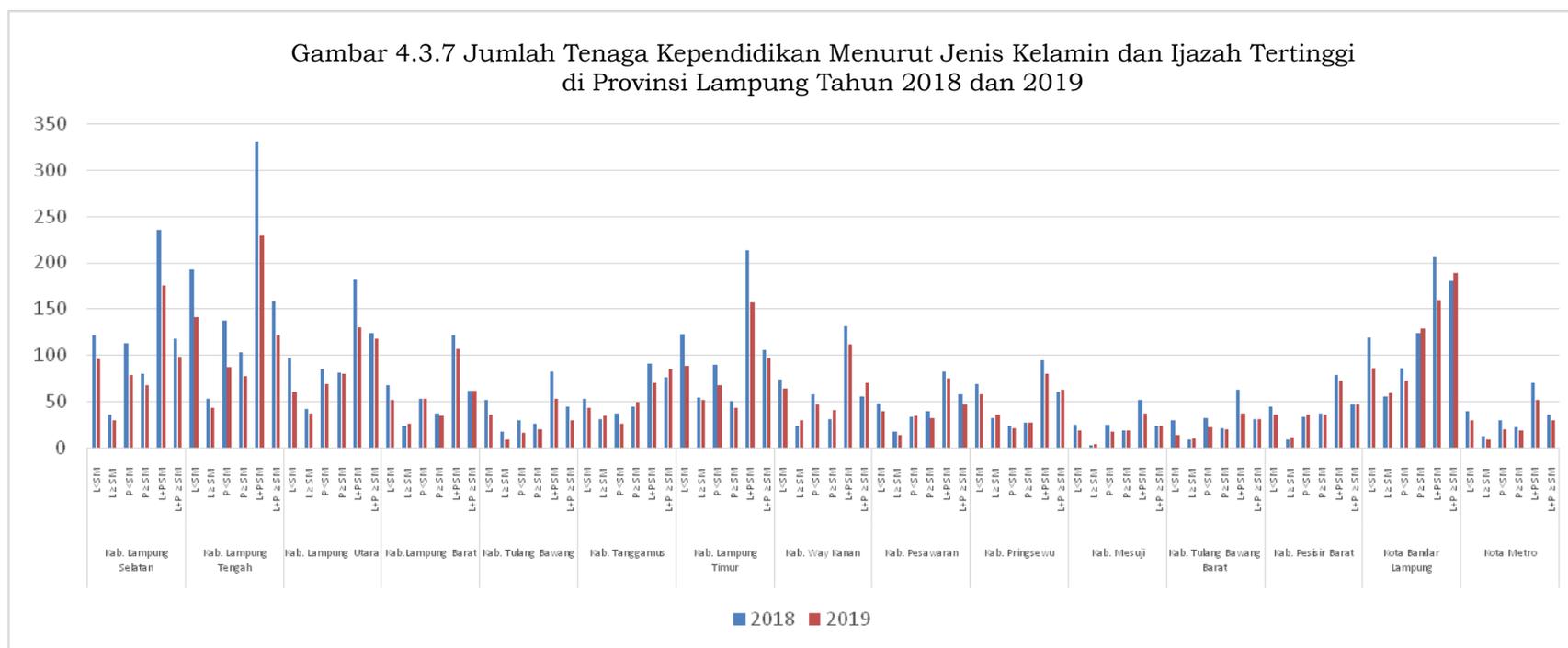


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.7. Jumlah Tenaga Kependidikan SMP Berdasarkan Ijazah

Berdasarkan Gambar 4.3.7. data jumlah tenaga kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan ijazah tertinggi Tahun 2018 dan 2019 di tiap Kabupaten dan Kota pada tahun 2019 memiliki jumlah tenaga paling banyak dibandingkan pada tahun 2018. Sedangkan disparitas pada tahun 2018 sebesar 1,02 maka hal ini terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 1,07 sama halnya pada tahun 2019 lebih besar dari 1 terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

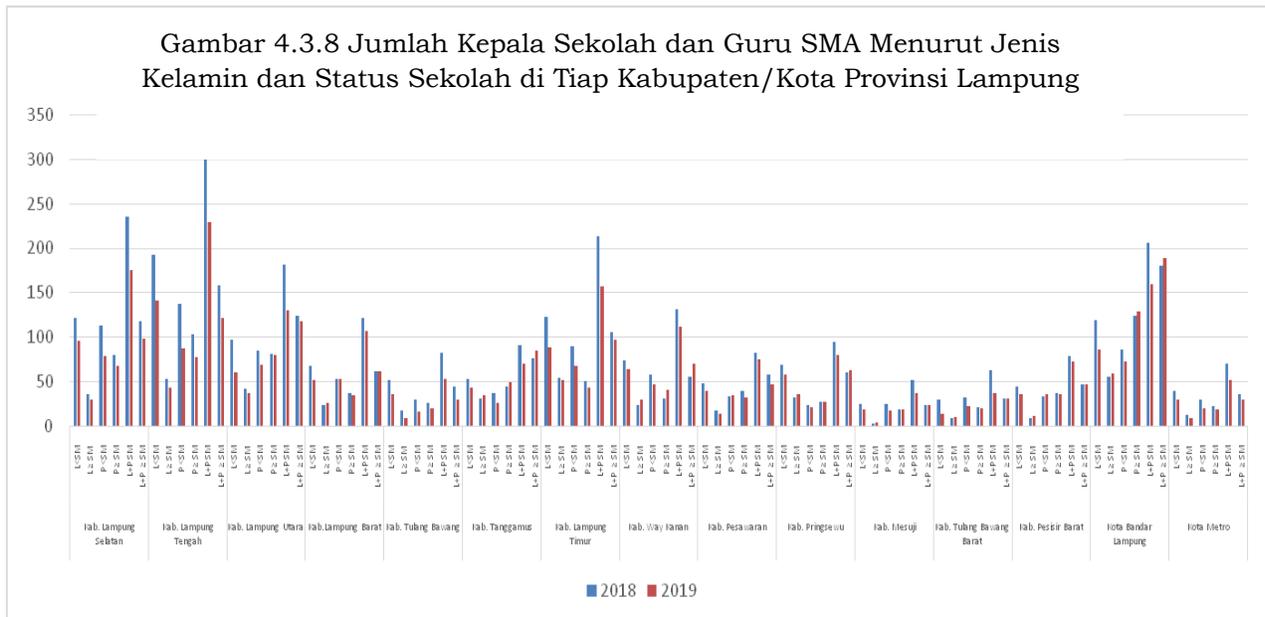
Gambar 4.3.7 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.8 Jumlah Guru SMA

Gambar 4.3.8 merupakan grafik jumlah kepala sekolah dan guru menurut jenis kelamin dan status sekolah SMA tiap kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1,66 indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 1,61, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

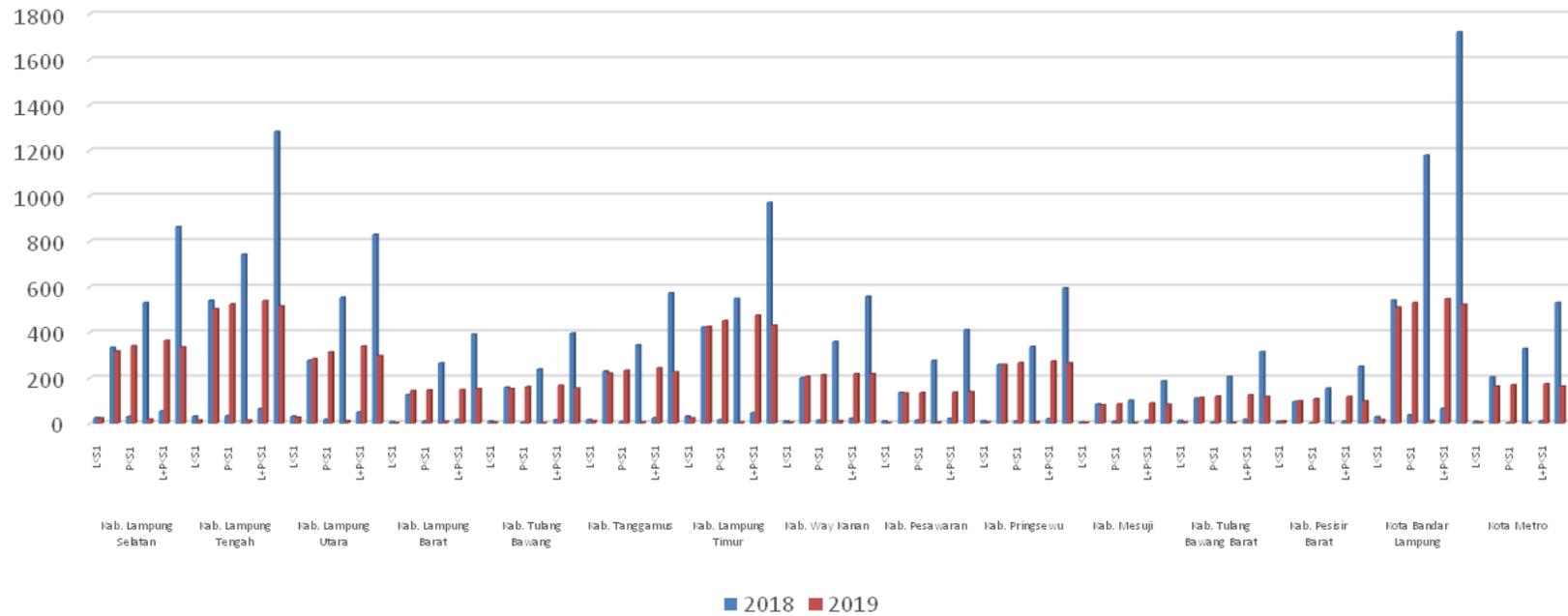


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.9 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMA Berdasarkan Ijazah Tertinggi

Gambar 4.3.9 merupakan grafik jumlah kepala sekolah dan guru menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1,61, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.62, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Gambar 4.3.9 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung SMA Tahun 2018 dan 2019

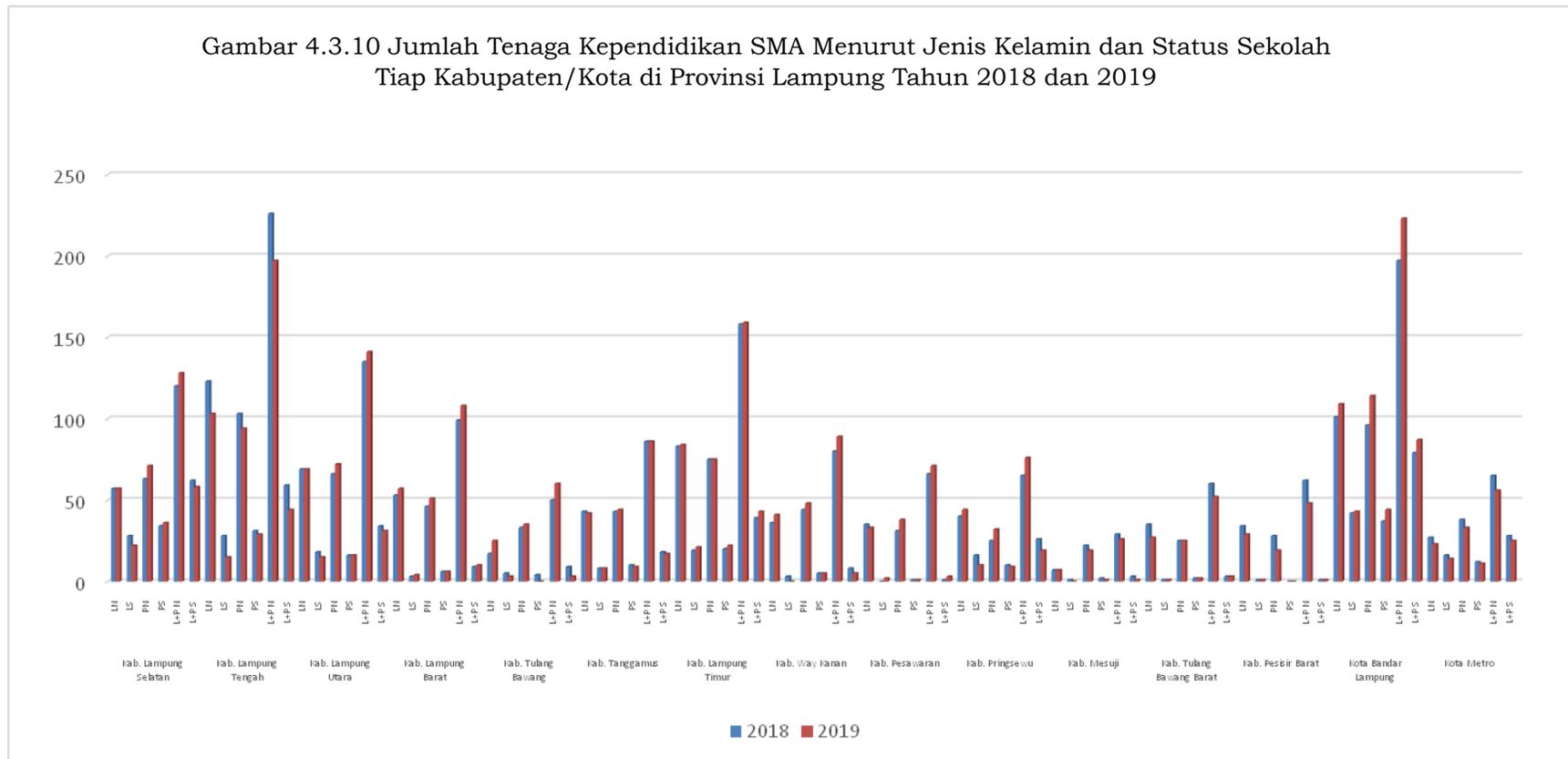


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.10 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA

Gambar 4.3.10 merupakan grafik jumlah tenaga kependidikan SMA menurut jenis kelamin dan status sekolah tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga kependidikan pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1.06, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.98, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

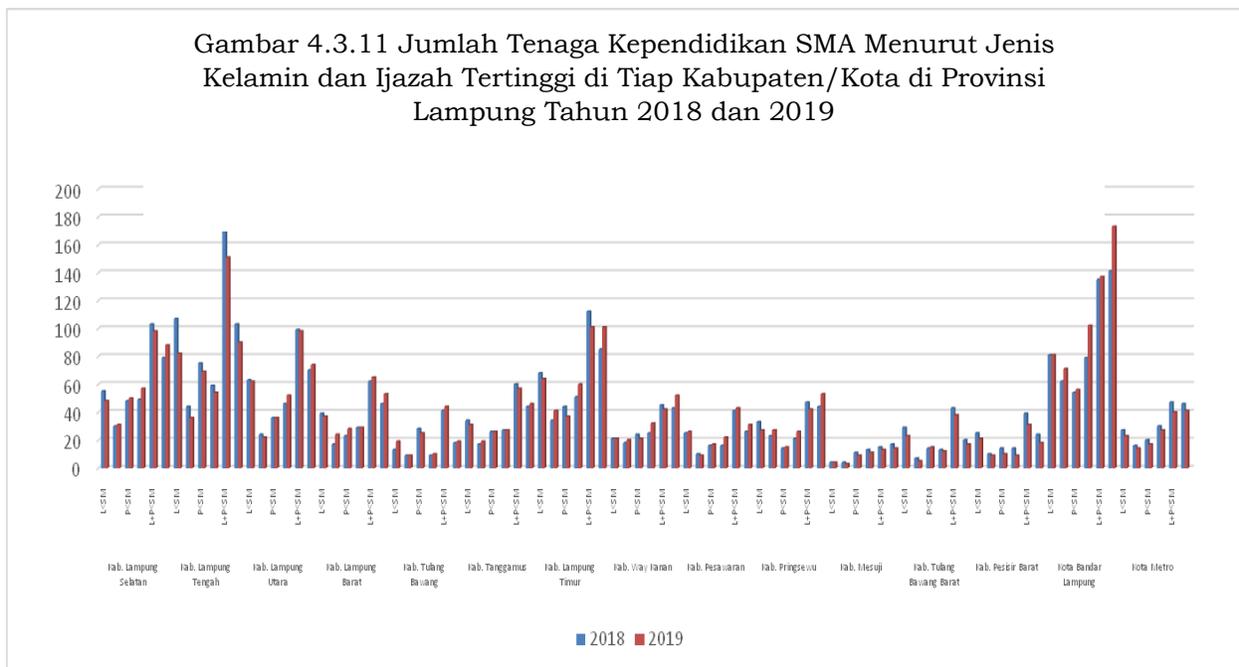
Gambar 4.3.10 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.11 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Berdasarkan Status Sekolah

Gambar 4.3.11 merupakan grafik jumlah tenaga kependidikan SMA menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga kependidikan pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1.06 indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.98, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

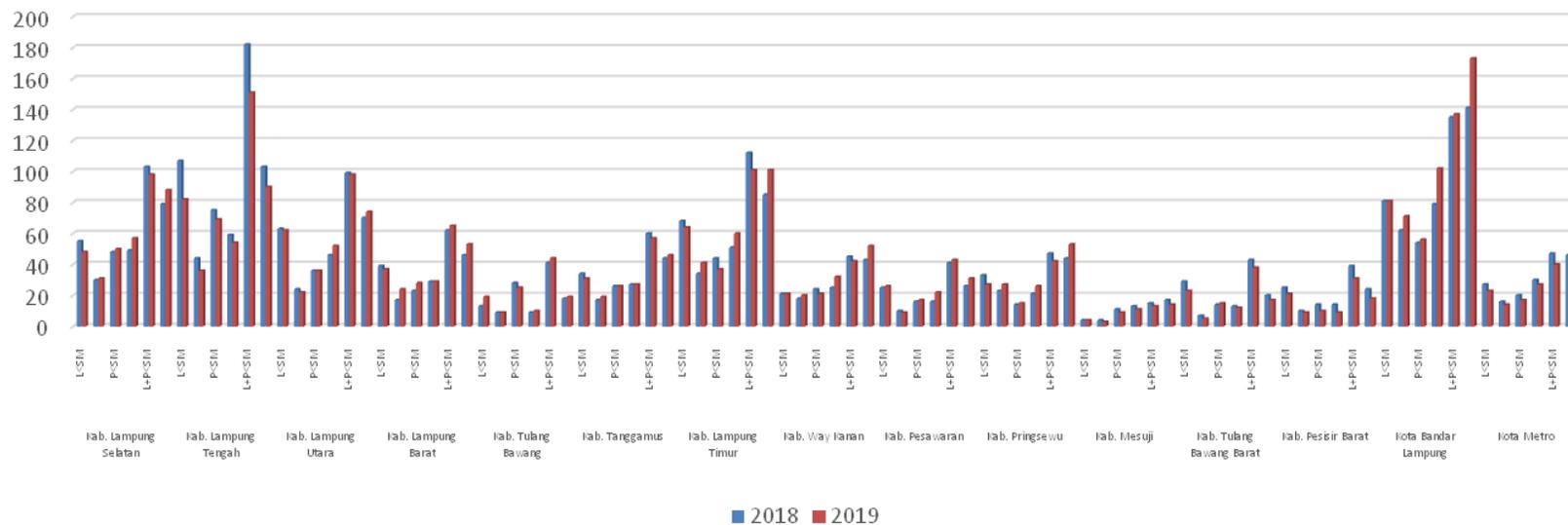


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.12 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Berdasarkan Ijazah Tertinggi

Gambar 4.3.12 merupakan grafik jumlah tenaga kependidikan SMA menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga kependidikan pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2019. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 1.06, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.98, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

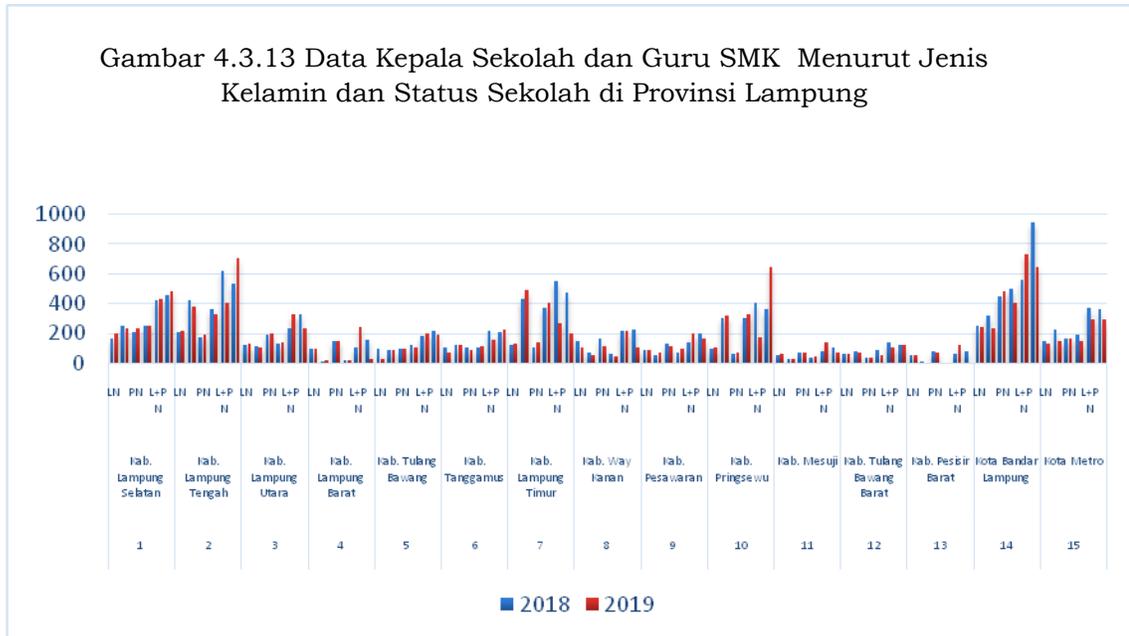
Gambar 4.3.12 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2019

4.3.13 Jumlah Guru SMK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah

Gambar 4.3.13 Data Kepala Sekolah dan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung

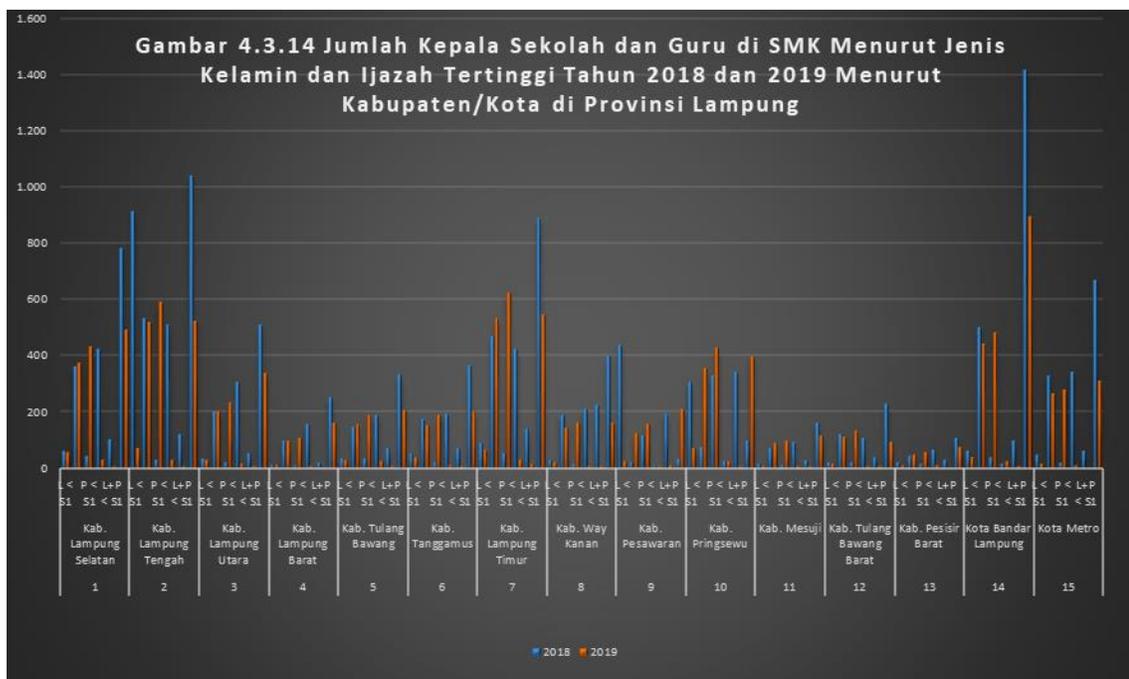


Sumber: Data Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

Dari gambar di atas diketahui bahwa jumlah kepala sekolah dan guru menurut jenis kelamin dan status sekolah pada 2018 lebih besar dibanding pada tahun 2019. Jumlah disparitas pada tahun 2018 sebesar 1,11 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas 2019 sebesar 1,14 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

4.3.14. Jumlah Guru SMK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi

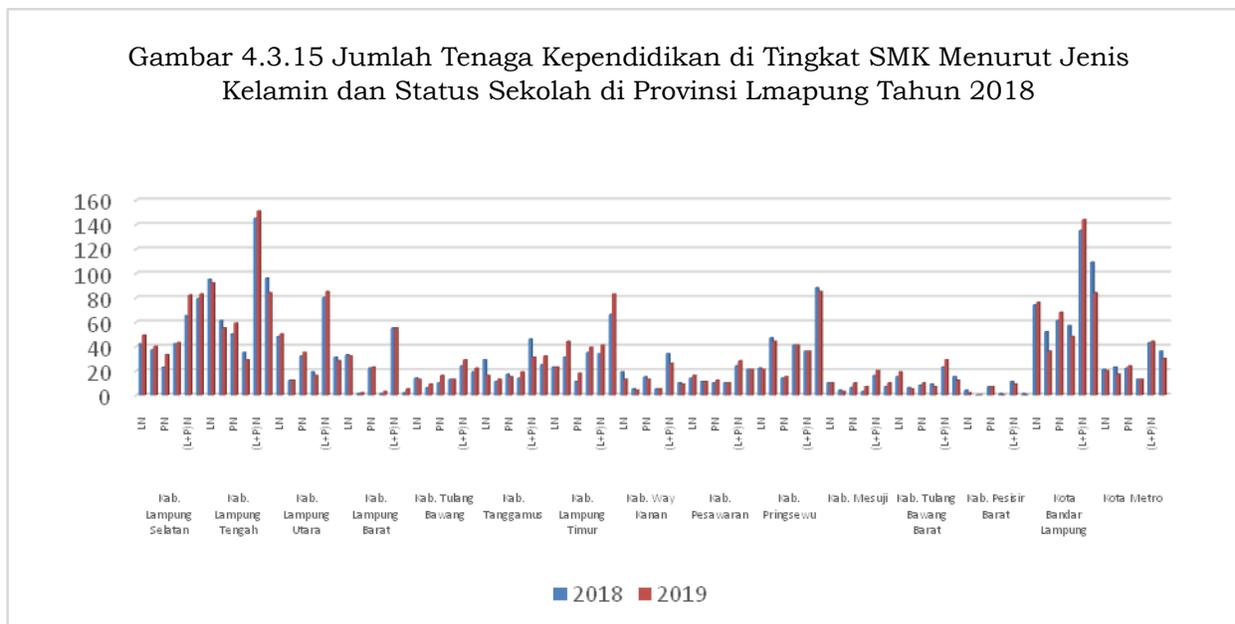
Berdasarkan gambar di bawah ini jumlah kepala sekolah dan guru di SMK menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi 2018 lebih besar daripada 2019. Hal ini dapat diketahui dari grafik bahwa jumlah kepala sekolah dan guru di SMK menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi pada tahun 2018 berjumlah 18.005 dan tahun 2019 berjumlah 13.147. Jumlah disparitas pada tahun 2018 sebesar 1,11 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi disbanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas 2019 sebesar 1,08 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

4.3.15 Jumlah Tenaga Kependidikan SMK Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 4.3.15 menunjukkan jumlah tenaga kependidikan menurut jenis kelamin dan status sekolah tiap provinsi pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kependidikan baik guru laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 2.752 guru di sekolah negeri maupun swasta. Sedangkan, pada tahun 2019 jumlah tenaga kependidikan baik guru laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 2.796 guru di sekolah negeri maupun swasta. Untuk jumlah disparitas tahun 2018 adalah 0,79 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Sedangkan, jumlah disparitas tahun 2019 adalah 0,87 maka, terdapat kesenjangan gender kinerja dengan perempuan lebih rendah kinerja dibanding dengan laki-laki.

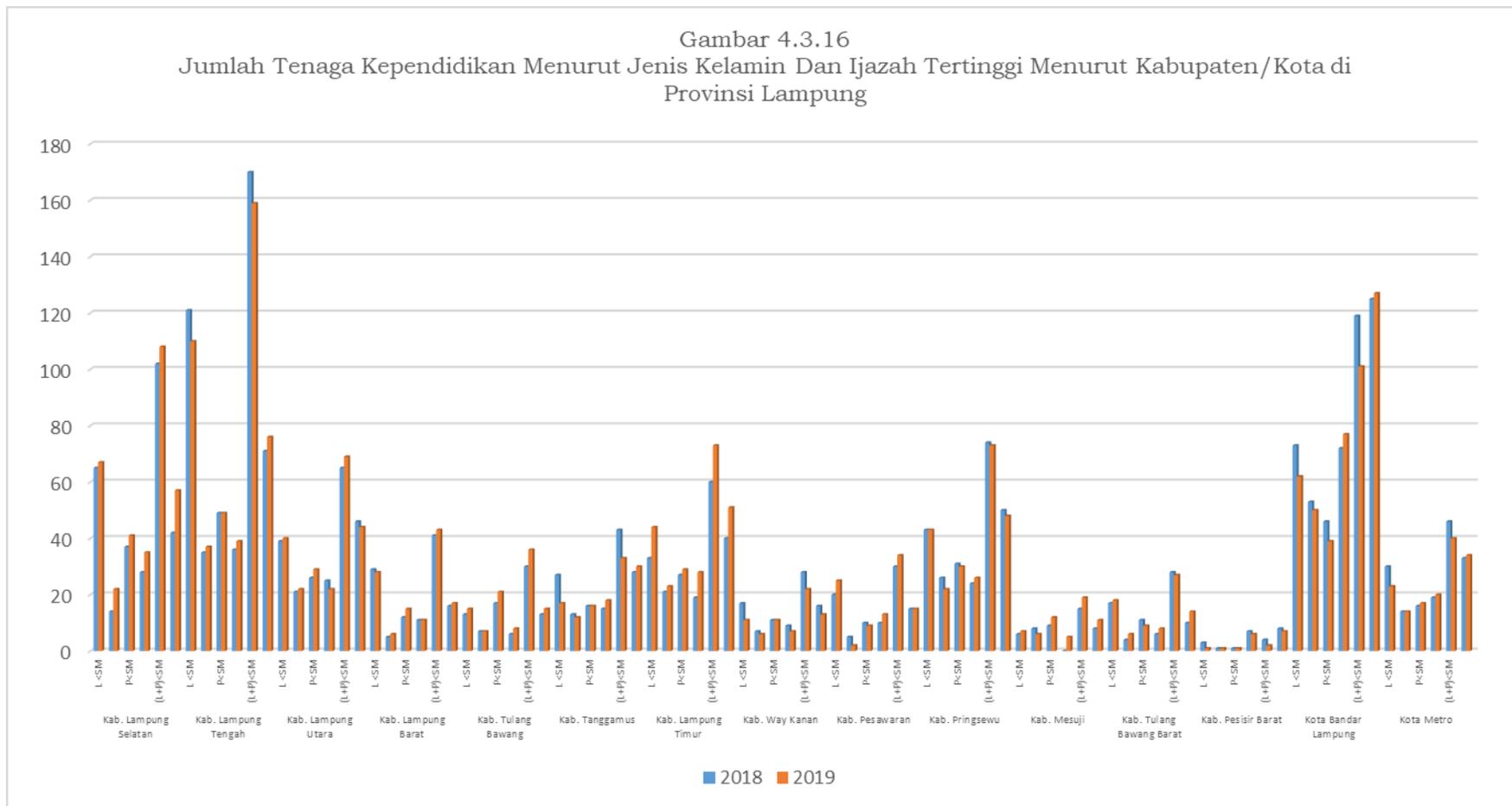


Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019

4.3.16 Jumlah Tenaga Kependidikan SMK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi

Berdasarkan gambar 4.3.16 menunjukkan jumlah tenaga kependidikan menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi tiap provinsi pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kependidikan baik guru laki-laki maupun perempuan dengan ijazah tertinggi <SM sebesar 855 dan \geq SM sebesar 521 guru. Kemudian tahun 2019 jumlah tenaga kependidikan baik guru laki-laki maupun perempuan dengan ijazah tertinggi <SM sebesar 839 dan \geq SM sebesar 559 guru. Untuk jumlah disparitas tahun 2018 adalah 0,79 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Sedangkan, jumlah disparitas Tahun 2019 adalah 0,87 maka, terdapat kesenjangan gender kinerja dengan perempuan lebih rendah kinerja dibanding dengan laki-laki.

Gambar 4.3.16
 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin Dan Ijazah Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota di
 Provinsi Lampung



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

5. EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat adalah salah satu persoalan ketika dikaitkan dengan pembagian beban kerja atas masing-masing gender. Pembagian beban kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya sejauh ini menganggap bahwa perempuan cocok untuk jenis pekerjaan tertentu yang dibedakan dengan laki-laki. Alasan-alasan seperti perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, berdampak pada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan internal keluarga dianggap lebih cocok untuk perempuan, sementara pekerjaan mencari nafkah yang sifatnya lebih pada persoalan eksternal dianggap cocok untuk laki-laki. Pada faktanya saat ini jumlah perempuan yang bekerja mencari nafkah juga menunjukkan eksistensi yang meningkat secara signifikan.

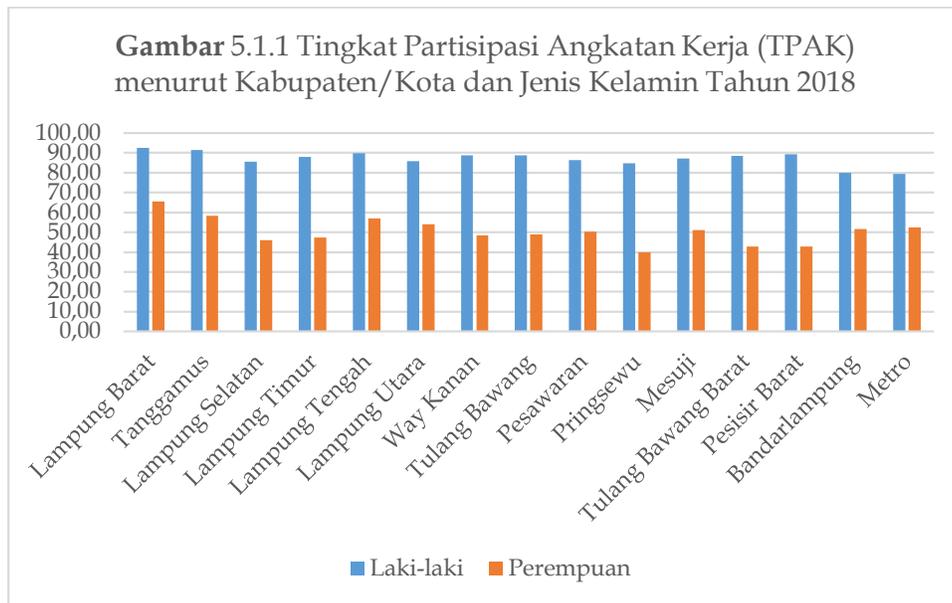
Alasan lain, anggapan pembagian beban kerja atas gender juga disebabkan karena adanya pelabelan gender (*gender stereotyping*) yaitu pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh anggapan bahwa perempuan lebih emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, namun sebaliknya laki-laki lebih mandiri, tegas, kasar, agresif, dominan, kejam, dan sebagainya. Peran pencarian nafkah (produktif) cocok untuk laki-laki; peran reproduktif cocok untuk perempuan dan peran sosial dapat dilakukan laki-laki dan perempuan meskipun kecenderungannya laki-laki yang dominan karena aktivitas sosial dilakukan di luar rumah tangga.

Ketimpangan dalam pembagian kerja atas gender mengakibatkan munculnya banyak ketidakadilan gender yang terwujud dalam bentuk

marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan, subordinasi perempuan atas laki-laki, *stereotype gender*, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda pada perempuan. Ketimpangan gender dalam pembagian kerja juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan yang pada umumnya dialami perempuan karena anggapan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, dan sebagainya sehingga ada status dan peran tertentu yang ditutup atau dibatasi untuk perempuan.

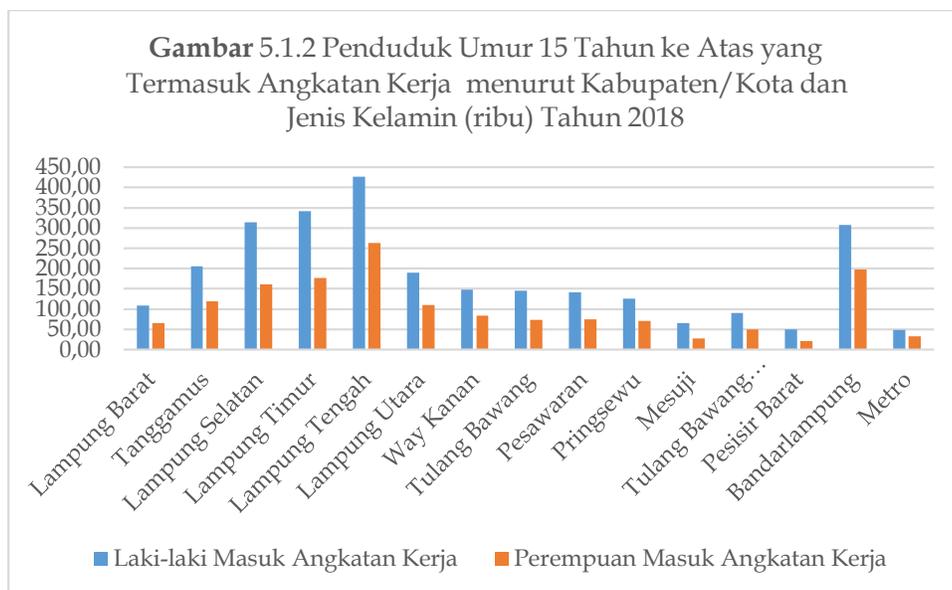
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan kabupaten dan gender di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

Tingkat partisipasi angkatan kerja jelas menunjukkan perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki. Pada setiap kabupaten jumlah perempuan yang masuk dalam partisipasi kerja rata-rata hanya setengah dari jumlah laki-laki.



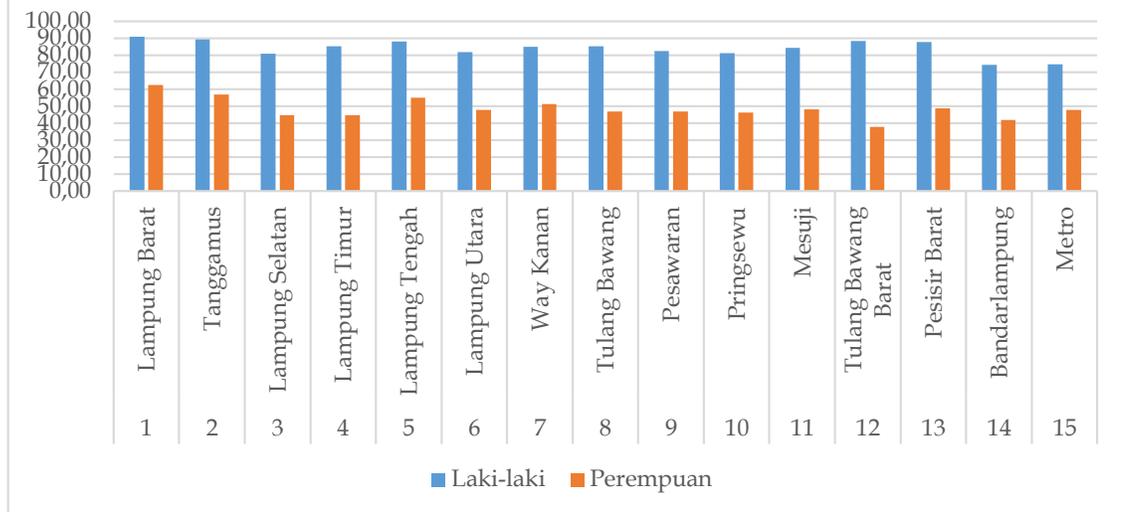
Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

Partisipasi angkatan kerja dan jumlah orang bekerja di Provinsi Lampung ditunjukkan pada grafik disparitas diatas menunjukkan rata-rata angkatan kerja yang berumur diatas 15 tahun perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 78,83. Lebih lanjut jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja juga menunjukkan dominasi laki-laki. Penduduk umur 15 tahun yang termasuk angkatan kerja jumlah terbanyak di kontribusikasi dari Kabupaten Lampung Tengah, juga jumlah orang bekerja jumlah terbanyak berasal dari kabupaten yang sama.

5.2 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (EPR)

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja atau *Employment to Population Ratio* (EPR) juga merupakan salah satu indicator yang menjadi pertimbangan ketimpangan gender terhadap akses tenaga kerja. Data menunjukkan jumlah rasio EPR perempuan dan laki-laki di provinsi lampung secara umum terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan peluang usaha perempuan untuk bekerja dan berusaha jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Kementerian P3A dan BPS, 2016). Secara makro, terdapat banyak variabel yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah.

Gambar 5.2 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin 2018



Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

Studi yang dilakukan Akmal dan Zulkifli (2017) di empat Negara yakni China, Singapura, Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Analisis data makro Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia tahun 1980-2010 yang dilakukan Harahap (2014) menemukan variabel pendidikan sebagai determinan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan. Menurutnya kemajuan dibidang pendidikan yang dicapai perempuan mengakibatkan terbukanya peluang karirnya. Adapun motivasi utama perempuan bekerja dalah tuntutan ekonomi/menambah pendapatan keluarga. Kontribusi rata-rata pendapatan perempuan di perdesaan sekitar 48,22% dari total pendapatan keluarga.

Senada dengan studi Harahap, Gesti (2016) yang melakukan analisis determinan pendapatan sektor industri di Indonesia Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendidikan, pengalaman

kerja, pengalaman kerja kuadrat, jenis kelamin, domisili, jam kerja dan kelompok industri berpengaruh terhadap pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. Pengalaman kerja berpengaruh secara positif dan koefisien pengalaman kerja kuadrat menunjukkan tanda negatif yang artinya tiap tambahan satu tahun pengalaman kerja akan meningkatkan pendapatan marginal dan pada titik tertentu akan mengalami penurunan. Jenis kelamin berpengaruh terhadap pendapatan. Tenaga kerja laki-laki memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding perempuan. Tenaga kerja yang berdomisili di perkotaan memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding pedesaan. Tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja penuh memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang bekerja tidak penuh.

Variabel pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran terselubung di pedesaan. Studi Harfina (2009) yang merujuk data Sakernas 2007 di Pedesaan Jawa Tengah menunjukkan bahwa perempuan yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih rendah untuk menjadi pengangguran terselubung. Berdasarkan tipe okupasinya, pekerja pertanian lebih terbuka peluangnya untuk menjadi penganggur terselubung dibanding sektor manufaktur dan jasa. Peningkatan produktivitas pertanian di pedesaan Jawa Tengah secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran terselubung yang berarti meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Variabel gender bersama-sama umur dan status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan gender dalam tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Faktor karakteristik rumah tangga yang terdiri dari asal daerah tempat tinggal, jumlah tanggungan anak (0-14) tahun, dan pendapatan rumah tangga juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan gender tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Selain itu, faktor pendidikan perempuan juga

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Tingkat pendidikan perempuan yang lebih baik akan menurunkan kesenjangan gender pada tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Oleh karenanya, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah bisa mendorong para perempuan Indonesia untuk lebih peduli dengan pendidikan (Novianti, 2018).

Tingkat pengangguran di masyarakat selanjutnya berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kemiskinan dan dampak negatif lain di masyarakat. Studi yang dilakukan Amalia (2017) di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa variabel gender dan angka melek huruf berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi kesetaraan gender maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan. Temuan bahwa pengangguran terbuka berefek terhadap kemiskinan juga dikemukakan oleh Anggadini (2015) melalui studinya di Sulawesi Tengah. Studi ini juga menemukan bahwa tingkat literasi mempunyai efek positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Umur harapan hidup dan PDRB mempunyai efek negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan temuan Darman (2013) yang menyatakan bahwa hukum Okun berlaku di Indonesia, dimana koefisien Okun bernilai negatif. Tingkat pengangguran cenderung meningkat seiring dengan dicapainya pertumbuhan GDP. Studi Hastuti & Artaningtyas (2016) dengan menggunakan data panel, juga menunjukkan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi konsentrasi pengangguran propinsi di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan kompleksitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, dan kesetaraan gender. Laporan Bank Dunia (2000:22) menyebutkan bahwa ketika perkembangan ekonomi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan,

ketidaksetaraan gender cenderung menurun. Rumahtangga-rumahtangga berpenghasilan rendah dipaksa untuk menjatah pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan gizi di mana perempuan dan anak perempuan yang "dikorbankan" karena merekalah yang menanggung sebagian besar beban. Oleh sebab itu, ketika pendapatan rumahtangga bertambah, ketidaksetaraan gender dalam sumber daya manusia cenderung menurun. Sebagaimana hak-hak dasar lainnya, pendapatan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kesetaraan gender dalam sumber daya, baik kesehatan maupun pendidikan. Di bidang pendidikan, hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan terbesar yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pendapatan kemungkinan akan terjadi di wilayah-wilayah termiskin: Asia Selatan dan Sub Sahara Afrika, bahkan dampak pendapatan khususnya kuat pada tingkat sekunder.

5.3 Tenaga Kerja Indonesia Sektor Formal dan Informal

Kesenjangan gender lain di bidang ekonomi khususnya dalam akses pasar kerja adalah persentase TKI yang didominasi oleh perempuan. Terdapat perbedaan karakteristik antara tenaga kerja migran laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja laki-laki umumnya adalah tenaga profesional dan semi profesional, sementara itu tenaga kerja perempuan umumnya tidak mempunyai keterampilan seperti sebagai asisten rumah tangga. Menurut Febriyanti & Isabella (2016), implementasi perlindungan tenaga kerja Indonesia masih belum optimal, seperti misalnya komunikasi eksternal dengan pimpinan agensi yang belum baik khususnya komunikasi antara Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Komunikasi yang kurang baik juga terlihat dari tidak terpenuhinya hak-hak pekerja karena

konsorsium asuransi yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar kompensasi atas klaim yang tidak lebih dari 7 hari kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Kondisi sosial yang kurang mendukung kegiatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada tahap pra penempatan hal ini disebabkan Tenaga Kerja Indonesia Re-entry merasa keberatan dengan pembayaran premi asuransi yang dibebankan pada saat pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Kualitas SDM TKW yang rendah menjadi faktor lain yang menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi tenaga kerja perempuan. Studi yang dilakukan Rahayuningsih (2018) terhadap TKI asal Madura menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sejumlah masalah yang berimplikasi pada rendahnya kualitas tenaga kerja, antara lain: (1) mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal yang berisiko tinggi tanpa jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat. Minat masyarakat Madura untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat besar. Hal ini didorong oleh berbagai sebab terutama faktor ekonomi. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM masyarakat Madura menyebabkan berbagai permasalahan timbul. Permasalahan tersebut antara lain yang utama adalah maraknya praktek TKI ilegal.

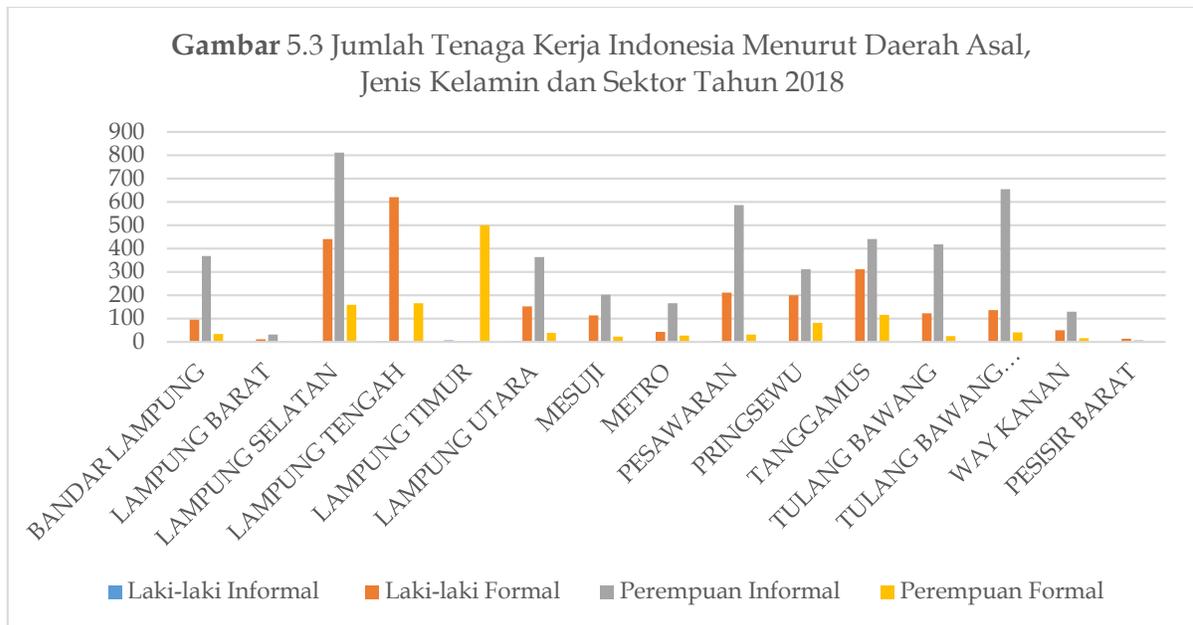
Bekerja di luar negeri bagi sebagian masyarakat merupakan bagian dari solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi di negerinya sendiri. Peluang kerja di luar negeri dengan upah yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan bekerja di dalam negeri merupakan daya tarik tidak saja bagi pekerja yang belum pernah bekerja di luar negeri melainkan juga bagi mantan TKI yang telah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri. Studi Fawaid (2016) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi minat mantan TKI bekerja kembali ke luar negeri yakni: upah di daerah tujuan,

status pernikahan, umur, pendidikan, dukungan keluarga dan jumlah tanggungan keluarga. Wafirotin (2013) yang melakukan studi di Ponorogo menemukan faktor pendorong berupa pendapatan yang rendah dan sempitnya peluang kerja di satu sisi dan faktor penarik berupa gaji yang tinggi dan peluang kerja yang luas di sisi lain. Sementara itu Khumairoh dan Kuspriyanto (2018) menyebutkan faktor pendorong berupa motivasi mensejahterakan kehidupan keluarga dan dorongan saudara yang telah menjadi TKI dan faktor penarik berupa upah yang tinggi.

Bekerja di luar negeri dengan demikian menjadi impian bagi sebagian masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Remitan menjadi tumpuan bagi keluarga dimana anggotanya menjadi TKI. Studi Dibyantoro dan Ali (2014) menyebutkan bahwa penggunaan remitan meliputi usaha produktif (seperti pembelian tanah, investasi dan modal usaha), konsumtif (pembangunan/renovasi rumah dan pembelian alat-alat elektronik) dan investasi sosial (seperti modal untuk menjadi kepala desa). Khumairoh dan Kuspriyanto (2018) menemukan bahwa pemanfaatan remitan paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebesar 29%. Menurut Wafirotin (2013), bekerja di luar negeri memberi dampak sosial berupa peningkatan status sosial seperti peningkatan pengetahuan, pendidikan, pendapatan serta peningkatan kepemilikan barang. Meskipun demikian, tenaga kerja khususnya perempuan menghadapi resiko berupa berbagai macam stigma negatif (Novianti, 2010).

Perempuan yang bekerja sebagai TKI merupakan pencerminan rendahnya posisi perempuan di masyarakat. Menurut Khotimah (2018) Perempuan di Indonesia telah dirugikan oleh kemiskinan dan dimarginalkan oleh proses pembangunan. Dari perspektif perempuan, definisi kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga kurangnya kesempatan bekerja, berkarya, dan akses, serta hak untuk mengambil keputusan atas diri dan keluarganya. Rendahnya akses terhadap

pendidikan akibat kemiskinan dan budaya patriarki juga menambah buruknya kualitas sumber daya perempuan Indonesia. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah contoh kongrit rendahnya mutu pendidikan sehingga menjadikan Perempuan tak lebih sebagai asset yang dapat dieksploitasi. Kemiskinan struktural dalam berbagai praktik pembangunan telah memarginalkan perempuan dan menempatkannya sebagai korban.



Sumber: Data BNP2TKI, 2018

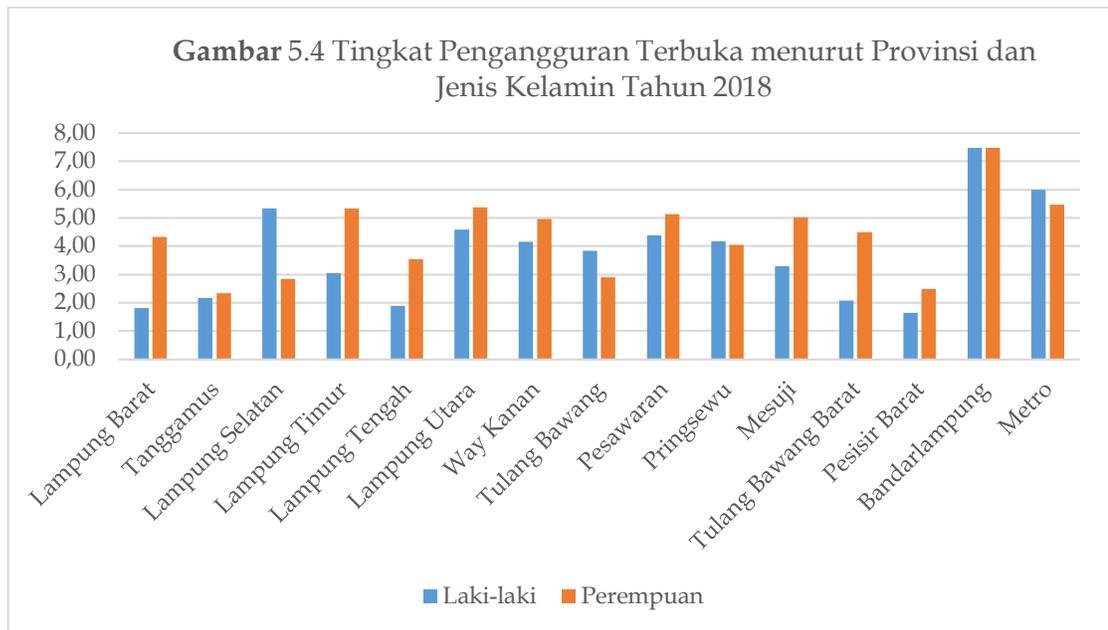
Data diatas menunjukkan perempuan yang bekerja disektor informal masih sangat tinggi di bandingkan dengan jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal. Sebaliknya pada gender laki-laki yang menunjukkan jumlah laki-laki bekerja disektor formal lebih tinggi dibandingkan dengan sektor informalnya. Gambar 5.3 menunjukkan bahwa TKI Provinsi Lampung tahun 2018, sebagian besar 85% diantaranya adalah tenaga kerja perempuan. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi perempuan karena risiko yang ditanggungnya mulai dari disharmoni keluarga di tanah air yang ditinggalkan hingga keselamatan dirinya di negara tujuan. Perlindungan

hukum terhadap TKI khususnya bagi TKW hingga saat ini masih menjadi kendala.

5.4 Pengangguran Terbuka

Indonesia beberapa tahun mendatang akan menikmati bonus demografi yaitu dimana jumlah penduduk produktif dua kali lebih banyak dari penduduk non produktif. Bonus demografi memiliki dampak positif dimana jumlah penduduk yang banyak akan menghasilkan produk dan karya inovatif, atau bahkan sebaliknya yaitu meningkatnya jumlah pengangguran yang ada. Maryati (2015) mengatakan jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya dikhawatirkan akan terus bertambah karena jumlah lulusan perguruan tinggi juga terus bertambah, akan tetapi tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat tertampung di dunia kerja, akibatnya akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik.

Jonaidi (2012) menunjukkan data pergerakan meningkatnya pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berhubungan langsung terhadap tingkat kemiskinan disuatu daerah. Data pada grafik menunjukkan data pengangguran bergerak sama rata antara jumlah pengangguran laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan jumlah pengangguran tidak berhubungan langsung dari jenis kelamin (*gender*).



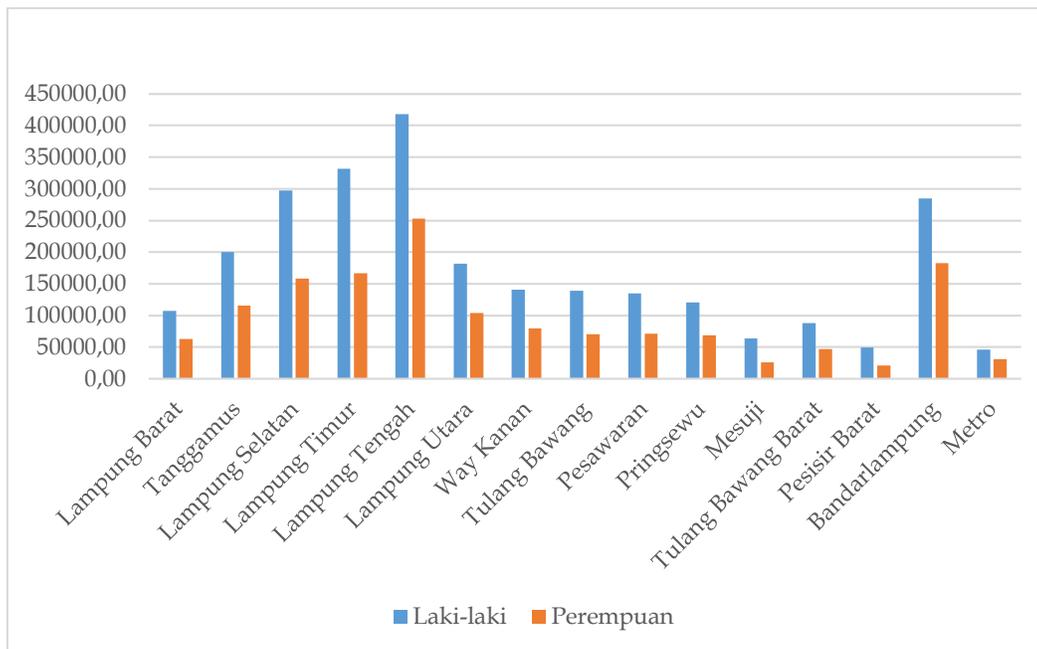
Sumber: Data Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, BPS, 2019

Franita (2016) hasil penelitiannya menyarankan pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah dapat meningkatkan jumlah pelatihan kepada masyarakat, dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Angka pengangguran akan berkurang seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan diluar negeri untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkopeten.

5.5 Pekerja Profesional dan Managerial

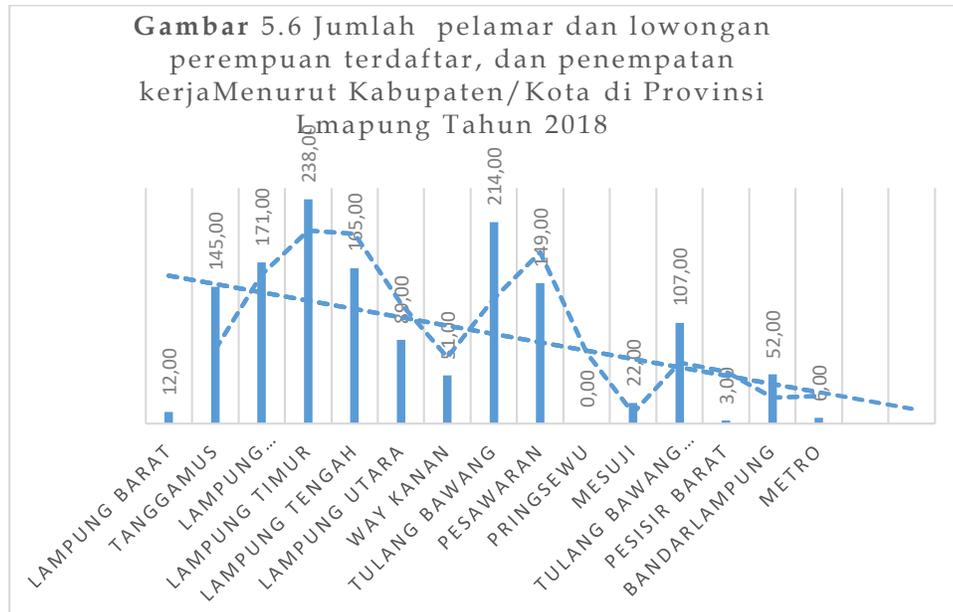
Pekerjaan profesional merupakan sub jenis pekerjaan yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab lebih. Pekerja atau yang sering disebut karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis) yang dibebankan kepada individu tersebut. Dampak dari penyediaan waktu pada pekerja profesional adalah besaran imbalan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya. Perempuan pada pekerja profesional dianggap cocok karena sub jenis pekerjaan ini lebih memerlukan kegiatan pikiran dari fisik.

Gambar 5.5. Jumlah Pekerja Profesional Berdasarkan JenisKelain dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

5.6 Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja



Sumber: BPS, 2019 (Data Diolah)

Jumlah wanita yang memiliki minat untuk menjadi pekerja profesional dapat dilihat dari minat perempuan untuk melamar. Disamping itu jumlah lowongan khusus untuk pelamar wanita juga dapat menjadi indikator keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Data diatas menunjukkan trend penurunan jumlah penempatan kerja terutama penempatan kerja perempuan pada daerah-daerah yang jauh dari akses perkotaan. Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Way Kanan merupakan kabupaten dengan pembukaan lapangan kerja untuk perempuan dengan jumlah yang cukup rendah.

5.7 Jumlah Pekerja Tidak di Bayar



Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

Tenaga kerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan tersebut (KKBI, diakses 2019). Disamping itu tenaga kerja tidak dibayar juga dapat didefinisikan pekerja sukarela (*voullenteer*), yang sengaja meluangkan waktu, tenaga dan lainnya untuk kepentingan social. Pada pengertian sawala lainnya tenaga kerja yang tidak dibayar diartikan sebagai pekerja yang tidak memberikan integritas secara profesional. Menurut data selisih pekerja tidak dibayar di Provisnis Lampung pada tahun 2018 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan diantara laki-laki dan perempuan pada Kabupaten Tulang Bawang. Pada kabupaten dan kotamadya sendiri data menunjukkan perbedaan yang dapat dimaklumi.

6. POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.1. Anggota Legislatif

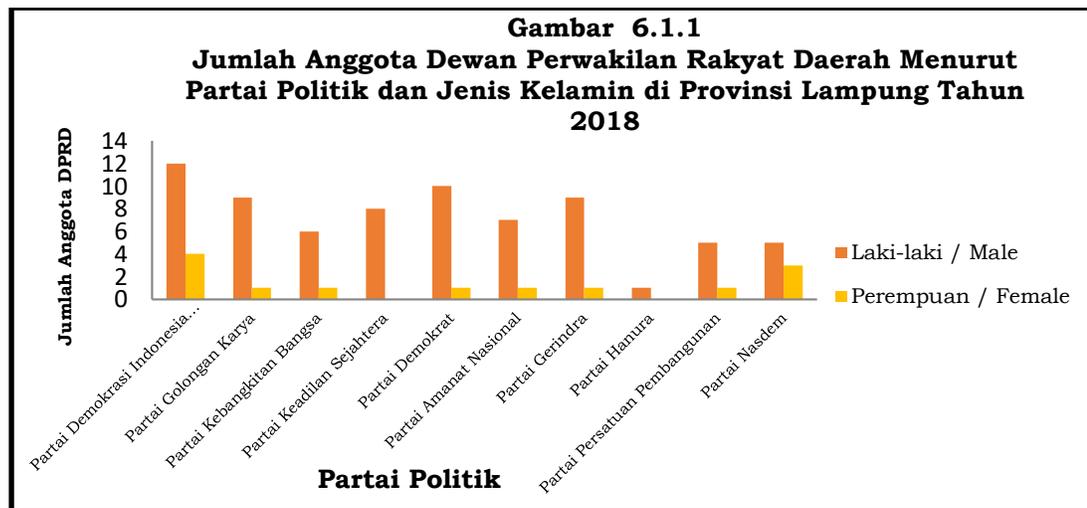
Kesetaraan gender dalam keterwakilannya sebagai anggota legislatif telah diatur dalam amanah Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan calon legislatif. Dalam pilkada tahun 2018, Kementerian PPPA juga telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam pemilu dan pilkada. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Walaupun telah diatur dalam amanah Undang-Undang dan telah ada pelatihan politik dari KemenPPPA, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam anggota Legislatif di Provinsi Lampung masih terjadi ketimpangan yang relatif tinggi.

Fakta menunjukkan, peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi penting, meskipun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, telah berhasil mengundang secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003. Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi

- 1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

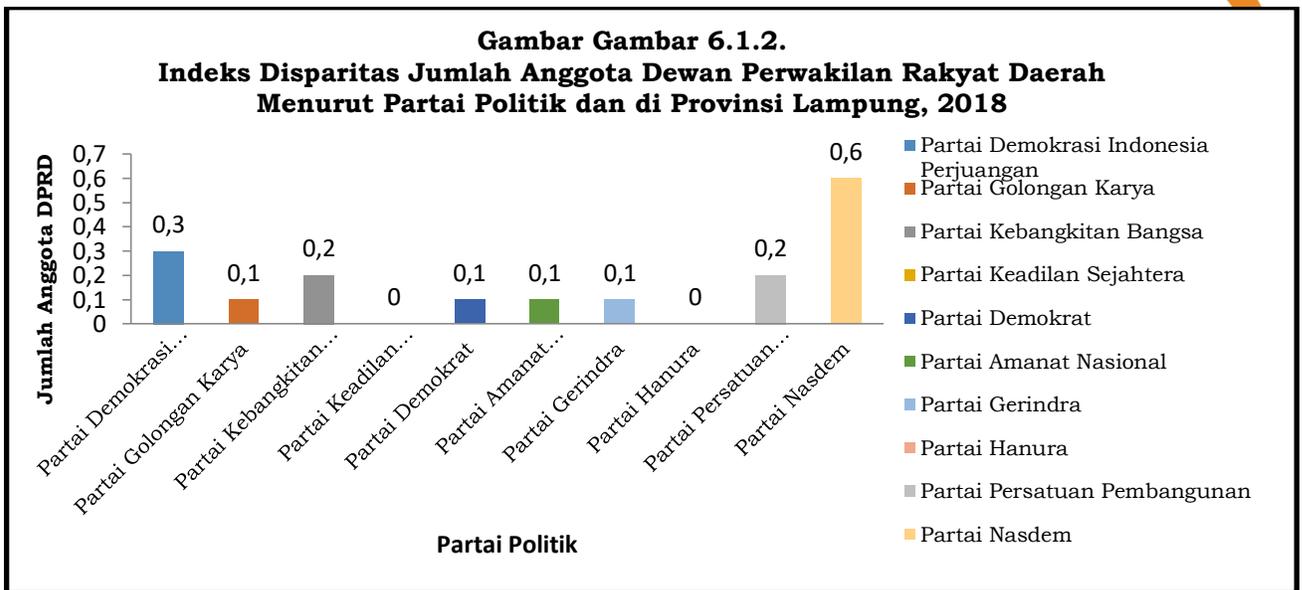
(2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Data pada Gambar 6.1.1 menunjukkan bahwa pada dasarnya akses perempuan menjadi anggota legislatif sudah memperhatikan amanah undang-undang, meskipun masih jauh dari jumlah minimal (30%). Secara keseluruhan partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif sudah mencapai 15 persen atau setengah dari jumlah minimal.



Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka, BPS 2019

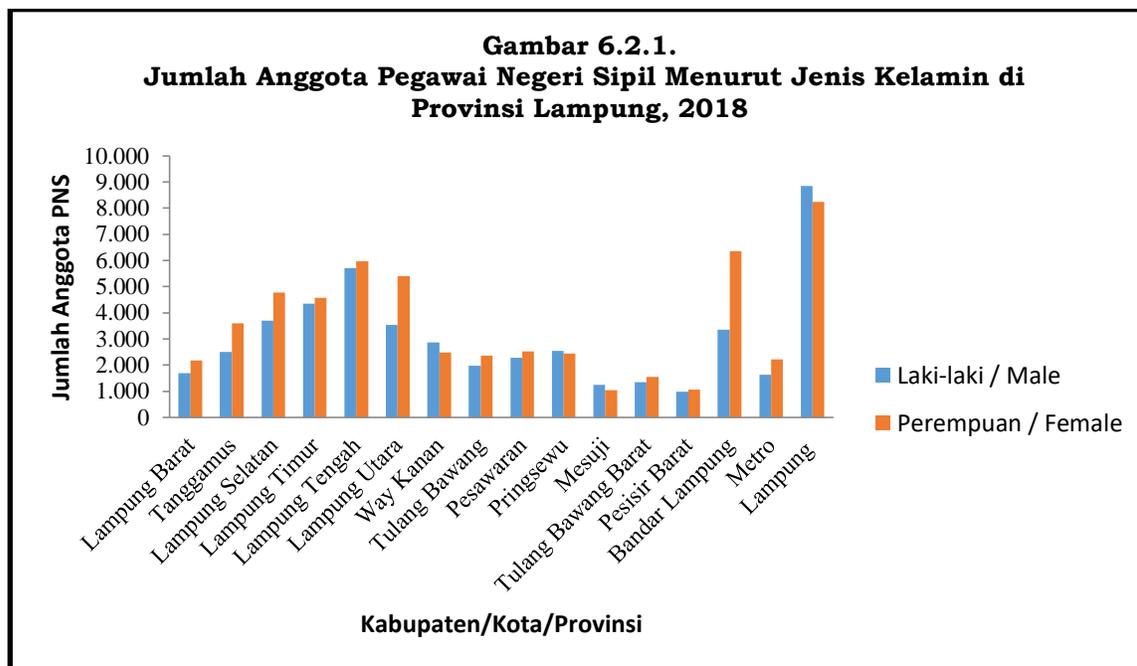
Dilihat dari nama partainya, data pada Gambar 6.1.1 menunjukkan bahwa PKS yang paling sedikit atau tidak ada anggota legislatif perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kabupaten/kota, maka Kota Metro yang jumlah anggota DPRD perempuan sudah melebihi target 30%.



Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka 2019 (diolah)

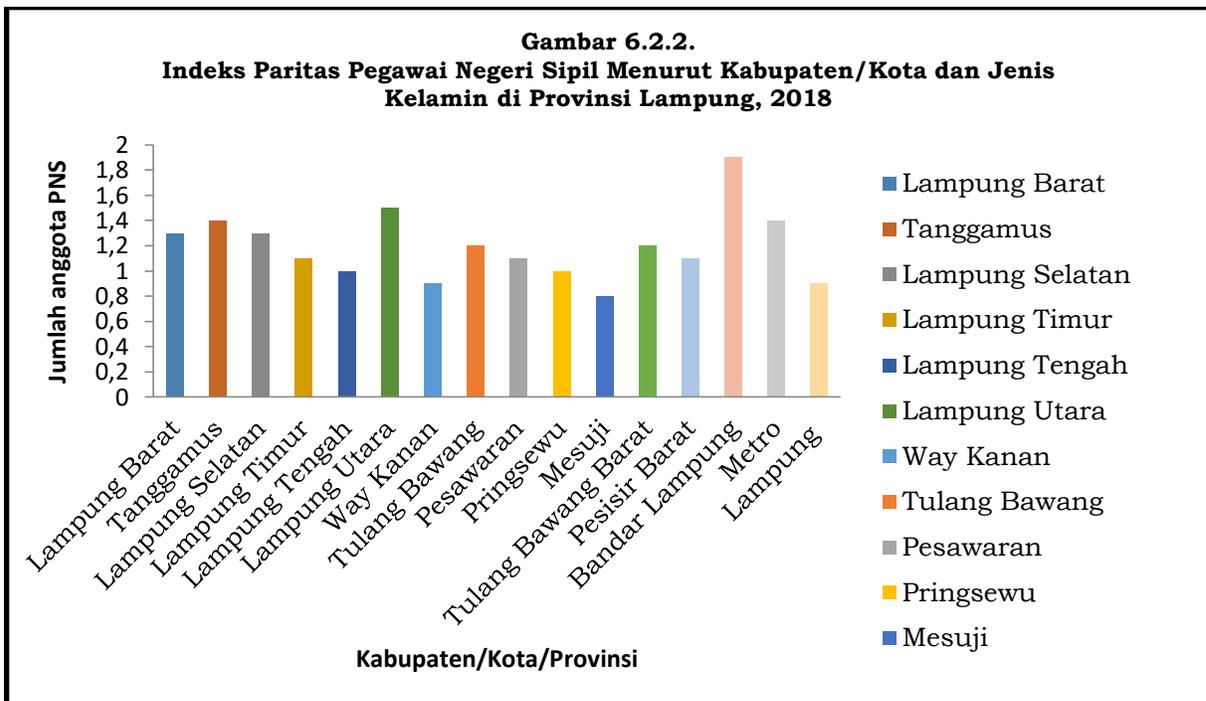
6.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Data pada Gambar 6.1.2 menunjukkan bahwa pegawai sipil daerah di Provinsi Lampung sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Tetapi jika dilihat pada masing-masing kabupaten/kota tampak bahwa sebagian besar pegawai negeri sipil daerah yang perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.



Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka, BPS 2019

Sudah terbuka akses perempuan sebagai PNS merupakan suatu realitas yang menggembirakan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah peluang menduduki jabatan pada jenjang yang lebih tinggi. Data pada Gambar 6.2.1 juga memperkuat bahwa kesenjangan gender pada perempuan terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung dan kemudian di Kabupaten Lampung Utara.

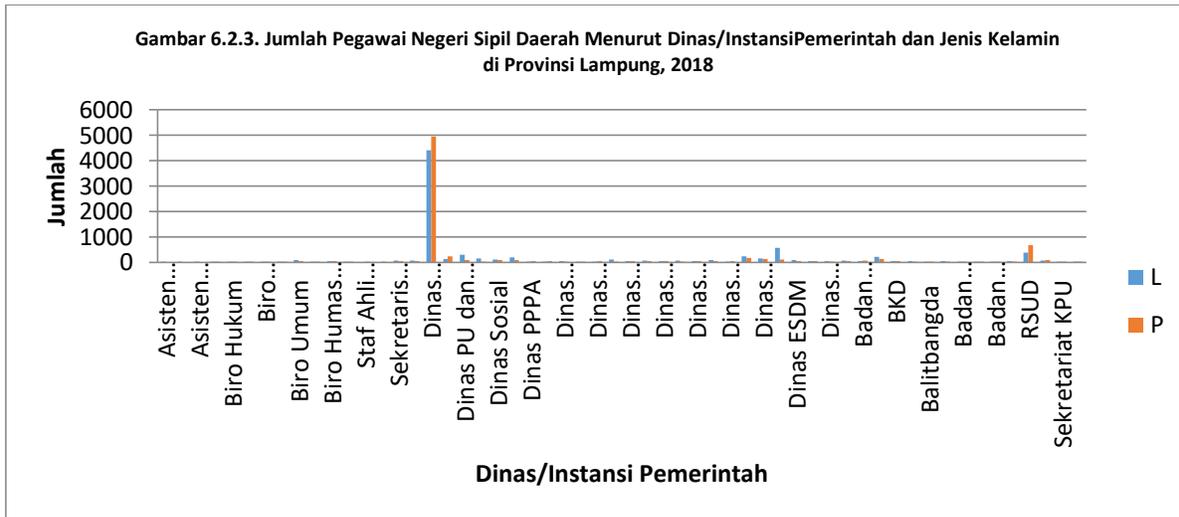


Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka 2019 (diolah)

Data pada Gambar 6.2.2 menunjukkan bahwa terdapat 48 persen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Provinsi Lampung yang berjenis kelamin perempuan. Secara umum perbedaan yang kecil menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan PNSD perempuan yang tidak berarti terhadap PNS laki-laki. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa kontrol terhadap keseimbangan penerimaan pegawai yang responsif gender tetap penting, tetapi yang juga penting diperhatikan adalah kesetaraan akses dan partisipasi PNS dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Artinya, peka gender dalam PNS bukan hanya dalam penerimaan input dari luar tetapi juga dalam meningkatkan kualitas untuk mampu menduduki jabatan pada jenjang karir di dalam.

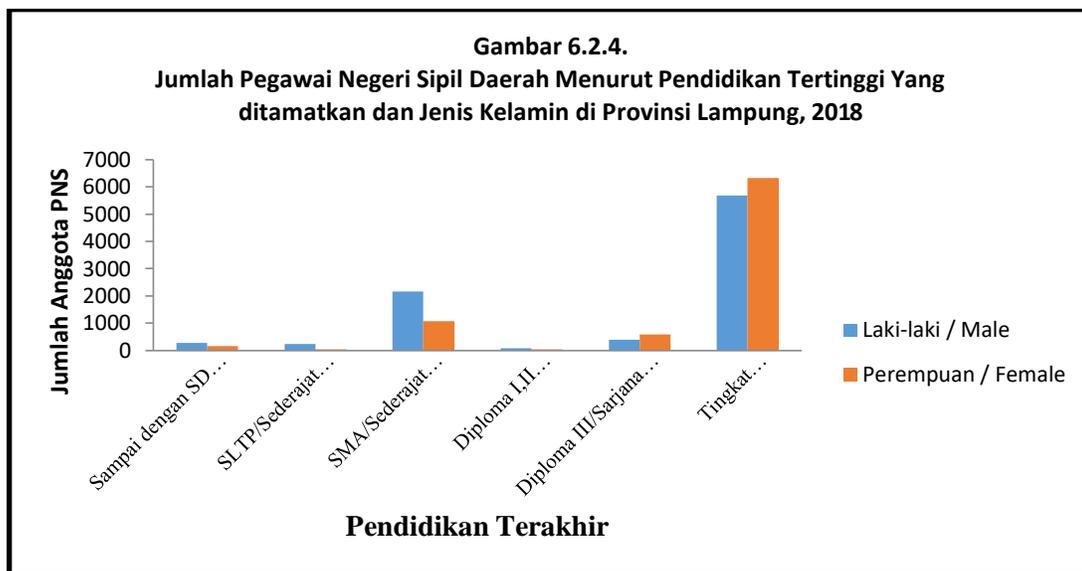
Data pada Gambar 6.2.3 juga menunjukkan bahwa posisi puncak jabatan sebagai PNS setelah Gubernur dan Wagub sudah tidak lagi mempertimbangkan jenis kelamin, melainkan kualitas atau kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun perempuan jika

memiliki kapasitas kecakapan yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, maka peluang akses dan partisipasi itu nyata dapat diperoleh.



Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka 2019

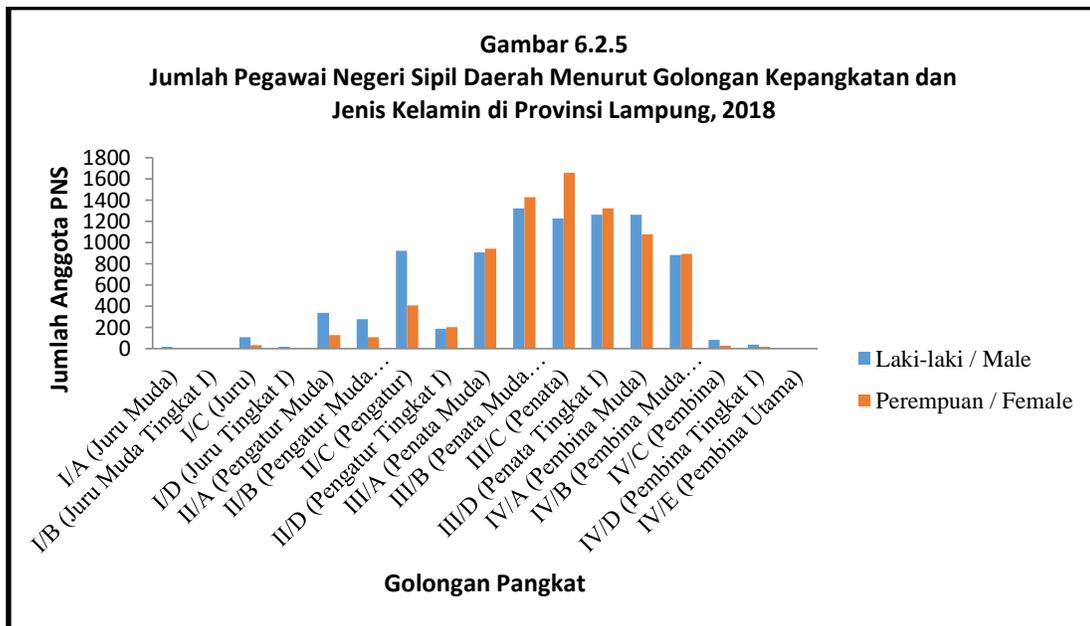
Dilihat dari tingkat pendidikan PNS, data pada Gambar 6.2.2 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan Diplom III, Sarjana sampai Doktor lebih banyak pegawai perempuan dibanding pegawai laki-laki. Jenjang golongan dan kepangkatan ini mempengaruhi akses jabatan struktural yang dapat diperoleh. Semakin tinggi golongan pangkat seorang PNS didukung oleh persyaratan lainnya, maka semakin besar peluangnya untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi pula. Berdasarkan variasi jumlah dan golongan pangkat pada PNS tersebut, paling tidak sudah mampu mewarnai semakin terbukanya peluang perempuan untuk menduduki jabatan yang strategis sehingga berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang lebih responsif gender.



Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka, BPS 2019

Dilihat dari golongan kepangkatan, data pada Gambar 6.2.4 menunjukkan bahwa sebagian besar PNS laki-laki berada pada golongan I dan II, sedangkan PNS perempuan berada pada golongan III. Untuk PNS golongan IV lebih banyak laki-laki tetapi sudah termasuk sudah setara.

Data pada Gambar 6.2.5 menunjukkan bahwa kesenjangan status golongan pangkat PNS perempuan berada pada golongan III/C, sedangkan kesenjangan laki-laki ada pada golongan kepangkatan II/C. Dilihat dari data ini paling tidak menunjukkan bahwa rata-rata tingkat golongan pangkat pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai perempuan. Selain itu, peluang yang lebih besar kepada pegawai perempuan untuk menduduki jabatan strategis di daerah menjadi perhatian tersendiri.



Sumber: Data Provinsi Lampung Dalam Angka 2019

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati juga tidak luput dari perhatian untuk dilihat dalam perspektif gender, karena jabatan dalam posisi ini yang paling menentukan dalam membuat kebijakan pada tingkat kabupaten. Di Provinsi Lampung, terdapat dua orang bupati perempuan, yakni di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur dan satu orang wakil Bupati, yakni di Kabupaten Pesisir Barat.

7. KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan pada perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Adapun tantangan yang dihadapi perempuan sebagai korban kekerasan yakni pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dalam *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* di *United Nations* pada tahun 1993, dijelaskan bahwa setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi merupakan bagian dari kekerasan pada perempuan.

Komitmen global yang paling baru terkait dengan kekerasan terhadap perempuan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di mana salah satu target dari tujuan kelima (Kesetaraan Gender) adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan baik di ranah publik maupun domestik, termasuk perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual dan eksploitasi lainnya (*United Nations, Sustainable Development Goals,*

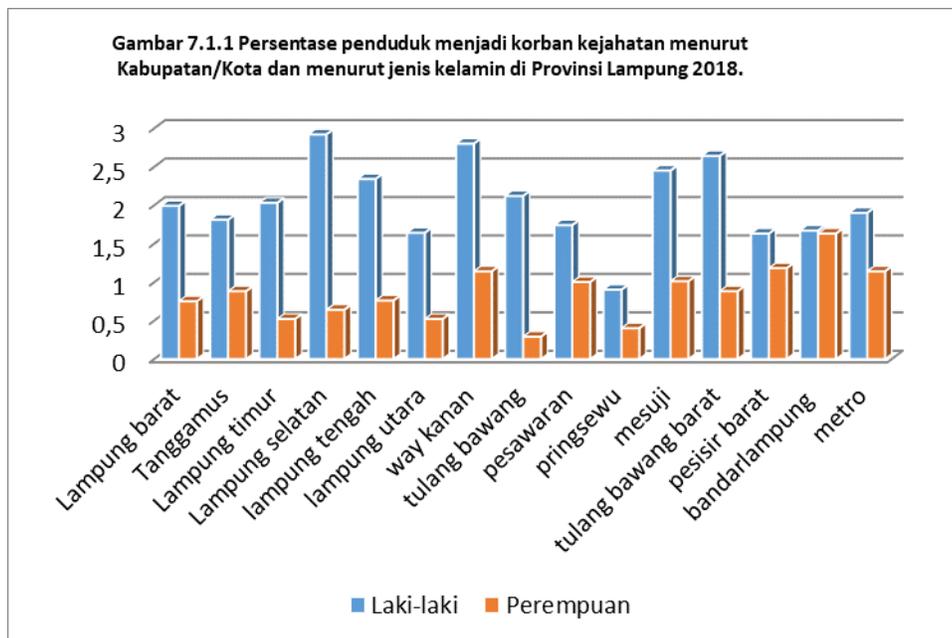
2015). Seiring dengan komitmen global tersebut, berbagai studi tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak juga terus berkembang dalam rangka untuk melihat prevalensi dan memahami lebih mendalam isu kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kajian yang cukup penting dalam kajian isu kekerasan terhadap perempuan adalah studi multi-negara berbasis populasi yang dilakukan oleh WHO. Salah satu kajian yang cukup penting dalam kajian isu kekerasan terhadap perempuan adalah studi multi-negara berbasis populasi yang dilakukan oleh WHO. Studi ini memperkirakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hidupnya (Heise L., *et al.* 1999).

Batasan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai "korban" sebagaimana diuraikan menggambarkan spektrum kekerasan terhadap perempuan yang luas. Korban kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kekerasan tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan korban secara individual dan sosial serta mengakibatkan trauma fisik dan psikis. Dilihat dari bentuknya, kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, mental, seksual, trafficking, penelantaran dan lainnya. Sedangkan dilihat dari lokasi terjadinya, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ruang publik (di luar rumah) maupun domestik (di dalam rumah). Penegasan atas kekerasan yang terjadi pada ranah domestik ini sangat penting dan beralasan karena masih kuatnya norma yang menganggap bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumahtangga adalah masalah privat yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain diluar keluarga. Selain dua aspek

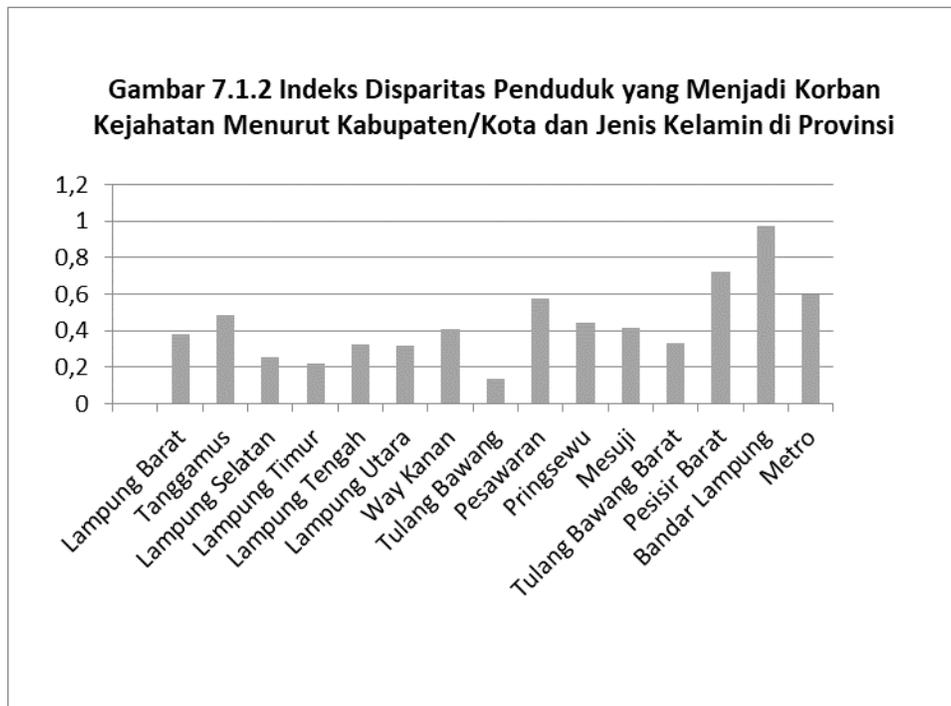
tersebut, luasnya spektrum kekerasan juga dapat dilihat dari aspek akar penyebab terjadinya kekerasan, faktor resiko, dan dampak kekerasan terhadap korban.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan memerlukan kerangka pendekatan yang tepat. Ada 3 kerangka pendekatan untuk memahami kekerasan, yaitu: **Pertama**, kerangka HAM, yang memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk dan manifestasi dari diskriminasi terhadap perempuan yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak yang paling asasi dan kebebasan fundamental. Dalam konteks nasional, pemerintah mengaktualisasikannya dalam bentuk peraturan perundangan mulai dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No.23/2004); UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21/2007); UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006 dan perubahannya menjadi UU No. 31/2014); Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Keputusan Presiden No. 181/1998 tentang pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Beberapa kebijakan operasional meliputi PP No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Konflik Sosial serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Substansi kerangka ini, maka negara sebagai penanggungjawab kewajiban yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan kewajiban untuk mencapai hasil yang maksimal terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Kewajiban-kewajiban

negara tersebut diwujudkan dengan melakukan upaya yang komprehensif, strategis, dan dengan mengalokasikan sumberdaya maksimal untuk pemajuan hak asasi perempuan. **Kedua**, Kerangka ekologi yang melihat kekerasan terhadap perempuan terjadi karna beberapa lapisan yang meliputi lapisan individual, lapisan hubungan lapisan organisasi komunitas, dan lapisan masyarakat. **Ketiga**, kerangka pelibatan laki-laki didasari sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki (Flood, 2011); konstruksi maskulinitas berperan penting dalam mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Flood, 2011); laki-laki dapat berperan positif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pencapaian keadilan gender (Flood, 2011).



Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2019



Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2019

Secara keseluruhan jika dilihat dari korban kejahatan memiliki indeks disparitas yang lebih tinggi di alami laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Korban kejahatan tertinggi ditempati Kota Bandar Lampung dengan indeks disparitas (IP) 0,97 yang diikuti oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan IP sebesar 0,72; Kota Metro dengan IP sebesar 0,6; dan Kabupaten Pesawaran dengan IP sebesar 0,57.

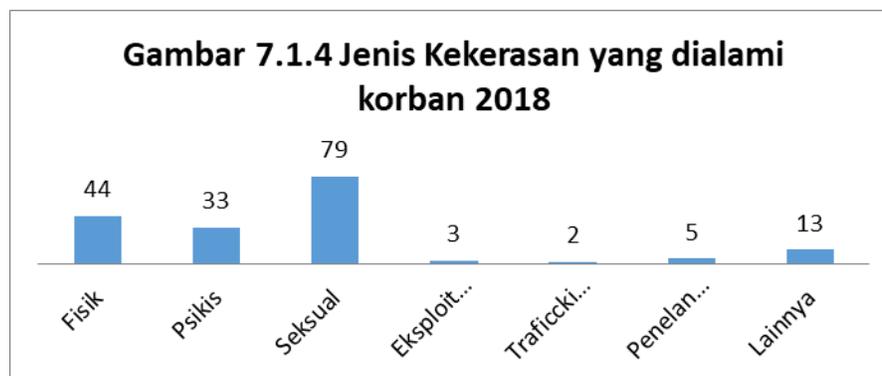
Data mengenai kasus kekerasan di Propinsi Lampung tidak terdapat dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk jumlah kasus. Pada Tahun 2018, jumlah kasus kekerasan sebesar 129 kasus, menurun di banding 2017 yang terdapat 259 kasus. Jika dibandingkan dengan antar kabupaten/kota, maka Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki kasus terbanyak sebesar 17,82% (23 Kasus), diikuti Kabupaten Way Kanan sebesar 13,95% (18 kasus), Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Selatan 12,40% (16 kasus) serta Kabupaten

Pringsewu 8,52% (11 Kasus). Terendah kasus kekerasan diperoleh Kabupaten Mesuji sebesar 0% (0 kasus), Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah didapati sama 1 kasus (0,77%) dan Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus didapati sama 3 kasus (2,32%), Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Barat maupun Pesawaran ditemui 6 kasus (4,65%), untuk Kota Metro 8 kasus (6,20%) serta Kabupaten Tulang Bawang 9 kasus (6,97%).

Jenis kekerasan yang dialami korban bervariasi, mulai dari tertinggi seksual (79 kasus), fisik (44 kasus), psikis (33 kasus), lainnya (13 kasus), penelantaran (5 kasus), eksploitasi (3 kasus), dan trafficking (2 kasus).



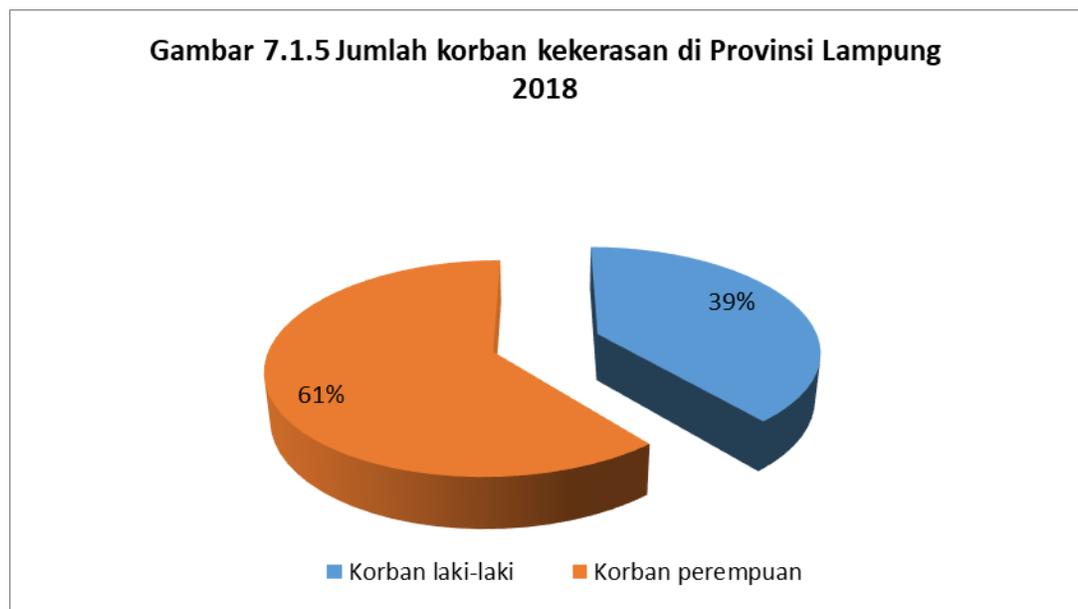
Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Tergambar kekerasan seksual merupakan jenis yang tertinggi terjadi di Provinsi Lampung dari tahun lalu sampai Tahun 2018 ini. Variasi bentuk kekerasan seksual di ranah publik dan personal yang terdiri dari mulai perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan bertujuan seksual, pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan, dan sterilisasi paksa. Semua bentuk kekerasan di atas, banyak korban yang mengalami kekerasan yang berlapis atau mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

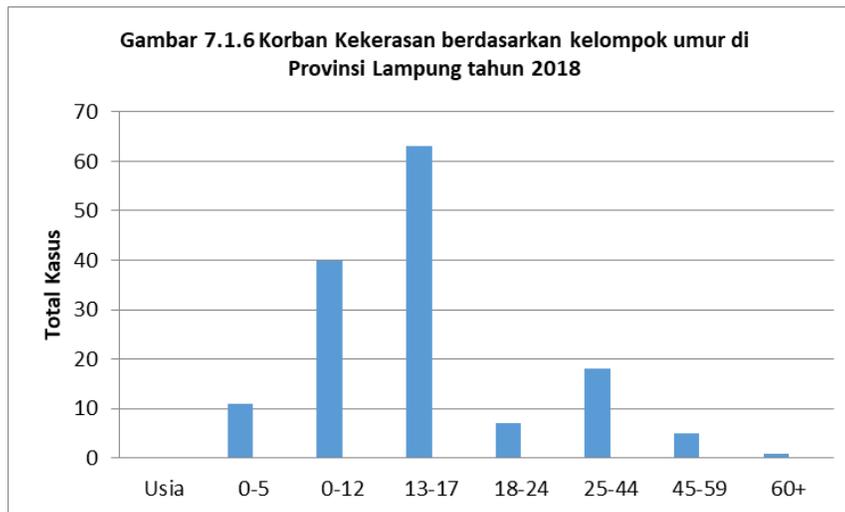
Untuk melihat data jenis kelamin korban kekerasan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Secara keseluruhan jumlah korban kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2018 sebanyak 145 korban. Persentase penduduk perempuan korban kekerasan lebih tinggi, yakni sebesar 99 atau sebesar 61% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 46 korban atau sebesar 39%. Tergambar disparitas atau kesenjangan gender, dimana korban berjenis kelamin perempuan lebih tinggi ketimbang jenis kelamin laki-laki sebesar 2,2. Banyak faktor menjadi pemicu indeks disparitas diantaranya dalam konteks pelaku kekerasan "laki-laki", maka konstruksi maskulinitas berperan penting dalam mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Karenanya, dibutuhkan perspektif *socio-ecological* model atau ekologi (lingkungan) yang perlu melihat adanya multi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan faktor-faktor ini terbagi dalam beberapa lapisan daritingkat personal/individu al sampai tingkat masyarakat, saling terkait satu sama lain dan berjalan secara bersama sehingga membentuk sebuah sistem yang membuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan tinggi, diantaranya: faktor orangtua atau pengasuh, faktor keluarga, faktor komunitas/masyarakat.

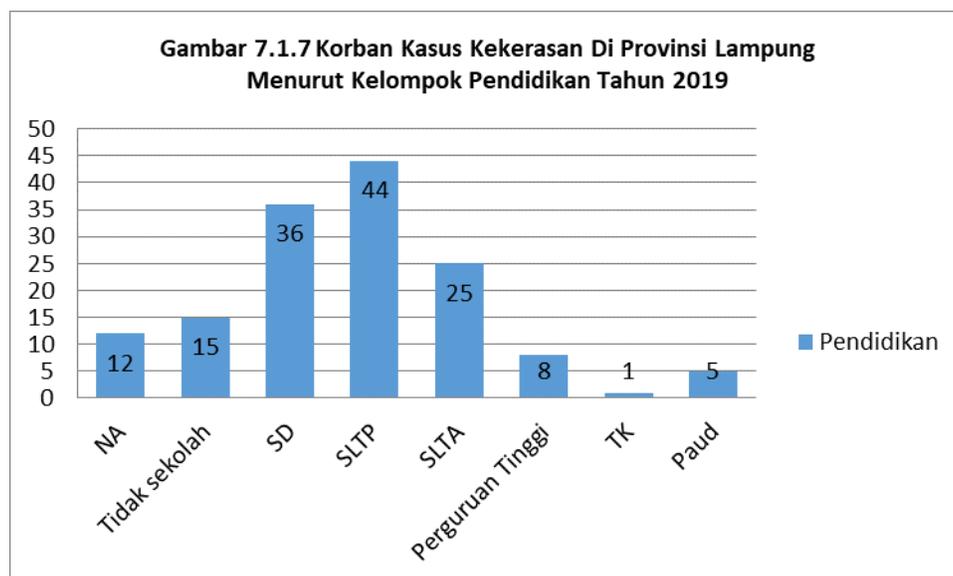
Untuk memahami secara mendalam tentang lokasi/klasifikasi, faktor resiko korban kekerasan, maka analisis korban kekerasan berdasarkan kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan tempat kejadian memiliki korelasi yang positif sebagaimana tergambar pada Gambar berikut ini:



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

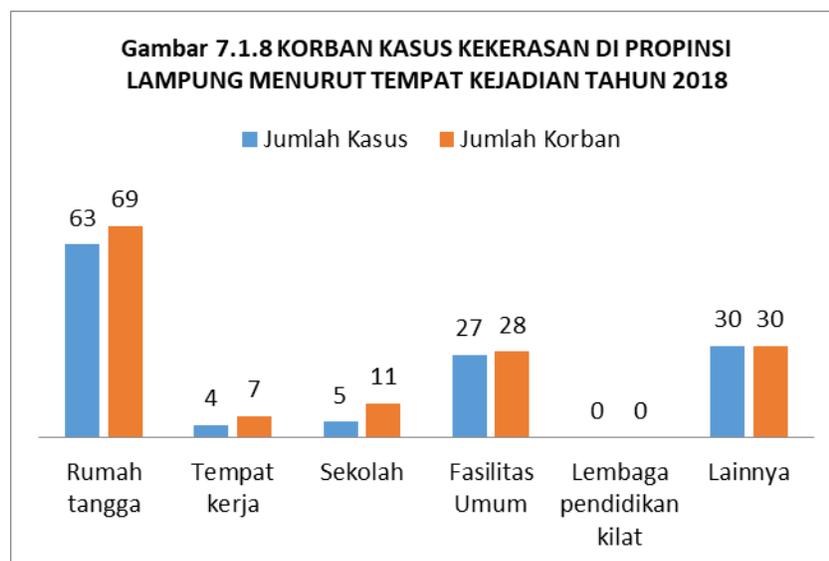
Diagram kelompok umur menggambarkan korban kekerasan tertinggi dialami korban usia 13-17 tahun sebesar 43,44%; korban usia 6-12 Tahun sebanyak 27,58% ; korban usia 25-44 Tahun sebesar 12,41%; korban usia 0-5 Tahun sebesar 7,58%; korban usia 18-24 Tahun sebesar 4,82%; korban usia 45-59 tahun sebesar 3,44%; korban usia 60+ tahun sebesar 0,68%. Tergambar masih maraknya kekerasan pada anak 0-18 tahun, khususnya bagi jenis kelamin perempuan. Usia tersebut merupakan usia masa pertumbuhan dan usia emas dalam mengenyam pendidikan. Dampak kekerasan pada usia pendidikan, selain fisik juga akan berdampak serius terhadap psikis perempuan korban kekerasan. Diantara dampak psikis yang kerap ditemukan pada usia di atas adalah depresi, masalah kecemasan, gangguan tidur, mimpi buruk, gangguan pola makan, kemungkinan bisa mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, menarik diri atau mengisolasi diri secara sosial, dan yang paling serius adalah bunuh diri. Gejala yang sama juga ditemukan pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan, misalnya menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya.

Selanjutnya Usia 18-44 adalah usia produktif bagi perempuan, dalam melaksanakan fungsi reproduksi dan produksi. Perempuan korban kekerasan dalam usia di atas berkecenderungan sudah menikah. Dampak fisik dari kekerasan bermacam-macam, mulai dari kematian, luka/cedera serius, cedera atau luka pada saat hamil termasuk kemungkinan cedera pada anak yang sedang dikandung, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual, dan memiliki kerentanan lebih terhadap penyakit. Selain dampak psikis, juga kerap ditemui dampak sosial yang tidak kalah seriusnya. Di antara yang dapat diidentifikasi adalah biaya untuk perawatan mereka yang menjadi korban, lebih-lebih ketika biaya kesehatan yang semakin mahal. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga berpengaruh pada produktivitas dan ketenagakerjaan. Karena kekerasan yang dialami, perempuan menjadi tidak dapat bekerja atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dibutuhkan pendekatan yang berbeda untuk kedua usia korban kekerasan di atas.

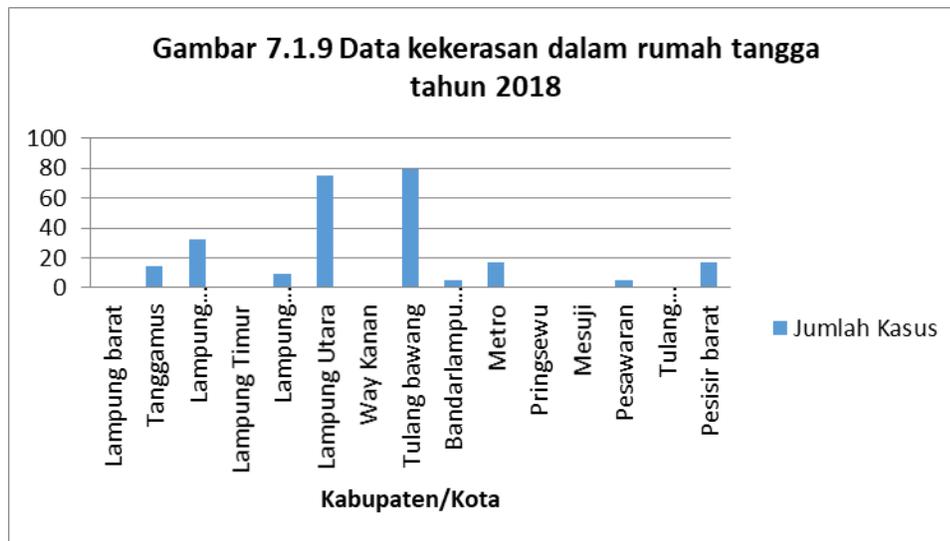


Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Diagram pendidikan menggambarkan korban kekerasan yang paling tinggi dialami pada tingkat pendidikan SLTP dengan 44 korban (30,34%) diikuti tingkat pendidikan SD sebesar 36%. Keterkaitan pendidikan dengan tingginya disparitas korban kekerasan dilihat dari aspek faktor resiko personal/individual. Perempuan yang memiliki pendidikan rendah beresiko menjadi korban kekerasan, demikian juga laki-laki yang memiliki pendidikan SLTP juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Pendidikan SLTP merupakan level pendidikan yang belum memiliki kemandirian, usia muda, belum memiliki sikap terhadap ketidaksetaraan peran gender dan kekerasan. Ini yang menjadi pemicu tingginya korban kekerasan pada level pendidikan SLTP. Ada banyak kemungkinan menjadi penyebabnya, diantaranya: Norma gender yang mendukung ketidakadilan gender, penerimaan Ideologi tentang laki-laki berhak mendapatkan layanan seksual dan subordinasi perempuan dan norma sosial yang mendukung kekerasan.



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019



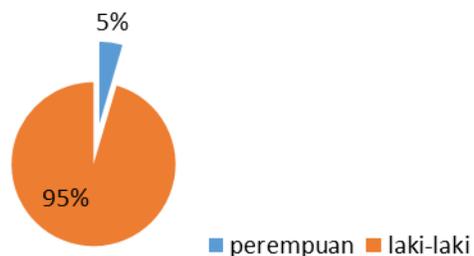
Sumber: Mahkamah Agung Daerah Lampung, Per maret Tahun 2019

Dua gambar di atas, secara keseluruhan terdeskripsi dilihat dari tempat kejadian, maka rumah tangga menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian, dengan korban kekerasan tertinggi berada pada jenis kelamin perempuan sebesar 47,58%, dengan indeks disparitas sebesar 1,1. Selanjutnya korban KDRT tertinggi ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, diikuti dengan Kabupaten Lampung Utara dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

Kerasan dalam rumah tangga di kenal dengan KDRT. Bentuk kekerasan terpilah menjadi (a) kekerasan terhadap Istri, (b) kekerasan terhadap anak, dan (c) kekerasan terhadap penghuni rumah lainnya seperti keponakan, adik/kakak ipar, dan pekerja rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk tindak kekerasan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Kekerasan bisa terjadi pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa. Tindak kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Data KDRT didapati Kabupaten Tulang Bawang

menempati urutan pertama, diikuti dengan Kabupaten Lampung Utara. Tingginya KDRT menggambarkan bahwa rumah tangga yang paling dominan menjadi tempat terjadi tindakan kekerasan. Diperlukan penyuluh keluarga sakinah atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pembinaan keluarga sakinah mempunyai peran penting untuk selalu mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada keluarga yang rentan akan terjadi kekerasan, bukan hanya yang rentan saja tetapi peran pemerintah sangat penting dalam membina kedamaian dan keharmonisan keluarga. Sebab ketidak harmonisan keluarga yang berujung pada perceraian faktor ekonomi yang menjadi pemicu paling dominan, maka pemerintah harus memberikan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pinjaman lunak atau hibah dengan tujuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga pra sejahtera Kabupaten/Kota yang memiliki korban kekerasan yang tinggi.

Gambar 7.1.10 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Propinsi Lampung Tahun 2019



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Secara keseluruhan jumlah pelaku kekerasan di Propinsi Lampung Tahun 2018 berjumlah 132 pelaku. Pelaku kekerasan sebesar 95,45% berjenis kelamin laki-laki, sementara 4,54% berjenis kelamin perempuan. Paralel dengan data, maka survei yang dilakukan beberapa lembaga yang kompeten, mulai dari *National Violence Against Women Survey* yang

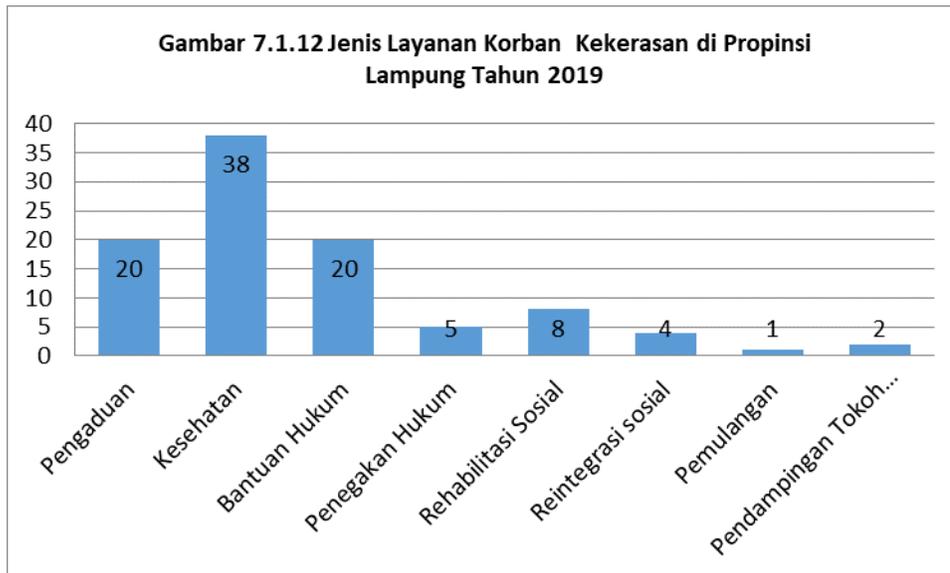
diterbitkan oleh Departemen of Justice Amerika Serikat menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Survey tentang laki-laki dan kekerasan terhadap perempuan di Asia Pasifik yang dilakukan oleh *Partner for Prevention* menunjukkan bahwa angka laki-laki yang melaporkan melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam hidupnya cukup tinggi yaitu sebesar 26 persen (di Indonesia) sampai 82 persen (di Papua New Guinea) laki-laki yang mengikuti survey mengaku telah melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Konsep maskulinitas yang mengidentikkan laki-laki dengan kekuatan, superioritas dan dominasi adalah faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan . Laki-laki melakukan kekerasan juga didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki memiliki hak atas perempuan. Untuk itu diperlukan peran positif laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pencapaian keadilan gender. Keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan akan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan semata isu perempuan akan tetapi juga isu dan kepentingan laki-laki. Untuk itu diperlukan dukungannya terhadap advokasi isu kekerasan terhadap perempuan, laki-laki akan mendapatkan manfaat, di antaranya laki-laki akan terbebas dari konsekuensi negatif keharusan mengikuti konsep maskulinitas yang diidealkan. Laki-laki juga akan memiliki hubungan yang lebih peduli dan penuh cinta kasih dengan perempuan. Manfaat ini dapat menjadi motivasi laki-laki untuk terlibat dalam gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Data mengenai hubungan pelaku kekerasan di Propinsi Lampung tidak terdapat dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk hubungan dan jumlah kekerasan. Pada Tahun 2018, jumlah pelaku kasus kekerasan pada perempuan sebesar 126 kasus. Hubungan pelaku kekerasan dengan korban kekerasan didominasi tertinggi mulai dari hubungan tetangga 39,39 %, pacar/teman 20,45 %, dan orangtua 15,90%.

Sedangkan mengenai korban *human trafficking* di Provinsi Lampung, berdasarkan data Polda Lampung tahun 2018 terdapat Dua (2) orang korban perdagangan manusia dari Kota Metro dan Kabupaten Way Kanan dengan tingkat pendidikan terakhir adalah SLTP dengan jenis kelamin perempuan.



Sumber: Simponi KPPPA RI, Tahun 2019

Korban kekerasan yang terjadi di Propinsi Lampung secara keseluruhan telah mendapatkan 98 pelayanan. Pelayanan yang diterima korban, mulai dari pencegahan, merespon kejadian, sampai dengan pasca kejadian kekerasan yang menimpa korban. Data mengenai jenis layanan korban tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin. Tergambar pada grafik jenis layanan korban kekerasan yang dilakukan korban kekerasan tertinggi kesehatan 38,77%, bantuan hukum dan pengaduan masing-masing 20,40%, rehabilitasi sosial 8,16, penegakan hukum 5,10%, reintegrasi sosial 4,08%, pendampingan tokoh agama 2,04% dan pemulangan 1,02%.

8. GANDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bersifat lintas sektor atau *crosscutting issue*, berintegrasi dalam kebijakan/program/kegiatan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Lampung. Gender Analysis Pathway (GAP) menjadi alat bagi perencana di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghasilkan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dapat memperkecil atau menghapus kesenjangan gender, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Tujuan penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) adalah :

- a. Referensi perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender di Provinsi Lampung
- b. Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki dan perempuan.
- c. Mengetahui latar belakang kesenjangan gender
- d. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender
- e. Mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan

Berikut analisis Gender Analysis Pathway (GAP) terhadap isu-isu strategis di Provinsi Lampung sebagai landasan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan/program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Lampung

1. GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>PROGRAM</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pengawasan pada OPD Inspektorat</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Inventarisasi Temuan Pengawasan</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Menurunnya jumlah temuan OPD yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Jumlah OPD di Propinsi</p> <p>Jumlah OPD yang menjadi pilot project (Uji Coba) implementasi PPRG di Propinsi Lampung</p> <p>Panduan untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan prinsip 4E (effectivity, efficiency, equality, equity) belum ada</p> <p>AKSES</p> <p>Prosentase OPD yang</p>	<p>AKSES</p> <p>Masih rendahnya OPD yang mengujicobakan anggaran di Provinsi Lampung karena keterbatasan kemampuan SDM paham gender</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Belum ada pelatihan dan pendampingan PPR secara intensif dan optimal</p> <p>Belum ada komitmen dari OPD untuk mengintegrasikan</p>	<p>Kurang pemahaman perencana di jajaran OPD di Propinsi Lampung Tentang integrasi dan perencanaan PUG</p> <p>Belum ada regulasi dan dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penyusunan PPRG pada OPD (Hanya tersedia surat permohonan</p>	<p>Belum ada pendampingan penyusunan PPRG pada setiap OPD</p> <p>Belum berfungsinya Pokja PUG pada lembaga driver PUG maupun pada OPD teknis</p>	<p>Menurunkan jumlah temuan OPD yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Penyusunan tool pengawasan berbasis prinsip 4E (effectivity, efficiency, equality, equity)</p> <p>Sosialisasi pengawasan berdasarkan prinsip 4 E (effectivity, efficiency, equality, equity)</p> <p>Koordinasi dengan lembaga driver PUG untuk pendampingan</p>	<p>AKSES</p> <p>Prosentase OPD yang mengintegrasikan gender dengan menerapkan 4E</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Jumlah PNS Pengawas di Inspektorat Propinsi yang bersertifikat. Pernah ikut pelatihan gender dan paham gender (L/P)</p> <p>KONTROL</p> <p>Panduan untuk melaksanakan</p>	<p>OUTPUT</p> <p>Jumlah tool pengawasan berdasarkan prinsip 4E sebanyak 1 buah buku</p> <p>Jumlah prosentase OPD yang tidak menerapkan 4E menurun</p> <p>OUTCOME</p> <p>Prosentase OPD di Propinsi Lampung yang sudah mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan</p>

	<p>mengintegrasikan gender dengan menerapkan 4E</p> <p>PARTISIPASI Jumlah PNS Pengawas di Inspektorat Propinsi yang bersertifikat. Pernah ikut pelatihan gender dan paham gender (L/P)</p> <p>KONTROL Panduan untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan prinsip 4E (effectivity, efficiency, equality, equity)</p> <p>MANFAAT Pengawasan belum mampu mendorong OPD menyusun</p>	<p>kan gender dalam perencanaannya</p> <p>KONTROL Belum adanya tool yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan berdasarkan prinsip 4E</p> <p>MANFAAT Pengawasan belum mampu mendorong OPD menyusun perencanaan berdasarkan prinsip 4E ((effectivity, efficiency, equality, equity)</p>	<p>untuk menyusun GBS)</p> <p>Belum ada tool sebagai acuan inspektorat melakukan pengawasan berdasarkan prinsip 4E</p>			<p>n penyusunan PPRG Mengusulkan rancangan regulasi penyusunan PPRG pada OP dengan menggunakan Surat Edaran Gubernur</p>	<p>n pengawasan berdasarkan prinsip 4E (effectivity, efficiency, equality, equity)</p> <p>MANFAAT Pengawasan belum mampu mendorong OPD menyusun perencanaan berdasarkan prinsip 4E</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

	perencanaan berdasarkan prinsip 4E							
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>ROGRAM</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Pelaksanaan Musrenbang sebagai bahan RKPD Propinsi Pada Tahun Anggaran</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Terumusnya rancangan RKPD Propinsi Lampung</p>	<p>AKSES</p> <p>Jumlah laki-laki dan perempuan yang diundang mengikuti musrenbang propinsimengacu pada peraturan perundangan</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang hadir berdasarkan undangan musrenbang Propinsi</p>	<p>AKSES</p> <p>Tidak digunakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan pelaksanaan untuk kepesertaan laki-laki dan perempuan dalam musrenbang</p> <p>PARTISIPASI</p> <p><i>Utusan kepesertaan dari undangan sebagian besar diwakili laki-laki</i></p> <p><i>Undangan peserta dari</i></p>	<p>Bappeda belum membuar regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki dalam musrenbang</p> <p>Sedikitnya kuota keterwakilan perempuan Yang disediakan Bappeda dalam pelaksanaan musrenbang</p> <p>Masih rendahnya pemahaman dan</p>	<p>Peraturan perundangan belum mengatur berapa jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam musrenbang</p> <p>Kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih didominasi oleh laki-laki</p> <p>Rendahnya pengetahuan pejabat OPD terkait isu gender</p>	<p>Terumusnya RKPD di tahun anggaran yang responsif gender</p>	<p>Mengusulkan regulasi pemerintah propinsi tentang keikutsertaan minimal 30% di pelaksanaan musrenbang Propinsi Lampung</p> <p>Mengidentifikasi pejabat eselon laki-laki dan perempuan di OPD Pemprov untuk dijadikan peserta musrenbang propinsi</p>	<p>Jumlah OPD yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran RKA</p>	<p>OUTPUT</p> <p>Jumlah OPD di Propinsi Lampung yang mengintegrasikan gender dalam rancangan SKPD</p> <p>OUTCOME</p> <p>Jumlah OPD di Propinsi Lampung yang memiliki GAP/GBS pada RKA meningkat</p>

<p>yang responsif gender</p>	<p>Jumlah peserta yang aktif dan memberikan usulan program/kegiatan pada pelaksanaan musrenbang Propinsi Lampung</p> <p>KONTROL Representasi perempuan sebagai pimpinan sidang/komisi/kelompok</p> <p>Laki-laki/perempuan peserta musrenbang yang mengangkat isu gender</p> <p>MANFAAT Jumlah OPD Propinsi yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran</p>	<p><i>unsur pemerintah sebagian besar diduduki laki-laki</i></p> <p><i>Undangan peserta khusus dari unsur perempuan kuota tidak banyak</i></p> <p>KONTROL Peserta didominasi laki-laki</p> <p>Peserta yang hadir dan berbicara /tanggapan mewakili institusinya ataupun menduduki jabatan kepesertaan didominasi laki-laki Rendahnya pengetahuan akan isu gender di kalangan</p>	<p>komitmen pejabat di internal Bappeda Propinsi terkait isu gender</p> <p>Belum optimalnya peran focal point di lingkup Bappeda propinsi</p> <p>Belum adanya tool di Bappeda apakah program/kegiatan OPD sudah responsif gender/belum</p>	<p>Belum optimalnya focal point gender di seluruh OPD di pemerintah propinsi</p>		<p>Melakukan klasifikasi perempuan dan laki-laki pada daftar hadir</p> <p>Menambahkan materi yang menjelaskan Masalah gender pada sesi seminar pelaksanaan musrenbang</p> <p>Menambahkan kuota peserta pada unsur keterwakilan perempuan</p>		
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>rencana kerja dan anggaran</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan OPD belum memberi kemanfaatan pada IPD dan IDG sehingga trend peningkatan Indeks Pembangunan Gender belum signifikan</p>	<p>pemerintah dan masyarakat Rendahnya kepedulian aparatur pemerintah dan Masyarakat akan isu gender</p> <p>MANFAAT Rendahnya pemahaman akan isu gender Meskipun sudah memiliki pemahaman tentang isu gender, namun komitmen pimpinan OPD dalam integrasi gender pada program/kegiatan masih rendah Rendahnya komitmen pimpinan OPD Pemprov untuk</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		mengintegrasikan GAB, GBS. RKA-OPD nya							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>PROGRAM</p> <p>Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Pengarusutamaan Gender Bidang Politik</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Meningkatnya kapasitas Kelembagaan PUG Bidang</p>	<p>Kepemimpinan Perempuan (Politik, Perkotaan, Perdesaan) :</p> <p>Jumlah/data perempuan Kepala Desa, pejabat pemerintah, legislatif</p> <p>Jumlah terlatihnya perempuan Kepala Desa, pejabat pemerintah, legislatif</p>	<p>AKSES</p> <p>Kurangnya akses perempuan dalam memperoleh informasi dalam ranah politik (kepemimpinan)</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Pertemuan potensial kurang berpartisipasi dalam pembangunan</p> <p>KONTROL</p> <p>Perempuan belum</p>	<p>Masih terbatasnya kapasitas SDM di Dinas PPPA Propinsi dalam melakukan pendampingan</p> <p>Keterbatasan data dalam melakukan perencanaan</p>	<p>Masih kentalnya budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan kemampuan di ranah pengambilan keputusan</p> <p>Belum tersedianya Fasilitator kepemimpinan Perempuan politik, perkotaan</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas perempuan tentang PUG Bidang politik</p>	<p>Kepemimpinan Perempuan legislatif, eksekutif, pedesaan dan perkotaan : Penguatan kapasitas perempuan</p>	<p><i>Jumlah terlatihnya Perempuan Potensial legislatif, eksekutif, perkotaan, pedesaan</i></p>	<p>OUTPUT</p> <p>Terlatihnya kepemimpinan perempuan</p> <p>OUTCOME</p> <p>Jumlah Fasilitator Kepemimpinan perempuan di beberapa kabupaten/kota/desa</p>

<p>politik di Kabupaten / Kota serta meningkatkan Kapasitas perempuan tentang PUG Bidang politik dan kepemimpinan</p>		<p>memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan</p> <p>MANFAAT Perempuan belum merasakan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang ramah gender</p>		<p>dan pedesaan</p>				
---	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>PROGRAM</p> <p>Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Penguatan PU, PPRG dan gender Focal Point</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Mendorong seluruh OPD menerapkan Perencanaan dan penganggaran gender</p>	<p>AKSES</p> <p>Jumlah OPD Provinsi Lampung sebanyak 50 OPD</p> <p>Perencana OPD sebanyak 50 orang perencana</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Jumlah perencana yang mendapatkan pelatihan 50 orang (2017) yang terdiri dari 35 perempuan dan 15 laki-laki.</p>	<p>AKSES</p> <p>Belum ada OPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Kurang pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>Belum ada pemahaman</p>	<p>Terbatasnya anggaran untuk menjalankan fungsi i Dinas Pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai driver PUG</p> <p>Kurang pemahaman perencana tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>Belum ada regulasi hukum di</p>	<p>Kurang harmonisnya OPD driver dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan gender focal point</p> <p>Tidak berfungsinya pokja PUG dan gender focal point dimasing-masing OPD</p> <p>Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran</p>	<p>Mendorong seluruh OPD menerapkan Perencanaan dan penganggaran gender</p>	<p>Melaksanakan pelatihan dan pendampingan Perencanaan dan penganggaran Gender</p> <p>Workshop Perencanaan dan penganggaran Gender</p> <p>Menyediakan format sebagai dasar dan panduan yang digunakan untuk Perencanaan dan penganggaran Gender</p>	<p>Jumlah OPD Provinsi Lampung sebanyak 50 OPD</p> <p>Perencana OPD sebanyak 50 orang perencana</p> <p>Jumlah perencana yang mendapatkan pelatihan 50 orang (2017) yang terdiri dari 35 perempuan dan 15 laki-laki.</p> <p>Jumlah SDM yang paham gender</p>	<p>OUTPUT</p> <p>Meningkatnya jumlah OPD yang memiliki pokja PUG dan gender focal point</p> <p>OUTCOME</p> <p>Meningkatnya OPD yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p>

	<p>Tahun 2020 dianggarkan dan ditargetkan peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 50 perempuan</p> <p>Jumlah SDM yang paham gender</p> <p>Jumlah OPD yang menerapkan GAB/GBS sebagai bagian RKA</p> <p>KONTROL Jumlah perencana yang paham gender</p> <p>Jumlah perencana yang bisa menyusun GAP dan GBS</p> <p>Jumlah kepala OPD yang</p>	<p>dari seluruh OPD untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>KONTROL Belum optimalnya peran pokja PUG dan gender focal poin di OPD</p> <p>MANFAAT Kegiatan PUG dan gender focal point belum mampumendorong OPD menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	<p>daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>Belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada semua bidang pembangunan secara lengkap dan akurat</p>	<p>n yang responsif gender</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p>		<p>Mengoptimalkan peran pokja PUG dan gender focal point di OPD</p>	<p>Jumlah OPD yang menerapkan GAB/GBS sebagai bagian RKA</p> <p>Jumlah perencana yang paham gender</p> <p>Jumlah perencana yang bisa menyusun GAP dan GBS</p> <p>Jumlah kepala OPD yang responsif gender</p> <p>Kegiatan penguatan PUG, PPRG dan gender focal point belum mampu mendorong seluruh OPD</p>	
--	--	---	--	---	--	---	---	--

	responsif gender MANFAAT <i>Kegiatan</i> penguatan PUG, PPRG dan gender focal point belum mampu mendorong seluruh OPD untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender							untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>PROGRAM</p> <p>Upaya kesehatan masyarakat</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita anak pra sekolah</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak,</p>	<p>Jumlah puskesmas di Propinsi Lampung (Rawat inap)</p> <p>Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan, nifas (kasus)</p> <p>AKSES Jumlah persalinan yang ditolong NAKES dengan kompetensi kebidanan di Propinsi Lampung (Tinggi/rendah)</p>	<p>AKSES Masih rendahnya sistem rujukan dini berencana di tingkat perifer</p> <p>Penyampaian informasi kesehatan ibu dan anak belum terkoordinasi dengan baik, sehingga akses laki-laki lebih tinggi</p> <p>Belum semua puskesmas rawat inap merupakan puskesmas PONED, hal ini menjadi penyebab masih</p>	<p>Respon program bersifata netral gender, dengan asumsi akses dan kesempatan sama</p> <p>Lemahnya koordinasi tingkat program di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat.</p>	<p>Koordinasi lintas sektor belum optimal, anggapan kematian ibu adalah masalah dibidang kesehatan masih kuat</p> <p>Fasilitas kesehatan yang berkualitas masih kurang</p>	<p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lansia, kesehatan reproduksi dan stunting</p>	<p>Pertemuan koordinasi pemantapan rujukan berjenjang</p> <p>Pelatihan PPGDON bagi dokter puskesmas dan bidan koordinator di puskesmas</p> <p>Penyusunan standar baku protap penanganan kegawatdaruratan obstretik</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana PKM PONED</p>	<p>AKSES Penyuluhan dan informasi tentang kesehatan ibu dan anak (KIA), stunting lebih mudah diakses oleh perempuan</p> <p>Belum semua puskesmas rawat inap merupakan puskesmas PONED</p> <p>PARTISIPASI Tidak semua ibu hamil mau memeriksakan kesehatannya</p>	<p>OUTPUT Terlayannya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan pelayanan stunting di sarana kesehatan yang ada</p> <p>OUTCOME Meningkatnya kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dalam rangka penurunan kematian ibu dan pencegahan stunting</p>

remaja, lansia, kesehatan reproduksi dan stunting	Prosentase Jumlah penanganan komplikasi obstretik	diketemukan kematian ibu, baik hamil, melahirkan maupun nifas				Penguatan kapasitas tenaga pelaksana PONED	ke tenaga kesehatan terdekat dengan lengkap (minimal 4 kali)	
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe) (orang)	Kesempatan perempuan untuk menghadiri penyuluhan kesehatan ibu dan anak lebih besar, karena waktu luang yang lebih banyak				Pengembang an materi penyuluhan/i klan layanan masyarakat untuk kesehatan ibu dan anak untuk sasaran laki-laki	Tidak semua ibu hamil di imunisasi TT Tidak semua ibu hamil minum tablet tambah darah (TTD/Fe) sesuai dosis	
	Penyuluhan dan informasi tentang kesehatan ibu dan anak (KIA),stuntin g lebih mudah diakses oleh perempuan	Keterbatasan informasi yang diterima laki-laki menyebabkan sulit mendeteksi adanya bahaya kehamilan				Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung suami siaga	KONTROL Data PUS 4T dimasyarakat	
	PARTISIPASI Tidak semua ibu hamil mau memeriksa ke kesehatannya ke tenaga kesehatan terdekat dengan	PARTISIPASI Keengganan ibu hamil memeriksa ke kesehatannya						

	<p>lengkap (minimal 4 kali)</p> <p>Tidak semua ibu hamil di imunisasi TT</p> <p>Tidak semua ibu hamil minum tablet tambah darah (TTD/Fe) sesuai dosis</p> <p>Laki-laki seringkali tidak mau menghadiri penyuluhan/d esimenasi informasi terkait kesehatan ibu dan anak</p> <p>KONTROL Data PUS 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak anak) merupakan ibu beresiko</p>	<p>kehamilannya , meminum tablet penambah darah, menolak imunisasi TT karena keterbatasan pengetahuan ibu atau larangan dari semua</p> <p>KONTROL Keterlambatan merujuk (terlambat memutuskan) untuk kerumah sakit menjadi penyebab kematian ibu</p>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

	jika hamil dan bersalin sehingga menjadi ancaman kematian ibu								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5. GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
<p>PROGRAM</p> <p>Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu</p> <p>TUJUAN KEGIATAN</p> <p>Menurunkan angka putus sekolah (APTS) pada jenjang pendidikan dasar</p>	<p>Jumlah sekolah SD dan SMP</p> <p>Jumlah siswa SD dan SMP</p> <p>Jumlah siswa dari keluarga kurang mampu pada SD dan SMP</p> <p>AKSES</p> <p>Akses sekolah untuk laki-laki dan perempuan terbuka luas</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>SD: APS (L/P), APK</p>	<p>AKSES</p> <p>Semua peserta didik baik laki-laki/perempuan</p> <p>Pada SD dan SMP punya peluang sekolah/melanjutkan sekolah ke jenjang yang tinggi</p> <p>PARTISIPASI</p> <p>Jenjang SD :</p> <p>Prosentase jumlah siswa perempuan terhadap laki-laki</p> <p>Data APS, APM, Putus sekolah laki-</p>	<p>Kurangnya kapasitas SDM untuk melakukan analisis gender pada kegiatan pemberian beasiswa pada jenjang SD dan SMP</p> <p>Terbatasnya kesediaan anggaran pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu</p>	<p>Kondisi geografis tempat tinggal siswa yang terpencil sulit menjangkau lokasi penelitian Budaya yang mengangap pendidikan bagi anak perempuan tidak penting Belum dipahaminya regulasi yang menegaskan keharusan melaksanakan PUG pendidikan</p>	<p>Menurunkan angka putus sekolah (APTS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP</p>	<p>Identifikasi siswa siswi sekolah SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu</p> <p>Melakukan identifikasi jumlah siswa sekolah SD dan SMP miskin , terpilih berdasarkan jenis kelamin</p> <p>Menentukan sekolah dan siswa miskin yang akan mendapatkan beasiswa</p>	<p>Angka APTs (Angka Putus Sekolah) SD dan SMP antara laki-laki dan perempuan</p>	<p>OUTPUT</p> <p>Meningkatnya penerima beasiswa untuk siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu</p> <p>OUTCOME</p> <p>Menurunnya angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD dan SMP</p>

	<p>(L/P), APTS (L/P), dan penerima beasiswa (L/P) SMP: APS (L/P), APK (L/P), APTS (L/P), dan penerima beasiswa (L/P)</p> <p>KONTROL Kepala sekolah SD (L/P) dan SMP (L/P)</p> <p>MANFAAT Pemberian beasiswa memberikan manfaat bagi peserta didik SD dan SMP</p>	<p>laki dan perempuan</p> <p>Jenjang SMP:</p> <p>Prosentase jumlah siswa perempuan terhadap laki-laki</p> <p>Data APS, APM, Putus sekolah laki-laki dan perempuan</p> <p>KONTROL Representasi pengambilan keputusan siswa laki-laki dan perempuan</p> <p>MANFAAT Pemberian beasiswa memberikan manfaat bagi peserta didik SD dan SMP</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

9. REKOMENDASI

1. Pengembangan Sistem (tool) Pengawasan Penganggaran Responsif Gender

Isu masih rendahnya OPD yang mengujicobakan anggaran di Provinsi Lampung, karena keterbatasan kemampuan SDM paham gender, minimnya pelatihan dan pendampingan PPRG secara intensif dan optimal, ketiadaan komitmen dari OPD untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaannya, membutuhkan pengawasan pada OPD dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Rekomendasi program dilakukan untuk menurunkan jumlah temuan pada OPD yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan melalui: (a) program penyusunan tool pengawasan berbasis prinsip 4E (*effectivity, efficiency, equality, equity*), (b) Sosialisasi pengawasan berdasarkan prinsip 4 E (*effectivity, efficiency, equality, equity*), (c) Koordinasi dengan lembaga driver PUG untuk pendampingan penyusunan PPRG, (d) Mengusulkan rancangan regulasi penyusunan PPRG pada OPD dengan menggunakan Surat Edaran Gubernur.

2. Musrenbang Provinsi yang Responsif Gender

Isu pelaksanaan Musrenbang sebagai bahan RKPD Provinsi Lampung yang dinilai belum responsif gender telah menyebabkan minimnya jumlah OPD yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran RKA. Rekomendasi program dilakukan untuk terumusnya rancangan RKPD Provinsi Lampung yang responsif gender melalui : (a) Pegusulan regulasi pemerintah Provinsi tentang keikutsertaan minimal 30% di pelaksanaan musrenbang Provinsi Lampung; (b) Perlu mengidentifikasi pejabat eselon laki-laki dan perempuan di OPD Pemprov untuk dijadikan peserta musrenbang Provinsi; (c) Melakukan klasifikasi perempuan dan laki-laki pada daftar hadir; (d) Menambahkan materi yang menjelaskan Masalah

gender pada sesi seminar pelaksanaan musrenbang; (e) Menambahkan kuota peserta pada unsur keterwakilan perempuan.

3. Peningkatan Kelembagaan PUG Bidang Politik dan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan

Isu rendahnya kapasitas Kelembagaan PUG Bidang politik di Kabupaten/Kota serta rendahnya kapasitas kepemimpinan perempuan berdampak pada indeks pemberdayaan gender. Rekomendasi program ditujukan membentuk kepemimpinan Perempuan legislatif, eksekutif, pedesaan dan perkotaan dan penguatan kapasitas perempuan, sehingga jumlah terlatihnya Perempuan Potensial legislatif, eksekutif, perkotaan, pedesaan semakin besar dan jumlah Fasilitator Kepemimpinan perempuan di beberapa kabupaten/kota/desa meningkat.

4. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Isu minimnya OPD di Provinsi Lampung yang menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, membutuhkan strategi Penguatan PUG, PPRG dan gender Focal Point. Rekomendasi program ditujukan untuk: (a) Melaksanakan pelatihan dan pendampingan Perencanaan dan penganggaran Gender; (b) Workshop Perencanaan dan penganggaran Gender; (c) Menyediakan format sebagai dasar dan panduan yang digunakan untuk Perencanaan dan penganggaran Gender; (d) Mengoptimalkan peran pokja PUG dan gender focal point di OPD

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lansia, Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Stunting

Isu rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lansia, kesehatan reproduksi dan tingginya prevalensi gizi buruk (stunting) membutuhkan program-program kesehatan masyarakat. Rekomendasi program ditujukan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang melalui: (a) Pertemuan koordinasi pemantapan rujukan berjenjang; (b) Pelatihan PPGDON bagi dokter puskesmas dan bidan koordinator di puskesmas; (c) Penyusunan standar baku protap penanganan kegawat daruratan obstetrik; (d) Pemenuhan sarana dan prasarana PKM PONEB; (e) Penguatan kapasitas tenaga pelaksana PONEB; (f) Pengembangan materi penyuluhan/iklan layanan masyarakat untuk kesehatan ibu dan anak untuk sasaran laki-laki; (g) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung suami siaga.

6. Program Beasiswa untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS) pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP

Isu angka putus sekolah (APTS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP membutuhkan dukungan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Analisis gender. Rekomendasi program dibutuhkan untuk peningkatan penerima beasiswa untuk siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui : (a) Identifikasi siswa siswi sekolah SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu; (b) Melakukan identifikasi jumlah siswa sekolah SD dan SMP miskin , terpilah berdasarkan jenis kelamin; (c) Menentukan sekolah dan siswa miskin yang akan mendapatkan beasiswa

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, F. 2015. Analisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek Huruf, tingkat pengangguran terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. *e-Jurnal Katalogis*, 3(7):40-49.
- Amalia, A. 2017. Pengaruh pendidikan, pengangguran dan ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *At-Tawasuth*, 3(3): 324-344.
- Anggraeni, MD., Hartati, Permana, RH. 2007. Peran suami dalam Penggunaan alat kontrasepsi yang berwawasan gender. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 2(2): 73-81.
- Aridiyah, FO., Rohmawati, N., & Ririanty, M. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *e-Journal Pustaka Kesehatan*. 3(1): 163-170.
- Ardias, Setiani, O. & Hanani, Y. 2012. Faktor Lingkungan dan Perilaku Masyarakat yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Kabupaten Sambas. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 11(2): 199-207.
- Arkandi, I. & Winahju, WS. 2015. Analisis Faktor Risiko Kematian Ibu dan Kematian Bayi dengan Pendekatan Regresi Poisson Bivariat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. *Jurnal Sains dan Seni ITS* 4(2): 139-144.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2018: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018. Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2018: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2018. Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2019: Provinsi Lampung Dalam Angka. Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2018. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2019 – Laporan Pendahuluan. Jakarta:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. 2019. Data Kependudukan Tahun 2019.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2019. Data Kesehatan Tahun 2019.
- Buku Saku Kesehaatan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2019. Data Kesehatan Tahun 2019.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 2019. *Data Pendidikan SMA dan SMK Provinsi Lampung 2019*. Bandar Lampung.
- Febriyanti, D. & Isabella. 2016. Implementasi kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada tahap pra penempatan (studi kasus TKI Kota Palembang). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 1(2): 22-29.
- Gesti, H.N. 2016. Analisis determinan pendapatan tenaga kerja sektor industri di Indonesia tahun 2014 *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(5): 373-385.
- Harfina, D. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah: Analisis Data Sakernas 2007. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(1): 15-32.
- Hapsari, AT., Shaluhiyah, Z., & Suryoputro, A. 2018. Pengaruh Faktor Pendukung terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Filariasis di Kota Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 13(2): 143-154.
- Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ini Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, Jakarta, UNICEF, Hlm
- Huda, Laksmi Nurul. 2007. Hubungan Status Reproduksi, Status Kesehatan, Akses Pelayanan Kesehatan dengan Komplikasi Obstetri di Banda Sakti, Lhoksumawe Tahun 2005. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol.1, No.6, Juni 2007 (Hal 276).
- Jayanti, KD., Basuki, H. & Wibowo, A. 2016. Faktor yang Memengaruhi Kematian Ibu (Studi Kasus di Kota Surabaya). *Jurnal Wiyata* 3(1): 46-53.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Indonesia 2013-2017. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.
- Maharyani, HW. & Handayani, S. 2010. Hubungan karakteristik suami dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB di wilayah Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. *KesMas* 4(1): 49-58.
- Mariana, N., Loriana, R., & Mustaming. 2018. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi di Puskesmas Wonorejo Samarinda. *Jurnal Husada Mahakam*, 4(6): 377-390.

- Mariam, E. 2018. Gambaran Masyarakat yang Mengalami Kejadian Tuberculosis di Wilayah Kerja Puskesmas Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Kesehatan "Akbid Wira Buana"* 4(2): 1-9.
- Maryatun, S. 2012. Pengaruh Terapi Psikoedukasi terhadap Pengetahuan dan Tingkat Kecemasan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga dengan Penyakit TBC Paru. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 3(1): 62-75.
- Muchtar, Yati, 2001; "Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 14, , h.12-13.
- Mulyani, S., Shafira, NNA., & Haris, A. 2018. Pengetahuan ibu tentang kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. *JMJ*, 6(1): 45-55.
- Nurhidayati, Sitti (dkk). 2018. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penolong Persalinan di Wilayah Halmahera Utara. Semarang. Vol.13, No.1, Januari 2018 (hal 47)
- Pohan, NH. 2017. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance* 2(3): 424-435.
- Prabandari, GM., Musthofa, SB. & Kusumawati, A. 2018. Beberapa faktor yang berhubungan dengan penerimaan ibu terhadap imunisasi *measles rubella* pada anak SD di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 6(4): 573- 581.
- PSKK UGM dan Plan Indonesia. 2011. Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2011. Yogyakarta.
- Putri, DSK & Wahyono, TYM. 2013. Faktor Langsung dan Tidak Langsung yang berhubungan dengan Kejadian Wasting pada Anak Umur 6-59 bulan di Indonesia Tahun 2010. *Media Litbangkes* 23(3): 110-121.
- Program Indonesia Pintar Tahun 2016 Bantu 19,2 Juta Siswa Indonesia", diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/program-indonesiapintar-tahun-2016-bantu-192-juta-siswa-indonesia>. Pada tanggal 25 September 2018.
- Rachmah, NF. & Puhadi. 2104. Pemodelan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur Menggunakan *Bivariate Poisson Regression*. *Jurnal Sains Dan Seni POM ITS* 3(2): 194-199.
- Rahayuningsih, ES. 2018. Analisis profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Madura. *Pamator*, 11(1): 19-31.

Raharjo, Yulfitra. 1995. "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi". Makalah Seminar Hak dan Kesehatan Reproduksi; Implikasi Pasal dan Rencana Tindakan Kairo bagi Indonesia. PPK-UGM bekerjasama dengan PKBI dan Ford Foundation. Yogyakarta, 1-2 Mei 1995.

Rachmah, NF. & Puhadi. 2014. Pemodelan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur Menggunakan *Bivariate Poisson Regression*. *Jurnal Sains Dan Seni POM ITS* 3(2): 194-199.

Rahayuningsih, ES. 2018. Analisis profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Madura. *Pamator*, 11(1): 19-31.

Raharjo, Yulfitra. 1995. "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi". Makalah Seminar Hak dan Kesehatan Reproduksi; Implikasi Pasal dan Rencana Tindakan Kairo bagi Indonesia. PPK-UGM bekerjasama dengan PKBI dan Ford Foundation. Yogyakarta, 1-2 Mei 1995.

Rieker, P.P. & Bird, C.E. 2005. Rethinking Gender Differences in Health: Why We Need to Integrate Social and Biological Perspectives. *Journals of Gerontology: SERIES B. 60B(Special Issue II)*: 40-47.

Sutikno, A., Haida AIN., & Sari, DY. 2018. Effectiveness of Socialization of Immunization of Pentavalen Continued by Health Persons to Mother's Compliance Batita in Working Center Health Center Community Beji Malang, East Java. *Journal of Nursing Practice*. 1(2): 18-25.

Suwandi. 2005. Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia, (dalam Muladi (editor); Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Adita

Suyasa, ING., Putra, NA. & Aryanta, IWR. 2016. Hubungan Faktor Lingkungan dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan. *Echotropic* 3(1): 1-6.

Syatriani, S., Puji, E., & Susilowati, A. 2009. Partisipasi Masyarakat Menanggulangi Lingkungan Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Rappocini Kota Makasar. *KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 3(5): 219-223.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Verbrugge, L.M. 1985. Gender and Helth : An Update on Hyphotheses dan Evidence. *Journal of Health and Social Behavior*, 26(3): 156-182.

Wati, Lilik Sholikhah. 2013. Gambaran Penyebab Kematian Neonatal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardii. Surakarta.

Yudhastuti, R. & Vidiyani, A. 2005. Hubungan Kondisi Lingkungan, Kontainer, dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Nyamuk *Aedes Aegypti* di Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue Surabaya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 1(2): 170-182.

LAMPIRAN

2.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
	0-14	0-14	15-64	15-64	65+	65+
Lampung Barat	22,96	28,12	69,5	68,14	3,54	3,74
Tanggamus	27,63	28,63	67,47	65,74	4,9	5,58
Lampung Selatan	28,76	28,73	66,24	65,85	5	5,42
Lampung Timur	26,89	26,73	66,78	66,67	6,33	6,6
Lampung Tengah	27,11	26,88	67,17	66,27	5,72	6,85
Lampung Utara	29,18	28,55	66,02	66,18	4,79	5,27
Way Kanan	28,59	30,11	65,81	64,56	5,6	5,33
Tulang Bawang	29,25	30,27	66,69	66,11	4,06	3,63
Pesawaran	27,8	28,22	67,06	66,1	5,13	5,68
Pringsewu	27,21	27,07	66,92	66,18	5,87	6,75
Mesuji	28,09	29	66,62	66,53	5,29	4,48
Tulang Bawang Barat	29,63	29,48	64,03	65,22	6,34	5,31
Pesisir Barat	35,48	30,94	60,91	65,13	3,61	3,93
Bandar Lampung	26,8	26	69,69	70,06	3,51	3,94
Metro	25,79	24,62	69,72	70,06	4,48	5,32
Lampung	27,9	27,85	67,04	66,68	5,06	5,46

2.2.2. Indeks Disparitas Gender Berdasarkan Jenjang Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	0-14	15-64	65+
Lampung Barat	1,22	0,98	1,06
Tanggamus	1,04	0,97	1,14
Lampung Selatan	1,00	0,99	1,08
Lampung Timur	0,99	1,00	1,04
Lampung Tengah	0,99	0,99	1,20
Lampung Utara	0,98	1,00	1,10
Way Kanan	1,05	0,98	0,95
Tulang Bawang	1,03	0,99	0,89
Pesawaran	1,02	0,99	1,11
Pringsewu	0,99	0,99	1,15
Mesuji	1,03	1,00	0,85
Tulang Bawang Barat	0,99	1,02	0,84
Pesisir Barat	0,87	1,07	1,09

Bandar Lampung	0,97	1,01	1,12
Metro	0,95	1,00	1,19
Lampung	1,00	0,99	1,08

2.4.1. Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil				
	Ya, Dapat Di Tunjukan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu	Total
Lampung Barat	74,46	7,64	17,91	0	100
Tanggamus	67,02	8,58	23,72	0,69	100
Lampung Selatan	58,86	12,53	28,05	0,56	100
Lampung Timur	58,08	17,53	24,39	0	100
Lampung Tengah	58,89	12,08	29,04	0	100
Lampung Utara	78,75	6,98	14,26	0	100
Way Kanan	74,93	11	14,07	0	100
Tulang Bawang	52,58	11,33	36,09	0	100
Pesawaran	71,46	4,84	23,29	0,41	100
Pringsewu	59,13	13,58	27,29	0	100
Mesuji	66,4	7,15	25,65	0,8	100
Tulang Bawang Barat	58,94	12,01	29,04	0	100
Pesisir Barat	60,93	15,56	23,51	0	100
Bandar Lampung	63,2	23,58	13,22	0	100
Metro	75,54	9,12	15,34	0	100
Lampung	63,68	12,84	23,32	0,16	100

2.4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki NIK

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lampung Barat	96,11	95,5	95,82
Tanggamus	99,09	98,17	98,65
Lampung Selatan	97,67	96,78	91,23
Lampung Timur	97,91	97,14	97,53
Lampung Tengah	98,43	97,59	98,02
Lampung Utara	96,78	94,6	95,7
Way Kanan	97,59	97,37	97,48
Tulang Bawang	95,59	95,98	96,02
Pesawaran	98,21	95,61	95,6
Pringsewu	97,97	96,62	97,43
Mesuji	97,44	96,6	97,32
Tulang Bawang Barat	93,95	96,81	97,14
Pesisir Barat	96,17	95,84	94,86
Bandar Lampung	99,31	95,95	96,06

Metro	97,4	98,39	98,85
Lampung	97,31	96,67	97,04

2.4.3. Indeks Disparitas Kepemilikan NiIK Usia 5 Tahun Keatas

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas
lampung barat	0,99
tanggamus	0,99
lampung selatan	0,99
lampung timur	0,99
lampung tengah	0,99
lampung utara	0,98
way kanan	1,00
tulang bawang	1,00
pesawaran	0,97
pringsewu	0,99
mesuji	0,99
tulang bawang barat	1,03
pesisir barat	1,00
bandar lampung	0,97
metro	1,01

3.1.1 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota (Lampung Dalam Angka)

Kabupaten/Kota	< 20 Tahun	20-34 Tahun	≥35 Tahun
Lampung Barat	0	2	1
Tanggamus	0	1	1
Lampung Selatan	0	4	1
Lampung Timur	0	0	1
Lampung Tengah	0	1	1
Lampung Utara	0	0	0
Way Kanan	0	0	0
Tulang Bawang	1	1	0
Pesawaran	0	0	0
Pringsewu	0	1	0
Mesuji	0	0	0
Tulang Bawang Barat	0	0	0
Pesisir Barat	0	2	1
Bandar Lampung	1	5	0
Metro	0	0	1

3.1.2 Jumlah Kematian Ibu Bersalin Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	< 20 Tahun	20-34 Tahun	≥35 Tahun
Lampung Barat	0	2	0
Tanggamus	0	3	1
Lampung Selatan	0	0	0
Lampung Timur	0	4	1
Lampung Tengah	0	0	0
Lampung Utara	0	5	3
Way Kanan	0	0	0
Tulang Bawang	0	0	0
Pesawaran	1	1	0
Pringsewu	0	0	0
Mesuji	1	2	5
Tulang Bawang Barat	0	1	0
Pesisir Barat	0	1	0
Bandar Lampung	0	1	0
Metro	0	1	0

3.1.3 Jumlah Kematian Ibu Nifas Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	< 20 Tahun	20-34 Tahun	≥35 Tahun
Lampung Barat	0	0	0
Tanggamus	0	2	4
Lampung Selatan	0	1	2
Lampung Timur	0	1	2
Lampung Tengah	0	6	2
Lampung Utara	0	1	0
Way Kanan	0	4	0
Tulang Bawang	0	0	1
Pesawaran	0	1	1
Pringsewu	0	4	1
Mesuji	0	0	0
Tulang Bawang Barat	0	0	0
Pesisir Barat	0	0	2
Bandar Lampung	1	4	2
Metro	0	1	0

3.2.1 Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Hamil Di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	K1	K4
Lampung Barat	6261	6051
Tanggamus	11927	11560
Lampung Selatan	20651	20228
Lampung Timur	19763	19285
Lampung Tengah	22464	20448
Lampung Utara	12653	11849
Way Kanan	8954	7628
Tulang Bawang	8787	8412
Pesawaran	8647	8358
Pringsewu	7186	6437
Mesuji	4293	3866
Tulang Bawang Barat	5400	5201
Pesisir Barat	3484	3255
Bandar Lampung	19686	18950
Metro	2919	2919

3.2.2 Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin Dan Nifas Di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota 2018

Kabupaten/Kota	Persalinan Ditolong Nakes	Persalinan di Fasyankes	Kf1	Kf2	Kf3
Lampung Barat	5604	5884	5685	5627	5546
Tanggamus	11198	10907	11220	11118	10963
Lampung Selatan	19426	19426	19426	19426	19426
Lampung Timur	18066	18066	18099	18049	18099
Lampung Tengah	19889	19899	19911	19569	18829
Lampung Utara	11235	11235	11235	11124	10817
Way Kanan	8044	7280	8082	8047	7763
Tulang Bawang	8042	8245	7866	7841	7749
Pesawaran	7716	7717	7829	7829	7829
Pringsewu	6436	6476	6436	6434	6433
Mesuji	3690	3267	3760	3698	3634
Tulang Bawang Barat	5113	5113	5113	5112	5112
Pesisir Barat	3107	3107	3130	3115	3112
Bandar Lampung	18030	18030	18030	17697	17353
Metro	2787	2787	2787	2787	2787

3.2.3 Cakupan Persentase Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Lampung Dalam Angka)

Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Yang Mendapatkan Vitamin A
Lampung Barat	5685
Tanggamus	11097
Lampung Selatan	19426
Lampung Timur	17977
Lampung Tengah	19899
Lampung Utara	11250
Way Kanan	8077
Tulang Bawang	7866
Pesawaran	7445
Pringsewu	6436
Mesuji	3760
Tulang Bawang Barat	5113
Pesisir Barat	1274
Bandar Lampung	18030
Metro	2787

3.2.4 Cakupan Ibu Hamil Konsumsi 90 Tablet Tambah Darah Fe3 Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018 (Buku Saku Kesehatan 2018)

Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan Ibu Hamil
Lampung Barat	93.25
Tanggamus	95.75
Lampung Selatan	96.04
Lampung Timur	94.44
Lampung Tengah	83.49
Lampung Utara	89.42
Way Kanan	84.5
Tulang Bawang	89.34
Pesawaran	92.18
Pringsewu	85.43
Mesuji	89.75
Tulang Bawang Barat	48.8
Pesisir Barat	93.88
Bandar Lampung	94.34
Metro	98.94

3.2.5 Cakupan Ibu Hamil Anemia Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018 (Buku Saku Kesehatan 2018)

Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil Anemia
Lampung Barat	9.35
Tanggamus	7.2
Lampung Selatan	2.11
Lampung Timur	23.43
Lampung Tengah	7.7
Lampung Utara	8.13
Way Kanan	4.5
Tulang Bawang	12.38
Pesawaran	4.99
Pringsewu	9.14
Mesuji	5.07
Tulang Bawang Barat	1.11
Pesisir Barat	22.75
Bandar Lampung	23.37
Metro	18.5

3.2.6 Jumlah Ibu Hamil Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Buku Saku Kesehatan 2018)

Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa	Jumlah Positif
Lampung Barat	307	1
Tanggamus	3,158	2
Lampung Selatan	15,506	4
Lampung Timur	5,974	6
Lampung Tengah	6,765	1
Lampung Utara	2,087	0
Way Kanan	831	0
Tulang Bawang	985	0
Pesawaran	116	1
Pringsewu	2,627	4
Mesuji	36	2
Tulang Bawang Barat	353	2
Pesisir Barat	0	0
Bandar Lampung	5,438	12
Metro	573	1

3.3.1 Presentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kurang Dari 16 Tahun	17-18 Tahun	19-20 Tahun	Diatas 21 Tahun
Lampung Barat	16.91	27.75	23.63	31.71
Tanggamus	15.11	21.64	26.26	36.99
Lampung Selatan	14.64	23.81	26.01	35.55
Lampung Timur	18.53	20.69	25.96	34.82
Lampung Tengah	15.28	22.21	25.3	37.21
Lampung Utara	16.39	22.12	23.96	37.53
Way Kanan	16.19	22.7	25.85	35.25
Tulang Bawang	16.08	22.97	29.8	31.15
Pesawaran	15.05	21.31	22.04	41.59
Pringsewu	11.53	17.26	25.62	45.59
Mesuji	19.03	29.91	24.96	26.11
Tulang Bawang Barat	15.83	27.21	26.43	30.53
Pesisir Barat	11.02	19.06	26.67	43.26
Bandar Lampung	7.48	12.78	20.05	59.68
Metro	10.75	13.55	21.05	54.65

3.3.2 Presentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	RS/RS Bersalin/Klinik	Praktek Nakes	Puskesmas/Polindes/Pustu	Rumah
Lampung Barat	32.16	16.89	6.05	44.89
Tanggamus	43.29	27.52	8.84	20.34
Lampung Selatan	48.03	32.13	7.06	12.78
Lampung Timur	42.05	51.27	4.91	1.77
Lampung Tengah	53.88	21.5	13.13	11.49
Lampung Utara	34.25	21.71	29.5	14.53
Way Kanan	41.37	9.64	6.72	41.19
Tulang Bawang	44.52	33.51	14.93	7.04
Pesawaran	50.25	19.68	6.33	23.75
Pringsewu	74.84	13.66	7.9	3.6
Mesuji	20.05	26.91	17.86	35.19
Tulang Bawang Barat	44.17	30.59	7.18	18.05
Pesisir Barat	30.09	4.1	12.97	52.84
Bandar Lampung	77.06	16.83	5.28	0.82
Metro	79.41	20.55	0.04	0

3.3.3 Presentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dukun Beranak/ Paraji
Lampung Barat	12.56	0	69.98	1.67	15.79
Tanggamus	7.09	0	81.57	0	11.35
Lampung Selatan	16.11	0	76.32	0	7.57
Lampung Timur	23.49	2.05	72.69	0	1.77
Lampung Tengah	28.61	0	67.97	0	3.42
Lampung Utara	9.47	0	86.35	0	4.18
Way Kanan	20.34	2.12	55.39	0	22.16
Tulang Bawang	13.46	2.2	82.28	1.03	1.04
Pesawaran	15.65	1.93	74.31	0	8.11
Pringsewu	15.72	3.89	80.39	0	0
Mesuji	14.22	3.03	75.66	0	7.09
Tulang Bawang Barat	19.53	0	70.56	0	9.91
Pesisir Barat	9.17	0.68	76.18	2.32	11.65
Bandar Lampung	21.06	0	78.9	0	0.03
Metro	49.9	1.62	48.48	0	0

3.3.4 Presentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Berat Bayi Hidup Yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kurang Dari 2 Kg	Lebih Dari 2,5 Kg	Tidak Ditimbang	TT
Lampung Barat	9.91	86.67	3.42	0
Tanggamus	17.9	78.58	1.86	1.66
Lampung Selatan	6.17	86.48	6.83	0.52
Lampung Timur	9.65	90.35	0	0
Lampung Tengah	11.94	86.95	1.11	0
Lampung Utara	10.52	89.29	0.19	0
Way Kanan	12.23	83.02	3.42	1.33
Tulang Bawang	4.75	87.66	0	7.59
Pesawaran	6.79	93.21	0	0
Pringsewu	14.88	85.12	0	0
Mesuji	11.07	88.93	0	0
Tulang Bawang Barat	6.95	93.05	0	0
Pesisir Barat	13.23	86.77	0	0
Bandar Lampung	8.8	86.99	0.94	3.2
Metro	9.57	90.43	0	0

3.3.5 Presentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan
Lampung Barat	16.56	62.46	20.97
Tanggamus	15.12	60.45	24.43
Lampung Selatan	8.3	61.55	30.15
Lampung Timur	10.78	64.38	24.84
Lampung Tengah	11.11	70.47	18.41
Lampung Utara	13.35	67.23	19.43
Way Kanan	14.63	70.5	14.87
Tulang Bawang	17.22	64.57	18.21
Pesawaran	8.63	63.02	28.35
Pringsewu	14.86	58.73	26.41
Mesuji	10.3	65.5	24.19
Tulang Bawang Barat	14.26	67.31	18.43
Pesisir Barat	7.27	72.16	20.57
Bandar Lampung	11.83	52.44	35.73
Metro	16.87	54.38	28.75

3.3.6 Presentase Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain
Lampung Barat	12.56	69.98	1.67
Tanggamus	7.09	81.57	0
Lampung Selatan	16.11	76.32	0
Lampung Timur	25.54	72.69	0
Lampung Tengah	28.61	67.97	0
Lampung Utara	9.47	86.35	0
Way Kanan	22.45	55.39	0
Tulang Bawang	15.65	82.28	1.03
Pesawaran	17.58	74.31	0
Pringsewu	19.61	80.39	0
Mesuji	17.25	75.66	0
Tulang Bawang Barat	19.53	70.56	0
Pesisir Barat	9.85	76.18	2.32
Bandar Lampung	21.06	78.9	0
Metro	51.52	48.48	0

3.4.1 Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	37.31	36.41
Tanggamus	28.99	30.46
Lampung Selatan	26.29	31.59
Lampung Timur	26.73	32.79
Lampung Tengah	34.32	34.3
Lampung Utara	26.09	26.75
Way Kanan	34.7	34.9
Tulang Bawang	30.62	29.55
Pesawaran	21.05	31.46
Pringsewu	29.06	32.32
Mesuji	37.68	42.35
Tulang Bawang Barat	33.77	34.95
Pesisir Barat	19.79	20.52
Bandar Lampung	29.61	30.48
Metro	23.88	28.48

3.4.2 Indeks Disparitas Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Paritas Gender
Lampung Barat	0.98
Tanggamus	1.05
Lampung Selatan	1.20
Lampung Timur	1.23
Lampung Tengah	1.00
Lampung Utara	1.03
Way Kanan	1.01
Tulang Bawang	0.97
Pesawaran	1.49
Pringsewu	1.11
Mesuji	1.12
Tulang Bawang Barat	1.03
Pesisir Barat	1.04
Bandar Lampung	1.03
Metro	1.19

3.4.3 Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	17.13	16.48
Tanggamus	14.11	14.82
Lampung Selatan	14.65	15.42
Lampung Timur	13.62	15.6
Lampung Tengah	14.66	15.86
Lampung Utara	13.17	12.52
Way Kanan	16.74	16.44
Tulang Bawang	13.74	12.01
Pesawaran	10.92	17.38
Pringsewu	11.83	13.37
Mesuji	18.59	19.15
Tulang Bawang Barat	13.96	14.28
Pesisir Barat	12.18	8.76
Bandar Lampung	12.59	10.32
Metro	8.94	11.35

3.4.4 Disparitas Gender Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas Gender
Lampung Barat	0.96
Tanggamus	1.05
Lampung Selatan	1.05
Lampung Timur	1.15
Lampung Tengah	1.08
Lampung Utara	0.95
Way Kanan	0.98
Tulang Bawang	0.87
Pesawaran	1.59
Pringsewu	1.13
Mesuji	1.03
Tulang Bawang Barat	1.02
Pesisir Barat	0.72
Bandar Lampung	0.82
Metro	1.27

3.4.5 Persentase Penduduk Yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	1.9	3.04
Tanggamus	2.43	4.87
Lampung Selatan	2.32	5
Lampung Timur	3.04	5.38
Lampung Tengah	3.03	5.2
Lampung Utara	1.96	3.83
Way Kanan	3.87	5.5
Tulang Bawang	4.29	6.83
Pesawaran	3.16	7.47
Pringsewu	2.94	7.76
Mesuji	2.58	3.92
Tulang Bawang Barat	4.74	5.51
Pesisir Barat	1.44	3.64
Bandar Lampung	5.34	6.6
Metro	5.1	8.18

3.4.6 Disparitas Gender Penduduk Yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas Gender
Lampung Barat	1.60
Tanggamus	2.00
Lampung Selatan	2.16
Lampung Timur	1.77
Lampung Tengah	1.72
Lampung Utara	1.95
Way Kanan	1.42
Tulang Bawang	1.59
Pesawaran	2.36
Pringsewu	2.64
Mesuji	1.52
Tulang Bawang Barat	1.16
Pesisir Barat	2.53
Bandar Lampung	1.24
Metro	1.60

3.4.7 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	15.42	13.49
Tanggamus	25.58	34.88
Lampung Selatan	29.84	37.13
Lampung Timur	14.72	20.59
Lampung Tengah	15.33	20.28
Lampung Utara	37.76	38.43
Way Kanan	27.17	22.43
Tulang Bawang	26.65	26.11
Pesawaran	28.15	33.66
Pringsewu	16.71	22.95
Mesuji	15.35	19.33
Tulang Bawang Barat	12.38	11.67
Pesisir Barat	14.78	8.97
Bandar Lampung	60.39	63.15
Metro	54.23	60.3

3.4.8 Disparitas Gender Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas Gender
Lampung Barat	0.87
Tanggamus	1.36
Lampung Selatan	1.24
Lampung Timur	1.40
Lampung Tengah	1.32
Lampung Utara	1.02
Way Kanan	0.83
Tulang Bawang	0.98
Pesawaran	1.20
Pringsewu	1.37
Mesuji	1.26
Tulang Bawang Barat	0.94
Pesisir Barat	0.61
Bandar Lampung	1.05
Metro	1.11

3.4.9 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	39.67	57.94
Tanggamus	47.13	66.14
Lampung Selatan	66.06	62.07
Lampung Timur	60.61	48.22
Lampung Tengah	44.03	41.37
Lampung Utara	63.38	67.76
Way Kanan	75.53	63.74
Tulang Bawang	41.16	60.35
Pesawaran	64	74.21
Pringsewu	48.8	45.41
Mesuji	32.68	65.96
Tulang Bawang Barat	52.01	53
Pesisir Barat	41.13	52.11
Bandar Lampung	91.27	81.08
Metro	85.22	72.99

3.4.10 Indeks Disparitas Gender Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas Gender
Lampung Barat	1.46
Tanggamus	1.40
Lampung Selatan	0.94
Lampung Timur	0.80
Lampung Tengah	0.94
Lampung Utara	1.07
Way Kanan	0.84
Tulang Bawang	1.47
Pesawaran	1.16
Pringsewu	0.93
Mesuji	2.02
Tulang Bawang Barat	1.02
Pesisir Barat	1.27
Bandar Lampung	0.89
Metro	0.86

3.4.11 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	26.17	32.73
Tanggamus	49.08	54.1
Lampung Selatan	41.75	48.32
Lampung Timur	41.62	45.97
Lampung Tengah	38.2	51.66
Lampung Utara	43.65	43.15
Way Kanan	46.66	43.56
Tulang Bawang	43.07	44.61
Pesawaran	62.3	66.8
Pringsewu	44.14	49.84
Mesuji	39.66	42.85
Tulang Bawang Barat	44.64	54.22
Pesisir Barat	54.94	58.65
Bandar Lampung	44.6	45.1
Metro	44.22	58.96

3.4.12 Disparitas Gender Penduduk Yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas Gender
Lampung Barat	1.25
Tanggamus	1.10
Lampung Selatan	1.16
Lampung Timur	1.10
Lampung Tengah	1.35
Lampung Utara	0.99
Way Kanan	0.93
Tulang Bawang	1.04
Pesawaran	1.07
Pringsewu	1.13
Mesuji	1.08
Tulang Bawang Barat	1.21
Pesisir Barat	1.07
Bandar Lampung	1.01
Metro	1.33

4.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki/Male			Perempuan/Female		
	7 Sd 12	13 Sd 15	16 Sd 18	7 Sd 12	13 Sd 15	16 Sd 18
Lampung Barat	100	97.21	68	100	92.21	66.48
Tanggamus	99.12	92.82	62.02	100	88.86	74.62
Lampung Selatan	100	92.53	73.71	100	94.27	69.98
Lampung Timur	99.54	90.49	60.06	100	99.91	71.09
Lampung Tengah	100	96.9	63.2	100	97.08	77.31
Lampung Utara	100	93.76	72.23	100	97.09	74.44
Way Kanan	100	91.73	66.09	99.12	98.98	65.94
Tulang Bawang	100	86.61	69.59	99.13	99.97	68.21
Pesawaran	100	98.39	72.71	100	95.31	71.27
Pringsewu	100	98.19	79.33	100	100	73.63
Mesuji	98.6	89.91	42.91	100	90.85	79.97
Tulang Bawang Barat	100	93.72	74.5	99.19	90.55	74.63
Pesisir Barat	100	88.94	64.56	100	85.25	79.41
Bandar Lampung	100	98.94	76.16	100	95.93	73.89
Metro	100	95.08	86.15	100	96.55	80.24

4.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Pada Tahun 2015- 2018

Kabupaten/Kota	Sd		Smp		Sm	
	Laki- Laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki- Laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki- Laki/ Male	Perempuan/ Female
Lampung Barat	110.42	116.26	85.56	79.47	78.05	86.06
Tanggamus	105.23	112.42	94.07	91.31	77.67	87.46
Lampung Selatan	108.29	106.87	89.08	106.87	74.62	64.27
Lampung Timur	104.85	106.32	100.59	106.32	66.36	82.6
Lampung Tengah	114.05	110.54	94.07	110.54	72.14	78.59
Lampung Utara	120.13	113.82	86.17	113.82	85.36	81.05
Way Kanan	109.66	108.85	100.41	108.85	77.85	80.62
Tulang Bawang	113.62	112.62	87.86	112.62	61.02	69.56
Pesawaran	110.72	116.72	95.74	116.72	79.43	92.94
Pringsewu	103.48	110.26	103.04	110.26	77.61	78.35
Mesuji	110.39	111.5	79.26	111.5	72.62	76.42
Tulang Bawang Barat	107.79	108.52	105.85	108.52	66.03	62.18
Pesisir Barat	105.87	109.44	84.5	109.44	71.47	105.22
Bandar Lampung	109.84	111.57	94.31	111.57	116.15	116.89
Metro	111.26	105.87	92.01	105.87	96.56	80.24

4.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Tahun 2015-2018

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SM	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	100	100	76.92	78.2	61.28	61.46
Tanggamus	97.42	98.24	77.5	77.25	46.91	68.95
Lampung Selatan	100	95.58	75.13	76.62	58.63	50.58
Lampung Timur	98.42	100	85.77	95.72	55.03	63.2
Lampung Tengah	100	98.33	76.37	75.16	53.36	52.8
Lampung Utara	100	100	74.43	83.01	50.94	63.17
Way Kanan	100	99.12	77.03	80.17	56.2	59.59
Tulang Bawang	100	99.13	66.66	84.35	45.01	42.96
Pesawaran	100	100	87.16	80.69	65.04	65.01
Pringsewu	100	100	86.69	80.62	61.81	64.12
Mesuji	98.6	100	79.26	88.36	42.91	76.42
Tulang Bawang Barat	100	99.19	87.79	81.91	51.4	53.37
Pesisir Barat	100	100	84.5	76.79	64.56	79.41
Bandar Lampung	100	98.79	78.18	79.77	65	73.26
Metro	100	100	91.98	96.55	86.13	80.24

4.2.1 Data Jumlah Siswa Tahun 2018-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Negeri	Laki-Laki Swasta	Perempuan Negeri	Perempuan Swasta
Kab. Lampung Selatan	10.616	5.941	10.864	4.913
Kab. Lampung Tengah	14.774	7.770	15.204	6.673
Kab. Lampung Utara	9.322	2.104	9.815	1.667
Kab. Lampung Barat	4.847	347	4.558	312
Kab. Tulang Bawang	6.159	2.037	5.816	1.997
Kab. Tanggamus	6.640	2.482	6.779	1.970
Kab. Lampung Timur	11.864	5.834	12.102	5.028
Kab. Waykanan	6.704	1.307	6.912	1.183
Kab. Pesawaran	6.094	1.363	6.001	1.002
Kab. Pringsewu	6.470	2.122	6.432	1.569
Kab. Mesuji	2.790	787	2.697	685
Kab. Tulang Bawang Barat	4.696	849	4.638	711
Kab. Pesisir Barat	2.880	117	2.758	86
Kota Bandar Lampung	14.381	7.532	15.115	6.327
Kota Metro	2.993	1.852	3.239	1.715

4.2.2 Data Jumlahsiswa SD Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah 2018 dan 2019

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki Tingkat						Perempuan Tingkat					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Lampung Selatan	347	156	153	64	46	0	169	72	60	31	31	0
Lampung Tengah	455	229	151	98	71	0	210	87	54	53	39	0
Lampung Utara	154	88	58	22	24	2	108	32	22	6	12	0
Lampung Barat	46	10	8	7	3	0	35	5	2	2	3	0
Tulang Bawang	133	57	30	23	40	0	80	32	8	12	22	0
Tanggamus	218	96	53	23	22	2	105	42	25	15	11	1
Lampung Timur	240	83	54	21	27	0	110	34	32	15	20	0
Way Kanan	265	79	58	35	14	0	115	34	26	13	12	0
Pesawaran	206	103	55	40	24	0	98	32	16	17	10	0
Pringsewu	184	108	74	26	10	0	79	43	16	5	7	0
Mesuji	108	36	35	17	14	0	50	19	16	8	9	0
Tulang Bawang Barat	138	44	45	28	14	1	64	16	11	9	4	0
Pesisir Barat	46	23	19	7	13	0	20	7	4	3	11	0
Bandar Lampung	207	107	76	53	42	0	97	53	32	19	20	0
Kota Metro	14	6	6	2	2	0	4	3	1	1	0	0

4.2.3 Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

Kab/Kota	Laki-Laki Tingkat						Perempuan Tingkat					
	I	I	Iii	Iv	V	Vi	I	Ii	Iii	Iv	V	Vi
Lampung Selatan	10	1	0	0	1	1	11	0	1	0	2	0
Lampung Tengah	12	6	2	4	0	2	8	3	0	1	3	4
Lampung Utara	2	2	1	3	1	5	2	0	0	0	0	3
Lampung Barat	4	0	0	2	1	3	4	0	0	0	1	0
Tulang Bawang	0	0	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1
Tanggamus	23	3	0	2	3	1	7	0	0	1	0	1
Lampung Timur	22	2	3	0	1	1	23	1	2	0	0	0
Way Kanan	5	1	0	1	0	3	9	1	1	0	0	3
Pesawaran	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Pringsewu	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0
Mesuji	7	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	2
Tulang Bawang Barat	0	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Pesisir Barat	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Metro	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0

4.2.4 Jumlah Siswa SMP Putus Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	VII	VIII	IX	VII	VIII	IX
Lampung Selatan	0	5	10	0	4	6
Lampung Tengah	2	6	17	1	1	3
Lampung Utara	2	3	8	2	0	1
Lampung Barat	1	0	1	1	0	0
Tulang Bawang	0	2	5	0	2	0
Tanggamus	2	2	0	0	2	0
Lampung Timur	2	7	4	6	2	5
Way Kanan	1	2	3	0	1	1
Pesawaran	1	3	2	0	0	1
Pringsewu	1	5	8	1	3	5
Mesuji	1	5	7	1	1	5
Tulang Bawang Barat	1	1	5	1	1	1
Pesisir Barat	1	0	1	0	0	1
Bandar Lampung	3	1	3	1	0	0
Metro	0	1	0	0	0	0

4.2.5 Data Siswa SMP Mengulang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat VII	Laki-Laki Tingkat VIII	Laki-Laki Tingkat IX	Perempuan Tingkat VII	Perempuan Tingkat VIII	Perempuan Tingkat IX
Lampung Selatan	18	28	0	13	17	0
Lampung Tengah	19	15	0	11	4	1
Lampung Utara	10	5	0	1	2	0
Lampung Barat	0	11	0	0	4	0
Tulang Bawang	5	24	0	5	20	0
Tanggamus	6	5	0	0	0	0
Lampung Timur	13	18	0	2	4	0
Waykanan	19	34	0	13	28	0
Pesawaran	5	1	7	3	0	2
Pringsewu	7	8	0	0	0	0
Mesuji	2	5	0	1	2	0
Tulang Bawang Barat	3	7	0	2	2	0
Pesisir Barat	1	1	0	0	0	0
Bandar Lampung	50	61	3	7	22	2
Kota Metro	4	4	0	0	0	0

4.2.6 Jumlah siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	VII	VIII	IX	VII	VII	IX
Lampung Selatan	0	5	10	0	4	6
Lampung Tengah	2	6	17	1	1	3
Lampung Utara	2	3	8	2	0	1
Lampung Barat	1	0	1	1	0	0
Tulang Bawang	0	2	5	0	2	0
Tanggamus	2	2	0	0	2	0
Lampung Timur	2	7	4	6	2	5
Waykanan	1	2	3	0	1	1
Pesawaran	1	3	2	0	0	1
Pringsewu	1	5	8	1	3	5
Mesuji	1	5	7	1	1	5
Tulang Bawang Barat	1	1	5	1	1	1
Pesisir Barat	1	0	1	0	0	1
Bandar Lampung	3	1	3	1	0	0
Kota Metro	0	1	0	0	0	0

4.2.7 Jumlah Siswa SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat VII	Tingkat VIII	Tingkat IX
Kab. Lampung Selatan	10.253	11.350	10.731
Kab. Lampung Tengah	13.513	15.524	15.384
Kab. Lampung Utara	7.111	8.103	7.694
Kab. Lampung Barat	3.151	3.404	3.509
Kab. Tulang Bawang	5.246	5.488	5.275
Kab. Tanggamus	5.460	6.206	6.205
Kab. Lampung Timur	10.739	12.011	12.078
Kab. Waykanan	5.106	5.616	5.384
Kab. Pesawaran	4.384	5.231	4.845
Kab. Pringsewu	5.388	5.665	5.540
Kab. Mesuji	2.174	2.391	2.394
Kab. Tulang Bawang Barat	3.432	3.832	3.630
Kab. Pesisir Barat	1.631	2.094	2.116
Kota Bandar Lampung	13.162	15.302	14.891
Kota Metro	3.247	3.328	3.224

4.2.8 Jumlah Siswa SMA Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	12	9	0	5	9	0
Lampung Tengah	0	1	1	0	1	0
Lampung Utara	2	2	0	2	1	0
Lampung Barat	5	17	0	0	7	0
Tulang Bawang	4	1	0	0	0	0
Tanggamus	3	1	0	0	1	0
Lampung Timur	2	1	0	0	0	0
Way Kanan	14	6	0	0	1	0
Pesawaran	1	2	0	1	0	0
Pringsewu	1	1	0	0	1	0
Mesuji	3	12	0	0	5	0
Tulang Bawang Barat	0	1	0	0	0	0
Pesisir Barat	2	2	0	1	1	0
Bandar Lampung	10	4	0	3	1	0
Kota Metro	5	7	0	1	3	0

4.2.9 Jumlahsiswaputussekolahmenurutjeniskelamin Dan Tingkat Sma Kelas X, Xi, Xii Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	0	1	3	1	2	4
Lampung Tengah	1	2	1	2	1	1
Lampung Utara	0	3	3	0	3	1
Lampung Barat	1	0	2	0	1	4
Tulang Bawang	1	3	1	0	4	1
Tanggamus	1	3	2	1	0	2
Lampung Timur	1	6	0	1	7	2
Way Kanan	0	2	1	0	0	0
Pesawaran	0	1	0	0	1	1
Pringsewu	1	0	3	1	0	1
Mesuji	0	0	2	0	0	1
Tulang Bawang Barat	2	7	0	3	2	1
Pesisir Barat	2	0	1	1	0	0
Bandar Lampung	0	0	1	1	0	1
Kota Metro	0	0	0	0	0	0

4.2.11 Jumlah Siswa SMK Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	5	5	0	1	7	0
Lampung Tengah	14	5	0	13	5	0
Lampung Utara	4	0	0	0	0	0
Lampung Barat	0	0	0	0	0	0
Tulang Bawang	6	8	0	0	4	0
Tanggamus	0	2	0	0	0	0
Lampung Timur	1	7	0	0	2	0
Way Kanan	5	9	0	0	11	0
Pesawaran	0	1	0	0	0	0
Pringsewu	1	1	0	0	0	0
Mesuji	3	4	0	0	1	0
Tulang Bawang Barat	3	0	0	0	0	0
Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	14	2	0	4	4	0
Metro	2	2	1	0	1	0

4.2.12 Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi Tahun 2018 Dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	0	1	1	0	0	1
Lampung Tengah	2	5	1	1	2	1
Lampung Utara	0	0	1	0	0	1
Lampung Barat	0	0	0	0	0	0
Tulang Bawang	0	6	3	1	3	1
Tanggamus	0	0	0	0	0	0
Lampung Timur	76	1	2	41	1	1
Way Kanan	0	0	0	0	0	0
Pesawaran	0	0	0	0	0	0
Pringsewu	1	2	0	0	1	0
Mesuji	0	0	0	0	0	0
Tulang Bawang Barat	0	0	0	1	0	0
Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	0	11	3	1	6	0
Metro	0	0	6	0	0	1

4.3.1 Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggitahun 2018 Dan 2019

Kabupaten/Kota	L < S1	L ≥ S1	P < S1	P ≥ S1
Kab. Lampung Selatan	162	791	289	1.863
Kab. Lampung Tengah	316	1.721	440	3.735
Kab. Lampung Utara	167	487	491	1.997
Kab. Lampung Barat	120	441	202	1.000
Kab. Tulang Bawang	94	403	181	948
Kab. Tanggamus	176	866	206	1.864
Kab. Lampung Timur	249	1.265	247	2.738
Kab. Way Kanan	152	796	198	1.726
Kab. Pesawaran	121	489	178	1.427
Kab. Pringsewu	115	553	153	1.323
Kab. Mesuji	108	393	119	648
Tulang Bawang Barat	56	338	102	730
Kab. Pesisir Barat	89	264	191	548
Kota Bandar Lampung	81	512	201	2.589
Kota Metro	19	188	43	561

4.3.2 Data Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Negeri	Laki-Laki Swasta	Perempuan Negeri	Perempuan Swasta
Lampung Selatan	112	15	118	29
Lampung Tengah	146	39	117	49
Lampung Utara	83	16	136	13
Lampung Barat	76	4	86	3
Tulang Bawang	40	7	30	8
Tanggamus	60	19	58	19
Lampung Timur	112	30	87	25
Waykanan	91	4	82	6
Pesawaran	50	5	60	8
Pringsewu	76	18	37	13
Mesuji	24	1	33	4
Tulang Bawang Barat	24	2	37	7
Pesisir Barat	47	1	73	0
Kota Bandar Lampung	107	40	143	59
Kota Metro	32	9	27	14

4.3.3 Data Jumlah Tenaga Kependidikan SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	L Negeri	L Swasta	P Negeri	P Swasta
Kab. Lampung Selatan	52	3	42	4
Kab. Lampung Tengah	104	9	56	10
Kab. Lampung Utara	53	4	61	8
Kab. Lampung Barat	69	1	45	0
Kab. Tulang Bawang	29	3	20	7
Kab. Tanggamus	106	3	88	2
Kab. Lampung Timur	80	5	25	3
Kab. Way Kanan	59	2	41	0
Kab. Pesawaran	26	1	15	3
Kab. Pringsewu	53	7	44	2
Kab. Mesuji	23	0	13	1
Kab. Tulang Bawang Barat	18	1	9	1
Kab. Pesisir Barat	27	0	23	0
Kota Bandar Lampung	28	27	32	38
Kota Metro	16	11	11	8

4.3.4 Data Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Smp Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Negeri	Laki-Laki Swasta	Perempuan Negeri	Perempuan Swasta
Kab. Lampung Selatan	364	143	730	264
Kab. Lampung Tengah	700	422	990	539
Kab. Lampung Utara	349	96	847	133
Kab. Lampung Barat	307	11	538	22
Kab. Tulang Bawang	232	75	364	107
Kab. Tanggamus	331	103	512	187
Kab. Lampung Timur	557	318	762	404
Kab. Waykanan	393	53	672	70
Kab. Pesawaran	301	51	583	74
Kab. Pringsewu	347	97	537	160
Kab. Mesuji	158	17	271	51
Kab. Tulang Bawang Barat	172	40	316	57
Kab. Pesisir Barat	242	12	429	13
Kota Bandar Lampung	364	306	1,281	641
Kota Metro	137	101	294	143

4.3.5 Data Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	L <S1	L ≥ S1	P <S1	P ≥ S1	Gtt
Kab. Lampung Selatan	71	426	507	59	422
Kab. Lampung Tengah	160	957	1122	125	565
Kab. Lampung Utara	52	393	445	61	481
Kab. Lampung Barat	25	293	318	18	391
Kab. Tulang Bawang	51	255	307	46	255
Kab. Tanggamus	66	365	434	52	214
Kab. Lampung Timur	94	778	875	67	394
Kab. Way Kanan	37	409	446	29	491
Kab. Pesawaran	48	303	352	52	286
Kab. Pringsewu	52	392	444	42	232
Kab. Mesuji	37	137	175	28	79
Kab. Tulang Bawang Barat	33	178	212	14	228
Kab. Pesisir Barat	33	220	254	29	162
Kota Bandar Lampung	38	618	670	85	663
Kota Metro	23	213	238	22	76

4.3.8 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	L Negeri	L Swasta	P Negeri	P Swasta
Kab. Lampung Selatan	201	140	381	198
Kab. Lampung Tengah	367	158	556	173
Kab. Lampung Utara	250	63	490	104
Kab. Lampung Barat	136	10	283	16
Kab. Tulang Bawang	142	19	230	21
Kab. Tanggamus	193	39	291	59
Kab. Lampung Timur	311	140	422	168
Kab. Way Kanan	187	26	360	39
Kab. Pesawaran	116	19	247	23
Kab. Pringsewu	200	67	275	87
Kab. Mesuji	71	14	104	13
Kab. Tulang Bawang Barat	2	10	200	7
Kab. Pesisir Barat	105	3	144	13
Kota Bandar Lampung	264	266	650	478
Kota Metro	103	66	172	106

4.3.9 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah tertinggi Tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki <S1	Laki-Laki ≥ S1	Perempuan <S1	Perempuan ≥ S1
Kab. Lampung Selatan	71	426	507	59
Kab. Lampung Tengah	160	957	1122	125
Kab. Lampung Utara	52	393	445	61
Kab. Lampung Barat	25	293	318	18
Kab. Tulang Bawang	51	255	307	46
Kab. Tanggamus	66	365	434	52
Kab. Lampung Timur	94	778	875	67
Kab. Waykanan	37	409	446	29
Kab. Pesawaran	48	303	352	52
Kab. Pringsewu	52	392	444	42
Kab. Mesuji	37	137	175	28
Kab. Tulang Bawang Barat	33	178	212	14
Kab. Pesisir Barat	33	220	254	29
Kota Bandar Lampung	38	618	670	85
Kota Metro	23	213	238	22

4.3.10 Jumlah Tenaga Kependidikan SMA Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	L Negeri	L Swasta	P Negeri	P Swasta
Kab. Lampung Selatan	57	22	71	36
Kab. Lampung Tengah	103	15	94	29
Kab. Lampung Utara	69	15	72	16
Kab. Lampung Barat	57	4	51	6
Kab. Tulang Bawang	25	3	35	0
Kab. Tanggamus	42	8	44	9
Kab. Lampung Timur	84	21	75	22
Kab. Way Kanan	41	0	48	5
Kab. Pesawaran	33	2	38	1
Kab. Pringsewu	44	10	32	9
Kab. Mesuji	7	0	19	1
Kab. Tulang Bawang Barat	27	1	25	2
Kab. Pesisir Barat	29	1	19	0
Kota Bandar Lampung	109	43	114	44
Kota Metro	23	14	33	11

4.3.11 Jumlah tenaga kependidikan di SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Laki-Laki <Sm	Laki-Laki ≥Sm	Perempuan <Sm	Perempuan ≥Sm
Kab. Lampung Selatan	48	31	50	57
Kab. Lampung Tengah	82	36	69	54
Kab. Lampung Utara	62	22	36	52
Kab. Lampung Barat	37	24	28	29
Kab. Tulang Bawang	19	9	25	10
Kab. Tanggamus	31	19	26	27
Kab. Lampung Timur	64	41	37	60
Kab. Way Kanan	21	20	21	32
Kab. Pesawaran	26	9	17	22
Kab. Pringsewu	27	27	15	26
Kab. Mesuji	4	3	9	11
Kab. Tulang Bawang Barat	23	5	15	12
Kab. Pesisir Barat	21	9	10	9
Kota Bandar Lampung	81	71	56	102
Kota Metro	23	14	17	27

4.3.12 Data SMK Kepala Sekolah dan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah

Kabupaten/Kota	L Negeri	L Swasta	P Negeri	P Swasta
Kab. Lampung Selatan	197	233	235	253
Kab. Lampung Tengah	215	376	191	331
Kab. Lampung Utara	130	100	201	135
Kab. Lampung Barat	91	14	147	14
Kab. Tulang Bawang	99	87	99	103
Kab. Tanggamus	70	117	89	109
Kab. Lampung Timur	127	493	138	408
Kab. Way Kanan	106	53	111	47
Kab. Pesawaran	88	68	111	96
Kab. Pringsewu	105	320	70	326
Kab. Mesuji	66	29	73	40
Kab. Tulang Bawang Barat	65	66	39	51
Kab. Pesisir Barat	54	0	71	0
Kota Bandar Lampung	243	236	485	408
Kota Metro	130	146	162	145

4.3.13 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tahun 2018 dan 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	L <S1	L ≥ S1	P <S1	P ≥ S1
Kab. Lampung Selatan	56	374	430	28
Kab. Lampung Tengah	70	517	591	25
Kab. Lampung Utara	28	200	230	13
Kab. Lampung Barat	9	95	105	6
Kab. Tulang Bawang	29	155	186	24
Kab. Tanggamus	35	151	187	7
Kab. Lampung Timur	65	532	620	29
Kab. Way Kanan	18	141	159	6
Kab. Pesawaran	23	122	156	6
Kab. Pringsewu	70	352	425	22
Kab. Mesuji	6	88	95	6
Kab. Tulang Bawang Barat	14	110	131	4
Kab. Pesisir Barat	7	47	54	8
Kota Bandar Lampung	38	441	479	22
Kota Metro	15	261	276	7

4.3.14 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Negeri	Laki-Laki Swasta	Perempuan Negeri	Perempuan Swasta
Kab. Lampung Selatan	112	15	118	29
Kab. Lampung Tengah	146	39	117	49
Kab. Lampung Utara	83	16	136	13
Kab. Lampung Barat	76	4	86	3
Kab. Tulang Bawang	40	7	30	8
Kab. Tanggamus	60	19	58	19
Kab. Lampung Timur	112	30	87	25
Kab. Waykanan	91	4	82	6
Kab. Pesawaran	50	5	60	8
Kab. Pringsewu	76	18	37	13
Kab. Mesuji	24	1	33	4
Kab. Tulang Bawang Barat	24	2	37	7
Kab. Pesisir Barat	47	1	73	0
Kota Bandar Lampung	107	40	143	59
Kota Metro	32	9	27	14

4.3.15 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Laki-Laki <Sm	Laki-Laki ≥ Sm	Perempuan <Sm	Perempuan ≥ Sm
Lampung Selatan	96	31	79	68
Lampung Tengah	141	44	88	78
Lampung Utara	61	38	69	80
Lampung Barat	53	27	54	35
Tulang Bawang	37	10	17	21
Tanggamus	44	35	27	50
Lampung Timur	89	53	68	44
Waykanan	65	30	47	41
Pesawaran	40	15	35	33
Pringsewu	58	36	22	28
Mesuji	20	5	18	19
Tulang Bawang Barat	15	11	23	21
Pesisir Barat	36	12	37	36
Bandar Lampung	87	60	73	129
Metro	31	10	21	20

5.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	92.53	65.51	158.04
2	Tanggamus	91.39	58.33	149.72
3	Lampung Selatan	85.49	46.08	131.57
4	Lampung Timur	88.00	47.29	135.29
5	Lampung Tengah	89.87	57.05	146.92
6	Lampung Utara	85.83	54.07	139.90
7	Way Kanan	88.75	48.32	137.07
8	Tulang Bawang	88.64	48.86	137.50
9	Pesawaran	86.45	50.28	136.73
10	Pringsewu	84.85	39.87	124.72
11	Mesuji	87.24	51.11	138.35
12	Tulang Bawang Barat	88.41	42.92	131.33
13	Pesisir Barat	89.23	42.92	132.15
14	Bandarlampung	80.06	51.74	131.80
15	Metro	79.33	52.56	131.89

5.1.2 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan) Tahun 2018

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	107.01	62.96	169.97
2	Tanggamus	200.36	115.73	316.09
3	Lampung Selatan	297.10	156.16	453.26
4	Lampung Timur	331.59	166.88	498.47
5	Lampung Tengah	418.14	253.17	671.31
6	Lampung Utara	181.47	104.04	285.51
7	Way Kanan	141.11	79.42	220.53
8	Tulang Bawang	139.39	70.65	210.04
9	Pesawaran	135.07	71.25	206.32
10	Pringsewu	120.66	68.42	189.08
11	Mesuji	63.56	25.76	89.32
12	Tulang Bawang Barat	88.10	46.98	135.08
13	Pesisir Barat	49.52	20.87	70.39
14	Bandarlampung	285.10	183.02	468.12
15	Metro	45.81	31.07	76.88

5.2 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	90.85	62.68	153.53
2	Tanggamus	89.41	56.79	146.20
3	Lampung Selatan	80.93	44.77	125.70
4	Lampung Timur	85.31	44.77	130.08
5	Lampung Tengah	88.18	55.03	143.21
6	Lampung Utara	81.90	48.03	129.93
7	Way Kanan	85.06	51.39	136.45
8	Tulang Bawang	85.23	46.91	132.14
9	Pesawaran	82.66	46.91	129.57
10	Pringsewu	81.31	46.36	127.67
11	Mesuji	84.36	48.24	132.60
12	Tulang Bawang Barat	88.57	37.87	126.44
13	Pesisir Barat	87.76	48.81	136.57
14	Bandarlampung	74.34	41.85	116.19
15	Metro	74.57	47.88	122.45

5.3 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Daerah asal, Jenis Kelamin dan Sektor Tahun 2018

No.	Daerah Asal	Laki -Laki		Perempuan		Jumlah	
		Laki - Laki Informal	Laki-Laki Formal	Perempuan Informal	Perempuan Formal	Informal	Formal
1	Bandar Lampung	0	94	367	33	367	127
2	Lampung Barat	0	11	32	3	32	14
3	Lampung Selatan	2	441	812	158	814	599
4	Lampung Tengah	3	621	1.668	166	1.671	787
5	Lampung Timur	6	1.645	3.365	501	3.371	2.146
6	Lampung Utara	3	151	364	38	367	189
7	Mesuji	0	113	202	21	202	134
8	Metro	0	43	165	26	165	69
9	Pesawaran	3	211	586	32	589	243
10	Pringsewu	0	200	310	80	310	280
11	Tanggamus	1	310	441	115	442	425
12	Tulang Bawang	1	121	418	24	419	145
13	Tulang Bawang Barat	0	136	654	41	654	177
14	Way Kanan	0	50	128	15	128	65
15	Pesisir Barat	0	13	5	2	5	15

5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1 Lampung Barat	1.81	4.33	6.14
2 Tanggamus	2.17	2.33	4.50
3 Lampung Selatan	5.33	2.85	8.18
4 Lampung Timur	3.05	5.33	8.38
5 Lampung Tengah	1.89	3.53	5.42
6 Lampung Utara	4.58	5.37	9.95
7 Way Kanan	4.16	4.96	9.12
8 Tulang Bawang	3.84	2.90	6.74
9 Pesawaran	4.38	5.13	9.51
10 Pringsewu	4.18	4.05	8.23
11 Mesuji	3.30	5.02	8.32
12 Tulang Bawang Barat	2.08	4.49	6.57
13 Pesisir Barat	1.65	2.48	4.13

14	Bandarlampung	7.47	7.47	14.94
15	Metro	6.00	5.47	11.47

5.5 Jumlah Pekerja Profesional dan Managerial Provinsi Lampung Tahun 2018

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	107007.00	62957.00	169964.00
2	Tanggamus	200384.00	115733.00	316117.00
3	Lampung Selatan	297101.00	158158.00	455259.00
4	Lampung Timur	331585.00	166881.00	498466.00
5	Lampung Tengah	418135.00	253173.00	671308.00
6	Lampung Utara	181471.00	104041.00	285512.00
7	Way Kanan	141107.00	79417.00	220524.00
8	Tulang Bawang	139388.00	70649.00	210037.00
9	Pesawaran	135074.00	71252.00	206326.00
10	Pringsewu	120663.00	68418.00	189081.00
11	Mesuji	63580.00	25756.00	89336.00
12	Tulang Bawang Barat	88101.00	46983.00	135084.00
13	Pesisir Barat	49524.00	20874.00	70398.00
14	Bandarlampung	285102.00	183019.00	468121.00
15	Metro	45811.00	31073.00	76884.00

5.6 Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018

	Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan
1	Lampung Barat	12.00
2	Tanggamus	145.00
3	Lampung Selatan	171.00
4	Lampung Timur	238.00
5	Lampung Tengah	165.00
6	Lampung Utara	89.00
7	Way Kanan	51.00
8	Tulang Bawang	214.00
9	Pesawaran	149.00
10	Pringsewu	0.00
11	Mesuji	22.00
12	Tulang Bawang Barat	107.00
13	Pesisir Barat	3.00
14	Bandarlampung	52.00

15	Metro	6.00
----	-------	------

5.7 Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	16846.00	39661.00	56507.00
2	Tanggamus	35133.00	56258.00	91391.00
3	Lampung Selatan	23894.00	48749.00	72643.00
4	Lampung Timur	30615.00	61626.00	92241.00
5	Lampung Tengah	54048.00	88094.00	142142.00
6	Lampung Utara	10935.00	26466.00	37401.00
7	Way Kanan	7468.00	34816.00	42284.00
8	Tulang Bawang	12591.00	275586.00	288177.00
9	Pesawaran	8742.00	22300.00	31042.00
10	Pringsewu	7816.00	13585.00	21401.00
11	Mesuji	4723.00	8784.00	13507.00
12	Tulang Bawang Barat	8358.00	17761.00	26119.00
13	Pesisir Barat	4535.00	8264.00	12799.00
14	Bandarlampung	7904.00	15446.00	23350.00
15	Metro	1709.00	5205.00	6914.00

6.1.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Disparitas
Partai Demokrat	10	1	11	0.10
Partai Golongan Karya	9	1	10	0.11
Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2	0.00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	3	17	0.21
Partai Gerakan Indonesia Raya	9	1	10	0.11
Partai Amanat Nasional	7	1	8	0.14
Partai Nasdem	5	3	8	0.60
Partai Kebangkitan Bangsa	6	1	7	0.17
Partai Keadilan Sejahtera	8	0	8	0.00
Partai Persatuan Pembangunan	3	1	4	0.33

6.1.2 Indeks Disparitas Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dprd Provinsi Lampung Tahun 2018

Partai Politik	Disparitas
Partai Demokrat	0.1
Partai Golongan Karya	0.1
Partai Hati Nurani Rakyat	0.0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0.2
Partai Gerakan Indonesia Raya	0.1
Partai Amanat Nasional	0.1
Partai Nasdem	0.6
Partai Kebangkitan Bangsa	0.2
Partai Keadilan Sejahtera	0.0
Partai Persatuan Pembangunan	0.3

6.2.1 Jumlah Anggota Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female
Lampung Barat	1923	1950
Tanggamus	2892	2800
Lampung Selatan	3327	4597
Lampung Timur	3886	4522
Lampung Tengah	6872	6500
Lampung Utara	4471	4483
Way Kanan	2681	2675
Tulangbawang	1908	2318
Pesawaran	2441	2350
Pringsewu	2075	2588
Mesuji	1184	1100
Tulang Bawang Barat	1341	1560
Pesisir Barat	1055	1000
Kota Bandar Lampung	4779	4775
Kota Metro	1546	2148
Provinsi Lampung	8431	8149

6.2.2 Indeks disparitas pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Disparitas
Lampung Barat	101.4
Tanggamus	96.8
Lampung Selatan	138.2
Lampung Timur	116.4
Lampung Tengah	94.6
Lampung Utara	100.3
Way Kanan	99.8
Tulangbawang	121.5
Pesawaran	96.3
Pringsewu	124.7
Mesuji	92.9
Tulang Bawang Barat	116.3
Pesisir Barat	94.8
Kota Bandar Lampung	99.9
Kota Metro	138.9
Provinsi Lampung	96.7

6.2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Dinas/Instansi pemerintah dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-Laki	Perempuan
Sekretaris Daerah Provinsi	0	0
Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0	0
Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Pembangunan	1	0
Asisten Bidang Administrasi Umum	1	0
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	32	15
Biro Hukum	26	19
Biro Kesejahteraan Sosial	18	28
Biro Perekonomian	19	19
Biro Administrasi Pembangunan	23	14
Biro Umum	86	50
Biro Perlengkapan	35	22
Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	46	42
Biro Organisasi	32	30
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	1	0
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan	0	1
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	1	0
Sekretariat Dprd	80	61

Inspektorat Provinsi	85	58
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3856	4874
Dinas Kesehatan	139	241
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	261	104
Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air	361	94
Satuan Polisi Pamong Praja	159	28
Dinas Sosial	100	87
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	181	77
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perundungan Anak	27	40
Dinas Ketahanan Pangan	40	38
Dinas Lingkungan Hidup	48	33
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	27	33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	36	42
Dinas Perhubungan	100	37
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistika	59	52
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	52	48
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60	48
Dinas Pemuda Dan Olahraga	75	37
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	41	52
Dinas Kelautan Dan Perikanan	92	52
Dinas Pariwisata	38	41
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	229	166
Dinas Perkebunan Dan Peternakan	150	113
Dinas Kehutanan	521	105
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	82	40
Dinas Perdagangan	52	39
Dinas Perindustrian	45	31
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	31	13
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	66	47
Badan Keuangan Daerah	47	74
Badan Pendapatan Daerah	208	128
Badan Kepegawaian Daerah	48	45
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	45	41
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	32	38
Badan Penghubung Provinsi Lampung Di Jakarta	42	15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38	13
Badan Penyelenggara Korpri	30	17
Badan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	11	7
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	51	18
Rumah Sakit Umum Daerah	375	669
Rumah Sakit Jiwa	80	109
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu)	6	1
Sekretariat Badan Narkotika Nasional	4	3

6.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung Tahun 2018

Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan
Sampai Dengan SD	247	144
SLTP/Sederajat	220	50
SMA/Sederajat	2031	1019
Diploma I,II/Akta I,II	77	37
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	389	589
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	5467	6310

6.2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung Tahun 2018

GOLONGAN KEPANGKATAN	Laki-Laki	Perempuan
I/A (JURU MUDA)	8	1
I/B (JURU MUDA TINGKAT I)	11	5
I/C (JURU)	69	15
I/D (JURU TINGKAT I)	23	5
II/A (PENGATUR MUDA)	231	63
II/B (PENGATUR MUDA TINGKAT I)	248	87
II/C (PENGATUR)	853	358
II/D (PENGATUR TINGKAT I)	225	176
III/A (PENATA MUDA)	659	717
III/B (PENATA MUDA TINGKAT I)	1190	1321
III/C (PENATA)	1213	1754
III/D (PENATA TINGKAT I)	1326	1486
IV/A (PEMBINA MUDA)	1284	1131
IV/B (PEMBINA MUDA TINGKAT I)	956	981
IV/C (PEMBINA)	95	32
IV/D (PEMBINA TINGKAT I)	30	14
IV/E (PEMBINA UTAMA)	10	3

7.1.1 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Dan Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	1.99	0.75
Tanggamus	1.81	0.88
Lampung Selatan	2.03	0.52
Lampung Timur	2.92	0.64
Lampung Tengah	2.34	0.76
Lampung Utara	1.64	0.52
Way Kanan	2.8	1.14
Tulang Bawang	2.12	0.29
Pesawaran	1.76	1
Pringsewu	0.9	0.4
Mesuji	2.45	1.01
Tulang Bawang Barat	2.64	0.88
Pesisir Barat	1.63	1.18
Bandarlampung	1.67	1.63
Metro	1.9	1.14

7.1.2 Indeks Disparitas Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas
Lampung Barat	0.376884422
Tanggamus	0.486187845
Lampung Selatan	0.256157635
Lampung Timur	0.219178082
Lampung Tengah	0.324786325
Lampung Utara	0.317073171
Way Kanan	0.407142857
Tulang Bawang	0.136792453
Pesawaran	0.574712644
Pringsewu	0.444444444
Mesuji	0.412244898
Tulang Bawang Barat	0.333333333
Pesisir Barat	0.72392638
Bandar Lampung	0.976047904
Metro	0.6

7.1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Lampung Barat	6
Tanggamus	3
Lampung Selatan	16
Lampung Timur	1
Lampung Tengah	1
Lampung Utara	6
Way Kanan	18
Tulang Bawang	9
Pesawaran	6
Pringsewu	11
Mesuji	0
Tulang Bawang Barat	16
Pesisir Barat	3
Bandarlampung	23
Metro	8

7.1.4 Jenis Kekerasan Yang Dialami Korban 2018

Jenis Kekerasan	Total Korban
Fisik	44
Psikis	33
Seksual	78
Eksploitasi	3
Traficcking	2
Penelantaran	5
Lainnya	13

7.1.5 Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Lampung 2018

Laki-Laki	Perempuan
46	99

7.1.6 Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018

Usia Korban	Total
0-5 Th	11
6 - 12 Th	40
13-17 Th	63
18-24 Th	7
25-44 Th	18
45-59 Th	5
60+	1

7.1.7 Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan Korban	Total
N/A	12
TIDAK SEKOLAH	15
SD	36
SLTP	44
SLTA	25
PERGURUAN TINGGI	8
TK	1
PAUD	5

7.1.8 Korban Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Menurut Tempat Kejadian Tahun 2018

Korban Menurut Tempat Kejadian	Total
Rumah Tangga	63
Tempat Kerja	4
Lainnya	30
Sekolah	5
Fasilitas Umum	27
Lembaga Pendidikan Kilat	0

7.1.9 Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Total
Lampung Barat	0
Tanggamus	14
Lampung Selatan	32

Lampung Timur	0
Lampung Tengah	9
Lampung Utara	75
Way Kanan	0
Tulang Bawang	79
Pesawaran	5
Pringsewu	0
Mesuji	0
Tulang Bawang Barat	0
Pesisir Barat	17
Bandarlampung	5
Metro	17

7.1.10 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2018

Laki-Laki	Perempuan
126	6

7.1.11 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan di Provinsi Lampung Tahun 2018

Jenis Hubungan	Total
NA	8
Orang Tua	21
Suami/Istri	15
Keluarga/Saudara	12
Lainnya	18
Tetangga	52
Pacar/Teman	27
Guru	3
Majikan	0
Rekan Kerja	0

7.1.12 Jenis Layanan Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2018

Jenis Layanan Yang Diberikan	Total Korban
Pengaduan	20
Kesehatan	38
Bantuan Hukum	20
Pengegakan Hukum	5
Rehabilitasi Sosial	8
Reintegrasi Sosial	4
Pemulangan	1
Pendampingan Tokoh Agama	2

